



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Kota Bima menyusun Laporan Keuangan Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2024.

Sehubungan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Bima dalam Penyusunan dan Pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Bahwa pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berasaskan prestasi kerja. Karena hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk menciptakan suatu produk/hasil dengan mengutamakan *output*.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, Permendagri nomor 77 tahun 2020 dan Permendagri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Pemerintah Daerah, maka Kepala Daerah harus menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian proses kegiatan yang dimulai dengan perencanaan/penyusunan APBD, Pelaksanaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah yang dijabarkan dalam peraturan Kepala Daerah untuk menjadi landasan bagi para Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Wali Kota selaku Kepala Daerah yang



memiliki kuasa pengelolaan keuangan daerah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Kementerian Keuangan. Laporan keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap perundang-undangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2024 disusun dengan maksud untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010, PP Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

Pemerintah Kota Bima selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.



Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Adapun secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan menyediakan informasi mengenai:

- a. posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas Pemerintah Kota Bima;
- b. perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas;
- c. sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. cara Pemerintah Kota Bima mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- g. informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan dan arus kas sebagai suatu entitas pelaporan.

Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) - PP 71 Tahun 2010 terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; (e) Laporan Arus Kas; (f) Neraca; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan.

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut.

- 1) Pendapatan-LRA;
- 2) Belanja;
- 3) Transfer;
- 4) Surplus/defisit-LRA;



- 5) Pembiayaan; dan
- 6) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya dari pos-pos berikut.

- 1) Saldo Anggaran Lebih awal;
- 2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- 3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- 4) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
- 5) Lain-lain; dan
- 6) Saldo Anggaran Lebih akhir.

c. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah kota untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari:

- 1) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
- 2) Beban dari kegiatan operasional;
- 3) Surplus/defisit dari kegiatan non operasional;
- 4) Pos luar biasa; dan
- 5) Surplus/defisit-LO.

d. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan keuangan pokok yang sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos:

- 1) Ekuitas awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti:
 - a) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya; dan
 - b) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- 4) Ekuitas akhir.



e. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Unsur Neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas yang sekurang-kurangnya mencantumkan pos-pos sebagai berikut.

- 5) Kas dan Setara Kas;
- 6) Investasi Jangka Pendek;
- 7) Piutang;
- 8) Persediaan;
- 9) Investasi Jangka Panjang;
- 10) Aset Tetap;
- 11) Aset Lain-lain;
- 12) Kewajiban Jangka Pendek;
- 13) Kewajiban Jangka Panjang; dan
- 14) Ekuitas

Pos-pos selain yang disebutkan di atas disajikan dalam Neraca jika Standar Akuntansi Pemerintahan mensyaratkan, atau jika penyajian demikian perlu untuk menjelaskan secara wajar posisi keuangan suatu entitas pelaporan.

f. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris.

g. Catatan atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- 2) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan; dan
- 3) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas



Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penyusunan laporan keuangan Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6523);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2022 Nomor 243);
20. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2023 Nomor 253);
21. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2024 Nomor 256);
22. Peraturan Wali Kota Bima Nomor 33 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Dana Bergilir (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2014 Nomor 193);



23. Peraturan Wali Kota Bima Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2022 Nomor 739);
24. Peraturan Walikota Bima Nomor 9 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2023 Nomor 809);
25. Peraturan Wali Kota Bima Nomor 69 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bima Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 737);
26. Peraturan Wali Kota Bima Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2023 Nomor 870); dan
27. Peraturan Walikota Bima Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2024 Nomor 903).

1.3 Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah daerah

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan
- 4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan



- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1 Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran
- 5.1.1 Pendapatan-LRA
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.1.3 Pembiayaan
- 5.2 Penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)
- 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal
 - 5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan
 - 5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
 - 5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
 - 5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir
- 5.3 Penjelasan Komponen-Komponen Neraca
- 5.3.1 Aset
 - 5.3.2 Kewajiban
 - 5.3.3 Ekuitas
- 5.4 Penjelasan Laporan Operasional
- 5.4.1 Pendapatan-LO
 - 5.4.2 Beban
 - 5.4.3 Kegiatan Non Operasional
 - 5.4.4 Pos Luar Biasa
- 5.5 Penjelasan Komponen-Komponen Laporan Arus Kas
- 5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan
 - 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
 - 5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
- 5.6 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.6.1 Perubahan Ekuitas

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup

Lampiran-Lampiran



BAB II

**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN
DAN PENCAPAIAN TARGET APBD**

2.1 Ekonomi Makro

2.1.1 Indikator Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Beberapa indikator kemiskinan antara lain:

1. Penduduk Miskin

Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Jumlah Penduduk miskin suatu wilayah, diartikan banyaknya penduduk miskin yang terdapat di wilayah tersebut.

2. Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minuman dan makanan yang setara dengan 2.100 kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis kemiskinan (GK) = Garis Kemiskinan Makanan (GKM) + Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

3. Persentase Kemiskinan (Tingkat Kemiskinan)

Secara sederhana persentase kemiskinan yang juga disebut tingkat kemiskinan menggambarkan proporsi penduduk miskin di suatu wilayah. Perhitungan dilakukan dengan rumus tertentu yang menggambarkan persentase jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di suatu wilayah dibandingkan jumlah penduduk di wilayah tersebut.

Garis kemiskinan di Kota Bima mengalami peningkatan sebesar Rp38.882,00 dibandingkan dengan tahun lalu. Pada tahun ini garis kemiskinan Kota Bima sebesar Rp471.841,00. Persentase penduduk miskin di Kota Bima secara *trend* selalu menurun semenjak tahun 2019. Persentase penduduk miskin di Kota Bima pada Tahun 2023 sebesar 8,67% dengan jumlah penduduk miskin sebesar 16.530 jiwa.

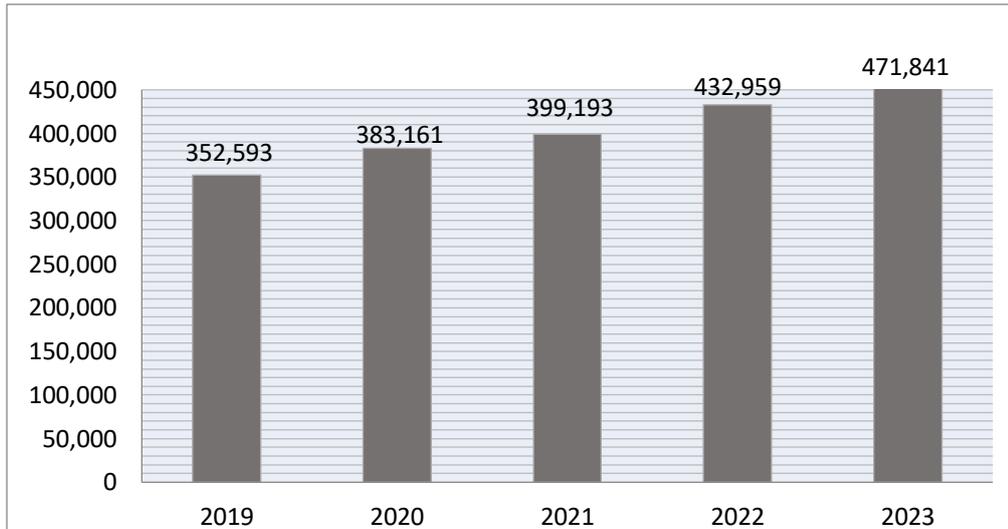
Jumlah Penduduk Miskin Kota Bima Tahun 2019 – 2023 (Poverty Line - Rupiah)

Jumlah Penduduk Miskin (Poverty Line - Rupiah)					
Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
Kota Bima	352.593,00	383.161,00	399193	432.959,00	471.841,00

Sumber Data: Kota Bima Dalam Angka, BPS 2024



Jumlah Penduduk Miskin Kota Bima Tahun 2019-2023

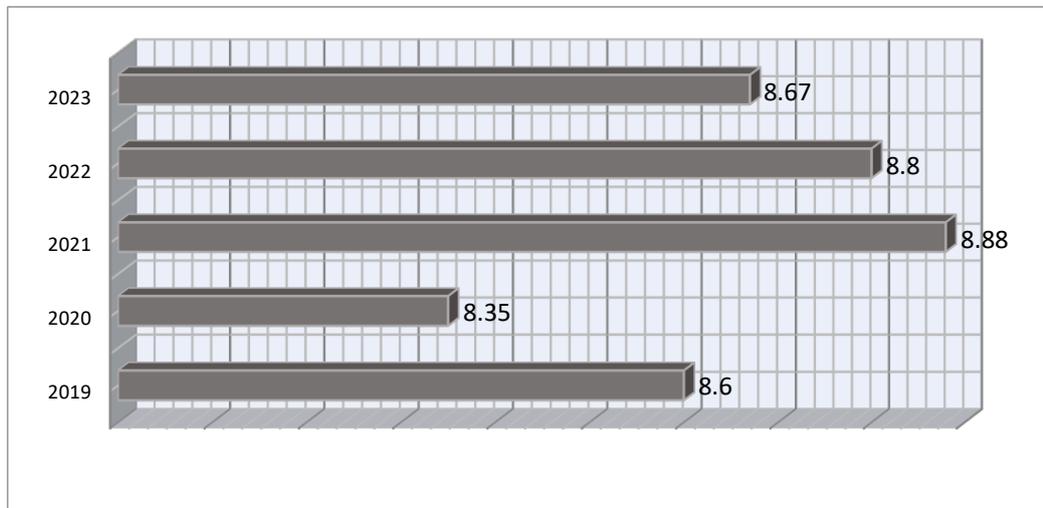


Sumber Data: Kota Bima Dalam Angka, BPS 2024

Persentase Penduduk Miskin Kota Bima Tahun 2019-2023 (Persentase)

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Poverty Line - Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
Kota Bima	8,60	8,35	8,88	8,80	8,67

Persentase Miskin Kota Bima Tahun 2016-2023



Sumber Data : Kota Bima Dalam Angka, BPS 2024

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Sasaran utama pembangunan di Bidang Ketenagakerjaan adalah terciptanya lapangan kerja baru dengan jumlah dan kualitas yang memadai sehingga dapat menyerap angkatan kerja yang memasuki pasar kerja. Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan jumlah penduduk yang masuk dalam pasar kerja (bekerja atau mencari kerja) yang biasanya disebut sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Keterlibatan penduduk usia 15 Tahun ke atas dalam Kegiatan Ekonomi di Kota Bima pada Tahun 2023 mencapai 78,09 persen atau mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar 69,80 persen. Proporsi angkatan kerja yang menganggur dikenal dengan nama Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

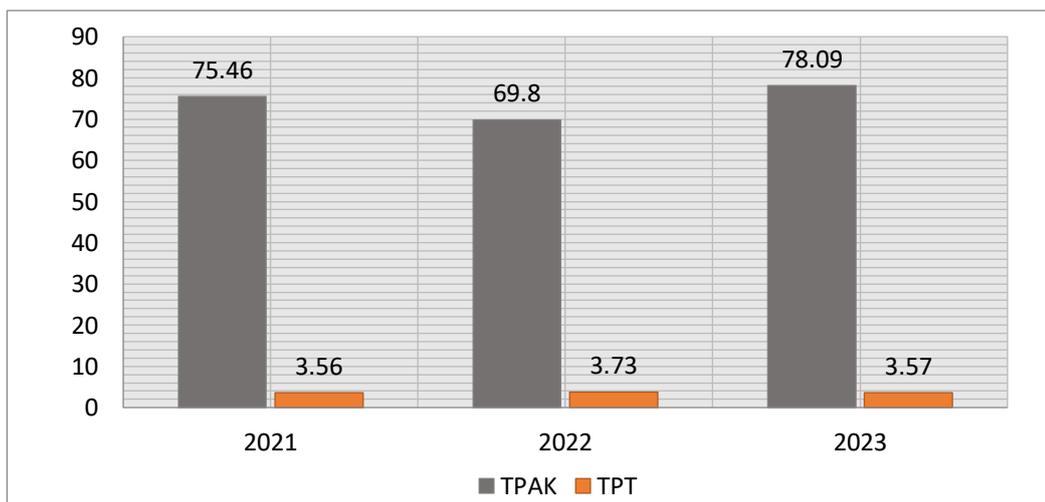
Indikator ini dapat menggambarkan secara umum mengenai Tingkat Pengangguran di suatu wilayah dari waktu ke waktu. TPT Kota Bima Tahun 2023 sebesar 3,57 persen atau mengalami Penurunan dibandingkan Tahun 2022 yaitu sebesar 3,73 persen.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Bima Tahun 2021-2023 (Persentase)

Tahun	Keterlibatan Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Dalam Kegiatan Ekonomi	
	TPAK	TPT
1	2	3
2021	75,46	3,56
2022	69,8	3,73
2023	78,09	3,57

Sumber Data : Statistik Daerah Kota Bima, BPS 2024

Keterlibatan Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Dalam Kegiatan Ekonomi Kota Bima Tahun 2021-2023



2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia memiliki peranan yang sangat penting di dalam mendukung Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan dan Penurunan Pengangguran. Pengukuran terhadap Indikator Pembangunan Manusia sangatlah kompleks. Walaupun demikian beberapa indikator dianggap dapat merefleksikan aspek-aspek pembangunan

manusia. Aspek-aspek yang relevan dengan pembangunan manusia dapat dilihat dengan menggunakan ukuran indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indeks komposit yang dipakai untuk mengukur tingkat pencapaian upaya pembangunan manusia dari tiga dimensi. Ketiga dimensi tersebut adalah umur panjang dan sehat yang dicerminkan oleh indeks harapan hidup, pengetahuan dan keterampilan yang dicerminkan oleh indeks pendidikan dan kehidupan yang layak yang dicerminkan oleh Indeks Pendapatan.

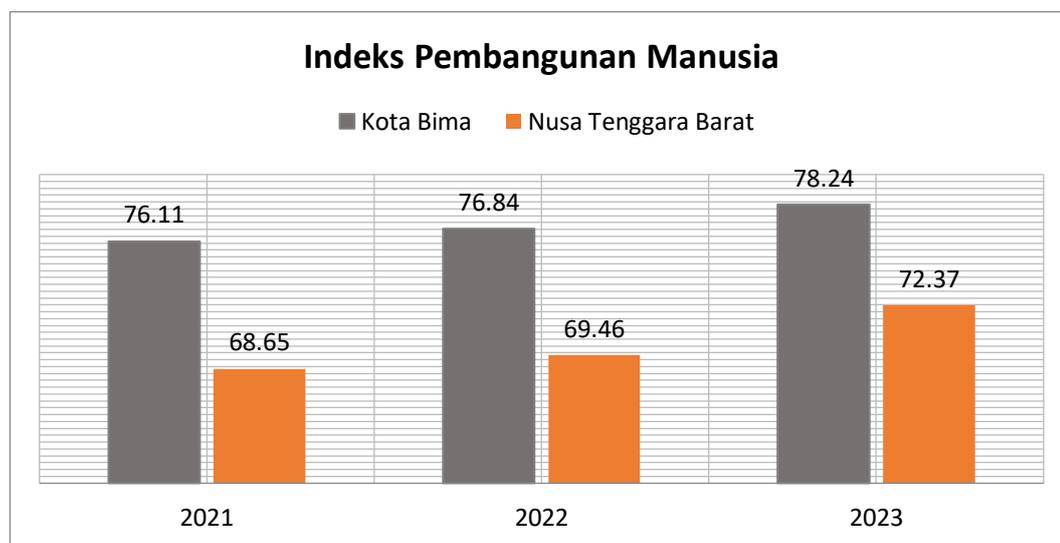
IPM merupakan ukuran ringkas rata-rata yang menempatkan Kota Bima pada posisi kedua tertinggi dari sepuluh kabupaten/kota yang ada di NTB. IPM Kota Bima pada Tahun 2023 adalah sebesar 78,24%. Angka ini cukup tinggi dibandingkan Nilai IPM NTB sendiri yang sebesar 72,37%.

Indeks Pembangunan Manusia Kota Bima Tahun 2021-2023

Kabupaten/Kota	[Metode Baru] IPM Kabupaten/Kota		
	2021	2022	2023
1	2	3	4
Kota Bima	76,11	76,84	78,24
Nusa Tenggara Barat	68,65	69,46	72,37

Sumber Data : BPS Nusa Tenggara Barat, 2024

Tingkat IPM Kota Bima Tahun 2021-2023



Sumber Data : BPS Nusa Tenggara Barat, 2024

2.1.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

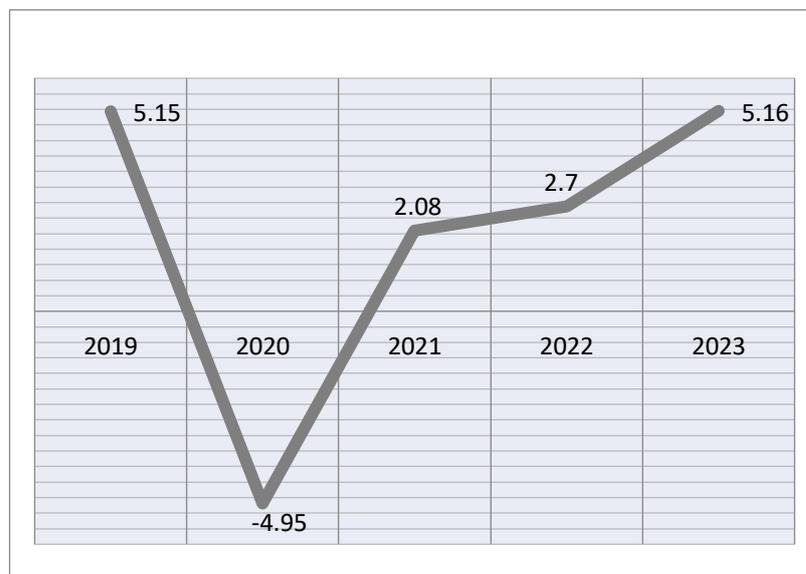
Di tahun 2023 besaran nilai PDRB Kota Bima atas dasar harga berlaku sebesar 4.986,32 miliar rupiah meningkat dari tahun sebelumnya. Seperti halnya PDRB harga berlaku, PDRB kota Bima atas dasar harga konstan juga meningkat dibandingkan tahun sebelumnya menjadi sebesar 4.574,61 miliar rupiah. Dapat dilihat Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,16% mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah mengimplementasikan Program Stimulus Ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Stimulus ini meliputi berbagai kebijakan fiskal, seperti pengurangan pajak bagi sektor tertentu, insentif investasi, dan pengeluaran pemerintah yang lebih besar untuk proyek-proyek infrastruktur. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah bersama seluruh *stakeholders*, termasuk semua masyarakat Indonesia, telah berhasil mendongkrak pertumbuhan perekonomian.

LPE Kota Bima Tahun 2019-2023

Tahun	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) %				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Bima	5,15	(4,95)	2,08	2,7	5,16

Sumber Data : Kota Bima Dalam Angka, BPS 2024

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bima



Sumber Data : Kota Bima Dalam Angka, BPS 2024

2.1.5 Inflasi

Inflasi sebagai salah satu Indikator untuk melihat stabilitas ekonomi suatu wilayah atau daerah yang menunjukkan perkembangan harga barang dan jasa secara umum yang dihitung dari Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK merupakan angka perbandingan harga yang terjadi pada suatu saat dari satu kelompok barang/jasa pada suatu periode waktu dengan periode tertentu (tahun dasar). Dengan demikian angka inflasi sangat mempengaruhi daya beli masyarakat yang berpenghasilan tetap dan di sisi lain juga mempengaruhi besarnya produksi barang.



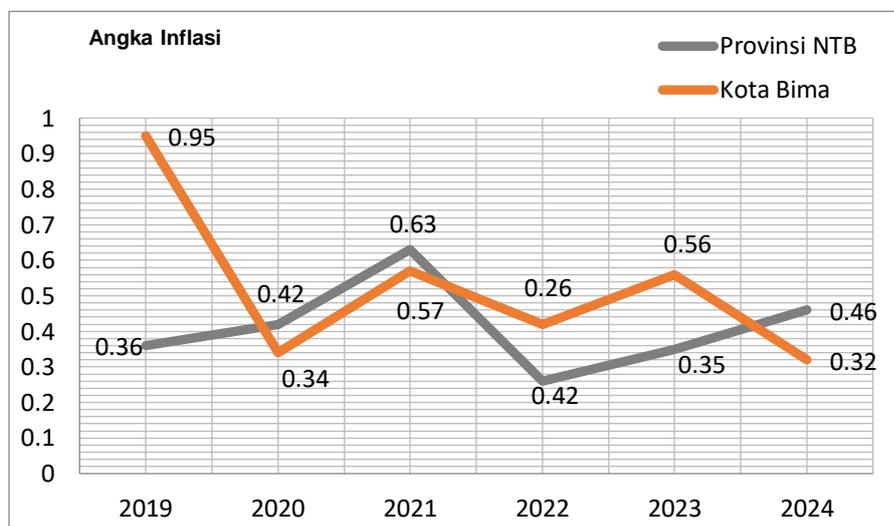
Pada bulan Desember 2024, Kota Bima mengalami inflasi sebesar 0,32 persen atau terjadi peningkatan IHK dari 115,94 persen pada bulan November 2023 menjadi 116,59 persen pada Bulan Desember 2023. Laju inflasi tahun kalender (Desember 2024 terhadap Januari 2025) sebesar 2,33 persen dan laju inflasi ‘Tahun ke Tahun’ (Desember 2025 terhadap Desember 2024) sebesar 2,33 persen.

Angka Inflasi Kota Bima Tahun 2019-2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi NTB	0,36	0,42	0,63	0,26	0,35	0,46
Kota Bima	0,95	0,34	0,57	0,42	0,56	0,32

Sumber Data : BPS Nusa Tenggara Barat, 2023

Tingkat Inflasi Kota Bima dan Provinsi NTB Tahun 2019-2024



Sumber Data : BPS Nusa Tenggara Barat, 2024

2.1.6 Pertumbuhan PDRB

Indikator kemajuan perekonomian suatu daerah dicerminkan oleh Laju Pertumbuhan Ekonomi yang dicapai dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses saat pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan selanjutnya membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah dengan sektor swasta dalam rangka menciptakan lapangan kerja baru serta merangsang perkembangan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut.

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemerataan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.



Trend pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun dapat dilihat salah satunya berdasarkan pertumbuhan PDRB. PDRB adalah salah satu bagian dari sistem neraca ekonomi regional yang didalamnya merekam hasil-hasil dari kegiatan ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu (satu tahun).

PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil).

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode perhitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Harga berlaku adalah penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa Yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga Tahun sedang berjalan. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Nilai PDRB Kota Bima atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 mencapai 45,31 Triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami peningkatan sebesar 327 Milyar rupiah dibandingkan dengan Tahun 2023 yang telah mencapai 49,81 Triliun rupiah.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami peningkatan dari 3,01 triliun rupiah pada tahun 2022 menjadi 3,17 triliun rupiah pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan selama tahun 2023 Kota Bima mengalami kontraksi peningkatan ekonomi sekitar 10,47 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dimana pertumbuhan ekonomi tahun 2023 berada pada angka minus 5,16 persen. PDRB (Lapangan usaha) dapat dilihat pada tabel berikut.

Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bima Atas Dasar Harga Konstan 2010, Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2019-2023

Kategori	2019	2020	2021	2022	2023
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,20	(0,52)	0,01	1,40	2,45
B Pertambangan dan Penggalian	4,72	(7,19)	1,32	(5,73)	4,83
C Industri Pengolahan	4,23	(0,69)	0,59	1,90	2,74
D Pengadaan Listrik dan Gas	7,46	8,23	7,78	9,53	2,11
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,43	(2,23)	0,06	1,03	(1,97)
F Konstruksi	4,84	(12,70)	6,48	(7,72)	5,46
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,06	(6,00)	2,22	3,96	7,76
H Transportasi dan Pergudangan	5,96	(20,24)	1,38	9,63	5,24



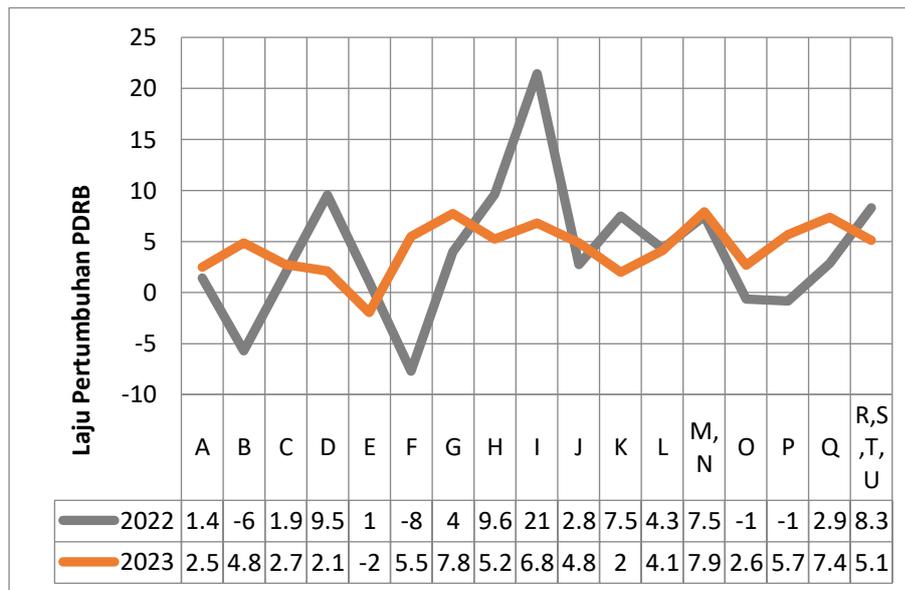
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Lampiran 2

Kategori	2019	2020	2021	2022	2023
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,61	(5,24)	1,38	21,44	6,80
J Informasi dan Komunikasi	4,93	13,48	5,16	2,76	4,83
K Jasa Keuangan dan Asuransi	1,88	1,95	0,02	7,49	2,01
L Real Estate	5,69	1,29	1,15	4,27	4,09
M,N Jasa Perusahaan	4,18	(1,94)	0,12	7,46	7,91
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,27	(0,38)	1,62	(0,68)	2,64
P Jasa Pendidikan	7,56	1,35	1,41	(0,81)	5,65
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,25	0,83	5,71	2,85	7,39
R,S,T,U Jasa lainnya	6,35	(5,97)	1,67	8,32	5,08
PDRB	5,15	(4,95)	2,08	2,70	5,16

Sumber Data : BPS Nusa Tenggara Barat, 2024

Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bima Tahun 2022-2023



Sumber Data : BPS Nusa Tenggara Barat, 2024

Pendapatan regional merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari besaran PDRB, perkembangan PDRB Kota Bima, struktur perekonomian, pendapatan perkapita maupun pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun regional mengalami perubahan akibat berbagai perubahan skala ekonomi, teknologi, dan SDM dalam memproduksi barang dan jasa.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Bima pada tahun 2023 mengalami peningkatan. Peningkatannya tersebut dipengaruhi oleh naiknya produksi di sebagian lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kota Bima



tahun 2023 atas dasar harga konstan 2010 mencapai 3,17 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 3,01 triliun rupiah pada tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2023 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,16 persen, jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang hanya mencapai 2,70 persen.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa perusahaan yaitu sebesar 7,9 persen yang selama dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini selalu menunjukkan pertumbuhan tinggi diatas 7 persen. Salah satu sebab utamanya adalah makin meningkatnya kebutuhan akan makan dan minum oleh pelaku usaha maupun masyarakat di Kota Bima. 8 (delapan) lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif di atas 5 persen. Sedangkan 8 (delapan) lapangan usaha lainnya tercatat mengalami pertumbuhan positif namun lebih rendah.

Delapan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif diatas lima persen tersebut antara lain lapangan usaha jasa perusahaan sebesar 7,90 persen, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 7,76 persen, lapangan usaha kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 7,39 persen, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 6,80 persen, lapangan usaha jasa pendidikan sebesar 5,65 persen, lapangan usaha jasa konstruksi sebesar 5,46 persen, lapangan usaha transportasi pergudangan sebesar 5,24 persen, dan lapangan usaha jasa lainnya sebesar 5,08 persen.

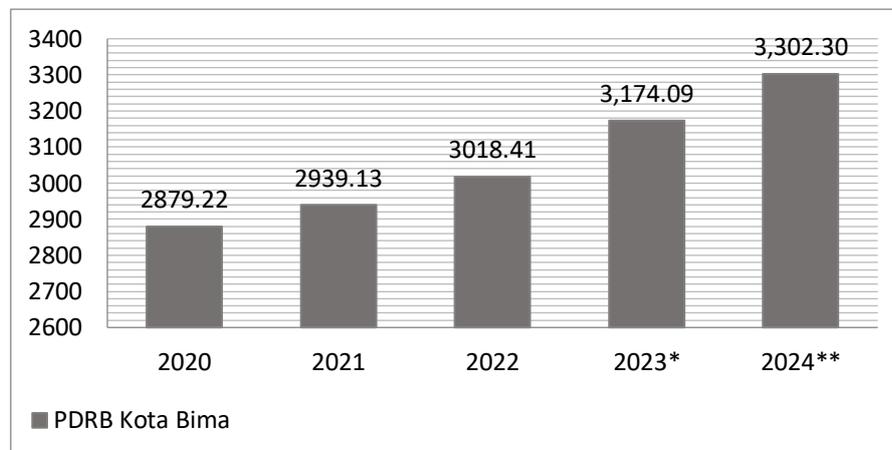
Sedangkan 8 (delapan) lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif diatas dua persen namun kurang dari lima persen yaitu lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi sebesar 2,01 persen, lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 2,11 persen, lapangan usaha industri pengolahan sebesar 2,74 persen, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 2,45 persen, lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 2,64 persen, lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 4,83 persen, dan lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 4,83 persen.

**Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bima Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Jenis Pengeluaran (Milyar Rupiah) Tahun 2020-2024**

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2.000,05	2.052,73	2.100,60	2.186,42	2.276,97
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	58,68	59,16	61,59	65,51	73,32
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	904,54	888,90	899,37	921,31	970,29
Pembentukan Modal Tetap Bruto	983,12	1.016,11	946,80	1.037,64	1.053,70
Perubahan Inventori	8,50	(1,14)	(1,20)	(0,39)	0,08
Net Ekspor Barang dan Jasa	(1.075,67)	(1.076,63)	(988,75)	(1.036,40)	(1.072,07)
PDRB	2 879, 22	2 939, 13	3 018, 41	3.174,09	3.302,30

Sumber Data : PDRB Kota Bima, 2020-2024 *Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

Persentase Pertumbuhan PDRB Kota Bima Tahun 2020-2024



Sumber

Data : BPS Nusa Tenggara Barat, 2024

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Bima mulai tahun 2020 setiap tahun mengalami peningkatan. Apabila dilihat dari nilai PDRB Kota Bima atas dasar harga konstan, pada tahun 2024 mencapai 3.302,30 miliar rupiah. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 128.01 miliar rupiah (3,87%) dari nilai PDRB tahun 2023 yaitu sebesar 3.174,09 miliar rupiah.

2.1.7 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan gambaran dari rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk dari nilai tambah yang tercipta selama satu tahun. PDRB per kapita biasa digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat secara makro. Laju pertumbuhan PDRB per kapita yang melebihi angka inflasi mencerminkan keadaan ekonomi masyarakat lebih baik, dan sebaliknya pertumbuhan PDRB per kapita yang lebih rendah dari inflasi mencerminkan kesejahteraan masyarakat tidak meningkat. Angka PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun pada tahun yang sama. Pertumbuhan PDRB dapat terjadi tanpa memberi dampak positif pada tingkat kesejahteraan masyarakat akibat pertumbuhan penduduk dan atau perubahan harga yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan PDRB.

PDRB Per Kapita Kota Bima Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
I. Atas Dasar Harga Berlaku					
PDRB Perkapita (Ribu Rp)	24.265	26.658	27.531	29.071	30.901
Pertumbuhan (%)	17,22	18,57	18,81	19,18	19.67

Sumber Data : BPS NTB 2024, PDRB Menurut Pengeluaran Kota Bima Tahun 2019-2023

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan

besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kota Bima atas dasar harga berlaku sejak tahun 2019-2023 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 PDRB per kapita tercatat sebesar 17,22 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2023 mencapai 19,67 juta rupiah, walaupun faktor inflasi yang masih mempengaruhi kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi.

2.1.8 Indeks Harga Implisit

Tingkat harga merupakan variabel penting yang berpengaruh terhadap peningkatan PDRB dan daya beli (*Purchasing Power*) masyarakat terhadap barang dan jasa. Sementara itu daya beli masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan yang diterima dan tingkat harga atas barang dan jasa. Untuk melihat terjadinya perubahan harga pada suatu waktu, indikator yang digunakan adalah Indeks Harga Implisit (IHI).

IHI adalah suatu indeks harga yang diperoleh dengan membagi nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan untuk masing-masing sektor/sub sektor dalam kurun waktu satu tahun dan dikalikan 100. Perubahan indeks harga implisit menggambarkan perubahan harga ditingkat produsen dari seluruh komoditi baik barang maupun jasa dari seluruh kegiatan ekonomi mulai dari sektor pertanian sampai dengan sektor jasa-jasa yang terjadi di suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun.

IHI dan Perubahan IHI Kota Bima Tahun 2019-2023

Tahun	Indeks Harga Implisit (IHI)	Laju IHI (%)
2019	140,88	2,85
2020	143,55	1,89
2021	146,34	1,94
2022	151,56	3,57
2023	154,76	3,68

Sumber Data : PDRB Menurut Lapangan Usaha 2019-2023

Selama kurun waktu 2019-2023, laju perubahan IHI selalu lebih rendah dibandingkan laju perubahan PDRB per kapita. Ini mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat selama periode tersebut mengalami peningkatan sehingga dapat dikatakan bahwa kesejahteraan masyarakat Kota Bima dilihat dari PDRB per kapita meningkat selama tahun 2023.

2.2 Kebijakan Keuangan

Dalam proses pembangunan dan perkembangan perekonomian di daerah, pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui APBD, memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah. Oleh karena itu, proses penyusunan APBD semaksimal mungkin harus dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas, dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat.



APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan dan belanja daerah. Proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik.

Oleh karena itu, disiplin dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran merupakan hal penting agar anggaran tersebut dapat berfungsi sebagaimana diharapkan yaitu:

1. Dalam konteks kebijakan anggaran, memberikan arah kebijakan perekonomian, dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumber daya yang dimiliki masyarakat;
2. Untuk mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian; dan
3. Sebagai sarana sekaligus pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal dalam suatu daerah.

Pembangunan di Kota Bima dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan umum anggaran dan pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2024 yang memuat berbagai strategi dan prioritas pembangunan yang dilaksanakan dan disesuaikan dengan situasi maupun kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat dimana tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD Kota Bima Tahun 2023 sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2024, maka RKPD dimaksudkan sebagai upaya-upaya pemerintah daerah secara menyeluruh untuk mewujudkan Tujuan dari Visi dan Misi daerah. Untuk itu RKPD tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga untuk menjalankan fungsi pemerintah sebagai penentu kebijakan dan menetapkan kerangka regulasi guna mendorong partisipasi masyarakat di daerah.

Dalam kebijakan umum APBD Pemerintah Kota Bima Tahun 2023 serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati, terdapat lima program prioritas pembangunan dalam Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam RKPD Tahun 2023 adalah pembangunan ekonomi berbasis perekonomian lokal, yaitu:

1. Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal yang tersedia, sehingga menghasilkan produk yang unggul secara komparatif maupun secara kompetitif;
2. Meningkatkan nilai tambah bagi produk yang dihasilkan masyarakat dengan mendorong tumbuhnya industri pengolahan skala kecil maupun skala menengah dengan memberikan kemudahan dan insentif yang sifatnya pengguliran, sehingga hal ini dapat menciptakan kesempatan kerja bagi para pencari kerja;
3. Menciptakan/memperluas jaringan pasar bagi produk masyarakat, sehingga produk tersebut layak dan berdaya saing di pasar yang pada gilirannya masyarakat memperoleh pendapatan;
4. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif, pemberian paket insentif, dan pembangunan sarana dan prasarana perekonomian dalam rangka mendukung Kota Bima sebagai Kota Perdagangan dan Jasa; dan
5. Penetapan kawasan/lahan abadi untuk produksi pertanian dalam rangka mempertahankan ketahanan dan kestabilan produksi pangan, serta mengembangkan usaha agrobisnis.



Dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan APBD sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kota Bima, selama Tahun 2024 diterapkan kebijakan-kebijakan sebagai berikut :

1. Kebijakan Pendapatan Daerah;
2. Kebijakan Belanja Daerah; dan
3. Kebijakan Pembiayaan Daerah.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan daerah dalam APBD Pemerintah Kota Bima adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan atau Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Untuk mencapai target yang ditetapkan pada Tahun 2024, ditempuh arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah sebagai berikut.

1. Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan peningkatan Pendapata Asli Daerah (PAD) harus tetap memperhatikan prinsip agar pajak dan retribusi tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat yang dapat berakibat pada terhambatnya iklim usaha yang baik untuk pengembangan ekonomi lokal. Dan sebaliknya perlu upaya dan langkah-langkah strategis untuk memberikan paket insentif dan disinsentif maupun stimulus agar terus bertumbuhkembangnya aktifitas ekonomi masyarakat tetap stabil dan terus meningkat. Disamping itu dalam hal pengelolaan juga perlu penyederhanaan sistem dan Prosedur Administrasi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, Pemberian Insentif atau Rasionalisasi Pajak/Retribusi Daerah, dan Sosialisasi untuk terus meningkatkan Ketaatan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Objek Pajak dan Restribusi Daerah perlu terus dilakukan dalam rangka mengoptimalkan potensi yang ada.

Dalam menetapkan target pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hendaknya dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan hasil dari nilai kekayaan daerah yang disertakan sesuai dengan tujuan dan fungsi penyertaan modal dimaksud. Selain itu, untuk meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah daerah dapat mendayagunakan Kekayaan atau Aset-aset daerah yang *idle* dengan cara melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga.

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan pada tahun 2024 diproyeksikan meningkat dibandingkan dengan dana perimbangan yang ditargetkan pada tahun 2023 khususnya pada komponen Dana Alokasi Umum (DAU) yang meningkat seiring asumsi peningkatan gaji pegawai.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan daerah yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2023 juga diproyeksikan akan mengalami peningkatan dengan pendapatan yang ditargetkan pada tahun 2024.



2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah Pemerintah Kota Bima pada tahun 2024 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Disamping itu, Pemerintah Kota Bima sangat menekankan pada penggunaan belanja daerah yang mengedepankan efisiensi dan penghematan serta diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap PD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kota Bima dalam berbagai kebijakannya selalu memberikan perhatian khusus terhadap program prioritas daerah baik dalam rangka pencapaian visi dan misi pada tahun yang berjalan maupun bagi pencapaian pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good local governance*) sebagai perwujudan atas terlaksananya otonomi daerah. Pemerintah Kota Bima memberdayakan seluruh elemen kebijakan yang sudah terimplementasikan pada semua PD yang kemudian dijabarkan pada program/kegiatan. Pemerintah Kota Bima tetap menekankan pada penggunaan belanja daerah yang mengedepankan efisiensi dan efektifitas belanja dengan memanfaatkan sumber pendapatan secara maksimal.

Arah pengelolaan belanja daerah didasarkan pada pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap PD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan Belanja Operasi

1. Belanja Pegawai

Kebijakan belanja pegawai pada Tahun 2024 antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi, dan penambahan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) telah diperhitungkan *acress* yang besarnya dibatasi maksimum 2,5% dari jumlah Belanja Pegawai untuk Gaji Pokok dan Tunjangan, serta estimasi alokasi untuk pembayaran Gaji ke-13 dan Gaji ke-14 PNSD sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
- b. Untuk mengantisipasi kebutuhan pengangkatan Calon PNSD (CPNSD) sesuai formasi penyuluh lapangan tahun 2024 serta pengangkatan PPPK;
- c. Penyediaan dana untuk membiayai Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Askes) bagi PNSD dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);



- d. Penganggaran belanja pegawai untuk Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah senilai 5% dari target pajak daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. Penganggaran belanja pegawai untuk pembayaran tunjangan profesi guru PNSD dan tambahan penghasilan guru PNSD;
- f. Pemberian tambahan penghasilan bagi PNSD/CPNSD dalam upaya peningkatan prestasi kerja sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah, yang didasarkan pada Pertimbangan Beban Kerja, Prestasi Kerja, Kondisi Kerja, Tempat Bertugas, dan Kelangkaan Profesi;
- g. Dasar penghitungan besaran Honorarium bagi PNSD disesuaikan dengan standar yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bima, dengan tetap memperhatikan aspek kewajaran dan beban kerja; dan
- h. Penganggaran Honorarium Non PNSD hanya dapat disediakan bagi pegawai tidak tetap yang benar-benar memiliki peranan dan kontribusi serta yang terkait langsung dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing SKPD, termasuk narasumber/tenaga ahli di luar instansi pemerintah.

2. Belanja Barang dan Jasa

- a. Penganggaran upah tenaga kerja dan tenaga lainnya yang terkait dengan jasa pemeliharaan atau jasa konsultasi baik yang dilakukan secara swakelola maupun dengan pihak ketiga agar dianggarkan pada belanja barang dan jasa;
- b. Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023. Untuk menghitung kebutuhan riil disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan beban pekerjaan;
- c. Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dinas luar negeri maupun perjalanan dinas dalam negeri, agar dilakukan secara selektif dan terdapat pembatasan frekuensi dan jumlah hari;
- d. Untuk perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding agar dibatasi frekuensi dan jumlah pesertanya serta dilakukan sesuai dengan substansi kebijakan yang sedang dirumuskan, yang hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel;
- e. Penganggaran untuk penyelenggaraan rapat-rapat yang dilaksanakan di luar kantor, *workshop*, seminar, dan lokakarya agar dibatasi; dan
- f. Penganggaran untuk menghadiri pelatihan terkait dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) hanya diperkenankan untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga non pemerintah yang bekerjasama dan telah mendapat Akreditasi dari Instansi Pembina (Lembaga Administrasi Negara), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

3. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Kebijakan yang ditempuh dalam pengelolaan belanja hibah antara lain:

- a. Penganggaran belanja hibah dialokasikan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh pemerintah (instansi vertikal seperti TMMD dan KPUD), semi Pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI, dan PKK), Partai Politik, Perusahaan daerah, dan masyarakat serta organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
- b. Dalam menentukan organisasi atau lembaga yang akan diberikan hibah, dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Pemberian Bantuan Sosial kepada kelompok/anggota masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Disamping itu, penetapan besaran bantuan tidak melebihi batas toleransi untuk penunjukan langsung sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; dan
- d. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah, telah diupayakan pembatasan terhadap jumlah alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dan format pertanggungjawabannya telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Belanja Modal

- a. Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing PD. Oleh karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya;
- b. Penganggaran belanja modal tidak hanya senilai harga beli/bangun aset tetap, tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap tersebut sampai siap digunakan.

5. Belanja Tidak Terduga

Penetapan anggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi TA 2024 dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang mendesak, dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada TA 2024.

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.



1. Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kota Bima selama ini berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Untuk itu, dalam menetapkan SiLPA agar disesuaikan dengan kapasitas potensi riil yang ada untuk menghindari kendala pendanaan pada belanja yang telah direncanakan.

2. Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kota Bima dialokasikan jika diperkirakan surplus anggaran. Pemanfaatan sisa Lebih Anggaran (Surplus) digunakan untuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Kebijakan keuangan daerah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dijabarkan lebih lanjut dalam indikator pencapaian kinerja APBD Daerah, sehingga Pemerintah Kota Bima memiliki sasaran dan tujuan yang pasti mengenai apa yang ingin dicapai dalam Tahun Anggaran 2024. Penetapan capaian kinerja APBD untuk tahun 2024 dilaksanakan sebanyak dua kali, yang pertama adalah melalui Penetapan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan yang kedua adalah melalui penetapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

2.3.1 APBD dan Perubahannya

APBD dan perubahan APBD serta realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut.

APBD, Perubahan APBD dan Realisasi APBD Kota Bima Tahun 2024

No	Uraian	APBD	Perubahan APBD	Realisasi APBD	%
1.	Pendapatan	809.556.428.302,00	911.422.634.704,00	899.567.459.005,00	98,70
2.	Belanja	858.556.428.302,00	928.222.492.278,00	893.324.937.238,00	96,24
	Surplus / (Defisit)	(49.000.000.000,00)	(16.799.857.574,00)	6.242.512.767,00	(37,15)
3.	Pembiayaan				
a.	Penerimaan Pembiayaan	50.000.000.000,00	17.799.857.574,00	17.799.857.573,00	100,00
b.	Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	100,00
	Pembiayaan Netto	49.000.000.000,00	16.799.857.574,00	17.799.857.573,00	105,95
	SILPA	0,00	0,00	24.042.379.340,00	0,00

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima Tahun 2024, Diolah

Dari data tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa terjadi peningkatan anggaran pendapatan pada perubahan APBD senilai Rp101.866.206.402,00 atau senilai 12,58%. Peningkatan pendapatan ini diakibatkan karena estimasi kebutuhan yang terjadi karena adanya penambahan belanja sehingga dilakukan penambahan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Total anggaran belanja daerah Pemerintah Kota Bima pada tahun 2024 setelah perubahan senilai Rp928.222.492.278,00 mengalami peningkatan senilai Rp69.666.063.976,00 atau senilai 8,11% dibanding total anggaran belanja sebelum perubahan senilai Rp858.556.428.302,00.



2.3.2 Realisasi APBD

Realisasi penerimaan pendapatan daerah tahun 2024 senilai Rp899.566.234.005,00 atau 98,70% dari target yang ditetapkan senilai Rp911.422.634.704,00, kurang dari target senilai Rp11.855.175.699,00 atau senilai 1,30%.

Realisasi belanja tahun 2024 senilai Rp893.324.937.238,00 atau senilai 96,24% dari yang ditargetkan senilai Rp928.222.492.278,00 sehingga masih terdapat sisa anggaran senilai Rp34.897.555.040,00 atau 3,91%. Hal tersebut terjadi karena adanya efisiensi dalam pengeluaran total belanja secara umum yang mencakup belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga.

Realisasi pendapatan dikurangi belanja pada tahun 2024 mengalami defisit senilai Rp6.242.521.767,00 sementara realisasi pembiayaan netto adalah senilai Rp17.799.857.573,00 yang diperoleh dari penerimaan pembiayaan daerah senilai Rp17.799.857.573,00 dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan daerah senilai Rp0,00 sehingga diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) senilai Rp24.042.379.340,00.

Rekapitulasi Belanja Daerah Per Program Kegiatan Tahun 2024

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rp)	(%)
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.203.000,00	15.203.000,00	0,00	100,00
1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	14.892.000,00	14.876.000,00	16.000,00	99,89
1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	16.090.500,00	16.090.500,00	0,00	100,00
1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	86.422.100,00	83.477.200,00	2.944.900,00	96,59
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	131.879.900,00	127.375.145,00	4.504.755,00	96,58
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	170.410.029.589,00	170.301.216.565,00	108.813.024,00	99,94
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	153.297.000,00	149.547.000,00	3.750.000,00	97,55
1.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12.163.900,00	12.163.900,00	0,00	100,00
1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.404.000,00	14.404.000,00	0,00	100,00
1.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	9.988.900,00	9.988.900,00	0,00	100,00
1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.136.500,00	5.136.500,00	0,00	100,00
1.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.849.600,00	3.849.600,00	0,00	100,00
1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	100,00
1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	34.783.400,00	34.583.400,00	200.000,00	99,43
1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30.000.000,00	29.884.000,00	116.000,00	99,61
1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	234.976.100,00	231.226.100,00	3.750.000,00	98,40
1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	33.800.000,00	27.800.000,00	6.000.000,00	82,25



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rp)	(%)
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	48.118.800,00	47.618.800,00	500.000,00	98,96
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	300.254.000,00	294.500.000,00	5.754.000,00	98,08
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.230.000,00	16.230.000,00	0,00	100,00
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	181.937.300,00	181.806.400,00	130.900,00	99,93
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	129.420.000,00	129.420.000,00	0,00	100,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	622.484.000,00	622.285.987,00	198.013,00	99,97
1.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	146.910.000,00	146.910.000,00	0,00	100,00
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	143.980.600,00	134.667.563,00	9.313.037,00	93,53
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29.900.000,00	29.900.000,00	0,00	100,00
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.270.000,00	59.568.652,00	701.348,00	98,84
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.750.000,00	23.750.000,00	0,00	100,00
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	247.000.000,00	246.500.000,00	500.000,00	99,80
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	9.243.300.000,00	8.933.510.650,00	309.789.350,00	96,65
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	150.000.000,00	149.739.000,00	261.000,00	99,83
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	119.459.000,00	115.025.000,00	4.434.000,00	96,29
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2.390.701.100,00	2.374.838.300,00	15.862.800,00	99,34
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	448.782.000,00	435.545.228,00	13.236.772,00	97,05
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	15.863.520.000,00	15.863.520.000,00	0,00	100,00
1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	94.800.000,00	82.800.000,00	12.000.000,00	87,34
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	103.710.000,00	98.910.000,00	4.800.000,00	95,37
1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5.410.000,00	5.410.000,00	0,00	100,00
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.210.000.000,00	1.639.613.150,00	570.386.850,00	74,19
1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	39.025.000,00	38.025.000,00	1.000.000,00	97,44
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.591.115.000,00	3.183.853.700,00	407.261.300,00	88,66
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	8.933.421.000,00	8.093.804.950,00	839.616.050,00	90,60
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.695.000.000,00	2.310.999.000,00	384.001.000,00	85,75
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	140.715.000,00	134.140.211,00	6.574.789,00	95,33
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	742.869.000,00	728.767.080,00	14.101.920,00	98,10
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	114.420.000,00	108.650.000,00	5.770.000,00	94,96



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rp)	(%)
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	7.001.280.000,00	7.001.280.000,00	0,00	100,00
1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	27.600.000,00	0,00	27.600.000,00	0,00-
1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	113.990.000,00	96.790.000,00	17.200.000,00	84,91
1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5.724.000,00	5.724.000,00	0,00	100,00
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	17.390.000,00	16.890.000,00	500.000,00	97,12
1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	22.260.000,00	18.645.000,00	3.615.000,00	83,76
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.548.507.000,00	1.457.249.300,00	91.257.700,00	94,11
1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	197.950.250,00	194.159.330,00	3.790.920,00	98,08
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	52.000.000,00	51.600.000,00	400.000,00	99,23
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	583.385.500,00	531.118.500,00	52.267.000,00	91,04
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	221.680.950,00	220.798.400,00	882.550,00	99,60
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	4.592.660.000,00	4.549.670.000,00	42.990.000,00	99,06
1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	96.000.000,00	57.600.000,00	38.400.000,00	60,00
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	8.862.350,00	0,00	8.862.350,00	0,00
1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	6.469.800,00	6.469.800,00	0,00	100,00
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	76.412.000,00	64.458.000,00	11.954.000,00	84,36
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.761.050.000,00	1.651.550.000,00	109.500.000,00	93,78
1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	12.960.000,00	6.480.000,00	6.480.000,00	50,00
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	130.656.100,00	112.106.100,00	18.550.000,00	85,80
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	28.050.000,00	28.050.000,00	0,00	100,00
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.865.000,00	58.310.750,00	2.554.250,00	95,80
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	13.818.754,00	13.818.500,00	254,00	100,00
1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12.331.100,00	12.330.800,00	300,00	100,00
1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	14.685.500,00	14.685.500,00	0,00	100,00
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	148.391.750,00	145.391.230,00	3.000.520,00	97,98
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	62.801.892.433,00	62.538.708.315,00	263.184.118,00	99,58
1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan	453.255.900,00	450.375.900,00	2.880.000,00	



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rp)	(%)
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				99,36
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	31.999.500,00	31.999.500,00	0,00	100,00
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	50.008.000,00	50.008.000,00	0,00	100,00
1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.499.800,00	20.499.800,00	0,00	100,00
1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	204.227.700,00	203.120.006,00	1.107.694,00	99,46
1.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	113.207.400,00	111.926.806,00	1.280.594,00	98,87
1.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5.499.700,00	3.433.300,00	2.066.400,00	62,43
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.697.600,00	14.661.000,00	36.600,00	99,75
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73.430.000,00	70.140.000,00	3.290.000,00	95,52
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.500.000,00	21.020.000,00	480.000,00	97,77
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	75.003.300,00	73.623.600,00	1.379.700,00	98,16
1.02.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	17.500.000,00	17.495.500,00	4.500,00	99,97
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	612.000.000,00	609.570.139,00	2.429.861,00	99,60
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	216.435.300,00	216.435.300,00	0,00	100,00
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	624.120.450,00	611.306.463,00	12.813.987,00	97,95
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	312.180.000,00	311.055.494,00	1.124.506,00	99,64
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	1.745.315.013,00	1.404.266.400,00	341.048.613,00	80,46
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	502.076.800,00	499.428.300,00	2.648.500,00	99,47
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6.085.552.650,00	5.965.259.000,00	120.293.650,00	98,02
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1.865.315.360,00	1.775.894.237,00	89.421.123,00	95,21
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	81.662.200,00	81.662.200,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	362.719.700,00	353.270.500,00	9.449.200,00	97,39
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	16.100.000,00	15.661.888,00	438.112,00	97,28
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	154.095.845,00	144.925.000,00	9.170.845,00	94,05
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	43.960.000,00	43.960.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	25.486.700,00	25.483.200,00	3.500,00	99,99
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	27.752.600,00	25.659.000,00	2.093.600,00	92,46
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	99.445.100,00	86.312.414,00	13.132.686,00	



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rp)	(%)
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
	Penderita Hipertensi				86,79
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	28.246.600,00	28.140.604,00	105.996,00	99,62
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	23.400.000,00	23.300.000,00	100.000,00	99,57
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	292.303.400,00	291.680.500,00	622.900,00	99,79
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	77.178.500,00	73.846.000,00	3.332.500,00	95,68
.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	712.972.400,00	689.426.800,00	23.545.600,00	96,70
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	24.126.400,00	24.126.400,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	330.939.300,00	329.167.900,00	1.771.400,00	99,46
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	36.050.000,00	35.200.000,00	850.000,00	97,64
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	27.520.100,00	25.720.100,00	1.800.000,00	93,46
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	310.718.000,00	306.299.310,00	4.418.690,00	98,58
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	17.579.178.650,00	17.080.463.366,00	498.715.284,00	97,16
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	12.450.000,00	10.200.000,00	2.250.000,00	81,93
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	37.658.340,00	(37.658.340,00)	0,00
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	90.114.300,00	90.114.300,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	24.199.900,00	23.499.900,00	700.000,00	97,11
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	82.600.000,00	81.400.000,00	1.200.000,00	98,55
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	85.178.200,00	85.178.000,00	200,00	100,00
1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	149.762.000,00	137.880.500,00	11.881.500,00	92,07
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1.231.827.700,00	1.214.971.690,00	16.856.010,00	98,63
1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	148.750.000,00	148.024.000,00	726.000,00	99,51
1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	15.000.000,00	11.532.600,00	3.467.400,00	76,88
1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	10.000.000,00	5.116.000,00	4.884.000,00	51,16
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	5.918.000,00	5.918.000,00	0,00	100,00
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	69.124.000,00	28.624.000,00	40.500.000,00	1,41
.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	452.790.300,00	428.017.500,00	24.772.800,00	94,53



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rp)	(%)
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
1.02.04.2.01.0001	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	63.730.000,00	62.110.000,00	1.620.000,00	97,46
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	192.387.000,00	192.387.000,00	0,00	100,00
1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	171.214.000,00	171.214.000,00	0,00	100,00
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	402.324.655,00	395.883.500,00	6.441.155,00	98,40
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	76.094.800,00	74.249.800,00	1.845.000,00	97,58
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	43.943.300,00	41.695.800,00	2.247.500,00	94,89
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	15.595.738.226,00	15.593.007.747,00	2.730.479,00	99,98
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	8.113.789.500,00	7.394.908.523,00	718.880.977,00	91,14
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	12.124.652.850,00	10.814.228.050,00	1.310.424.800,00	89,19
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	14.542.115.100,00	12.652.641.086,00	1.889.474.014,00	87,01
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	59.566.000,00	59.566.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.275.356.700,00	871.160.215,00	404.196.485,00	68,31
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	29.856.000,00	28.356.000,00	1.500.000,00	94,98
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	10.800.000,00	10.300.000,00	500.000,00	95,37
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	230.048.000,00	211.648.000,00	18.400.000,00	92,00
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	35.730.000,00	35.730.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	108.826.000,00	106.900.000,00	1.926.000,00	98,23



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rp)	(%)
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2.264.607.087,00	2.130.124.515,00	134.482.572,00	94,06
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	164.602.000,00	156.252.317,00	8.349.683,00	94,93
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	7.964.000,00	2.616.000,00	5.348.000,00	32,85
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	22.080.000,00	22.080.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	110.100.000,00	110.100.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	4.942.000,00	2.220.000,00	2.722.000,00	44,92
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	16.617.000,00	16.617.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	9.480.000,00	9.480.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	30.765.000,00	30.765.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	33.250.000,00	33.250.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	11.050.000,00	11.050.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	275.444.000,00	275.444.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	42.900.000,00	42.900.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	32.282.000,00	32.282.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	96.700.000,00	96.700.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2.677.834.702,00	2.511.239.035,00	166.595.667,00	93,78
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	208.549.000,00	203.370.239,00	5.178.761,00	97,52
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	4.008.000,00	4.008.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	187.240.000,00	187.240.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	15.725.000,00	14.920.000,00	805.000,00	94,88
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	31.974.000,00	31.974.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	31.460.000,00	31.460.000,00	0,00	



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rp)	(%)
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
	Ibu Hamil				100,00
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	36.379.000,00	36.379.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	71.600.000,00	71.600.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	16.660.000,00	16.660.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	282.849.000,00	234.799.000,00	48.050.000,00	83,01
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	18.645.000,00	18.645.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	147.550.000,00	147.550.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2.500.074.801,00	2.261.577.346,00	238.497.455,00	90,46
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	215.246.000,00	210.982.929,00	4.263.071,00	98,02
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	10.368.000,00	10.368.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	15.081.000,00	15.081.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	125.568.000,00	125.568.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	3.114.000,00	2.220.000,00	894.000,00	71,29
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	40.434.000,00	40.434.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	10.120.000,00	10.120.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	20.610.000,00	20.610.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	41.800.000,00	41.800.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	158.249.000,00	157.999.000,00	250.000,00	99,84
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	16.350.000,00	16.350.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	13.485.000,00	13.235.000,00	250.000,00	98,15
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	85.614.000,00	85.600.000,00	14.000,00	99,98
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	963.108.840,00	922.889.577,00	40.219.263,00	95,82
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	112.703.000,00	112.673.462,00	29.538,00	99,97
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rp)	(%)
		Anggaran	Realisasi	5	6
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	11.230.000,00	11.230.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	55.800.000,00	55.800.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	3.061.000,00	2.868.520,00	192.480,00	93,71
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2.960.000,00	2.960.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	18.280.000,00	18.280.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	96.991.000,00	93.991.000,00	3.000.000,00	96,91
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	13.782.000,00	12.782.000,00	1.000.000,00	92,74
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40.650.000,00	40.150.000,00	500.000,00	98,77
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	458.837.716,00	428.433.661,00	30.404.055,00	93,37
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	66.099.000,00	63.859.693,00	2.239.307,00	96,61
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	6.668.000,00	6.668.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	28.640.000,00	28.640.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	3.331.000,00	3.330.000,00	1.000,00	99,97
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.730.000,00	4.730.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	24.300.000,00	22.300.000,00	2.000.000,00	91,77
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	25.600.000,00	25.600.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	207.030.000,00	129.030.000,00	78.000.000,00	62,32
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.340.000,00	12.340.000,00	0,00	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rp)	(%)
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
					100,00
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	105.129.000,00	105.100.000,00	29.000,00	99,97
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.997.703.673,00	1.854.086.545,00	143.617.128,00	92,81
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	151.453.000,00	150.880.279,00	572.721,00	99,62
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	7.348.000,00	7.348.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	26.600.000,00	26.600.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	91.100.000,00	91.100.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	3.037.000,00	2.220.000,00	817.000,00	73,10
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	19.669.000,00	19.669.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	9.072.000,00	9.072.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	13.150.000,00	13.150.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	115.300.000,00	104.750.000,00	10.550.000,00	90,85
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	14.647.000,00	14.647.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	78.200.000,00	78.200.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	532.332.605,00	503.434.010,00	28.898.595,00	94,57
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	72.222.000,00	72.222.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.330.000,00	2.330.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	47.700.000,00	47.700.000,00	0,00	100,00
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	3.103.000,00	2.220.000,00	883.000,00	71,54
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rp)	(%)
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
	Masyarakat (UKBM)				
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.782.300,00	25.774.000,00	8.300,00	99,97
1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	17.765.500,00	17.763.000,00	2.500,00	99,99
1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.051.000,00	7.026.000,00	25.000,00	99,65
1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	11.996.000,00	11.996.000,00	0,00	100,00
1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	8.347.620,00	7.791.000,00	556.620,00	93,33
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.890.000,00	20.889.800,00	200,00	100,00
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.423.600,00	50.411.000,00	12.600,00	99,98
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.760.394.883,00	7.562.569.184,00	197.825.699,00	97,45
1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	425.432.000,00	407.822.000,00	17.610.000,00	95,86
1.03.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.818.000,00	10.817.400,00	600,00	99,99
1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	21.810.000,00	21.810.000,00	0,00	100,00
1.03.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	18.114.000,00	18.112.000,00	2.000,00	99,99
1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	23.840.000,00	23.285.000,00	555.000,00	97,67
1.03.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	82.188.000,00	82.000.000,00	188.000,00	99,77
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	385.872.269,00	384.682.700,00	1.189.569,00	99,69
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	188.534.878,00	188.534.000,00	878,00	100,00
1.03.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	56.445.363,00	56.428.000,00	17.363,00	99,97
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.156.186.000,00	1.154.520.072,00	1.665.928,00	99,86
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.457.600,00	26.451.000,00	6.600,00	99,98
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	263.922.017,00	218.762.474,00	45.159.543,00	82,89
1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.690.800,00	49.690.000,00	800,00	100,00
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	282.208.000,00	282.195.092,00	12.908,00	100,00
1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	507.001.700,00	496.990.600,00	10.011.100,00	98,03
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	115.460.000,00	115.455.000,00	5.000,00	100,00
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	256.225.000,00	256.211.227,00	13.773,00	99,99
1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	227.465.135,00	204.102.600,00	23.362.535,00	89,73
1.03.02.2.01.0080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	378.867.800,00	368.794.806,00	10.072.994,00	97,34
1.03.02.2.01.0104	Pembangunan Check Dam	785.430.000,00	784.103.816,00	1.326.184,00	99,83
1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan	874.368.200,00	873.519.331,00	848.869,00	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rp)	(%)
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
	Tebing				99,90
1.03.02.2.01.0114	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	512.250.000,00	511.637.051,00	612.949,00	99,88
1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	239.948.950,00	228.965.365,00	10.983.585,00	95,42
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	297.986.000,00	297.790.840,00	195.160,00	99,93
1.03.03.2.01.0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	289.514.000,00	263.862.000,00	25.652.000,00	91,14
1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	84.549.200,00	80.024.100,00	4.525.100,00	94,65
1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	163.028.000,00	162.277.700,00	750.300,00	99,54
1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	5.267.133.900,00	4.196.334.827,00	1.070.799.073,00	79,67
1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	871.825.502,00	850.045.750,00	21.779.752,00	97,50
1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	4.332.376.089,00	3.510.073.514,00	822.302.575,00	81,02
1.03.05.2.01.0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	296.044.000,00	212.880.844,00	83.163.156,00	71,91
1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	6.591.452.500,00	6.586.003.500,00	5.449.000,00	99,92
1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	7.450.904.086,00	7.285.358.535,00	165.545.551,00	97,78
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	257.525.000,00	220.466.000,00	37.059.000,00	85,61
1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	17.711.614.144,00	16.781.103.885,00	930.510.259,00	94,75
1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan	125.919.200,00	125.484.200,00	435.000,00	99,65
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	581.051.404,00	570.613.000,00	10.438.404,00	98,20
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	4.612.493.900,00	4.609.908.550,00	2.585.350,00	99,94
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	6.505.779.936,00	6.491.391.330,00	14.388.606,00	99,78
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	2.977.196.753,00	2.454.339.703,00	522.857.050,00	82,44
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	1.497.931.000,00	1.497.437.000,00	494.000,00	99,97
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	441.377.100,00	439.559.600,00	1.817.500,00	99,59
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	458.777.287,00	428.945.435,00	29.831.852,00	



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rp)	(%)
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
					93,50
1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	111.166.800,00	28.716.800,00	82.450.000,00	25,83
1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	107.950.000,00	107.950.000,00	0,00	100,00
1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	323.417.116,00	323.154.614,00	262.502,00	99,92
1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	259.704.465,00	257.694.663,00	2.009.802,00	99,23
1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	63.248.900,00	61.848.900,00	1.400.000,00	97,79
1.03.12.2.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	98.403.290,00	98.402.900,00	390,00	100,00
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	166.900.400,00	166.842.400,00	58.000,00	99,97
1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.494.400,00	3.487.400,00	7.000,00	99,80
1.04.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.016.500,00	1.990.500,00	26.000,00	98,71
1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.624.600,00	1.624.600,00	0,00	100,00
1.04.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.236.000,00	1.233.000,00	3.000,00	99,76
1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.383.000,00	3.338.900,00	44.100,00	98,70
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.440.670.343,00	3.342.985.236,00	97.685.107,00	97,16
1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	234.485.900,00	211.398.240,00	23.087.660,00	90,15
1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.417.400,00	1.417.400,00	0,00	100,00
1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.209.400,00	1.209.400,00	0,00	100,00
1.04.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	211.000,00	211.000,00	0,00	100,00
1.04.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.838.200,00	1.838.050,00	150,00	99,99
1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	33.600.000,00	32.480.000,00	1.120.000,00	96,67
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	154.100.000,00	150.790.000,00	3.310.000,00	97,85
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.712.000,00	16.694.500,00	17.500,00	99,90
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.220.000,00	1.316.560,00	1.903.440,00	40,89
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.000.000,00	349.986.407,00	13.593,00	100,00
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	407.222.600,00	365.746.809,00	41.475.791,00	89,81
1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.000.000,00	38.903.009,00	96.991,00	99,75
1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.940.000,00	11.691.400,00	248.600,00	97,92
1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	586.080.000,00	577.444.099,00	8.635.901,00	98,53
1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	55.525.600,00	52.851.600,00	2.674.000,00	95,18



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rp)	(%)
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	233.657.480,00	191.457.900,00	42.199.580,00	81,94
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	476.497.000,00	440.027.000,00	36.470.000,00	92,35
1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	344.286.300,00	303.533.293,00	40.753.007,00	88,16
1.04.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	79.404.300,00	63.358.800,00	16.045.500,00	79,79
1.04.03.2.02.0004	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	9.022.100,00	7.991.200,00	1.030.900,00	88,57
1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	20.496.000,00	18.750.000,00	1.746.000,00	91,48
1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	57.929.000,00	57.920.000,00	9.000,00	99,98
1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	179.595.135,00	147.248.200,00	32.346.935,00	81,99
1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	1.076.275.200,00	1.052.674.600,00	23.600.600,00	97,81
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.571.600,00	3.571.600,00	0,00	100,00
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.606.603.147,00	4.508.137.579,00	98.465.568,00	97,86
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	133.415.800,00	102.295.800,00	31.120.000,00	76,67
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.546.669.000,00	2.421.149.000,00	125.520.000,00	95,07
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.911.200,00	27.079.700,00	1.831.500,00	93,67
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.366.000,00	11.531.000,00	835.000,00	93,25
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	353.050.000,00	328.792.800,00	24.257.200,00	93,13
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.329.600,00	24.941.000,00	5.388.600,00	82,23
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.008.000,00	16.969.510,00	2.038.490,00	89,28
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.100.000,00	22.757.421,00	16.342.579,00	58,20
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	147.080.000,00	93.603.512,00	53.476.488,00	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rp)	(%)
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
	Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				63,64
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.560.000,00	2.520.000,00	6.040.000,00	29,44
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	260.255.600,00	253.961.310,00	6.294.290,00	97,58
1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	116.050.500,00	112.600.500,00	3.450.000,00	97,03
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	231.945.000,00	228.195.000,00	3.750.000,00	98,38
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	247.723.500,00	152.873.500,00	94.850.000,00	61,71
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	681.336.000,00	363.769.505,00	317.566.495,00	53,39
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	15.071.500,00	0,00	15.071.500,00	0,00
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.382.700,00	2.382.700,00	0,00	100,00
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.135.100,00	2.135.100,00	0,00	100,00
1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.415.600,00	1.415.600,00	0,00	100,00
1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.218.700,00	1.218.700,00	0,00	100,00
1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.182.400,00	1.182.400,00	0,00	100,00
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	41.368.700,00	41.368.700,00	0,00	100,00
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.787.437.157,00	3.750.955.958,00	36.481.199,00	99,04
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	109.803.450,00	109.767.050,00	36.400,00	99,97
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	897.290,00	897.290,00	0,00	100,00
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.659.150,00	1.659.150,00	0,00	100,00
1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	859.300,00	859.300,00	0,00	100,00
1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.679.500,00	3.679.500,00	0,00	100,00
1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	17.946.800,00	17.946.800,00	0,00	100,00
1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	964.700,00	964.700,00	0,00	100,00
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.490.000,00	60.785.000,00	705.000,00	98,85
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.708.000,00	15.657.000,00	51.000,00	99,68



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rp)	(%)
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.660.700,00	20.658.600,00	2.100,00	99,99
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	348.700.000,00	348.178.272,00	521.728,00	99,85
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.977.800,00	9.977.800,00	0,00	100,00
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	457.570.000,00	452.119.800,00	5.450.200,00	98,81
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	264.660.000,00	263.162.750,00	1.497.250,00	99,43
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.768.000,00	14.630.000,00	138.000,00	99,07
1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.271.200,00	7.136.200,00	135.000,00	98,14
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	276.219.200,00	276.218.100,00	1.100,00	100,00
1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	148.731.800,00	147.966.800,00	765.000,00	99,49
1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	14.910.000,00	14.655.000,00	255.000,00	98,29
1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	22.387.000,00	16.365.000,00	6.022.000,00	73,10
1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	55.998.780,00	53.155.000,00	2.843.780,00	94,92
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	600.784.000,00	90.466.000,00	510.318.000,00	15,06
1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	20.998.000,00	20.998.000,00	0,00	100,00
1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	25.467.500,00	25.347.500,00	120.000,00	99,53
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	53.461.000,00	50.644.000,00	2.817.000,00	94,73
1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	405.786.000,00	405.660.900,00	125.100,00	99,97
1.05.04.2.05.0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	6.805.100,00	6.265.100,00	540.000,00	92,06
1.05.04.2.05.0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	12.788.100,00	12.698.100,00	90.000,00	99,30
1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	27.380.000,00	23.930.000,00	3.450.000,00	87,40
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.590.000,00	12.920.000,00	670.000,00	95,07
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.083.600,00	4.083.600,00	0,00	100,00
1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.335.400,00	6.335.400,00	0,00	100,00
1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-	2.923.600,00	-	2.923.600,00	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rp)	(%)
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
	SKPD				
1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.175.400,00	5.175.400,00	0,00	100,00
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36.343.800,00	31.669.200,00	4.674.600,00	87,14
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.331.000,00	27.361.000,00	2.970.000,00	90,21
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.072.364.108,00	3.032.288.261,00	40.075.847,00	98,70
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	123.456.000,00	115.078.000,00	8.378.000,00	93,21
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.343.600,00	3.343.600,00	0,00	100,00
1.05.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.182.200,00	3.182.200,00	0,00	100,00
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12.990.000,00	11.250.000,00	1.740.000,00	86,61
1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.101.600,00	1.101.600,00	0,00	100,00
1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	34.264.000,00	33.688.360,00	575.640,00	98,32
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00
1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7.444.000,00	6.511.500,00	932.500,00	87,47
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.904.000,00	3.904.000,00	0,00	100,00
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66.692.750,00	66.650.000,00	42.750,00	99,94
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.251.500,00	5.251.500,00	0,00	100,00
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.592.100,00	13.724.000,00	1.868.100,00	88,02
1.05.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	10.440.000,00	10.440.000,00	0,00	100,00
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	154.390.657,00	152.387.098,00	2.003.559,00	98,70
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21.715.800,00	20.535.800,00	1.180.000,00	94,57
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	79.347.240,00	73.720.090,00	5.627.150,00	92,91
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	245.171.600,00	242.511.025,00	2.660.575,00	98,91
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	147.010.000,00	146.738.116,00	271.884,00	99,82
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.020.000,00	15.020.000,00	0,00	100,00
1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	200.350.000,00	175.010.000,00	25.340.000,00	87,35
1.05.03.2.02.0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	38.800.000,00	4.800.000,00	34.000.000,00	12,37
1.05.03.2.02.0009	Penyusunan Rencana Kontijensi	254.082.000,00	213.831.770,00	40.250.230,00	84,16
1.05.03.2.02.0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	59.677.600,00	1.350.000,00	58.327.600,00	2,26
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap	47.200.000,00	44.193.000,00	3.007.000,00	93,63



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rp)	(%)
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
	Bencana kabupaten/kota				
1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	168.677.971,00	130.166.360,00	38.511.611,00	77,17
1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	32.040.200,00	25.901.600,00	6.138.600,00	80,84
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	3.669.000,00	1.089.000,00	2.580.000,00	29,68
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	301.660.100,00	290.954.423,00	10.705.677,00	96,45
1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	36.153.200,00	34.402.600,00	1.750.600,00	95,16
1.05.03.2.04.0002	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	166.352.300,00	164.031.800,00	2.320.500,00	98,61
1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	17.050.200,00	13.710.200,00	3.340.000,00	80,41
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	122.540.300,00	115.199.063,00	7.341.237,00	94,01
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.144.000,00	9.144.000,00	0,00	100,00
1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.916.000,00	7.916.000,00	0,00	100,00
1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.916.000,00	7.916.000,00	0,00	100,00
1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.816.000,00	8.816.000,00	0,00	100,00
1.06.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.916.000,00	7.916.000,00	0,00	100,00
1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.965.000,00	24.948.000,00	6.017.000,00	80,57
1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.440.000,00	30.435.000,00	8.005.000,00	79,18
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.918.075.951,00	3.829.947.516,00	88.128.435,00	97,75
1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	38.623.000,00	33.669.500,00	4.953.500,00	87,17
1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	124.000.000,00	117.660.000,00	6.340.000,00	94,89
1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.672.600,00	8.672.600,00	0,00	100,00
1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14.063.600,00	14.063.000,00	600,00	100,00
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.530.500,00	13.530.500,00	0,00	100,00
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.112.900,00	59.086.400,00	26.500,00	99,96
1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.300.000,00	-	2.300.000,00	0,00
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59.805.000,00	53.305.000,00	6.500.000,00	89,13
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	59.780.000,00	59.723.000,00	57.000,00	99,90
1.06.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	51.936.000,00	51.936.000,00	0,00	100,00
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	568.160.000,00	559.503.900,00	8.656.100,00	98,48
1.06.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada	63.795.100,00	63.738.300,00	56.800,00	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rp)	(%)
		Anggaran	Realisasi	5	6
1	2	3	4	5	6
	SKPD				99,91
1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	241.940.000,00	228.704.000,00	13.236.000,00	94,53
1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	162.282.000,00	162.260.000,00	22.000,00	99,99
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	109.366.500,00	106.810.875,00	2.555.625,00	97,66
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.697.170,00	46.495.550,00	4.201.620,00	91,71
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	359.282.100,00	331.336.265,00	27.945.835,00	92,22
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	319.747.000,00	294.047.275,00	25.699.725,00	91,96
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.990.000,00	11.150.000,00	11.840.000,00	48,50
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	285.000.000,00	283.391.916,00	1.608.084,00	99,44
1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	20.000.000,00	16.720.000,00	3.280.000,00	83,60
1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	130.136.000,00	126.570.800,00	3.565.200,00	97,26
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	210.680.000,00	192.756.000,00	17.924.000,00	91,49
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	335.020.500,00	332.195.500,00	2.825.000,00	99,16
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	96.153.000,00	94.173.000,00	1.980.000,00	97,94
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	30.210.000,00	27.210.000,00	3.000.000,00	90,07
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	68.340.000,00	65.240.000,00	3.100.000,00	95,46
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	33.119.000,00	32.719.000,00	400.000,00	98,79
1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	15.000.000,00	2.098.000,00	12.902.000,00	13,99
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	21.740.000,00	14.163.600,00	7.576.400,00	65,15
1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	10.000.000,00	6.150.600,00	3.849.400,00	61,51
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	22.970.000,00	19.874.800,00	3.095.200,00	86,53
1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	10.000.000,00	8.100.000,00	1.900.000,00	81,00
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	21.100.000,00	20.780.000,00	320.000,00	98,48
1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	10.236.500,00	10.146.500,00	90.000,00	99,12
1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang	8.750.000,00	8.575.000,00	175.000,00	98,00
1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu	10.000.000,00	9.790.000,00	210.000,00	97,90
1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	396.607.000,00	359.357.000,00	37.250.000,00	90,61
1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang	13.050.000,00	1.500.000,00	11.550.000,00	11,49



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rp)	(%)
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
	Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA				
1.06.04.2.02.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	3.178.800,00	3.178.800,00	0,00	100,00
1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan	9.960.000,00	9.400.000,00	560.000,00	94,38
1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	16.367.000,00	8.100.000,00	8.267.000,00	49,49
1.06.05.2.01.0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar	28.047.000,00	14.140.000,00	13.907.000,00	50,42
1.06.05.2.01.0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	21.911.000,00	9.500.000,00	12.411.000,00	43,36
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	280.162.900,00	275.365.000,00	4.797.900,00	98,29
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	129.180.000,00	78.855.500,00	50.324.500,00	61,04
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	2.293.123.302,00	2.166.556.950,00	126.566.352,00	94,48
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	21.747.500,00	17.330.000,00	4.417.500,00	79,69
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	22.365.000,00	22.365.000,00	0,00	100,00
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	102.150.000,00	100.785.000,00	1.365.000,00	98,66
1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	4.750.000,00	-	4.750.000,00	0,00
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	56.675.000,00	56.675.000,00	0,00	100,00
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	6.800.000,00	1.500.000,00	5.300.000,00	22,06
1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	6.255.000,00	6.255.000,00	0,00	100,00
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	193.465.000,00	187.500.000,00	5.965.000,00	96,92
2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.882.000,00	6.882.000,00	0,00	100,00
2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.111.400,00	8.111.400,00	0,00	100,00
2.07.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.014.000,00	7.014.000,00	0,00	100,00
2.07.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.438.000,00	2.438.000,00	0,00	100,00
2.07.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.504.000,00	2.504.000,00	0,00	100,00
2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.824.000,00	4.440.000,00	384.000,00	92,04
2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.224.000,00	27.224.000,00	0,00	100,00
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.278.442.159,00	2.262.573.001,00	15.869.158,00	99,30
2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	39.799.200,00	38.670.600,00	1.128.600,00	97,16
2.07.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	129.500.000,00	124.410.000,00	5.090.000,00	96,07
2.07.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.458.000,00	7.458.000,00	0,00	100,00
2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.892.000,00	1.892.000,00	0,00	100,00
2.07.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.897.000,00	4.897.000,00	0,00	100,00
2.07.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan	4.722.000,00	4.440.000,00	282.000,00	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rp)	(%)
		Anggaran	Realisasi	5	6
1	2	3	4	5	6
	Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				94,03
2.07.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.658.000,00	5.442.000,00	216.000,00	96,18
2.07.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	27.537.000,00	22.737.000,00	4.800.000,00	82,57
2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.856.800,00	33.856.200,00	600,00	100,00
2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000,00	191.152.030,00	8.847.970,00	95,58
2.07.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	40.272.000,00	26.685.000,00	13.587.000,00	66,26
2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	115.923.000,00	115.483.225,00	439.775,00	99,62
2.07.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	498.827.236,00	473.830.022,00	24.997.214,00	94,99
2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72.000.000,00	65.565.000,00	6.435.000,00	91,06
2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.054.000,00	40.233.933,00	34.820.067,00	53,61
2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	163.200.000,00	160.041.000,00	3.159.000,00	98,06
2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.000.000,00	31.475.240,00	7.524.760,00	80,71
2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.240.000,00	6.063.000,00	9.177.000,00	39,78
2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.010.000,00	3.275.000,00	5.735.000,00	36,35
2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	120.620.000,00	78.000.501,00	42.619.499,00	64,67
2.07.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3.324.000,00	1.684.000,00	1.640.000,00	50,66
2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	11.842.400,00	11.640.000,00	202.400,00	98,29
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	-	8.590.000,00	- 8.590.000,00	0,00
2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	76.227.000,00	75.970.880,00	256.120,00	99,66
2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	54.340.000,00	51.090.000,00	3.250.000,00	94,02
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	32.373.000,00	29.603.000,00	2.770.000,00	91,44
2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	53.702.400,00	52.752.400,00	950.000,00	98,23
2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	32.087.000,00	31.587.000,00	500.000,00	98,44
2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	37.420.000,00	11.710.000,00	25.710.000,00	31,29
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	70.389.000,00	67.389.200,00	2.999.800,00	95,74
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang	6.969.000,00	6.705.000,00	264.000,00	96,21



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rp)	(%)
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
	Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	22.314.000,00	21.410.000,00	904.000,00	95,95
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	31.161.000,00	26.845.083,00	4.315.917,00	86,15
2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.452.800,00	16.021.800,00	1.431.000,00	91,80
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	341.523.000,00	331.521.500,00	10.001.500,00	97,07
2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	170.020.000,00	120.020.000,00	50.000.000,00	70,59
2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.705.800,00	3.705.800,00	0,00	100,00
2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.658.400,00	2.658.400,00	0,00	100,00
2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.654.600,00	3.654.600,00	0,00	100,00
2.08.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.162.500,00	1.162.500,00	0,00	100,00
2.08.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.178.400,00	3.178.400,00	0,00	100,00
2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.111.000,00	6.111.000,00	0,00	100,00
2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.784.800,00	4.784.800,00	0,00	100,00
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.804.625.524,00	2.650.543.453,00	154.082.071,00	94,51
2.08.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	157.800.900,00	152.262.300,00	5.538.600,00	96,49
2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.933.400,00	1.933.400,00	0,00	100,00
2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.138.500,00	2.138.500,00	0,00	100,00
2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.212.800,00	2.210.600,00	2.200,00	99,90
2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.790.000,00	14.789.000,00	1.000,00	99,99
2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.371.300,00	40.320.600,00	50.700,00	99,87
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.015.300,00	33.015.050,00	250,00	100,00
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	316.020.500,00	315.993.100,00	27.400,00	99,99
2.08.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.922.000,00	50.880.000,00	42.000,00	99,92
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.748.000,00	9.011.000,00	7.737.000,00	53,80
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	156.600.000,00	153.000.000,00	3.600.000,00	97,70
2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	120.110.000,00	120.109.900,00	100,00	100,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rp)	(%)
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
	Operasional atau Lapangan				
2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.540.000,00	17.540.000,00	0,00	100,00
2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	412.650.000,00	410.023.303,00	2.626.697,00	99,36
2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	40.787.900,00	40.271.900,00	516.000,00	98,73
2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	978.830.100,00	972.486.100,00	6.344.000,00	99,35
2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	144.533.800,00	136.418.200,00	8.115.600,00	94,38
2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	821.676.350,00	815.201.335,00	6.475.015,00	99,21
2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	308.186.400,00	304.858.400,00	3.328.000,00	98,92
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	31.540.000,00	31.540.000,00	0,00	100,00
2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	47.951.300,00	44.971.300,00	2.980.000,00	93,79
2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	175.556.300,00	174.859.300,00	697.000,00	99,60
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	89.057.000,00	85.567.000,00	3.490.000,00	96,08
2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	54.646.100,00	52.958.100,00	1.688.000,00	96,91
2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	13.053.100,00	13.053.100,00	0,00	100,00
2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	46.066.750,00	37.448.050,00	8.618.700,00	81,29
2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	95.520.500,00	94.080.500,00	1.440.000,00	98,49
2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3.780.000,00	0,00	3.780.000,00	0,00
2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	110.437.100,00	97.676.700,00	12.760.400,00	88,45
2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan	27.290.650,00	27.290.650,00	0,00	100,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rp)	(%)
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
2.08.07.2.01.0003	Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	69.960.000,00	69.869.000,00	91.000,00	99,87
2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	146.423.000,00	132.725.000,00	13.698.000,00	90,64
2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	189.996.000,00	133.122.450,00	56.873.550,00	70,07
2.08.07.2.03.0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	161.844.200,00	161.343.900,00	500.300,00	99,69
2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	96.124.000,00	94.820.800,00	1.303.200,00	98,64
2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.575.000,00	6.575.000,00	0,00	100,00
2.09.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.655.000,00	1.655.000,00	0,00	100,00
2.09.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.040.000,00	1.037.300,00	2.700,00	99,74
2.09.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	695.000,00	594.000,00	101.000,00	85,47
2.09.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	576.000,00	522.000,00	54.000,00	90,63
2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.584.000,00	4.747.000,00	4.837.000,00	49,53
2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.056.375.138,00	3.035.094.433,00	21.280.705,00	99,30
2.09.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	104.780.000,00	100.912.700,00	3.867.300,00	96,31
2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.764.000,00	2.764.000,00	0,00	100,00
2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	880.000,00	880.000,00	0,00	100,00
2.09.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00
2.09.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	826.000,00	594.000,00	232.000,00	71,91
2.09.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2.645.900,00	2.645.900,00	0,00	100,00
2.09.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	6.779.200,00	5.178.800,00	1.600.400,00	76,39
2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.425.000,00	7.415.000,00	10.000,00	99,87
2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.318.600,00	39.122.900,00	195.700,00	99,50
2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.821.600,00	6.279.600,00	5.542.000,00	53,12
2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.547.500,00	27.513.500,00	5.034.000,00	84,53
2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	90.400.000,00	90.194.344,00	205.656,00	



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rp)	(%)
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
	dan Konsultasi SKPD				99,77
2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	101.506.300,00	95.433.300,00	6.073.000,00	94,02
2.09.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	4.489.200,00	4.489.200,00	0,00	100,00
2.09.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.499.700,00	2.895.000,00	1.604.700,00	64,34
2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	95.904.700,00	86.904.700,00	9.000.000,00	90,62
2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.531.400,00	26.193.048,00	24.338.352,00	51,84
2.09.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.837.000,00	14.828.000,00	9.000,00	99,94
2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.999.350,00	20.742.907,00	9.256.443,00	69,14
2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.680.000,00	11.641.749,00	3.038.251,00	79,30
2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.270.000,00	10.270.000,00	0,00	100,00
2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	59.940.000,00	26.136.000,00	33.804.000,00	43,60
2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	18.078.200,00	17.531.750,00	546.450,00	96,98
2.09.03.2.01.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	52.827.200,00	52.653.800,00	173.400,00	99,67
2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	59.212.000,00	59.084.000,00	128.000,00	99,78
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	44.491.600,00	44.491.600,00	0,00	100,00
2.09.03.2.02.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	16.623.100,00	16.623.100,00	0,00	100,00
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	374.876.000,00	352.960.000,00	21.916.000,00	94,15
2.09.03.2.02.0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	26.809.000,00	7.413.600,00	19.395.400,00	27,65
2.09.03.2.02.0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	36.047.200,00	35.823.400,00	223.800,00	99,38
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	16.800.000,00	16.250.000,00	550.000,00	96,73
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	193.280.000,00	190.740.000,00	2.540.000,00	98,69
2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	115.963.100,00	114.273.100,00	1.690.000,00	98,54
2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	22.001.300,00	21.821.300,00	180.000,00	99,18
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	66.204.600,00	60.568.754,00	5.635.846,00	91,49
2.09.05.2.01.0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	42.133.700,00	41.683.700,00	450.000,00	98,93
2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk	3.960.000.000,00	2.395.448.060,00	1.564.551.940,00	60,49



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rp)	(%)
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
	Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	200.000.000,00	92.860.360,00	107.139.640,00	46,43
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.958.200,00	12.918.600,00	39.600,00	99,69
2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.999.900,00	10.986.000,00	13.900,00	99,87
2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.114.700,00	5.104.500,00	10.200,00	99,80
2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.905.950,00	9.865.500,00	40.450,00	99,59
2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.938.200,00	7.938.200,00	0,00	100,00
2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.999.900,00	9.999.800,00	100,00	100,00
2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.830.000,00	37.576.000,00	2.254.000,00	94,34
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.620.420.241,00	10.407.147.907,00	213.272.334,00	97,99
2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	156.999.800,00	156.980.000,00	19.800,00	99,99
2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.234.000,00	8.234.000,00	0,00	100,00
2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.000.000,00	9.917.500,00	82.500,00	99,18
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.637.400,00	27.570.300,00	67.100,00	99,76
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.736.000,00	20.000.000,00	26.736.000,00	42,79
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.250.000,00	25.250.000,00	-	100,00
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	309.545.733,00	307.871.277,00	1.674.456,00	99,46
2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.641.599,00	16.083.700,00	557.899,00	96,65
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	68.520.000,00	54.931.254,00	13.588.746,00	80,17
2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	96.057.200,00	82.930.000,00	13.127.200,00	86,33
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	242.921.500,00	235.568.500,00	7.353.000,00	96,97
2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	89.733.750,00	89.497.000,00	236.750,00	99,74
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	118.540.250,00	112.970.000,00	5.570.250,00	95,30
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.470.000,00	26.470.000,00	0,00	100,00
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	52.000.000,00	51.564.200,00	435.800,00	99,16
2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.002.000,00	12.002.000,00	0,00	100,00
2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	149.416.000,00	148.450.500,00	965.500,00	99,35
2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	464.091.000,00	446.241.800,00	17.849.200,00	96,15
2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana	162.038.584,00	116.974.978,00	45.063.606,00	



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rp)	(%)
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
	Tata Ruang				72,19
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	23.072.000,00	23.019.800,00	52.200,00	99,77
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	48.219.520,00	46.557.520,00	1.662.000,00	96,55
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	79.636.054,00	78.457.216,00	1.178.838,00	98,52
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	30.235.900,00	29.911.000,00	324.900,00	98,93
2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	34.191.500,00	33.817.200,00	374.300,00	98,91
2.11.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	20.455.000,00	20.427.500,00	27.500,00	99,87
2.11.03.2.03.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	31.078.500,00	30.956.900,00	121.600,00	99,61
2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	72.859.000,00	72.287.370,00	571.630,00	99,22
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	4.133.543.997,00	4.040.159.942,00	93.384.055,00	97,74
2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	181.703.752,00	181.140.150,00	563.602,00	99,69
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	853.088.000,00	851.430.833,00	1.657.167,00	99,81
2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	18.032.800,00	17.676.400,00	356.400,00	98,02
2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	61.100.200,00	58.399.400,00	2.700.800,00	95,58
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	13.438.000,00	12.488.000,00	950.000,00	92,93
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	10.919.800,00	10.899.000,00	20.800,00	99,81
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	19.433.530,00	0,00	19.433.530,00	0,00
2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	18.330.000,00	18.233.719,00	96.281,00	99,47
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	217.812.736,00	217.157.736,00	655.000,00	99,70
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui	5.736.100.636,00	5.686.763.780,00	49.336.856,00	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rp)	(%)
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
	pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				99,14
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.082.800,00	2.082.800,00	0,00	100,00
2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.158.800,00	2.158.800,00	0,00	100,00
2.12.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.111.600,00	1.111.600,00	0,00	100,00
2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.212.200,00	2.212.200,00	0,00	100,00
2.12.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.703.200,00	1.703.200,00	0,00	100,00
2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.273.800,00	2.273.800,00	0,00	100,00
2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.549.600,00	4.549.600,00	0,00	100,00
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.848.640.246,00	3.785.105.631,00	63.534.615,00	98,35
2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	159.706.250,00	159.706.000,00	250,00	100,00
2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	88.345.000,00	88.285.000,00	60.000,00	99,93
2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.078.200,00	3.078.200,00	0,00	100,00
2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.007.400,00	3.007.400,00	0,00	100,00
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95.416.000,00	93.059.000,00	2.357.000,00	97,53
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.408.000,00	17.406.500,00	1.500,00	99,99
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.706.000,00	16.705.900,00	100,00	100,00
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	279.268.334,00	279.268.334,00	0,00	100,00
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	77.132.124,00	77.131.374,00	750,00	100,00
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	281.100.000,00	280.700.000,00	400.000,00	99,86
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	90.523.950,00	90.519.081,00	4.869,00	99,99
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.350.000,00	31.350.000,00	0,00	100,00
2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000,00	25.000.000,00	125.000.000,00	16,67
2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	23.724.000,00	23.724.000,00	0,00	100,00
2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	7.545.300,00	7.545.300,00	0,00	100,00
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	36.745.800,00	36.745.800,00	0,00	100,00
2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	272.325.000,00	272.325.000,00	0,00	100,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rp) (%)	
		Anggaran	Realisasi	5	6
1	2	3	4	5	6
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	1.451.500,00	1.451.500,00	0,00	100,00
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	55.711.000,00	55.711.000,00	0,00	100,00
2.12.03.2.01.0003	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	12.016.600,00	12.016.600,00	0,00	100,00
2.12.03.2.02.0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	7.216.700,00	7.216.700,00	0,00	100,00
2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	2.694.100,00	2.693.200,00	900,00	99,97
2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	7.423.300,00	7.423.300,00	0,00	100,00
2.12.04.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4.408.200,00	4.408.200,00	0,00	100,00
2.12.04.2.03.0003	Fasilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	35.810.200,00	35.809.450,00	750,00	100,00
2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	7.752.300,00	7.752.300,00	0,00	100,00
2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.996.000,00	2.995.900,00	100,00	100,00
2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1.214.500,00	1.214.500,00	0,00	100,00
2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	14.015.800,00	14.015.800,00	0,00	100,00
2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	5.013.800,00	5.013.800,00	0,00	100,00
2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	4.017.100,00	4.016.900,00	200,00	100,00
2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	100,00
2.14.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.168.000,00	4.168.000,00	0,00	100,00
2.14.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.294.000,00	3.294.000,00	0,00	100,00
2.14.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.226.000,00	3.226.000,00	0,00	100,00
2.14.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.138.000,00	3.138.000,00	0,00	100,00
2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.668.600,00	3.668.600,00	0,00	100,00
2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.552.600,00	4.552.600,00	0,00	100,00
2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.109.475.397,00	3.061.233.952,00	48.241.445,00	98,45
2.14.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	204.322.000,00	202.862.000,00	1.460.000,00	99,29
2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.046.000,00	6.046.000,00	0,00	100,00
2.14.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan	5.386.300,00	5.386.300,00	0,00	



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rp)	(%)
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				100,00
2.14.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.642.700,00	4.642.700,00	0,00	100,00
2.14.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.194.000,00	4.172.000,00	22.000,00	99,48
2.14.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.356.000,00	4.356.000,00	0,00	100,00
2.14.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7.662.400,00	4.400.400,00	3.262.000,00	57,43
2.14.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8.640.000,00	8.010.000,00	630.000,00	92,71
2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.084.200,00	7.039.200,00	45.000,00	99,36
2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	402.817.600,00	401.672.500,00	1.145.100,00	99,72
2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.900.000,00	24.809.000,00	91.000,00	99,63
2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	41.766.900,00	41.705.900,00	61.000,00	99,85
2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	321.600.000,00	318.410.912,00	3.189.088,00	99,01
2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	77.659.200,00	72.699.397,00	4.959.803,00	93,61
2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	493.790.396,00	447.758.439,00	46.031.957,00	90,68
2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	123.920.000,00	123.137.026,00	782.974,00	99,37
2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.860.000,00	28.718.000,00	142.000,00	99,51
2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	149.850.000,00	149.500.000,00	350.000,00	99,77
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	41.400.000,00	16.800.000,00	24.600.000,00	40,58
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	30.000.000,00	19.856.686,00	10.143.314,00	66,19
2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	80.000.000,00	79.076.000,00	924.000,00	98,85
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	148.000.000,00	127.880.830,00	20.119.170,00	86,41
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	75.200.000,00	35.080.000,00	40.120.000,00	46,65
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150.000.000,00	139.750.000,00	10.250.000,00	93,17
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	250.000.000,00	104.290.000,00	145.710.000,00	41,72
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	123.000.000,00	82.000.000,00	41.000.000,00	66,67
2.14.03.2.02.0006	Fasilitas Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pembangunan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rp)	(%)
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	535.882.000,00	405.477.000,00	130.405.000,00	75,67
2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.544.692.000,00	1.498.837.000,00	45.855.000,00	97,03
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	15.300.000,00	0,00	15.300.000,00	0,00
2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	0,00
2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB	252.000.000,00	122.620.000,00	129.380.000,00	48,66
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	26.734.000,00	0,00	26.734.000,00	0,00
2.14.04.2.01.0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	48.000.000,00	23.420.000,00	24.580.000,00	48,79
2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	756.000.000,00	756.000.000,00	0,00	100,00
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.598.000,00	198.000,00	8.400.000,00	2,30
2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	198.000,00	198.000,00	0,00	100,00
2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	198.000,00	198.000,00	0,00	100,00
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	198.000,00	198.000,00	0,00	100,00
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.676.838.829,00	3.493.231.010,00	183.607.819,00	95,01
2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	186.670.000,00	168.830.000,00	17.840.000,00	90,44
2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	198.000,00	198.000,00	0,00	100,00
2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.890.800,00	2.890.800,00	0,00	100,00
2.15.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	198.000,00	0,00	198.000,00	100,00
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.760.000,00	3.725.000,00	35.000,00	99,07
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.264.520,00	9.371.000,00	1.893.520,00	83,19
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	113.996.000,00	86.966.000,00	27.030.000,00	76,29
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	93.403.255,00	81.354.700,00	12.048.555,00	87,10
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	224.821.464,00	207.046.255,00	17.775.209,00	92,09
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	116.980.000,00	113.230.000,00	3.750.000,00	



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rp)	(%)
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
					96,79
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.627.200,00	27.591.270,00	34.035.930,00	44,77
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	44.220.000,00	40.470.000,00	3.750.000,00	91,52
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	270.760.000,00	194.289.099,00	76.470.901,00	71,76
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00
2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	153.660.000,00	153.217.378,00	442.622,00	99,71
2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	949.820.000,00	949.807.000,00	13.000,00	100,00
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	5.768.090.000,00	5.699.544.370,00	68.545.630,00	98,81
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	4.946.509.122,00	4.843.273.797,00	103.235.325,00	97,91
2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	151.661.000,00	148.216.159,00	3.444.841,00	97,73
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	348.548.500,00	341.248.500,00	7.300.000,00	97,91
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	66.228.000,00	66.028.000,00	200.000,00	99,70
2.15.02.2.05.0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	14.131.000,00	10.985.000,00	3.146.000,00	77,74
2.15.02.2.05.0006	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	116.820.000,00	116.820.000,00	0,00	100,00
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	641.000.000,00	559.203.829,00	81.796.171,00	87,24
2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	15.960.000,00	13.192.000,00	2.768.000,00	82,66
2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	49.710.000,00	39.930.000,00	9.780.000,00	80,33
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.209.800,00	21.181.800,00	28.000,00	99,87
2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.485.000,00	4.485.000,00	0,00	100,00
2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.110.250,00	4.110.250,00	0,00	100,00
2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.099.000,00	4.099.000,00	0,00	100,00
2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.013.000,00	4.013.000,00	0,00	100,00
2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	54.076.000,00	53.883.000,00	193.000,00	99,64
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.352.333.956,00	4.263.685.800,00	88.648.156,00	97,96
2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	178.979.000,00	176.569.350,00	2.409.650,00	98,65
2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	4.770.250,00	4.770.250,00	0,00	100,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rp)	(%)
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
	SKPD				
2.16.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.054.250,00	3.054.250,00	0,00	100,00
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.505.000,00	8.505.000,00	0,00	100,00
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.122.000,00	69.779.000,00	343.000,00	99,51
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	53.257.900,00	53.248.800,00	9.100,00	99,98
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.435.000,00	100.434.900,00	100,00	100,00
2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	239.000.000,00	239.000.000,00	0,00	100,00
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	458.270.000,00	457.943.005,00	326.995,00	99,93
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	157.200.000,00	146.250.000,00	10.950.000,00	93,03
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.080.415.124,00	2.071.978.541,00	8.436.583,00	99,59
2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.720.000,00	10.720.000,00	0,00	100,00
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.684.000,00	18.678.500,00	5.500,00	99,97
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	131.215.000,00	131.005.000,00	210.000,00	99,84
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	34.225.000,00	34.220.500,00	4.500,00	99,99
2.16.02.2.01.0003	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	6.336.000,00	6.316.000,00	20.000,00	99,68
2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	7.446.000,00	7.426.000,00	20.000,00	99,73
2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	242.506.000,00	242.216.000,00	290.000,00	99,88
2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media	1.162.133.200,00	1.137.113.200,00	25.020.000,00	97,85
2.16.02.2.01.0011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	20.031.000,00	8.671.000,00	11.360.000,00	43,29
2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	29.509.000,00	7.749.000,00	21.760.000,00	26,26
2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	7.457.000,00	7.417.000,00	40.000,00	99,46
2.16.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	42.444.000,00	41.954.000,00	490.000,00	98,85
2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	513.007.000,00	444.399.599,00	68.607.401,00	86,63
2.16.03.2.02.0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	48.007.000,00	47.718.800,00	288.200,00	99,40
2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	149.512.000,00	149.496.200,00	15.800,00	99,99
2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	20.537.000,00	18.519.000,00	2.018.000,00	90,17
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.154.000,00	0,00	18.154.000,00	0,00
2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	23.268.000,00	11.996.000,00	11.272.000,00	51,56
2.17.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	58.717.000,00	49.550.890,00	9.166.110,00	84,39



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rp)	(%)
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.576.000,00	9.664.000,00	10.912.000,00	46,97
2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.300.000,00	25.705.000,00	1.595.000,00	94,16
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.895.988.683,00	4.662.014.695,00	233.973.988,00	95,22
2.17.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	164.880.000,00	159.720.000,00	5.160.000,00	96,87
2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.930.000,00	8.930.000,00	0,00	100,00
2.17.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.189.000,00	5.189.000,00	0,00	100,00
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.735.000,00	14.250.000,00	(2.515.000,00)	121,43
2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	351.839.900,00	281.075.500,00	70.764.400,00	79,89
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	363.374.100,00	232.539.000,00	130.835.100,00	63,99
2.17.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	66.939.500,00	62.685.000,00	4.254.500,00	93,64
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	723.000.000,00	716.551.500,00	6.448.500,00	99,11
2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	110.421.250,00	84.790.000,00	25.631.250,00	76,79
2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	54.000.000,00	50.250.000,00	3.750.000,00	93,06
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.686.360,00	60.247.491,00	4.438.869,00	93,14
2.17.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.460.000,00	34.430.000,00	2.030.000,00	94,43
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	217.950.000,00	225.420.000,00	(7.470.000,00)	103,43
2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	118.467.500,00	101.411.701,00	17.055.799,00	85,60
2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.150.000,00	33.020.000,00	2.130.000,00	93,94
2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	18.688.000,00	17.608.000,00	1.080.000,00	94,22
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	88.582.200,00	88.582.200,00	0,00	100,00
2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	50.214.000,00	49.674.000,00	540.000,00	98,92
2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	31.600.000,00	26.600.000,00	5.000.000,00	84,18
2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	614.221.800,00	579.312.800,00	34.909.000,00	94,32
2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	100,00
2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	24.975.000,00	23.975.000,00	1.000.000,00	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rp)	(%)
		Anggaran	Realisasi	5	6
1	2	3	4	5	6
	Kantor dan Bangunan Lainnya				96,00
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.609.000,00	1.830.000,00	3.779.000,00	32,63
2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.521.000,00	27.353.000,00	2.168.000,00	92,66
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.064.000,00	20.072.000,00	23.992.000,00	45,55
2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.066.000,00	15.000.000,00	3.066.000,00	83,03
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.458.000,00	20.231.933,00	5.226.067,00	79,47
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	94.368.000,00	71.688.000,00	22.680.000,00	75,97
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.802.100,00	16.802.100,00	0,00	100,00
2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.161.000,00	9.161.000,00	0,00	100,00
2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.502.500,00	9.502.500,00	0,00	100,00
2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.121.700,00	4.121.700,00	0,00	100,00
2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.857.200,00	3.857.200,00	0,00	100,00
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.464.000,00	24.951.650,00	5.512.350,00	81,91
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.975.700,00	28.671.129,00	304.571,00	98,95
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.909.138.199,00	2.883.379.879,00	25.758.320,00	99,11
2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	108.947.500,00	90.315.000,00	18.632.500,00	82,90
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.530.700,00	8.437.700,00	93.000,00	98,91
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.856.200,00	5.856.178,00	22,00	100,00
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.164.000,00	2.164.000,00	0,00	100,00
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.715.000,00	48.746.600,00	12.968.400,00	78,99
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39.647.300,00	28.534.606,00	11.112.694,00	71,97
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	330.232.000,00	310.926.809,00	19.305.191,00	94,15
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	158.863.800,00	158.087.600,00	776.200,00	99,51
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	377.171.750,00	149.532.765,00	227.638.985,00	39,65
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.000.000,00	32.895.049,00	6.104.951,00	84,35
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.300.000,00	13.460.000,00	6.840.000,00	66,31
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	57.481.100,00	57.201.180,00	279.920,00	99,51
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	1.268.705.400,00	1.073.221.828,00	195.483.572,00	84,59
2.18.04.2.01.0007	Terintegrasi secara Elektronik Penyediaan dan pengelolaan	19.677.100,00	19.316.800,00	360.300,00	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rp)	(%)
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
	Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko				98,17
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	14.206.000,00	14.005.000,00	201.000,00	98,59
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	133.924.000,00	129.409.590,00	4.514.410,00	96,63
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	74.491.500,00	72.088.160,00	2.403.340,00	96,77
2.19.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	28.880.000,00	28.849.400,00	30.600,00	99,89
2.19.02.2.01.0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	189.898.000,00	187.018.000,00	2.880.000,00	98,48
2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	130.100.000,00	128.071.880,00	2.028.120,00	98,44
2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	37.571.600,00	36.860.000,00	711.600,00	98,11
2.19.03.2.03.0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	474.370.200,00	451.616.498,00	22.753.702,00	95,20
2.19.03.2.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	1.825.000.000,00	1.825.000.000,00	0,00	100,00
2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00
2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	89.962.000,00	89.013.000,00	949.000,00	98,95
2.20.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	15.777.000,00	8.355.000,00	7.422.000,00	52,96
2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	33.493.000,00	32.478.000,00	1.015.000,00	96,97
2.20.02.2.01.0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	83.490.300,00	74.869.000,00	8.621.300,00	89,67
2.20.02.2.01.0005	Pengembangan Infrastruktur	93.404.000,00	87.090.500,00	6.313.500,00	93,24
2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	64.753.000,00	64.696.000,00	57.000,00	99,91
2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	30.561.000,00	30.483.000,00	78.000,00	99,74
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	7.144.000,00	7.121.000,00	23.000,00	99,68
2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.501.000,00	6.493.000,00	8.000,00	99,88
2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	95.148.000,00	94.292.000,00	856.000,00	99,10
2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	7.517.000,00	7.517.000,00	0,00	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rp)	(%)
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
	Perangkat Daerah				100,00
2.22.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	19.580.200,00	19.580.200,00	0,00	100,00
2.22.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.269.000,00	13.089.000,00	180.000,00	98,64
2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.869.691.542,00	3.804.395.997,00	65.295.545,00	98,31
2.22.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	163.900.000,00	141.950.000,00	21.950.000,00	86,61
2.22.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.910.000,00	14.900.000,00	10.000,00	99,93
2.22.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	16.286.000,00	16.286.000,00	0,00	100,00
2.22.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	9.514.000,00	9.316.000,00	198.000,00	97,92
2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	111.359.995,00	111.254.700,00	105.295,00	99,91
2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	70.926.600,00	70.926.500,00	100,00	100,00
2.22.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.200.000,00	17.160.000,00	40.000,00	99,77
2.22.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	38.918.000,00	38.906.000,00	12.000,00	99,97
2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.000.000,00	349.681.626,00	318.374,00	99,91
2.22.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	137.250.000,00	137.250.000,00	0,00	100,00
2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.973.626,00	53.046.056,00	927.570,00	98,28
2.22.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.849.700,00	43.304.148,00	7.545.552,00	85,16
2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.480.000,00	45.228.000,00	252.000,00	99,45
2.22.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.485.400,00	33.366.600,00	118.800,00	99,65
2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70.750.000,00	70.350.000,00	400.000,00	99,43
2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	94.436.300,00	91.116.860,00	3.319.440,00	96,48
2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	218.317.400,00	217.930.571,00	386.829,00	99,82
2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	312.978.000,00	302.810.620,00	10.167.380,00	96,75
2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	119.877.600,00	115.279.860,00	4.597.740,00	96,16
2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	19.744.000,00	19.744.000,00	0,00	100,00
2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.745.700,00	2.745.700,00	0,00	100,00
2.23.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.367.500,00	1.497.500,00	870.000,00	63,25
2.23.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.035.300,00	1.952.800,00	82.500,00	95,95
2.23.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.721.300,00	1.851.300,00	870.000,00	68,03
2.23.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.095.100,00	2.012.600,00	82.500,00	96,06
2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.633.800,00	40.613.760,00	20.040,00	99,95



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rp)	(%)
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.155.800.482,00	4.012.849.796,00	142.950.686,00	96,56
2.23.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	134.274.400,00	134.241.400,00	33.000,00	99,98
2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.476.400,00	573.400,00	903.000,00	38,84
2.23.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.365.800,00	4.332.800,00	33.000,00	99,24
2.23.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30.000.000,00	29.814.600,00	185.400,00	99,38
2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.988.200,00	11.449.200,00	539.000,00	95,50
2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	175.728.000,00	172.381.700,00	3.346.300,00	98,10
2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.731.700,00	5.500.000,00	3.231.700,00	62,99
2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
2.23.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	11.580.600,00	11.273.400,00	307.200,00	97,35
2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	447.871.200,00	447.488.004,00	383.196,00	99,91
2.23.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10.669.900,00	9.630.000,00	1.039.900,00	90,25
2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00
2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	122.651.622,00	121.086.798,00	1.564.824,00	98,72
2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	159.750.000,00	159.750.000,00	0,00	100,00
2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	85.490.250,00	80.899.900,00	4.590.350,00	94,63
2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.167.500,00	51.770.395,00	3.397.105,00	93,84
2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	62.320.000,00	59.630.000,00	2.690.000,00	95,68
2.23.02.2.01.0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	521.287.200,00	513.941.200,00	7.346.000,00	98,59
2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.212.500,00	6.212.000,00	1.000.500,00	86,13
2.23.02.2.01.0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	19.540.800,00	17.940.000,00	1.600.800,00	91,81
2.23.02.2.01.0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	6.228.000,00	5.400.000,00	828.000,00	86,71
2.23.02.2.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.037.550,00	14.150.000,00	1.887.550,00	88,23
2.23.02.2.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	24.911.800,00	24.445.000,00	466.800,00	98,13
2.23.02.2.01.0008	Pengembangan Bahan Pustaka	100.110.000,00	99.551.000,00	559.000,00	99,44



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rp)	(%)
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	6.582.800,00	6.516.800,00	66.000,00	99,00
2.23.02.2.01.0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18.455.200,00	18.055.200,00	400.000,00	97,83
2.23.02.2.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	7.507.600,00	6.657.600,00	850.000,00	88,68
2.23.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	61.586.200,00	60.840.000,00	746.200,00	98,79
2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	16.755.300,00	16.200.000,00	555.300,00	96,69
2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	25.017.200,00	24.792.200,00	225.000,00	99,10
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	57.162.000,00	56.970.000,00	192.000,00	99,66
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	80.282.150,00	75.492.300,00	4.789.850,00	94,03
2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	109.113.900,00	106.813.058,00	2.300.842,00	97,89
2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	233.717.650,00	232.753.244,00	964.406,00	99,59
2.24.03.2.01.0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	11.332.700,00	10.984.000,00	348.700,00	96,92
3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.159.200,00	7.159.200,00	0,00	100,00
3.25.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.086.000,00	5.086.000,00	0,00	100,00
3.25.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.851.900,00	5.851.900,00	0,00	100,00
3.25.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.419.750,00	5.797.750,00	622.000,00	90,31
3.25.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.353.700,00	5.353.700,00	0,00	100,00
3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.730.700,00	7.730.700,00	0,00	100,00
3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.940.400,00	6.940.400,00	0,00	100,00
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.922.884.281,00	2.883.519.158,00	39.365.123,00	98,65
3.25.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	154.933.850,00	154.446.800,00	487.050,00	99,69
3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.221.600,00	6.221.600,00	0,00	100,00
3.25.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	27.184.000,00	27.184.000,00	0,00	100,00
3.25.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	11.823.850,00	11.323.850,00	500.000,00	95,77
3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.046.100,00	46.087.500,00	2.958.600,00	93,97
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.600.000,00	8.600.000,00	-	100,00
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	276.999.994,00	276.676.991,00	323.003,00	99,88
3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.790.000,00	48.710.000,00	2.080.000,00	95,90
3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.362.400,00	14.062.600,00	8.299.800,00	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rp)	(%)
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
					62,89
3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62.096.490,00	54.902.950,00	7.193.540,00	88,42
3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	110.210.000,00	110.169.527,00	40.473,00	99,96
3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.120.000,00	21.255.000,00	865.000,00	96,09
3.25.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	545.814.000,00	545.131.003,00	682.997,00	99,87
3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	82.226.900,00	82.006.968,00	219.932,00	99,73
3.25.03.2.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	548.875.500,00	530.577.225,00	18.298.275,00	96,67
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	14.999.800,00	8.219.800,00	6.780.000,00	54,80
3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00
3.25.03.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	12.999.000,00	11.099.000,00	1.900.000,00	85,38
3.25.03.2.04.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	15.000.000,00	12.900.000,00	2.100.000,00	86,00
3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	88.000.000,00	88.000.000,00	0,00	100,00
3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00
3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00
3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12.000.000,00	10.740.000,00	1.260.000,00	89,50
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	75.126.712,00	72.988.001,00	2.138.711,00	97,15
3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	36.500.150,00	36.284.338,00	215.812,00	99,41
3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12.003.900,00	7.463.900,00	4.540.000,00	62,18
3.25.04.2.04.0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00
3.25.06.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	127.204.000,00	125.944.600,00	1.259.400,00	99,01
3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	35.530.000,00	35.410.000,00	120.000,00	99,66
3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	72.315.400,00	59.737.900,00	12.577.500,00	82,61
3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku	34.500.000,00	33.778.450,00	721.550,00	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rp)	(%)
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
	Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				97,91
3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	39.250.000,00	35.288.000,00	3.962.000,00	89,91
3.26.02.2.02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	64.362.000,00	53.395.100,00	10.966.900,00	82,96
3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	556.826.000,00	536.407.343,00	20.418.657,00	96,33
3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	517.550.555,00	499.374.529,00	18.176.026,00	96,49
3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	106.830.500,00	93.223.229,00	13.607.271,00	87,26
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	1.064.816.464,00	1.048.723.254,00	16.093.210,00	98,49
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	307.357.500,00	303.094.300,00	4.263.200,00	98,61
3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	169.540.000,00	166.231.840,00	3.308.160,00	98,05
3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	108.400.000,00	108.400.000,00	0,00	100,00
3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	84.147.600,00	81.524.800,00	2.622.800,00	96,88
3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	122.973.479,00	122.908.029,00	65.450,00	99,95
3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41.438.500,00	39.915.660,00	1.522.840,00	96,33
3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.899.800,00	4.899.800,00	0,00	100,00
3.27.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.320.000,00	3.320.000,00	0,00	100,00
3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.019.000,00	2.019.000,00	0,00	100,00
3.27.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.174.000,00	1.174.000,00	0,00	100,00
3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.626.100,00	7.361.000,00	265.100,00	96,52
3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.632.000,00	68.070.000,00	562.000,00	99,18
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.919.436.990,00	12.647.431.405,00	272.005.585,00	97,89
3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	263.547.200,00	262.946.949,00	600.251,00	99,77
3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.569.000,00	1.569.000,00	0,00	100,00
3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	898.000,00	898.000,00	0,00	100,00
3.27.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.627.100,00	1.627.100,00	0,00	100,00
3.27.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.434.000,00	10.434.000,00	0,00	100,00
3.27.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	38.187.000,00	38.142.000,00	45.000,00	99,88
3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi	50.696.000,00	50.556.900,00	139.100,00	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rp)	(%)
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				99,73
3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	222.480.000,00	221.474.901,00	1.005.099,00	99,55
3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.916.600,00	54.319.127,00	597.473,00	98,91
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	82.585.454,00	82.470.100,00	115.354,00	99,86
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.000.000,00	299.436.204,00	563.796,00	99,81
3.27.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.720.000,00	2.720.000,00	0,00	100,00
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.000.000,00	88.510.895,00	11.489.105,00	88,51
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	443.400.000,00	389.350.000,00	54.050.000,00	87,81
3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.000.000,00	68.420.787,00	11.579.213,00	85,53
3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.570.000,00	6.570.000,00	0,00	100,00
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2.800.103.000,00	2.672.778.644,00	127.324.356,00	95,45
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	112.120.000,00	82.816.850,00	29.303.150,00	73,86
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	22.506.950,00	22.506.950,00	0,00	100,00
3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	20.289.850,00	15.969.850,00	4.320.000,00	78,71
3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	12.590.100,00	12.590.100,00	0,00	100,00
3.27.02.2.05.0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	39.741.300,00	39.494.600,00	246.700,00	99,38
3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	604.999.500,00	560.617.867,00	44.381.633,00	92,66
3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	3.683.936.000,00	2.229.315.492,00	1.454.620.508,00	60,51
3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	17.755.450,00	17.755.450,00	0,00	100,00
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	113.764.214,00	113.352.544,00	411.670,00	99,64
3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	40.010.230,00	39.080.230,00	930.000,00	97,68
3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	112.078.700,00	103.103.520,00	8.975.180,00	91,99
3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	32.263.800,00	20.233.500,00	12.030.300,00	62,71
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	2.880.000,00	-	2.880.000,00	0,00
3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	24.639.900,00	22.752.900,00	1.887.000,00	92,34
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	86.981.500,00	84.981.500,00	2.000.000,00	97,70
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas	298.232.516,00	282.117.930,00	16.114.586,00	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rp)	(%)
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
	Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa				94,60
3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	98.254.700,00	62.723.516,00	35.531.184,00	63,84
3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	0,00
3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	49.150.000,00	(49.150.000,00)	0,00
3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	209.252.500,00	149.522.500,00	59.730.000,00	71,46
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	155.004.000,00	110.813.000,00	44.191.000,00	71,49
3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.589.500,00	11.160.000,00	14.429.500,00	43,61
3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.049.600,00	25.995.500,00	4.054.100,00	86,51
3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.630.000,00	16.367.000,00	4.263.000,00	79,34
3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36.180.000,00	30.000.000,00	6.180.000,00	82,92
3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.056.800,00	9.371.797,00	10.685.003,00	46,73
3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	333.000.000,00	246.600.000,00	86.400.000,00	74,05
3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	954.560.000,00	933.345.372,00	21.214.628,00	97,78
3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	44.076.000,00	44.076.000,00	0,00	100,00
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	1.837.346.391,00	(1.837.346.391,00)	0,00
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0,00	11.326.100,00	(11.326.100,00)	0,00
4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0,00	2.392.400,00	(2.392.400,00)	0,00
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	20.343.500,00	(20.343.500,00)	0,00
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0,00	19.890.700,00	(19.890.700,00)	0,00
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	12.372.400,00	(12.372.400,00)	0,00
4.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	0,00	159.486.650,00	(159.486.650,00)	0,00
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	25.288.400,00	(25.288.400,00)	0,00
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	222.575.141,00	(222.575.141,00)	0,00
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	45.070.000,00	(45.070.000,00)	0,00
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	50.275.000,00	(50.275.000,00)	0,00
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	78.393.673,00	(78.393.673,00)	0,00
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	25.865.000,00	(25.865.000,00)	0,00
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	28.055.500,00	(28.055.500,00)	0,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rp)	(%)
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	453.000,00	(453.000,00)	0,00
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0,00	13.500.000,00	(13.500.000,00)	0,00
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0,00	54.999.900,00	(54.999.900,00)	0,00
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	0,00	103.485.000,00	(103.485.000,00)	0,00
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	0,00	24.500.000,00	(24.500.000,00)	0,00
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	0,00	11.500.000,00	(11.500.000,00)	0,00
4.01.01.2.14.0001	Fasilitas Keprotokolan	0,00	206.423.775,00	(206.423.775,00)	0,00
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	0,00	29.200.000,00	(29.200.000,00)	0,00
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	0,00	16.200.000,00	(16.200.000,00)	0,00
4.01.02.2.01.0003	Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	0,00	49.999.350,00	(49.999.350,00)	0,00
4.01.02.2.02.0001	Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	0,00	774.826.287,00	(774.826.287,00)	0,00
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	0,00	19.100.000,00	(19.100.000,00)	0,00
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	0,00	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00
4.01.02.2.03.0001	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	0,00	82.399.300,00	(82.399.300,00)	0,00
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	0,00	39.900.000,00	(39.900.000,00)	0,00
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	0,00	34.190.338,00	(34.190.338,00)	0,00
4.01.03.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	0,00	5.940.000,00	(5.940.000,00)	0,00
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	0,00	24.380.300,00	(24.380.300,00)	0,00
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	0,00	23.592.000,00	(23.592.000,00)	0,00
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	3.188.700,00	(3.188.700,00)	0,00
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	0,00	129.452.350,00	(129.452.350,00)	0,00
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	55.581.175,00	(55.581.175,00)	0,00
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	0,00	4.324.000,00	(4.324.000,00)	0,00
4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	0,00	2.160.000,00	(2.160.000,00)	0,00
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.240.105.151,00	14.151.277.561,00	2.088.827.590,00	87,14
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	663.939.250,00	614.435.000,00	49.504.250,00	92,54
4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	23.334.400,00	20.910.200,00	2.424.200,00	89,61
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	98.886.600,00	78.542.800,00	20.343.800,00	79,43
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	129.698.310,00	109.770.400,00	19.927.910,00	84,64
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	114.391.800,00	102.001.500,00	12.390.300,00	89,17



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rp)	(%)
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.191.987.050,00	1.030.162.590,00	161.824.460,00	86,42
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	512.595.010,00	510.985.892,00	1.609.118,00	99,69
4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.618.117.250,00	2.576.590.000,00	41.527.250,00	98,41
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	389.380.000,00	380.780.000,00	8.600.000,00	97,79
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	372.855.100,00	343.961.700,00	28.893.400,00	92,25
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.354.271.651,00	1.102.895.604,00	251.376.047,00	81,44
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.644.878.180,00	1.472.048.200,00	172.829.980,00	89,49
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	532.970.000,00	464.842.771,00	68.127.229,00	87,22
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	842.110.000,00	752.557.013,00	89.552.987,00	89,37
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	278.510.000,00	246.069.292,00	32.440.708,00	88,35
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	365.294.000,00	337.236.622,00	28.057.378,00	92,32
4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.920.000,00	25.031.200,00	888.800,00	96,57
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	335.938.362,00	51.450.000,00	284.488.362,00	15,32
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	81.000.000,00	67.500.000,00	13.500.000,00	83,33
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	170.000.000,00	110.816.403,00	59.183.597,00	65,19
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	219.999.600,00	164.999.700,00	54.999.900,00	75,00
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	960.008.000,00	761.749.650,00	198.258.350,00	79,35
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	162.502.900,00	128.793.960,00	33.708.940,00	79,26
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	2.286.060.000,00	2.079.440.059,00	206.619.941,00	90,96
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	833.582.500,00	777.620.456,00	55.962.044,00	93,29
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	436.130.500,00	354.729.000,00	81.401.500,00	81,34
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	403.179.100,00	339.193.500,00	63.985.600,00	84,13
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	113.262.300,00	112.395.300,00	867.000,00	99,23
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	63.065.650,00	62.277.250,00	788.400,00	98,75
4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	62.904.000,00	62.593.310,00	310.690,00	99,51
4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	425.714.350,00	425.023.350,00	691.000,00	99,84
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	108.726.300,00	108.673.236,00	53.064,00	99,95
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	284.394.700,00	248.408.788,00	35.985.912,00	87,35



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rp)	(%)
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	129.171.942,00	124.599.942,00	4.572.000,00	96,46
4.01.03.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	63.722.400,00	57.782.400,00	5.940.000,00	90,68
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	79.276.795,00	73.529.700,00	5.747.095,00	92,75
4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	90.074.763,00	80.978.127,00	9.096.636,00	89,90
4.01.02.2.02.0001	Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10.646.477.800,00	9.470.061.368,00	1.176.416.432,00	88,95
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	237.258.800,00	214.005.700,00	23.253.100,00	90,20
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	880.373.800,00	758.962.800,00	121.411.000,00	86,21
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	705.235.000,00	622.220.670,00	83.014.330,00	88,23
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	264.532.000,00	263.795.940,00	736.060,00	99,72
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	341.816.000,00	298.378.499,00	43.437.501,00	87,29
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.648.000,00	1.648.000,00	0,00	100,00
4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.714.000,00	2.714.000,00	0,00	100,00
4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.714.000,00	2.714.000,00	0,00	100,00
4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.714.000,00	2.714.000,00	0,00	100,00
4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.714.000,00	2.714.000,00	0,00	100,00
4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.843.000,00	1.843.000,00	0,00	100,00
4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.790.000,00	2.790.000,00	0,00	100,00
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	72.431.250,00	71.627.000,00	804.250,00	98,89
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1.235.788.900,00	1.208.200.830,00	27.588.070,00	97,77
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	144.226.040,00	116.423.100,00	27.802.940,00	80,72
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	632.129.560,00	508.015.679,00	124.113.881,00	80,37
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	558.515.300,00	528.462.385,00	30.052.915,00	94,62
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	581.731.900,00	503.129.040,00	78.602.860,00	86,49
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	395.415.800,00	391.217.800,00	4.198.000,00	98,94
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	365.469.900,00	232.928.950,00	132.540.950,00	63,73
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	735.710.300,00	591.662.682,00	144.047.618,00	80,42
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.604.400,00	1.585.400,00	19.000,00	98,82
4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.444.400,00	2.436.400,00	8.000,00	99,67
4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.945.500,00	1.945.500,00	0,00	100,00
4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.529.000,00	2.529.000,00	0,00	100,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rp)	(%)
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.123.000,00	2.115.000,00	8.000,00	99,62
4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.968.000,00	1.960.000,00	8.000,00	99,59
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.134.348.733,00	12.977.171.370,00	157.177.363,00	98,80
4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	213.817.500,00	194.717.500,00	19.100.000,00	91,07
4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.973.900,00	3.973.900,00	0,00	100,00
4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.665.000,00	1.665.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	485.171.700,00	478.250.862,00	6.920.838,00	98,57
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.925.000,00	18.925.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.635.000,00	35.635.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	620.000.000,00	617.208.979,00	2.791.021,00	99,55
4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	204.720.000,00	199.939.250,00	4.780.750,00	97,66
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	187.456.500,00	166.491.500,00	20.965.000,00	88,82
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	387.022.200,00	368.919.447,00	18.102.753,00	95,32
4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	112.700.000,00	107.825.000,00	4.875.000,00	95,67
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	933.452.000,00	891.552.900,00	41.899.100,00	95,51
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	248.580.000,00	237.309.322,00	11.270.678,00	95,47
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	834.565.000,00	814.058.800,00	20.506.200,00	97,54
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	76.232.100,00	66.427.100,00	9.805.000,00	87,14
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.105.910.000,00	1.097.989.700,00	7.920.300,00	99,28
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	75.000.000,00	69.000.000,00	6.000.000,00	92,00
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	924.220.000,00	840.831.500,00	83.388.500,00	90,98
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	460.905.000,00	410.946.725,00	49.958.275,00	89,16
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	420.800.000,00	414.431.638,00	6.368.362,00	98,49
4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	5.800.000,00	5.785.000,00	15.000,00	99,74
4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	42.650.000,00	24.650.000,00	18.000.000,00	57,80
4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	100,00
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	135.150.000,00	128.135.000,00	7.015.000,00	94,81
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	135.150.000,00	130.512.858,00	4.637.142,00	96,57
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	260.150.000,00	244.979.156,00	15.170.844,00	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rp)	(%)
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
					94,17
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	310.150.000,00	306.149.580,00	4.000.420,00	98,71
4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	9.270.000,00	8.190.000,00	1.080.000,00	88,35
4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	8.910.000,00	-	8.910.000,00	0,00
4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	6.210.000,00	5.670.000,00	540.000,00	91,30
4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	6.210.000,00	2.550.000,00	3.660.000,00	41,06
4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	6.210.000,00	0,00	6.210.000,00	0,00
4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	33.660.000,00	32.460.000,00	1.200.000,00	96,43
4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD	589.371.900,00	583.871.969,00	5.499.931,00	99,07
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	1.140.000.000,00	1.129.087.898,00	10.912.102,00	99,04
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	229.200.000,00	157.192.500,00	72.007.500,00	68,58
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	480.800.000,00	480.100.000,00	700.000,00	99,85
4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	100,00
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	1.857.361.000,00	1.835.243.000,00	22.118.000,00	98,81
4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	11.774.500,00	11.764.500,00	10.000,00	99,92
4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	112.300.000,00	101.746.000,00	10.554.000,00	90,60
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	5.956.893.754,00	5.956.842.386,00	51.368,00	100,00
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.714.000,00	4.714.000,00	0,00	100,00
5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.050.500,00	4.050.500,00	0,00	100,00
5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.405.000,00	5.275.200,00	129.800,00	97,60
5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.482.000,00	2.827.200,00	654.800,00	81,19
5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	8.265.000,00	8.258.400,00	6.600,00	99,92
5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.856.000,00	7.856.000,00	0,00	100,00
5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	189.627.320,00	126.356.200,00	63.271.120,00	66,63
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.579.990.495,00	4.529.983.508,00	50.006.987,00	98,91
5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	122.370.000,00	100.170.000,00	22.200.000,00	81,86
5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.140.000,00	13.140.000,00	0,00	100,00
5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	49.310.550,00	47.081.500,00	2.229.050,00	95,48
5.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.819.400,00	8.450.000,00	2.369.400,00	78,10
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.285.000,00	9.253.000,00	32.000,00	99,66
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	399.533.000,00	386.768.050,00	12.764.950,00	96,81



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rp)	(%)
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	270.782.500,00	206.762.400,00	64.020.100,00	76,36
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	150.523.200,00	130.116.000,00	20.407.200,00	86,44
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	508.950.000,00	505.538.238,00	3.411.762,00	99,33
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	89.400.000,00	80.400.000,00	9.000.000,00	89,93
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.590.000,00	34.684.710,00	5.905.290,00	85,45
5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.080.000,00	13.750.000,00	3.330.000,00	80,50
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42.350.000,00	38.597.000,00	3.753.000,00	91,14
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	147.240.000,00	77.457.001,00	69.782.999,00	52,61
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.820.000,00	14.032.000,00	13.788.000,00	50,44
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	20.925.900,00	20.925.900,00	0,00	100,00
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	31.252.400,00	30.552.400,00	700.000,00	97,76
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	205.021.800,00	193.462.995,00	11.558.805,00	94,36
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	249.948.000,00	249.153.467,00	794.533,00	99,68
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	40.932.900,00	40.782.900,00	150.000,00	99,63
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100.255.000,00	98.824.500,00	1.430.500,00	98,57
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	110.000.000,00	96.265.942,00	13.734.058,00	87,51
5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	60.703.000,00	45.098.183,00	15.604.817,00	74,29
5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	75.183.200,00	54.974.400,00	20.208.800,00	73,12
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	214.248.000,00	186.057.145,00	28.190.855,00	86,84
5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	88.367.000,00	72.641.062,00	15.725.938,00	82,20
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	52.403.000,00	45.266.800,00	7.136.200,00	86,38
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,	162.166.600,00	155.975.101,00	6.191.499,00	96,18



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rp)	(%)
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
	RPJMD dan RKPD)				
5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	112.265.500,00	80.026.660,00	32.238.840,00	71,28
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	21.172.800,00	17.404.400,00	3.768.400,00	82,20
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	179.580.800,00	160.536.830,00	19.043.970,00	89,40
5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	94.472.100,00	94.229.721,00	242.379,00	99,74
5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	22.990.000,00	15.493.800,00	7.496.200,00	67,39
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	202.033.500,00	186.356.992,00	15.676.508,00	92,24
5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	170.370.800,00	169.253.916,00	1.116.884,00	99,34
5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	18.766.400,00	14.092.000,00	4.674.400,00	75,09
5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	179.724.700,00	167.583.280,00	12.141.420,00	93,24
5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	187.995.880,00	173.070.000,00	14.925.880,00	92,06
5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	10.028.000,00	9.445.000,00	583.000,00	94,19
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.805.950,00	14.395.950,00	410.000,00	97,23
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20.118.000,00	17.804.000,00	2.314.000,00	88,50
5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.279.700,00	8.240.400,00	39.300,00	99,53
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	2.039.900,00	2.039.500,00	400,00	99,98
5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.951.700,00	1.542.500,00	409.200,00	79,03
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.683.900,00	16.166.500,00	517.400,00	96,90
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.437.800,00	14.198.500,00	239.300,00	98,34
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.633.404.382,00	10.410.345.602,00	223.058.780,00	97,90
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.403.561.332,00	1.248.635.898,00	154.925.434,00	88,96



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rp)	(%)
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18.919.400,00	17.580.700,00	1.338.700,00	92,92
5.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	169.796.456,00	167.625.713,00	2.170.743,00	98,72
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	28.379.600,00	28.335.000,00	44.600,00	99,84
5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	8.752.800,00	8.332.000,00	420.800,00	95,19
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.363.000,00	18.302.500,00	60.500,00	99,67
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	517.636.700,00	517.537.300,00	99.400,00	99,98
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	126.508.100,00	124.002.850,00	2.505.250,00	98,02
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	686.702.014,00	686.341.213,00	360.801,00	99,95
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	637.240.600,00	583.179.600,00	54.061.000,00	91,52
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	45.600.000,00	43.350.000,00	2.250.000,00	95,07
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	143.061.200,00	142.408.631,00	652.569,00	99,54
5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	203.160.000,00	203.160.000,00	0,00	100,00
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	153.831.775,00	153.824.025,00	7.750,00	99,99
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	193.315.125,00	193.131.540,00	183.585,00	99,91
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	183.690.800,00	182.687.485,00	1.003.315,00	99,45
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	17.811.250,00	16.758.050,00	1.053.200,00	94,09
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	36.428.050,00	30.936.050,00	5.492.000,00	84,92
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	55.244.500,00	52.931.500,00	2.313.000,00	95,81
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	266.763.100,00	265.550.764,00	1.212.336,00	99,55
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	222.405.000,00	216.409.045,00	5.995.955,00	97,30
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	352.849.400,00	334.840.904,00	18.008.496,00	94,90
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	551.940.650,00	499.260.650,00	52.680.000,00	90,46
5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	165.464.300,00	163.006.800,00	2.457.500,00	98,51
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	72.006.000,00	71.867.884,00	138.116,00	99,81
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer	96.433.054,00	96.260.054,00	173.000,00	99,82



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rp)	(%)
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
	Lainnya				
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	118.696.208,00	118.587.880,00	108.328,00	99,91
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	214.220.900,00	213.951.846,00	269.054,00	99,87
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	174.043.588,00	174.016.588,00	27.000,00	99,98
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	172.287.800,00	172.124.228,00	163.572,00	99,91
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	71.527.700,00	68.718.438,00	2.809.262,00	96,07
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	50.659.000,00	49.835.260,00	823.740,00	98,37
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	214.279.000,00	213.705.329,00	573.671,00	99,73
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	169.892.481,00	168.699.967,00	1.192.514,00	99,30
5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	177.534.481,00	173.652.216,00	3.882.265,00	97,81
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	22.184.400,00	21.904.000,00	280.400,00	98,74
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	3.218.750.377,00	1.413.764.700,00	1.804.985.677,00	43,92
5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	227.288.950,00	188.570.406,00	38.718.544,00	82,97
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	66.297.450,00	66.269.550,00	27.900,00	99,96
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	52.429.850,00	52.347.550,00	82.300,00	99,84
5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	9.387.600,00	8.155.500,00	1.232.100,00	86,88
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	40.914.400,00	40.913.400,00	1.000,00	100,00
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	360.366.194,00	347.799.950,00	12.566.244,00	96,51
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	214.855.650,00	211.184.230,00	3.671.420,00	98,29
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	51.720.400,00	51.709.800,00	10.600,00	99,98



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rp)	(%)
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	132.458.800,00	122.170.260,00	10.288.540,00	92,23
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	96.916.150,00	90.542.499,00	6.373.651,00	93,42
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	28.411.450,00	28.302.450,00	109.000,00	99,62
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	104.856.500,00	36.859.000,00	67.997.500,00	35,15
5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	22.247.600,00	10.512.200,00	11.735.400,00	47,25
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	66.393.650,00	63.860.121,00	2.533.529,00	96,18
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	111.179.450,00	108.509.450,00	2.670.000,00	97,60
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	403.947.550,00	360.982.075,00	42.965.475,00	89,36
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	292.609.300,00	289.386.065,00	3.223.235,00	98,90
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	234.360.100,00	218.638.600,00	15.721.500,00	93,29
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	23.856.000,00	22.486.360,00	1.369.640,00	94,26
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	81.186.600,00	79.768.300,00	1.418.300,00	98,25
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	940.048.160,00	742.852.180,00	197.195.980,00	79,02
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	36.112.000,00	35.703.600,00	408.400,00	98,87
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	105.639.000,00	67.834.500,00	37.804.500,00	64,21
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	78.257.000,00	77.696.300,00	560.700,00	99,28
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.830.000,00	7.830.000,00	0,00	100,00
5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.877.100,00	8.877.000,00	100,00	100,00
5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.431.000,00	7.431.000,00	0,00	100,00
5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.844.000,00	6.844.000,00	1.000.000,00	87,25
5.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.134.000,00	7.134.000,00	0,00	100,00
5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.741.000,00	8.741.000,00	0,00	100,00
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.090.842.039,00	3.961.339.354,00	129.502.685,00	96,83
5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	131.527.000,00	131.527.000,00	0,00	100,00
5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.603.000,00	8.603.000,00	0,00	100,00
5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.695.000,00	10.695.000,00	0,00	100,00
5.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	27.750.000,00	26.270.000,00	1.480.000,00	94,67
5.03.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian	30.140.000,00	28.520.000,00	1.620.000,00	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rp)	(%)
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
	Kinerja Pegawai				94,63
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.717.400,00	29.747.500,00	5.969.900,00	83,29
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.940.000,00	64.940.000,00	5.000.000,00	92,85
5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.190.000,00	23.180.000,00	1.010.000,00	95,82
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	110.260.000,00	59.622.820,00	50.637.180,00	54,07
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	77.320.000,00	77.220.000,00	100.000,00	99,87
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	80,00
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	322.680.000,00	293.122.845,00	29.557.155,00	90,84
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.680.000,00	67.980.000,00	2.700.000,00	96,18
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	58.906.000,00	56.906.000,00	2.000.000,00	96,60
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.228.000,00	27.582.628,00	2.645.372,00	91,25
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.770.000,00	95.190.000,00	5.580.000,00	94,46
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	98.300.000,00	87.815.288,00	10.484.712,00	89,33
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.340.000,00	28.000.000,00	10.340.000,00	73,03
5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.000.000,00	28.800.000,00	3.200.000,00	90,00
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	10.200.000,00	2.900.000,00	7.300.000,00	28,43
5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	926.320.000,00	737.464.250,00	188.855.750,00	79,61
5.03.02.2.01.0007	Evaluasi Pemberhentian ASN	20.000.000,00	19.865.000,00	135.000,00	99,33
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	60.220.000,00	58.890.000,00	1.330.000,00	97,79
5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	40.300.000,00	33.702.434,00	6.597.566,00	83,63
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	119.430.000,00	99.483.393,00	19.946.607,00	83,30
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	58.778.000,00	48.239.418,00	10.538.582,00	82,07
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	293.871.000,00	254.080.000,00	39.791.000,00	86,46
5.03.02.2.03.0015	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	9.870.000,00	9.870.000,00	0,00	100,00
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100.645.000,00	94.550.843,00	6.094.157,00	93,94
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	19.475.000,00	7.410.000,00	12.065.000,00	38,05
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	12.150.000,00	9.330.000,00	2.820.000,00	76,79
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	46.720.000,00	27.850.000,00	18.870.000,00	59,61
5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	20.000.000,00	13.300.000,00	6.700.000,00	66,50
5.04.02.2.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rp)	(%)
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
	Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.262.253.000,00	1.176.766.450,00	85.486.550,00	93,23
5.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.263.200,00	11.263.200,00	0,00	100,00
5.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	16.591.300,00	12.811.300,00	3.780.000,00	77,22
5.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.161.600,00	8.541.600,00	1.620.000,00	84,06
5.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.820.100,00	1.788.100,00	4.032.000,00	30,72
5.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.335.600,00	5.335.600,00	0,00	100,00
5.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.261.000,00	30.091.000,00	10.170.000,00	74,74
5.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.138.921.719,00	2.090.877.762,00	48.043.957,00	97,75
5.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	163.996.000,00	163.449.300,00	546.700,00	99,67
5.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.143.600,00	6.443.600,00	2.700.000,00	70,47
5.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	11.044.800,00	9.936.700,00	1.108.100,00	89,97
5.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12.022.600,00	12.022.000,00	600,00	100,00
5.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6.885.000,00	4.509.000,00	2.376.000,00	65,49
5.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.732.000,00	2.726.300,00	5.700,00	99,79
5.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.108.400,00	11.460.000,00	26.648.400,00	30,07
5.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.000.000,00	8.830.000,00	4.170.000,00	67,92
5.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	115.319.300,00	86.319.400,00	28.999.900,00	74,85
5.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.400.000,00	35.707.500,00	1.692.500,00	95,47
5.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.000.000,00	22.000.000,00	2.000.000,00	91,67
5.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450.000.000,00	436.229.041,00	13.770.959,00	96,94
5.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	66.022.800,00	65.522.800,00	500.000,00	99,24
5.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.474.000,00	11.862.551,00	611.449,00	95,10
5.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.450.000,00	46.210.000,00	3.240.000,00	93,45
5.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	85.293.600,00	81.035.600,00	4.258.000,00	95,01
5.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58.300.000,00	43.817.848,00	14.482.152,00	75,16
5.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.650.000,00	1.550.000,00	2.100.000,00	42,47



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rp)	(%)
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
5.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.256.000,00	40.740.000,00	9.516.000,00	81,06
5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	132.357.800,00	101.679.200,00	30.678.600,00	76,82
5.05.02.2.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	343.269.700,00	302.218.609,00	41.051.091,00	88,04
5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	225.785.000,00	207.420.114,00	18.364.886,00	91,87
5.05.02.2.02.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	70.682.348,00	53.935.498,00	16.746.850,00	76,31
5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	12.212.500,00	10.000.000,00	2.212.500,00	81,88
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	00,00
5.05.02.2.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	76.331.600,00	41.194.000,00	35.137.600,00	53,97
5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	724.014.400,00	688.126.421,00	35.887.979,00	95,04
5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	61.731.000,00	57.769.000,00	3.962.000,00	93,58
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.905.600,00	1.861.000,00	44.600,00	97,66
6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.905.600,00	1.890.000,00	15.600,00	9,18
6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.905.600,00	1.882.000,00	23.600,00	98,76
6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.905.600,00	1.886.000,00	19.600,00	98,97
6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.905.600,00	1.890.000,00	15.600,00	99,18
6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.905.600,00	1.878.000,00	27.600,00	98,55
6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.905.600,00	1.896.000,00	9.600,00	99,50
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.725.438.405,00	8.567.372.171,00	158.066.234,00	98,19
6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	161.016.000,00	161.012.000,00	4.000,00	100,00
6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.905.600,00	1.897.000,00	8.600,00	99,55
6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.905.600,00	1.893.000,00	12.600,00	99,34
6.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.905.600,00	1.904.000,00	1.600,00	99,92
6.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.905.600,00	1.882.000,00	23.600,00	98,76
6.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.905.600,00	1.900.000,00	5.600,00	99,71
6.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.905.600,00	1.905.000,00	600,00	99,97
6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	42.000.000,00	41.978.325,00	21.675,00	99,95
6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.905.600,00	1.905.000,00	600,00	99,97



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rp)	(%)
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
6.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1.905.600,00	1.899.000,00	6.600,00	99,65
6.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.905.600,00	1.905.000,00	600,00	99,97
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	118.905.300,00	117.324.204,00	1.581.096,00	98,67
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	0,00
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	86.347.250,00	86.288.000,00	59.250,00	99,93
6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	38.525.000,00	37.831.000,00	694.000,00	98,20
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.846.300,00	52.752.000,00	94.300,00	99,82
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	69.083.700,00	69.079.000,00	4.700,00	99,99
6.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	67.840.000,00	67.821.000,00	19.000,00	99,97
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	950.164.500,00	950.066.888,00	97.612,00	99,99
6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.650.000,00	13.619.700,00	30.300,00	99,78
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.704.800,00	14.695.000,00	9.800,00	99,93
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.343.000,00	35.278.000,00	65.000,00	99,82
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	180.855.600,00	180.853.000,00	2.600,00	100,00
6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.750.000,00	33.546.871,00	203.129,00	99,40
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.840.000,00	8.165.000,00	675.000,00	92,36
6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000,00	14.900.085,00	99.915,00	99,33
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	107.115.000,00	106.800.000,00	315.000,00	99,71
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	89.475.000,00	88.080.000,00	1.395.000,00	98,44
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	275.610.000,00	266.595.000,00	9.015.000,00	96,73
6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	113.344.300,00	107.386.000,00	5.958.300,00	94,74
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	166.812.200,00	166.743.000,00	69.200,00	99,96
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	132.300.000,00	111.060.000,00	21.240.000,00	83,95
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	133.980.000,00	102.390.000,00	31.590.000,00	76,42
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	27.000.000,00	26.460.000,00	540.000,00	98,00
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	182.390.400,00	168.351.000,00	14.039.400,00	92,30
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	51.900.000,00	49.095.000,00	2.805.000,00	94,60
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.185.900,00	6.185.900,00	0,00	100,00
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.360.600,00	2.360.600,00	0,00	100,00
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.360.600,00	2.360.600,00	0,00	100,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rp)		100,00
		Anggaran	Realisasi		(%)	
1	2	3	4	5	6	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.360.600,00	2.360.600,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.360.600,00	2.360.600,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.360.600,00	2.360.600,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.824.598.427,00	6.657.502.151,00	167.096.276,00	97,55	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	270.469.400,00	261.719.400,00	8.750.000,00	96,76	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.520.600,00	3.520.600,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.281.000,00	18.281.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.332.000,00	26.332.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	73.475.600,00	73.384.100,00	91.500,00	99,88	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96.373.500,00	93.783.500,00	2.590.000,00	97,31	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	287.472.400,00	287.472.400,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.878.000,00	38.104.768,00	11.773.232,00	76,40	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	264.291.400,00	255.761.400,00	8.530.000,00	96,77	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52.697.500,00	52.082.500,00	615.000,00	98,83	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.725.000,00	16.721.400,00	3.600,00	99,98	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	48.841.400,00	46.241.400,00	2.600.000,00	94,68	
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	13.018.500,00	13.018.500,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	125.921.700,00	125.921.700,00	0,00	100,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	68.400.000,00	68.400.000,00	0,00	100,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.429.609.850,00	3.407.145.550,00	22.464.300,00	99,34	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	49.480.000,00	49.480.000,00	0,00	100,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.889.493.189,00	7.797.900.587,00	91.592.602,00	98,84	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rp)	(%)
		Anggaran	Realisasi	5	6
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	300.200.000,00	299.800.000,00	400.000,00	99,87
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.963.300,00	18.963.000,00	300,00	100,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.649.800,00	34.649.700,00	100,00	100,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	153.300.000,00	153.295.000,00	5.000,00	100,00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	114.344.000,00	114.343.300,00	700,00	100,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.529.000,00	19.529.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	665.400.000,00	665.400.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.042.000,00	30.042.000,00	0,00	100,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	43.604.000,00	43.604.000,00	0,00	100,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	41.320.000,00	41.320.000,00	0,00	100,00
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	28.080.000,00	28.080.000,00	0,00	100,00
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	29.100.000,00	29.100.000,00	0,00	100,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.658.503.100,00	3.657.378.000,00	1.125.100,00	99,97
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.974.217.794,00	6.918.274.815,00	55.942.979,00	99,20
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	473.553.600,00	473.052.800,00	500.800,00	99,89
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	18.097.000,00	18.097.000,00	0,00	100,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rp)	(%)
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
	Kantor				
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.755.000,00	49.185.000,00	2.570.000,00	95,03
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.680.000,00	3.560.000,00	120.000,00	96,74
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	127.000.000,00	112.215.000,00	14.785.000,00	88,36
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	142.873.800,00	141.996.600,00	877.200,00	99,39
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62.530.200,00	38.836.785,00	23.693.415,00	62,11
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	240.076.800,00	240.076.800,00	-	100,00
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	96.303.750,00	73.322.500,00	22.981.250,00	76,14
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	100,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1.052.000,00	1.052.000,00	0,00	100,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	38.579.300,00	35.191.000,00	3.388.300,00	91,22
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18.129.600,00	18.129.600,00	0,00	100,00
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	30.715.600,00	30.715.600,00	0,00	100,00
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	130.281.550,00	130.281.550,00	0,00	100,00
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	46.790.800,00	46.790.800,00	0,00	100,00
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2.904.000,00	2.904.000,00	0,00	100,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.917.842.775,00	3.814.605.577,00	103.237.198,00	97,36
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.016.400,00	4.016.400,00	0,00	100,00
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.091.000,00	3.091.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.592.000,00	3.592.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.022.000,00	3.022.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.683.012.591,00	10.480.083.790,00	202.928.801,00	98,10
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	584.713.000,00	584.713.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan	5.906.500,00	5.906.500,00	0,00	



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rp)	(%)
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				100,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	48.335.200,00	48.335.200,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65.081.400,00	65.081.400,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	64.896.800,00	64.896.800,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	216.800.000,00	216.422.577,00	377.423,00	99,83
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	356.615.500,00	333.698.600,00	22.916.900,00	93,57
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.296.000,00	66.001.151,00	7.294.849,00	90,05
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	440.400.000,00	375.150.000,00	65.250.000,00	85,18
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	61.282.500,00	56.782.500,00	4.500.000,00	92,66
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.149.800,00	11.149.800,00	0,00	100,00
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.420.000,00	28.420.000,00	0,00	100,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	100,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	24.420.000,00	24.420.000,00	0,00	100,00
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	20.880.000,00	20.880.000,00	0,00	100,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14.180.200,00	14.180.200,00	0,00	100,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0,00	492.000,00	(492.000,00)	0,00
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	129.423.950,00	129.423.950,00	0,00	100,00
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	25.488.000,00	25.488.000,00	0,00	100,00
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	12.930.000,00	12.930.000,00	0,00	100,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	257.950.750,00	257.941.500,00	9.250,00	100,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.155.056.110,00	4.132.803.610,00	22.252.500,00	99,46



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rp)	(%)
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	615.000,00	-	615.000,00	0,00
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.395.000,00	833.400,00	561.600,00	59,74
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.220.000,00	1.179.800,00	40.200,00	96,70
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.121.400,00	0,00	1.121.400,00	0,00
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.030.000,00	300.000,00	730.000,00	29,13
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.093.900,00	0,00	2.093.900,00	-
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.409.478.757,00	12.203.365.435,00	206.113.322,00	98,34
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	595.836.400,00	561.432.400,00	34.404.000,00	94,23
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	975.000,00	630.300,00	344.700,00	64,65
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.090.600,00	11.090.500,00	100,00	100,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	98.310.600,00	98.310.400,00	200,00	100,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	263.763.363,00	263.586.020,00	177.343,00	99,93
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	203.400.000,00	169.100.000,00	34.300.000,00	83,14
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.002.850,00	33.002.850,00	-	100,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	847.850.000,00	801.750.000,00	46.100.000,00	94,56
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	76.091.000,00	68.014.900,00	8.076.100,00	89,39
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	47.766.000,00	45.627.000,00	2.139.000,00	95,52
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	28.975.200,00	28.717.200,00	258.000,00	99,11
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	23.808.300,00	21.458.400,00	2.349.900,00	90,13
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	135.494.100,00	135.494.100,00	0,00	100,00
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	26.825.000,00	26.825.000,00	0,00	100,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.413.722.599,00	5.399.913.499,00	13.809.100,00	99,74
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.358.200,00	3.358.200,00	0,00	100,00
8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.246.000,00	3.246.000,00	0,00	100,00
8.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.283.000,00	3.283.000,00	0,00	100,00
8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.653.000,00	3.653.000,00	0,00	100,00
8.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.757.500,00	3.757.500,00	0,00	100,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rp)	(%)
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.245.900,00	3.245.900,00	0,00	100,00
8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.991.300,00	21.838.400,00	152.900,00	99,30
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.557.460.664,00	3.334.249.187,00	223.211.477,00	93,73
8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	223.654.400,00	223.581.800,00	72.600,00	99,97
8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.261.700,00	6.261.700,00	0,00	100,00
8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.025.600,00	5.025.600,00	0,00	100,00
8.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.304.100,00	5.304.100,00	0,00	100,00
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.762.500,00	1.762.500,00	0,00	100,00
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	206.967.200,00	206.416.200,00	551.000,00	99,73
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.492.421,00	11.455.700,00	36.721,00	99,68
8.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	4.640.000,00	4.640.000,00	0,00	100,00
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	270.039.999,00	268.003.882,00	2.036.117,00	99,25
8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.865.200,00	5.865.200,00	0,00	100,00
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.080.000,00	13.076.712,00	3.288,00	99,97
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	107.400.000,00	106.950.000,00	450.000,00	99,58
8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	53.110.000,00	53.077.058,00	32.942,00	99,94
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.360.000,00	11.360.000,00	0,00	100,00
8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	672.370.800,00	655.396.176,00	16.974.624,00	97,48
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	80.844.800,00	74.255.385,00	6.589.415,00	91,85
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	19.961.130.300,00	19.960.709.907,00	420.393,00	100,00
8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan	248.224.800,00	242.169.880,00	6.054.920,00	97,56



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 2

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rp)	(%)
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
8.01.04.2.01.0003	Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1.084.340.850,00	995.625.880,00	88.714.970,00	91,82
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	76.947.000,00	73.584.300,00	3.362.700,00	95,63
8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	123.090.200,00	113.290.100,00	9.800.100,00	92,04
8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	528.940.800,00	511.466.900,00	17.473.900,00	96,70
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4.055.502.100,00	4.036.956.460,00	18.545.640,00	99,50
8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	60.650.500,00	57.617.500,00	3.033.000,00	95,00
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1.323.605.294,00	1.154.355.900,00	169.249.394,00	87,21
JUMLAH		928.222.492.278,00	893.324.937.238,00	34.897.555.040,00	96,24

Sumber Data : BPKAD Kota Bima Tahun Anggaran 2024, Diolah



BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah dicerminkan dalam APBD merupakan rencana tahunan pemerintah daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pada tahun 2024 Pemerintah Kota Bima telah menganut anggaran defisit.

Anggaran Pendapatan Pemerintah Kota Bima pada TA 2024 senilai Rp911.422.634.704,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah senilai Rp132.054.217.467,00, Pendapatan Transfer senilai Rp768.113.583.263,00, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah senilai Rp11.254.833.974,00.

Anggaran Pendapatan Pemerintah Kota Bima pada TA 2023 senilai Rp812.217.998.559,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah senilai Rp62.434.155.760,00, Pendapatan Transfer senilai Rp740.018.857.090,00, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah senilai Rp9.764.985.709,00.

Realisasi Pendapatan pada TA 2024 adalah senilai Rp899.567.459.005,82 atau (98,70%) yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah senilai Rp131.340.945.242,82 atau (99,46%), Pendapatan Transfer senilai Rp757.753.922.550,00 atau (98,65%) dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah senilai Rp10.472.591.213,00 atau (93,05%).

Realisasi Pendapatan pada TA 2023 adalah senilai Rp773.124.623.905,70 atau (95,19%) yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah senilai Rp51.449.182.945,70 atau (82,41%), Pendapatan Transfer senilai Rp712.153.663.997,00 atau (96,23%) dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah senilai Rp9.521.776.963,00 atau (97,51%).

Anggaran Belanja pada TA 2024 senilai Rp928.222.492.278,00 dan TA 2023 senilai Rp886.801.025.189,00. Sedangkan realisasi Belanja TA 2024 adalah senilai Rp893.324.937.238,00 dan TA 2023 senilai Rp829.916.997.925,25 yang terdiri dari Realisasi Belanja Operasi TA 2024 senilai Rp774.585.834.029,00, Belanja Modal teralisasi senilai Rp117.434.068.509,00 dan Belanja Tak Terduga senilai Rp1.305.034.700,00. Sedangkan realisasi TA 2023 terdiri dari Realisasi Belanja Operasi TA 2023 senilai Rp680.574.756.827,25, Belanja Modal teralisasi senilai Rp147.479.520.226,00 dan Belanja Tak Terduga senilai Rp1.862.720.872,00.

Realisasi Pendapatan pada TA 2024 senilai Rp899.567.459.005,82 bila dibandingkan dengan Realisasi Belanja TA 2024 senilai Rp893.324.937.238,00 maka terjadi surplus senilai Rp6.242.521.767,82 Sedangkan penerimaan pembiayaan daerah senilai Rp17.799.857.573,12 dan pengeluaran pembiayaan daerah senilai Rp0,00 sehingga menghasilkan SILPA TA 2024 senilai Rp24.042.379.340,94.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 3.1

Realisasi Pendapatan pada TA 2023 senilai Rp773.124.623.905,70 bila dibandingkan dengan Realisasi Belanja TA 2023 senilai Rp829.916.997.925,25 maka terjadi defisit senilai Rp56.792.374.019,55 Sedangkan penerimaan pembiayaan daerah senilai Rp76.592.231.592,67 dan pengeluaran pembiayaan daerah senilai Rp2.000.000.000,00 sehingga menghasilkan SILPA TA 2023 senilai Rp17.799.857.573,12.

Realisasi APBD Kota Bima Tahun 2024 dan 2023 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Ringkasan Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bima
Tahun Anggaran 2024

No.	Komponen	Tahun 2024 (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5
4	Pendapatan Daerah			
4.1	Pendapatan Asli Daerah	132.054.217.467,00	131.340.945.242,82	99,46
4.1.01	Pajak Daerah	25.785.050.685,00	23.187.052.170,51	89,92
4.1.02	Retribusi Daerah	24.423.958.139,00	25.378.365.488,40	103,91
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.656.772.700,00	2.622.635.153,00	158,30
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	80.188.435.943,00	80.152.892.430,91	99,96
04.02	Pendapatan Transfer	768.113.583.263,00	757.753.922.550,00	98,65
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	705.926.520.600,00	698.388.305.312,00	98,93
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	62.187.062.663,00	59.365.617.238,00	95,46
04.03	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	11.254.833.974,00	10.472.591.213,00	93,05
04.03.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.254.833.974,00	10.472.591.213,00	93,05
	Jumlah Pendapatan	911.422.634.704,00	899.567.459.005,82	98,70
5	Belanja Daerah			
05.01	Belanja Operasi	795.514.016.964,00	774.585.834.029,00	97,37
05.01.01	Belanja Pegawai	453.510.459.222,00	448.064.545.062,00	98,80
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	294.439.923.491,00	279.668.139.717,00	94,98
05.01.05	Belanja Hibah	44.342.134.251,00	43.680.149.250,00	98,51
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	3.221.500.000,00	3.173.000.000,00	98,49
05.02	Belanja Modal	129.620.124.937,00	117.434.068.509,00	90,60
05.02.01	Belanja Modal Tanah	3.945.555.000,00	2.282.760.420,00	57,86
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.959.796.733,00	23.323.712.118,00	93,45
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46.622.375.275,00	42.504.291.643,00	91,17
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	51.877.747.829,00	47.137.157.328,00	90,86
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	149.200.100,00	148.641.000,00	99,63
05.02.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.065.450.000,00	2.037.506.000,00	98,65
05.03	Belanja Tidak Terduga	3.088.350.377,00	1.305.034.700,00	42,26
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	3.088.350.377,00	1.305.034.700,00	42,26
	Jumlah Belanja	928.222.492.278,00	893.324.937.238,00	96,24
	SUPLUS/ (DEFISIT)	(16.799.857.574,00)	6.242.521.767,82	(37,16)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 3.1

No.	Komponen	Tahun 2024 (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
3	Pembiayaan			
03.01	Penerimaan	17.799.857.574,00	17.799.857.573,12	100,00
03.02	Pengeluaran	1.000.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah Pembiayaan	16.799.857.574,00	17.799.857.573,12	105,95
	SILPA	0,00	24.042.379.340,94	0,00

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima Tahun 2024, diolah

Ringkasan Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bima
Tahun Anggaran 2023

No.	Komponen	Tahun 2023 (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5
4	Pendapatan Daerah			
4.1	Pendapatan Asli Daerah	62.434.155.760,00	51.449.182.945,70	82,41
4.1.01	Pajak Daerah	24.857.277.198,00	23.211.800.485,23	93,38
4.1.02	Retribusi Daerah	13.058.478.015,00	8.723.098.596,00	66,80
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.140.790.453,00	2.140.790.453,00	100,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	22.377.610.094,00	17.373.493.411,47	77,64
04.02	Pendapatan Transfer	740.018.857.090,00	712.153.663.997,00	96,23
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	672.019.052.986,00	654.147.760.859,00	97,34
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	67.999.804.104,00	58.005.903.138,00	85,30
04.03	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	9.764.985.709,00	9.521.776.963,00	97,51
04.03.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.764.985.709,00	9.521.776.963,00	97,51
	Jumlah Pendapatan	812.217.998.559,00	773.124.623.905,70	95,19
5	Belanja Daerah			
05.01	Belanja Operasi	728.183.679.382,00	680.574.756.827,25	93,46
05.01.01	Belanja Pegawai	389.708.764.568,00	372.071.721.926,00	95,47
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	287.103.412.292,00	267.851.512.668,25	93,29
05.01.05	Belanja Hibah	43.552.366.000,00	37.168.222.233,00	85,34
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	7.819.136.522,00	3.483.300.000,00	44,55
05.02	Belanja Modal	154.687.517.460,00	147.479.520.226,00	95,34
05.02.01	Belanja Modal Tanah	1.224.391.000,00	1.094.391.000,00	89,38
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.256.905.058,00	35.594.128.839,00	95,54
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.543.932.600,00	49.102.960.640,00	97,15
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	63.867.230.083,00	59.909.921.028,00	93,80
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.775.058.719,00	1.757.618.719,00	99,02
05.02.06	Belanja Modal Aset Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
05.03	Belanja Tidak Terduga	3.929.828.347,00	1.862.720.872,00	47,40
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	3.929.828.347,00	1.862.720.872,00	47,40



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 3.1

No.	Komponen	Tahun 2023 (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5
	Jumlah Belanja	886.801.025.189,00	829.916.997.925,25	93,59
	SUPLUS/ (DEFISIT)	(74.583.026.630,00)	(56.792.374.019,55)	76,15
3	Pembiayaan			
03.01	Penerimaan	76.583.026.630,00	76.592.231.592,67	100,01
03.02	Pengeluaran	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00
	Jumlah Pembiayaan	74.583.026.630,00	74.592.231.592,67	100,01
	SILPA	0,00	17.799.857.573,12	0,00

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima Tahun 2023, diolah

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

3.2.1 Penjelasan Terkait Capaian Target Pendapatan

Capaian target pendapatan Kota Bima terdapat pada beberapa SKPD selama tahun 2024 dan tahun 2023. Adapun rekapitulasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bima tahun 2024 dan 2023 tergambar dalam tabel sebagai berikut.

Rekapitulasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bima Berdasarkan SKPD Tahun 2024 dan 2023

No	SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1	2	3	4	5	3	4	5
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	173.250.000,00	110.480.000,00	63,77	167.400.000,00	149.000.000,00	89,01
2	Dinas Kesehatan	3.303.034.000,00	2.862.388.400,00	86,66	4.471.339.975,00	2.527.493.700,00	56,53
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.442.050.000,00	1.036.362.852,00	71,87	1.435.460.000,00	1.290.607.251,00	89,91
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	457.500.000,00	350.950.000,00	76,71	70.000.000,00	144.463.700,00	206,38
5	Dinas Lingkungan Hidup	700.000.000,00	349.435.000,00	49,92	700.000.000,00	367.465.000,00	52,50
6	Dinas Perhubungan	854.210.000,00	408.950.000,00	47,87	1.422.950.000,00	886.862.000,00	62,33
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	187.738.000,00	187.738.000,00	100,00
8	Dinas Koperindag	2.263.557.168,00	872.677.750,00	38,55	2.165.803.040,00	1.055.359.100,00	48,73
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	240.100.000,00	185.750.000,00	77,36	203.100.000,00	156.000.000,00	76,81
10	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.039.570.000,00	766.434.000,00	73,73	1.026.070.000,00	762.888.395,00	74,35
11	Dinas Pertanian	166.400.000,00	225.671.750,00	135,62	250.000.000,00	236.110.750,00	94,44
12	Sekretariat Daerah	473.350.000,00	395.910.000,00	83,64	473.350.000,00	417.360.000,00	88,17
13	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	887.455.251.565,00	874.901.820.618,34	98,59	790.691.747.044,00	753.856.779.959,16	95,34
14	RSUD	12.854.361.971,00	17.099.403.635,48	133,02	8.953.040.500,00	11.086.496.050	123,83
	JUMLAH	911.422.634.704,00	899.566.234.005,82	98,70	812.217.998.559,00	773.124.623.905,70	95,19

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima Tahun 2024 dan 2023, diolah

Hambatan dan kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Bima untuk mencapai target pendapatan dan belanja adalah sebagai berikut.



Faktor Pendukung dan Penghambat yang dihadapi SKPD untuk mencapai Target Pendapatan dan Belanja

No	SKPD	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1	2	3	4
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1 Koordinasi antar elemen pada SKPD terkait;	1 Kurangnya kelengkapan kantor guna menunjang aktifitas operasional;
		2 Percepatan pada proses pelaksanaan pekerjaan terutama pekerjaan fisik yang dikerjakan oleh pihak ke tiga;	2 Kondisi Alam yang seringkali menghambat pekerjaan fisik dan lapangan;
		3 Proses pencairan dana yang tepat waktu;	3 Pelaksanaan Pembuatan Kontrak dengan System Online sehingga terjadi kendala dalam penginputan data terkait masalah jaringan dan lain-lain.
		4 System pelaporan realisasi fisik dan keuangan semakin optimal;	
		5 Kelengkapan personil yang lebih maksimal sehingga pembagian pekerjaan menjadi lebih merata;	
2	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Menjaga hubungan koordinasi dan terlibatnya semua unsur dalam OPD agar pencapaian kinerja yang diharapkan bisa maksimal.	1 Terbatasnya tenaga yang memahami Pegelolaan Keuangan Perangkat Daerah terutama pada Pejabat PPKeu maupun PPTK
			2 Kurangnya Sosialisasi terkait Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah
3	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1 Tersedianya aparatur yang melaksanakan kegiatan;	1 Dana Terbatas;
		2 Adanya obyek yang menjadi sasaran kegiatan;	2 Kualitas SDM masih rendah;
		3 Terlaksananya kegiatan yang direncanakan;	3 Sarana dan Prasarana Terbatas;
		4 Peran serta masyarakat dalam Kesatuan Bangsa dan Politik.	4 Data pendukung masih kurang.
4	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Optimalisasi Pencapaian Kinerja dan Manajemen yang Baik dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	Perencanaan untuk realisasi keuangan yang kurang efektif dan manajemen realisasi keuangan yang kurang efektif dan manajemen realisasi keuangan yang kurang baik
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1 Tersedianya tenaga yang memahami pengelolaan keuangan SKPD	1 Panjangnya birokrasi penyelesaian tugas karena adanya penyerahan sebagian wewenang kepala pelaksana kepada sekretaris yang masih kabur pembatasannya sehingga perlu konsultasi atas bawah secara berulang kepada pimpinan untuk akhirnya diputuskan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 3.1

No	SKPD	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1	2	3	4
		2 Terpenuhinya SDM pada setiap struktur organisasi pada SKPD sehingga program dan kegiatan dapat terlaksana secara maksimal	2 Kendala dalam penggantian tugas kebidaharaan sehingga menghambat dalam proses penatausahaan dan pengelolaan keuangan
		3 Adanya program kerjasama dengan mitra pemerintah sehingga pelaksanaan kegiatan pada masyarakat lebih efektif dan efisien	3 Keterbatasan tenaga teknis dalam perawatan peralatan peringatan dini, menyebabkan sebagian besar peralatan tidak terawat dan tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal
		1 Pelaksanaan kegiatan yang sesuai jadwal dan kerangka acuan yang ditetapkan serta didukung oleh koordinasi dan kolaborasi maksimal antar bidang	1 keterbatasan sumber daya manusia dalam hal ini pejabat pelaksana dan terbatasnya sarana pendukung berupa peralatan komputer
6	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	2 Leadership yang tegas dalam setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan	
		3 penatausahaan keuangan dan Barang Milik Daerah yang sudah dilakukan dengan baik	
7	DINAS KETAHANAN PANGAN	1 Ketersediaan Anggaran yang memadai guna mendukung pelaksanaan Program Kegiatan	1 Kurangnya SDM dan Koordinasi antar Bidang dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada pada dokumen kegiatan
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1 Dedikasi dan Tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas	1 Armada Pengangkut Sampah perlu ditambah, karena armada yang sebelumnya sudah tidak layak pakai
		2 Manajerial yang baik dalam mendukung pencapaian target kinerja dan realisasi APBD	2 Masih kurangnya SDM Pegawai yang memahami pengaplikasian pengelolaan keuangan
			3 Peralatan dan Mesin untuk Penataan Taman Masih Kurang
			4 Ternak yang masih berkeliaran di tiap sudut Kota
			5 Peralatan kerja yang secara umum kurang memadai
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1 Adanya Komitmen dan semangat yang kuat dari ASN untuk bekerja secara maksimal	1 Kurang Stabilitasnya Jaringan untuk akses sistem pelayanan kependudukan sehingga mengganggu pelayan dan pencapaian target



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 3.1

No	SKPD	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1	2	3	4
10	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	1 Manajemen pengelolaan Program/Kegiatan disesuaikan dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan	1 Terlambatnya informasi dari pusat terhadap petunjuk pelaksanaan dan Penggunaan DAK fisik dan BOKB
		2 Penerapan Aplikasi yang memadai dan efisien	2 Ketidaksiesuaian Rekening Pemerintah Daerah terhadap alokasi dana DAK
			3 Kurangnya Dana UP yang berbanding terbalik terhadap efisiensi penggunaan dan DAK yang signifikan sekitar 120%
11	DINAS PERHUBUNGAN	1 Kinerja tim yang bagus dan Profesional, serta kecukupan dukungan anggaran	1 Dipengaruhi oleh kurangnya pertumbuhan ekonomi dan daya beli yang menurun
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1 Peran dan Dukungan perangkat organisasi yang cukup tinggi	1 Tidak terdapat faktor penghambat yang signifikan dalam pencapaian target.
		2 Kelengkapan peralatan kantor yang memadai sehingga mendukung kelancaran setiap kegiatan;	
13	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1 Adanya sumber PAD yang terdapat pada Pasar ;	1 Banyaknya tunggakan pajak tahun-tahun sebelumnya
		2 Adanya kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terkait Pemungutan PAD.	
14	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	1 Perencanaan dan target awal tertuang jelas dan terarah	1 Sarana ruang kerja yang kurang kondusif
		2 Kinerja bidang pelaksana kegiatan dan pengelolaan anggaran bagus dan tepat waktu	2 Kurangnya sarana dan Prasarana Kearsipan khususnya terbatasnya koleksi arsip proposal file yang bias dijadikan bahan referensi
		3 Pelaksanaan kegiatan tepat waktu dan sesuai perencanaan	
		4 Sarana prasarana penunjang layanan umum perpustakaan yang memadai dan telah memenuhi standar;	
		5 Pembinaan dan pengawasan secara continue terhadap penyelenggaraan kearsipan yang sesuai standar kearsipan	
15	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1 Perencanaan program/kegiatan terstruktur;	1 Kegiatan yang tidak mampu diprediksi;
		2 Sistem kinerja dan pengendaliannya yang baik;	2 Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan suatu program dan kegiatan.
		4 Administratif, penatausahaan yang memadai;	
		4 Pemahaman akan fungsi dan tugas.	
16	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	1 Kelengkapan peralatan kantor yang memadai sehingga mendukung kelancaran setiap kegiatan;	1 Adanya beberapa kegiatan yang dilaksanakan setelah perubahan anggaran pada bulan Oktober 2023;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 3.1

No	SKPD	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1	2	3	4
		2 Jaringan internet yang mendukung;	2 Kurangnya kontroling dalam melengkapi Surat Pertanggungjawaban dari kegiatan yang dilaksanakan; dan
		3 SDM pada sekretariat yang bisa diandalkan sehingga mempermudah dalam merealisasikan setiap kegiatan yang telah direncanakan.	3 Masih adanya ego sektoral bidang.
17	DINAS PERTANIAN	1 Komitmen yang baik beberapa stakeholder dalam melahirkan program dan kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kualitas sumber daya petani dengan dukungan APBD	1 kegiatan pertanian yang bergantung pada keadaan cuaca dan dengan keadaan cuaca yang tidak menentu di kota Bima sehingga mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran pada beberapa kegiatan.
		2 ketersediaan anggaran yang cukup dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendukung peningkatan produksi pertanian, perkebunan dan peternakan.	
		1 Koordinasi dan Komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan serta antar unit bagian dalam melaksanakan tugas;	1 Proses administrasi keuangan yang belum maksimal karena keterbatasan sumber daya aparatur pengelola keuangan serta penguasaan terhadap regulasi dan teknis pengelolaan keuangan;
18	SEKRETARIAT DAERAH	2 Adanya profesionalisme ASN yang tinggi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;	2 Belum optimalnya SDM dalam megoperasikan teknologi informasi;
		3 Profisinalnya tenaga hanorer dan kontrak dalam menyikapi tugas dan tanggung jawab; dan	3 Pemeliharaan barang inventaris dan fasilitas kantor lainnya belum dilaksanakan secara berkala dan teratur.
		4 Fasilitas peralatan kerja yang memadai dalam mendukung pekerjaan	
19	SEKRETARIAT DPRD	1 Optimalisasi Pelaksanaan Kegiatan DPRD sesuai Program Kerja Tahunan dan Profram Sekretariat DPRD; dan	1 Program yang sudah di tentukan maupun yang dijadwalkan berbenturan dengan alokasi waktu.
		2 Terlaksananya Kegiatan sesuai dengan Jadwal.	
20	KECAMATAN RABA	1 Tersedianya Anggaran yang cukup sehingga belanja dapat dilakukan secara maksimal	1 terlambatnya unit pelaksana di bawahnya dalam pengurusan adminitrasi keuangan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 3.1

No	SKPD	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1	2	3	4
21	INSPEKTORAT	1 program dan kegiatan yang terencana dengan baik	1 Beberapa kegiatan tidak berjalan dengan baik sesuai waktu dan pelaksanaannya karena beberapa faktor yang salah satunya kegiatan penanganan atas aduan masyarakat;
		2 terciptanya sistem kerja dan pengendaliannya yang baik	2 Faktor-faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan suatu kegiatan.
		3 Sistem administrasi, penatausahaan pertanggungjawaban keuangan yang memadai;	
		4 Paham akan Tugas dan Fungsi Setiap Aparatur.	
22	BAPPEDA DAN LITBANG	1 Pengoptimalan anggaran berbasis kinerja	1 Kurang cermat penganggaran dalam pengalokasian pada belanja rutin seperti belanja telepon, belanja pajak kendaraan bermotor
		1 Penerapan aplikasi SIMDA Keuangan, SIMDA BMD dan SIMDA Pendapatan Terintegrasi satu sama lain;	1 Kurangnya komitmen pada beberapa perangkat daerah dalam memenuhi standar kelengkapan pengajuan pencairan dana;
23	BPKAD	2 Penerapan SIM Gaji yang maksimal;	2 Tempat maupun ruang kerja yang kurang memadai;
		3 Komitmen Aparatur dalam Menyelesaikan Pekerjaan	3 Kurangnya SDM untuk optimalisasi program dan kegiatan;
		4 Kerjasama dan Kolaborasi antar Bidang yang sistematis dan lancar;	4 Kurangnya tenaga IT untuk mengoptimalkan aplikasi berbasis web.
		5 Regulasi dan SOP Tersedia dalam mendukung Tupoksi Kerja	
		1 Lengkapnya fasilitas peralatan kantor sehingga mempermudah dalam pengerjaan laporan keuangan	1 Adanya beberapa kegiatan yang dilaksanakan setelah perubahan anggaran pada bulan Oktober 2024;
24	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	2 Dukungan Sistem Aplikasi yang sangat membantu dalam pengolahan data keuangan	2 terbatasnya tenaga yang memahami pengelolaan keuangan
			3 Ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal
		1 Tersedianya aparatur yang melaksanakan kegiatan;	1 Kualitas SDM masih rendah dan pemahaman pengelolaan keuangan yang masih kurang;
25	KECAMATAN RASANA BARAT	2 Terlaksananya kegiatan yang direncanakan;	2 Anggaran yang tersedia masih belum memadai
		3 Peran serta masyarakat dalam mendukung program dan kegiatan yang telah direncanakan	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 3.1

No	SKPD	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1	2	3	4
26	DINAS TENAGA KERJA	1 Personal team, semua pegawai bisa saling berkoordinasi dan mendukung satu sama lain dengan tujuan agar capaian target kinerja dinas dapat dilaksanakan secara maksimal dan bertanggungjawab;	1 Jumlah pegawai yang kurang sehingga dalam pelaksanaan tupoksi dan pelayanan terhadap masyarakat mengalami hambatan
		2 Sarana dan Prasarana, Dapat melaksanakan tugas dan fungsinya karena didukung oleh sarana prasarana yang memadai;	
		3 Anggaran, untuk mendukung program dan kegiatan yang telah direncanakan perlu anggaran yang cukup.	
27	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1 Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai yang dapat menunjang pencapaian target kinerja	1 Perencanaan Anggaran yang tidak sinkron dengan kebutuhan dinas atau kantor
		2 Sumber Daya Manusia yang cukup andal sehingga mempermudah pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan	2 Terbatasnya tenaga yang memahami penatausahaan dan pengelolaan keuangan dinas
28	DINAS SOSIAL	1 Lengkapnya fasilitas peralatan kantor	1 Adanya beberapa kegiatan yang dilaksanakan setelah perubahan anggaran pada bulan Oktober 2023;
		2 Dukungan Sistem Aplikasi yang sangat membantu dalam pengolahan data keuangan	2 Terbatasnya tenaga yang memahami pengelola keuangan dinas;
		3 Komunikasi dan Koordinasi yang baik dengan mitra pengelola keuangan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan.	4 Kurang memadainya jaringan Internet yang menyebabkan mempengaruhi proses penginputan di sistem
			3 Ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal
29	KECAMATAN ASAKOTA	1 Terlibatnya semua unsur dalam kecamatan asakota sehingga dengan mudah dalam mencapai semua target	1 Terbatasnya tenaga/Sumber Daya Manusia yang menguasai IT dan memahami pengelolaan keuangan terutama dalam pengelolaan anggaran



3.2.2 Penjelasan Terkait Capaian Target Belanja

Pencapaian target belanja dapat ditampilkan dalam tabel berikut.

Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Bima per SKPD
Tahun Anggaran 2024 dan Tahun 2023

No.	SKPD	Tahun 2024 (Rp)		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	239.738.986.039,00	236.540.044.689,00	98,67	197.915.018.002,51
2	Dinas Kesehatan	117.362.363.784,00	114.474.859.295,00	97,54	93.816.666.084,00
3	RSUD Kota Bima	50.376.295.676,00	46.454.785.406,00	92,22	29.019.391.992,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	76.736.456.587,00	72.577.620.108,00	94,58	104.429.043.307,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	11.986.149.458,00	9.939.907.523,00	82,93	8.742.361.369,00
6	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	9.495.046.447,00	8.688.748.737,00	91,51	7.839.685.560,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.599.716.826,00	5.289.509.566,00	94,46	5.718.383.936,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	6.847.722.727,00	6.275.357.870,00	91,64	6.114.434.177,00
9	Dinas Sosial	11.303.521.923,00	10.731.748.647,00	94,94	8.851.957.908,00
10	Dinas Tenaga Kerja	4.913.050.395,00	4.631.333.015,00	94,27	3.869.703.033,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.825.994.274,00	7.519.587.491,00	96,08	9.516.402.544,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	4.849.442.588,00	4.665.927.485,00	96,22	4.327.332.545,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	24.403.252.833,00	23.880.826.982,00	97,86	27.940.170.220,00
14	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	5.662.354.704,00	5.470.993.670,00	96,62	6.608.379.403,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.273.538.293,00	8.369.254.442,00	90,25	9.962.604.704,00
16	Dinas Perhubungan	18.074.957.690,00	17.407.451.167,00	96,31	11.912.347.908,96
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.762.338.030,00	10.495.501.245,00	97,52	11.457.849.787,00
18	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	10.788.291.693,00	9.941.267.879,00	92,15	9.621.986.501,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.732.935.749,00	5.194.646.023,00	90,61	4.185.027.476,00
20	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	6.874.405.304,00	6.682.058.655,00	97,20	6.275.713.631,00
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	5.531.909.577,00	5.416.360.811,00	97,91	5.429.180.945,00
22	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	9.002.268.461,00	8.792.960.162,00	97,67	20.545.371.181,00
23	Dinas Pertanian	22.831.324.455,00	20.735.828.271,00	90,82	16.832.751.854,00
24	Sekretariat Daerah	52.522.207.264,00	50.559.558.249,00	96,26	59.530.838.452,78
25	Inspektorat	11.928.476.355,00	11.675.815.244,00	97,88	10.577.120.539,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 3.1

No.	SKPD	Tahun 2024 (Rp)		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
26	Badan Perencanaan Pembangunan Pembangunan Daerah	9.313.391.245,00	8.732.994.301,00	93,77	7.971.922.554,00
27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	25.473.401.277,00	22.663.003.906,00	88,97	20.888.049.010,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	8.440.977.539,00	7.770.620.223,00	92,06	7.786.017.406,00
29	Badan Riset dan Inovasi Daerah	5.093.836.967,00	4.723.423.044,00	92,73	5.465.875.301,00
30	Sekretariat DPRD	31.840.515.087,00	31.176.351.640,00	97,91	28.572.981.919,00
31	Kecamatan RasanaE Barat	11.691.995.177,00	11.467.481.269,00	98,08	10.882.146.343,00
32	Kecamatan RasanaE Timur	13.215.983.389,00	13.122.859.587,00	99,30	12.455.532.034,00
33	Kecamatan Asakota	12.414.583.569,00	12.186.487.427,00	98,16	11.493.515.689,00
34	Kecamatan Mpunda	17.346.909.701,00	17.021.871.978,00	98,13	15.582.136.960,00
35	Kecamatan Raba	20.226.285.069,00	19.873.051.204,00	98,25	18.548.959.137,00
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	32.741.606.126,00	32.174.840.027,00	98,27	9.230.138.512,00
JUMLAH		928.222.492.278,00	893.324.937.238,00	96,24	829.916.997.925,25

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima Tahun 2024 dan 2023, diolah

3.3 Mandatory spending Kota Bima Tahun Anggaran 2024

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.

Mandatory spending dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
- Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).
- Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN).
- Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa)

Realisasi anggaran belanja Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2024 dalam rangka pemenuhan *mandatory spending* adalah sebagai berikut :



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 3.1

Mandatory spending Kota Bima Tahun Anggaran 2024

No	SKPD/OPD	Jenis Mandatory spending	Nama Program/Kegiatan	Anggaran 2024	Realisasi 2024
		Total Belanja Daerah		928.222.492.278,00	893.324.937.238,00
A		Bidang Pendidikan 20%		21,99 %	22,44 %
		Capaian anggaran mandatory spending Bidang Pendidikan		204.070.153.381,00	
		Capaian realisasi mandatory spending Bidang Pendidikan			200.485.087.096,00
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga			188.193.479.616,00	185.015.748.629,00
			1.01.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	121.616.524.766,00	121.490.543.152,00
			1.01.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	63.363.085.050,00	60.339.739.699,00
			1.01.01.04 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	28.050.000,00	28.050.000,00
			1.02.19.02 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	348.878.000,00	343.939.280,00
			1.02.19.03 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	2.836.941.800,00	2.813.476.498,00
2	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			9.002.268.461,00	8.787.279.812,00
			2.22.01.00 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.094.861.063,00	4.997.507.827,00
			2.22.02.00 Program Pengembangan Kebudayaan	625.731.700,00	611.858.051,00
			2.22.05.00 Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	139.621.600,00	135.023.860,00
			3.26.02.00 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.177.988.555,00	1.120.553.772,00
			3.26.03.00 Program Pemasaran Pariwisata	1.479.004.464,00	1.443.271.633,00
			3.26.05.00 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	485.061.079,00	479.064.669,00
3	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah			6.874.405.304,00	6.682.058.655,00
			2.23.01.00 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.551.464.754,00	5.384.345.053,00
			2.23.02.00 Program Pembinaan Perpustakaan	806.314.950,00	789.908.800,00
			2.24.02.00 Program Pengelolaan Arsip	505.292.900,00	496.820.802,00
			2.24.03.00 Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	11.332.700,00	10.984.000,00
B		Kesehatan 10% dari APBD diluar gaji		26,47 %	26,77 %
		Gaji ASN		294.425.610.796	292.061.775.652
		Capaian anggaran mandatory spending		633.796.881.482,00	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 3.1

No	SKPD/OPD	Jenis <i>Mandatory spending</i>	Nama Program/Kegiatan	Anggaran 2024	Realisasi 2024
		Bidang Kesehatan diluar gaji			
		Capaian realisasi <i>mandatory spending</i> Bidang Kesehatan diluar gaji			601.263.161.586,00
	Dinas Kesehatan			117.362.363.784,00	114.474.859.295,00
			01.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	65.907.549.187,00	65.609.915.903,00
			01.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	49.830.704.542,00	47.326.611.192,00
			01.02.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	552.832.300,00	479.208.100,00
			01.02.04 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	429.831.000,00	428.211.000,00
			01.02.05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	641.446.755,00	630.913.100,00
	RSUD			50.376.295.676,00	46.454.785.406,00
			01.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	15.595.738.226,00	15.593.007.747,00
			01.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	34.780.557.450,00	30.861.777.659,00
	Total Bidang Kesehatan			167.738.659.460,00	160.929.644.701,00
C		Dana Transfer Umum diarahkan penggunaannya untuk Belanja Infrastruktur 25%		43,33	39,08
		Capaian anggaran <i>mandatory spending</i> Dana Transfer Umum diarahkan penggunaannya untuk Belanja Infrastruktur		402.216.855.505,00	
		Capaian realisasi <i>mandatory spending</i> Dana Transfer Umum diarahkan penggunaannya untuk Belanja Infrastruktur			349.077.172.835,58
	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga			236.369.976.239,00	204.288.558.911,00
			1.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	173.006.891.189,00	173.014.839.212,00
			1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	63.363.085.050,00	31.273.719.699,00
	Dinas Kesehatan			98.242.046.605,00	96.787.837.412,00
			1.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	65.907.549.187,00	65.609.915.903,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 3.1

No	SKPD/OPD	Jenis Mandatory spending	Nama Program/Kegiatan	Anggaran 2024	Realisasi 2024
			1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	32.334.497.418,00	31.177.921.509,00
	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			20.516.842.665,00	19.886.592.627,00
			1.03.10 Program Penyelenggaraan Jalan	17.200.526.580,00	16.617.678.818,00
			1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	3.316.316.085,00	3.268.913.809,00
			1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	0,00	0,00
			1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	0,00	0,00
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman			1.109.966.380,00	987.869.793,00
			1.04.02 Program Pengembangan Perumahan	1.109.966.380,00	987.869.793,00
	Dinas Tenaga Kerja			3.955.229.795,00	3.767.046.152,00
			2.07.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.955.229.795,00	3.767.046.152,00
	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan			7.427.240.293,00	7.053.126.064,00
			2.07.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.377.026.293,00	7.003.452.064,00
			2.17.06 Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	50.214.000,00	49.674.000,00
			2.17.08 Program Pengembangan UMKM	0,00	0,00
	Dinas Lingkungan Hidup			6.258.565.377,00	6.185.302.371,00
			2.11.03 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	266.888.474,00	263.147.136,00
			2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan	5.991.676.903,00	5.922.155.235,00
	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil			76.314.400,00	76.312.650,00
			2.12.04 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	76.314.400,00	76.312.650,00
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			1.177.988.555,00	1.120.553.772,00
			3.26.02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.177.988.555,00	1.120.553.772,00
	Dinas Perikanan			1.216.281.362,00	1.164.150.182,00
			3.25.03 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	687.101.200,00	657.802.993,00
			3.25.04 Program Pengelolaan Perikanan	259.630.762,00	251.476.239,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 3.1

No	SKPD/OPD	Jenis <i>Mandatory spending</i>	Nama Program/Kegiatan	Anggaran 2024	Realisasi 2024
			Budidaya		
			3.25.06 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	269.549.400,00	254.870.950,00
	Dinas Pertanian			18.392.112.745,00	2.244.209.811,58
			3.27.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.708.176.745,00	14.894.319,58
			3.27.03 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.683.936.000,00	2.229.315.492,00
	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah			50.214.000,00	49.674.000,00
			2.17.06 Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	50.214.000,00	49.674.000,00
			2.17.08 Program Pengembangan UMKM	0,00	0,00
	Sekretariat Daerah			755.366.900,00	740.586.531,00
			4.01.03 Program Perekonomian Dan Pembangunan	755.366.900,00	740.586.531,00
	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah			6.668.710.189,00	4.725.352.559,00
			5.02.02 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	6.668.710.189,00	4.725.352.559,00
			Jumlah Capaian anggaran <i>mandatory spending</i> Dana Transfer Umum diarahkan penggunaannya	402.216.855.505,00	
			Jumlah Capaian realisasi <i>mandatory spending</i> Dana Transfer Umum diarahkan penggunaannya		349.077.172.835,58



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi tersebut disusun sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan.

Kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Kota Bima Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Buletin-Buletin Teknis, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Bima, asumsi dasar yang digunakan adalah:

1. Kemandirian Entitas, Pemerintah Kota Bima sebagai entitas pelaporan maupun SKPD dibawahnya sebagai entitas akuntansi merupakan unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku.
2. Kesenambungan Entitas, Pemerintah Kota Bima sebagai entitas pelaporan maupun SKPD dibawahnya sebagai entitas akuntansi berlanjut keberadaannya/berkesinambungan.
3. Keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*), yaitu bahwa entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang dapat dinilai dengan satuan uang. Mata uang yang digunakan untuk pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan adalah Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dijabarkan dalam mata uang Rupiah.

Periode akuntansi yang digunakan untuk menyajikan informasi keuangan yaitu berdasarkan tahun anggaran, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan untuk laporan keuangan ini adalah Pemerintah Kota Bima secara keseluruhan. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima Tahun 2023 ini disusun berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bima sebagai entitas akuntansi, laporan keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan data-data keuangan lainnya.

SKPKD merupakan unit yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima. SKPD merupakan unit pengguna anggaran dan pengguna barang di lingkungan Pemerintah Kota Bima dan mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan keuangan. SKPD tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;



2. Dinas Kesehatan;
3. RSUD Kota Bima;
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
6. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
9. Dinas Sosial
10. Dinas Tenaga Kerja
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12. Dinas Ketahanan Pangan
13. Dinas Lingkungan Hidup
14. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
15. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
16. Dinas Perhubungan
17. Dinas Komunikasi dan Informatika
18. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
21. Dinas Kelautan dan Perikanan
22. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
23. Dinas Pertanian
24. Sekretariat Daerah
25. Inspektorat
26. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
27. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
28. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
29. Badan Riset dan Inovasi Daerah
30. Sekretariat DPRD
31. Kecamatan RasanaE Barat
32. Kecamatan RasanaE Timur
33. Kecamatan Asakota
34. Kecamatan Mpunda
35. Kecamatan Raba
36. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan ini adalah basis kas untuk pengakuan Pendapatan-LRA, Belanja, dan Pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan basis akrual untuk pengakuan Pendapatan-LO dan Beban dalam Laporan Operasional (LO) dan Pengakuan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas dalam Neraca.

Basis kas (*cash basis*) untuk penyusunan Laporan Realisasi APBD, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Laporan Arus Kas berarti bahwa Pendapatan-LRA dan Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima di Kas Daerah, sedangkan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Kas Daerah.

Basis akrual (*accrual basis*) untuk penyusunan Neraca, LO, dan Laporan Perubahan Ekuitas berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan SKPD atau pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, dan bahwa pendapatan dalam LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Salah satu asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*), disamping kemandirian entitas dan kesinambungan entitas. Hal ini berarti laporan keuangan Pemerintah Kota Bima harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang.

Pengukuran berhubungan dengan pengakuan suatu kejadian dan jumlah nilai yang dicatat dalam catatan akuntansi dan disajikan dalam laporan keuangan sehubungan dengan kejadian tersebut. Basis pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan ini mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah yaitu sebagai berikut:

4.3.1 Pengukuran Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Pengukuran pendapatan dan penerimaan pembiayaan yaitu sebesar kas yang diterima di Kas Daerah atas pendapatan atau penerimaan pembiayaan tersebut.

Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.3.2 Pengukuran Pos-Pos Laporan Operasional

1. Pengukuran Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO yang ditetapkan secara *self assessment system* dicatat sebesar nilai pajak terutang yang dicantumkan dalam rekapitulasi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) serta Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN);
- b. Pendapatan-LO yang dipungut melalui proses penetapan secara jabatan (*official*) dicatat sebesar nilai yang tertuang dalam rekapitulasi Surat Ketetapan Pajak/Retribusi (SKP/SKR) Daerah atau dokumen yang dipersamakan. Dasar penetapan nilai dalam SKP/SKR Daerah mengacu pada Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota Bima;
- c. Atas penerimaan pendapatan oleh Bendahara Penerimaan pada akhir periode pelaporan dan belum disetorkan ke Kas Umum Daerah dicatat sebagai Pendapatan-LO sebesar hak Pemerintah Kota Bima;
- d. Pendapatan yang dipungut dengan menggunakan karcis, pengakuan Pendapatan-LO dicatat sebesar nilai karcis yang berhasil "dijual", bukan berdasarkan jumlah karcis yang tercetak atau yang didistribusikan kepada juru pungut;

- e. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO Bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;
- f. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (actual price) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal;
- g. Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar;
- h. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas Pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan;
- i. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (nonrecurring) atas Pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama;
- j. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (nonrecurring) atas Pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut;
- k. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Pengukuran Beban

Pengukuran beban yaitu sebesar harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Apabila tidak ada harga perolehan, maka beban diukur berdasarkan taksiran nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi.

4.3.3 Pengukuran Pos-Pos Neraca

Pengukuran Aset adalah sebagai berikut.

1. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
2. Investasi jangka pendek dicatat sebesar:
 - a. Nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar untuk investasi yang memiliki pasar aktif. Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat digunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya;
 - b. Nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar, apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan. Apabila tidak ada nilai wajar, maka Investasi Jangka Pendek dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut;
 - c. Nilai nominal, apabila Investasi Jangka Pendek dalam bentuk bukan surat berharga.



3. Piutang dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
4. Persediaan dicatat sebesar:
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
 - c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
5. Investasi jangka panjang dicatat sebesar:
 - a. Nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar untuk investasi yang memiliki pasar aktif. Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat digunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya;
 - b. Biaya perolehan, apabila investasi jangka panjang yang bersifat permanen;
 - c. Nilai perolehan, apabila investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan;
 - d. Nilai bersih yang dapat direalisasikan, apabila investasi jangka panjang non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian;
 - e. Biaya pembangunan, apabila investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah; dan
 - f. Harga perolehan, apabila investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah, atau nilai wajar investasi jika harga perolehannya tidak ada.
6. Investasi Non Permanen Dana Bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir;
7. Aset Tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut;
8. Aset Lainnya dicatat sebesar:
 - a. Nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan untuk piutang dari tagihan penjualan angsuran. Apabila dalam pembayaran dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya;
 - b. Nilai kerugian yang menjadi tanggung jawab seseorang sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak untuk Piutang dari Tuntutan Ganti Rugi;
 - c. Harga perolehan untuk aset tak berwujud; dan
 - d. Nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian untuk aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan dan nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan untuk aset hasil



kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya.

- a. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- b. Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

4.4.1 Pendapatan-LRA

1. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah;
2. Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Klasifikasi atas Pendapatan-LRA dirinci lebih lanjut pada Bagan Akun Standar;
3. Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan;
4. Pendapatan-LRA diakui pada saat:
 - a. Pendapatan telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pada akhir periode pelaporan, jika terdapat pendapatan yang dipungut oleh/disetor kepada Bendahara Penerimaan SKPD namun belum disetorkan ke Kas Umum Daerah tidak diakui sebagai pendapatan LRA;
 - b. Diterima di SKPD;
 - c. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD;
 - d. Pendapatan telah diterima oleh BLUD dan digunakan langsung tanpa disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dicatat sebagai pendapatan daerah;
 - e. Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan namun belum dianggarkan dalam APBD, tetap disetorkan ke kas daerah sesuai dengan jenis pendapatan yang diterima dan dilaporkan dalam LRA dengan target anggaran pendapatan sebesar nol. Atas setoran pendapatan tersebut diakui menambah pendapatan di SKPD pemungut dan penyeter;
 - f. Hasil atas investasi jangka pendek yang kurang dari tiga bulan berupa bunga deposito diakui menambah pendapatan bunga;
 - g. Hasil atas investasi jangka pendek yang berusia 3-12 bulan, dan hasil investasi berupa obligasi diakui menambah pendapatan bunga;
 - h. Bila terdapat aset tetap/lainnya yang dijual oleh Pemerintah Kota Bima, maka atas hasil penjualan tersebut diakui sebagai pendapatan dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan. Atas uang jaminan pemeliharaan atau perbaikan atau uang retensi, diakui Pendapatan-LRA ketika pihak ketiga dinyatakan tidak



- memenuhi janji sesuai dengan kontrak yang disepakati dengan Pemerintah Kota Bima;
- i. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya maupun periode berjalan dibukukan sebagai pengurang Pendapatan-LRA;
 - j. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas penerimaan Pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang Pendapatan-LRA pada periode yang sama;
 - k. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas penerimaan Pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang SAL pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Dalam LRA, pembayaran restitusi (pengembalian kelebihan bayar) pendapatan tersebut oleh Pemerintah Kota Bima dilakukan dengan SP2D LS dengan menggunakan akun Belanja Tak Terduga;
 - l. Pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan
 - m. Pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
5. Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.

4.4.2 Belanja

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah;
2. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah;
3. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil;
4. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum;
5. Belanja daerah diklasifikasikan menurut Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran dan Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas;
6. Belanja menurut klasifikasi ekonomi secara terinci terdapat dalam Bagan Akun Standar;
7. Realisasi belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran;
8. Penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama;



9. Karena adanya perbedaan klasifikasi menurut peraturan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka entitas akuntansi dan pelaporan harus membuat konversi untuk klasifikasi belanja yang akan dilaporkan dalam laporan muka laporan realisasi anggaran (LRA);
10. Setelah dilakukan konversi maka klasifikasi berdasarkan pada klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi;
11. Belanja disajikan dalam LRA sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga serta dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
12. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu;
13. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja antara lain:
 - a. Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah;
 - c. Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi belanja yang didasarkan pada peraturan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - d. Penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang diperlukan;
14. Belanja diukur dan disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

4.4.3 Pembiayaan

1. Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran;
2. Pembiayaan diklasifikasikan menjadi penerimaan pembiayaan yang dirinci lagi menurut sumber pembiayaan, dan pengeluaran pengeluaran pembiayaan daerah dan dirinci lagi menurut jenis pengeluaran pembiayaan;
3. Penerimaan pembiayaan meliputi: SiLPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah, dan penerimaan pembiayaan daerah lain yang sah;



4. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain berupa: pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah;
5. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;
6. Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari penggunaan SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang berasal dari sisa perhitungan APBD periode sebelumnya. Penggunaan SiLPA diakui pada saat perda tentang perhitungan APBD tahun sebelumnya telah disahkan oleh DPRD;
7. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah;
8. Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan, dan penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan;
9. Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari dua belas bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang;
10. Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan;
11. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi;
12. Pembiayaan disajikan dalam LRA sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kota Bima untuk memanfaatkan surplus anggaran dan menggali sumber dana untuk menutupi defisit anggaran.

4.4.4 Pendapatan-LO

1. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali;
2. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau saat pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized);
3. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, Pendapatan-LO diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum;
4. Pendapatan-LO pada PPKD meliputi: pendapatan transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah;



5. Pendapatan-LO pada SKPD meliputi: PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan;
 - a. PAD melalui penetapan ini diartikan sebagai perolehan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kota Bima yang disahkan dengan penetapan;
 - b. PAD tanpa Penetapan adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kota Bima tanpa didahului dengan penetapan secara resmi yang dikirimkan ke Pemerintah Kota Bima karena proses bisnis yang tidak memungkinkan;
6. Pendapatan-LO disajikan sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan-LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan;

4.4.5 Beban

1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban;
2. Beban diakui saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;
3. Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Kota Bima dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian;
4. Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi;
5. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi;
6. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Penyusutan dan amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, Beban Bunga, dan Beban Transfer.

4.4.6 Aset/Aktiva

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.



4.4.6.1 Aset Lancar

1. Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.
2. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3-12 bulan, Surat Utang Negara (SUN) Pemerintah jangka pendek, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN). Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, dana perimbangan, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti rugi, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan piutang yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
3. Kas adalah adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
4. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas (jatuh tempo kurang dari tiga bulan) tanggal perolehannya.
5. Kas diakui pada saat diterima oleh BUD, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Badan Layanan Umum Daerah. Kas yang dikeluarkan untuk belanja oleh BUD diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah sedangkan bagi SKPD diakui pada saat dilakukan pengesahan oleh PA/KPA setelah diverifikasi oleh PPK SKPD.
6. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan serta dimiliki 3-12 bulan terhitung mulai tanggal pelaporan.
7. Investasi jangka pendek terdiri atas deposito berjangka waktu 3-12 bulan, pembelian obligasi/Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).
8. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kota Bima dan/atau hak Pemerintah Kota Bima yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pemberian barang/jasa, perjanjian, terbitnya ketetapan atas pajak daerah dan retribusi daerah, atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
9. Piutang terdiri atas: piutang pajak, retribusi, dana perimbangan, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti rugi, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan piutang yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah.
10. Piutang diakui ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas yaitu pada saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan, atau belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.



11. Penyisihan piutang adalah estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.
12. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
13. Pengukuran Berikutnya (*subsequent measurement*) terhadap pengakuan awal. Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
14. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
15. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
16. Persediaan dapat terdiri atas: alat tulis kantor, alat listrik, material/bahan, benda pos, bahan bakar, dan bahan makanan pokok.
17. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

4.4.6.2 Investasi Jangka Panjang

1. Investasi jangka panjang adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Investasi jangka panjang terdiri dari:
 - a. Investasi non permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali. Investasi non permanen dapat berupa pembelian SUN dengan jatuh tempo lebih dari 12 bulan, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, modal kerja yang digulirkan ke masyarakat/kelompok masyarakat (dana bergulir), dan investasi non permanen lainnya.
 - b. Investasi permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Investasi permanen dapat berupa penyertaan modal pemerintah pada perusahaan daerah dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah, dan investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat antara lain penambahan modal pada Koperasi Pegawai Negeri.
 - c. Properti Investasi merupakan properti/aset untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk



digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa.

3. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi salah satu kriteria berikut, yaitu manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah atau nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya.
4. Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui dan dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan.
5. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu: metode biaya dengan kriteria kepemilikan kurang dari 20%; metode ekuitas dengan kriteria kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau kepemilikan lebih dari 50%, metode nilai bersih yang direalisasikan dengan kriteria kepemilikan bersifat non permanen.
6. Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
7. Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam LRA maupun LAK.
8. Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen - Dana Bergulir.
9. Dana bergulir dapat dihapuskan jika Dana Bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, beserta perubahan atas Peraturan Pemerintah tersebut jika ada.

4.4.6.3 Aset Tetap

1. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Bima atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber APBD (sebagian atau seluruhnya) melalui pengadaan, pembangunan, atau dapat juga diperoleh dari donasi atau pertukaran dengan aset lainnya.
3. Aset tetap terdiri dari: Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi dalam Pengerjaan.
4. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.
5. Peralatan dan Mesin, meliputi alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio komunikasi dan



- pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, dan alat persenjataan/keamanan.
6. Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, gedung museum dan rambu-rambu.
 7. Jalan Irigasi dan Jaringan, meliputi jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon.
 8. Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset Tetap Lainnya, meliputi koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/ kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, dan tanaman.
 9. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
 10. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh, biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal, dan aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
 11. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal.
 12. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
 13. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
 14. Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Tujuan dasarnya adalah menyesuaikan nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya, di samping itu penyusutan juga dimaksudkan untuk menggambarkan penurunan kapasitas dan manfaat yang diakibatkan pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan.



15. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

4.4.6.4 Dana Cadangan

1. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi/tahun anggaran.
2. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan dan pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.

4.4.6.5 Aset Lainnya

1. Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.
2. Aset lainnya meliputi tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, aset tak berwujud, kemitraan dengan pihak ketiga, dan aset lain-lain.
3. Tagihan Penjualan Angsuran merupakan hak untuk menagih atas penjualan barang milik daerah yang dilakukan secara cicilan/angsuran, pada umumnya penyelesaiannya dapat melebihi satu periode akuntansi.
4. Piutang dari tagihan penjualan angsuran diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam pembayaran dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersih.
5. Tuntutan Perbendaharaan (TP) dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah.
6. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya.
7. Piutang dari TGR diukur sebesar nilai kerugian yang menjadi tanggung jawab seseorang sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak.
8. Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
9. ATB diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu ATB hingga siap untuk digunakan dan ATB tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.
10. Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi.
11. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas tidak berakhir jika aset tersebut tidak lagi digunakan, kecuali aset tersebut sudah sepenuhnya disusutkan atau digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual.
12. Amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti metode garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi.



13. Jumlah yang dapat diamortisasi dari ATB harus dialokasikan secara sistematis berdasarkan perkiraan terbaik dari masa manfaatnya. Masa manfaat ATB adalah 20 tahun sejak perolehan ATB.
14. Amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas dan pada umumnya ditetapkan dalam jumlah yang sama pada periode, atau dengan suatu basis alokasi garis lurus. ATB dengan masa manfaat yang terbatas (seperti paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, dll) harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek.
15. Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.
16. Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.
17. Aset Kerjasama/Kemitraan berupa gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama bangun serah guna (BSG), diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
18. Aset Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar.
19. Aset Lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga.
20. Pengakuan Aset Lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

4.4.7 Kewajiban

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
2. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
3. Kewajiban jangka pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
4. Kewajiban jangka pendek antara lain terdiri dari utang kepada pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga (PFK), utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, utang beban dan utang jangka pendek lainnya.
5. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
6. Kewajiban jangka panjang meliputi utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.
7. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
8. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.



4.4.8 Ekuitas

1. Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kota Bima yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kota Bima pada tanggal laporan.
2. Ekuitas dana terdiri dari ekuitas yang digunakan untuk mencatat akun untuk menampung saldo kekayaan bersih Pemerintah Kota Bima yang diperoleh dari LPE dan ekuitas untuk dikonsolidasikan yang digunakan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi yang mencakup akun RK PPKD atau RK SKPKD. Ekuitas untuk dikonsolidasikan ini berada di SKPD.
3. Ekuitas diakui pada akhir periode berdasarkan jurnal penyesuaian untuk memindahkan surplus/defisit LO ke Neraca. Sedangkan ekuitas untuk dikonsolidasikan diakui pada saat terjadi transaksi resiprokal antara SKPKD dengan SKPD. Pada akhir periode akuntansi, ekuitas untuk dikonsolidasikan ini akan dieliminasi dalam rangka menghasilkan laporan keuangan konsolidasi.
4. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

5.1 Penjelasan atas Pos-Pos LRA

LRA merupakan Laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Kota Bima yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan. Secara lebih rinci LRA Pemerintah Kota Bima pada TA 2024 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1 Pendapatan Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Daerah TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah	132.054.217.467,00	57.053.592.781,82	43,20	51.449.182.945,70
Pendapatan Transfer	768.113.583.263,00	757.753.927.550,00	98,65	712.153.663.997,00
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	11.254.833.974,00	84.762.193.674,00	753,12	9.521.776.963,00
Jumlah	911.422.634.704,00	899.569.714.005,82	98,70	773.124.623.905,70

Komposisi realisasi Pendapatan Daerah TA 2024 digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.



5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Asli Daerah TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Pajak Daerah	25.785.050.685,00	23.190.263.988,51	89,94	23.211.800.485,23
Pendapatan Retribusi Daerah	24.423.958.139,00	25.378.365.488,40	103,91	8.723.098.596,00
Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.656.772.700,00	2.622.635.153,00	158,30	2.140.790.453,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	80.188.435.943,00	5.862.328.151,91	7,31	17.373.493.411,47
Jumlah	132.054.217.467,00	57.053.592.781,82	43,20	51.449.182.945,70



5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Pajak Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	1.281.743.103,28
Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	2.132.758.354,00
Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	56.267.950,00
Pajak Reklame	774.440.250,00	480.449.487,00	62,04	448.264.791,50
Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	10.233.873.243,00
Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	164.195.500,00
Pajak Air Tanah	54.000.000,00	111.461.026,80	206,41	52.914.467,70
Pajak Sarang Burung Walet	30.000.000,00	0,00	0	21.000.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	500.000.000,00	198.524.497,00	39,70	235.761.383,75
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.100.000.000,00	2.993.482.633,00	58,70	3.456.288.051,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.000.000.000,00	4.761.940.441,00	95,24	5.128.733.641,00
PBJT Makanan dan Minuman	2.502.610.435,00	1.727.544.460,40	69,03	0,00
PBJT Tenaga Listrik	10.500.000.000,00	11.307.185.575,00	107,69	0,00
PBJT Jasa Perhotelan	1.112.000.000,00	1.362.033.968,31	122,49	0,00
PBJT Jasa Parkir	170.000.000,00	212.948.300,00	125,26	0,00
PBJT Kesenian dan Hiburan	42.000.000,00	34.693.600,00	82,60	0,00
Jumlah	25.785.050.685,00	23.190.263.988,51	89,94	23.211.800.485,23

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi Pendapatan Pajak Daerah dibandingkan anggaran pada Pendapatan Pajak Daerah di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mengalami penurunan akibat rendahnya kesadaran masyarakat, yang disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang keberatan terhadap penyesuaian tarif PBB berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024.
 - b. Pendapatan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mengalami penurunan, yang disebabkan oleh menurunnya jumlah transaksi pemindahan hak atas tanah dan bangunan selama tahun berjalan.
 - c. Realisasi pendapatan dari Pajak Sarang Burung Walet hingga 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp30.000.000,00. Hal ini disebabkan karena hingga akhir tahun belum memasuki musim panen sarang burung walet, sehingga belum terdapat objek pajak yang dapat dipungut.
 - d. Pendapatan dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas tenaga listrik mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi Pajak Penerangan Jalan pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya



konsumsi listrik di masyarakat, yang secara langsung berdampak pada naiknya pendapatan dari sektor tersebut.

2. Pemungutan Pajak Daerah di atas telah dilandasi Perda sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. Peraturan Daerah Wali Kota Bima Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - d. Peraturan Walikota Bima nomor 37 Tahun 2024 tentang Pemungutan Pajak Daerah.

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Dearah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Retribusi Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Retribusi Jasa Umum				
• Retribusi Pelayanan Kesehatan	16.133.395.971,00	19.940.787.436,40	123,60	2.736.071.950,00
• Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	895.300.000,00	472.305.000,00	52,75	501.768.000,00
• Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	800.000.000,00	393.264.000,00	49,16	407.854.000,00
• Retribusi Pelayanan Pasar	456.350.000,00	452.890.000,00	99,24	464.957.500,00
• Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	434.860.000,00
• Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	135.500.000,00	89.400.000,00	65,98	69.900.000,00
• Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	187.738.000,00
Retribusi Jasa Usaha			0,00	
• Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	1.763.033.700,00
• Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.514.242.168,00	269.092.750,00	17,77	423.824.800,00
• Retribusi Terminal	0,00	0,00	0,00	5.626.000,00
• Retribusi Tempat Khusus Parkir	450.460.000,00	189.871.000,00	42,15	211.343.000,00
• Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	160.900.000,00	151.000.000,00	93,85	0,00
• Retribusi Rumah Potong Hewan	0,00	13.710.000,00	0,00	14.700.000,00
• Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	0,00	0,00	0,00	0,00
• Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	518.000.000,00	478.502.000,00	92,37	561.114.395,00
• Retribusi Penyeberangan di Air	0,00	0,00	0,00	0,00
• Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	226.300.000,00	284.171.750,00	125,57	0,00
• Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	2.133.510.000,00	2.006.508.700,00	94,05	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 5.1

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Retribusi Perizinan Tertentu				
• Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	917.757.251,00
• Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00	22.550.000,00
• Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.000.000.000,00	636.862.852,00	63,69	0,00
Jumlah	24.423.958.139,00	25.378.365.488,40	103,91	8.723.098.596,00

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi Pendapatan Retribusi Daerah dibandingkan anggaran pada Pendapatan Retribusi Daerah di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 - a. Retribusi Jasa Umum
 - 1) Peningkatan realisasi Retribusi Jasa Umum disebabkan Retribusi Pelayanan Kesehatan (Pendapatan BLUD RSUD Kota Bima TA 2024 sebesar Rp17.099.403.635,48 dari Realisasi TA 2023 sebesar Rp11.086.496.050,54), merupakan reklasifikasi dari pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
 - 2) Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya cakupan pelayanan persampahan akibat beberapa armada pengangkut sampah mengalami kerusakan sehingga tidak dapat beroperasi secara optimal.
 - 3) Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tidak mencapai target karena pengelolaan parkir yang belum berjalan secara maksimal.
 - 4) Realisasi Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus tidak mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh adanya persaingan dengan penyedia jasa serupa dari pihak swasta, yang memengaruhi minat masyarakat untuk menggunakan layanan pemerintah.
 - b. Retribusi Jasa Usaha
 - 1) Pendapatan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh menurunnya minat masyarakat untuk menyewa toko secara *offline*, seiring dengan meningkatnya tren belanja *online* yang lebih diminati oleh konsumen.
 - 2) Penurunan Retribusi Tempat Khusus Parkir disebabkan oleh pengelolaan yang belum berjalan secara optimal.
 - 3) Penganggaran Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun Anggaran 2024 dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagai penyesuaian atas pengelompokan akun, yang mencakup:
 - Retribusi penjualan produksi hasil usaha daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan
 - Retribusi Pelayanan kesehatan hewan pada Dinas Pertanian



- Retribusi pemakaian pemakaian kekayaan Daerah (Lab Uji Mutu) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- c. Retribusi Perijinan Tertentu
 - 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada tahun 2024 tidak dianggarkan kembali sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
 - 2) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum tidak dianggarkan kembali sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
 - 3) Pendapatan dari Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung tidak mencapai target akibat menurunnya jumlah permohonan izin/persetujuan mendirikan bangunan oleh masyarakat.
- d. Pada tahun 2024 terdapat regulasi yang merubah secara mendasar jenis Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR), Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dan Retribusi Pengawasan Pengendalian Menara Telekomunikasi, dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yaitu:
 - 1) UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
 - 2) PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
 - 3) Sehingga, hal ini berdampak pada tidak dianggarkannya dan tidak terealisasinya beberapa jenis pendapatan retribusi pada tahun 2024.
- 2. Pemungutan Retribusi-Retribusi Daerah di atas telah dilandasi Perda sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. Peraturan Daerah Wali Kota Bima Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - d. Peraturan Walikota Bima Nomor 36 Tahun 2024 tentang Pemungutan Retribusi Daerah.

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 dan 2023 yang merupakan Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 5.1

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1.656.772.700,00	2.622.635.153,00	158,30	2.140.790.453,00
Jumlah	1.656.772.700,00	2.622.635.153,00	158,30	2.140.790.453,00

Penjelasan:

- Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Hasil Pengelolaan. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 - Peningkatan nilai Deviden bagian laba Pemerintah Kota Bima Tahun 2024 dipengaruhi peningkatan komposisi modal disetor pada Bank NTB Syariah, prosentase penyertaan modal pada tahun 2023 sebagai dasar perhitungan deviden atas hasil laba kinerja Tahun 2024.
 - Penurunan dividen pada PD. BPR NTB Bima disebabkan oleh perubahan komposisi modal disetor, yang mengakibatkan hanya diperolehnya dividen dari bagian laba sebesar 0,69%.
 - Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal dari PT BANK NTB diakui berdasarkan RUPS dengan Berita Acara RUPS Nomor SBA/712/17/10/2023 tentang Penyampaian Berita Acara RUPS LB Sirkuler PT. Bank NTB Syariah.
- Rincian penerimaan atas pada Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PT Bank NTB Syariah	1.495.453.447,00	2.461.315.900,00	164,59	1.988.566.416,00
PT Jamkrida NTB Bersaing	48.321.978,00	48.321.978,00	100,00	41.066.722,00
PD BPR NTB Bima	108.164.370,00	108.164.370,00	100,00	102.435.626,00
KPN Sabua Ade	4.832.905,00	4.832.905,00	100,00	8.721.689,00
Jumlah	1.656.772.700,00	2.622.635.153,00	158,30	2.140.790.453,00

- Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan (Deviden) kepada Pemda atas Penyertaan Modal dari Perumda. PT BANK NTB diakui berdasarkan RUPS dengan Akta Notaris SBA/712/17/10/2023 tentang Penyampaian Berita Acara RUPS LB Sirkuler PT. Bank NTB Syariah.
- Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan (Dividen) kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal dari PT. Jamkrida diakui berdasarkan Berita Acara RUPS Tahunan Perseroan Terbatas PT. Jamkrida NTB Bersaing Nomor 01 tanggal 04 April 2024.
- Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan (Dividen) kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal dari BPR-NTB diakui berdasarkan Akta Notaris RUPS Tahunan Perseroan Terbatas BPR NTB (Perseroda) dengan Nomor 1 tanggal 06 Mei 2024.



- d. Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan (Dividen) kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal dari KPN Sabua Ade diakui berdasarkan RAT Nomor 09/KSPPS-PN/II2025 tanggal 11 Februari 2025.

5.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, serta yang direalisasikan pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.793.626.128,00	1.604.177.858,53	89,44	1.117.736.923,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	78.735.456,67
Jasa Giro	600.000.000,00	578.475.168,25	96,41	479.369.095,52
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	5.365.000,00	0,00	0,00	501.300,00
Pendapatan Bunga	1.803.143.672,00	2.030.526.510,73	112,61	3.247.190.524,39
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	2.385.268.082,00	0,00	0,00	1.185.757.924,39
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	73.600.533.061,00	107.139.918,64	0,15	35.676.961,50
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	62.213.360,80	0,00	133.093.093,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah	500.000,00	73.335.568,96	14.667,11	123.934,00
Pendapatan dari Pengembalian	0,00	1.406.459.766,00	0,00	49.065.850,00
Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	11.046.242.349,00
Jumlah	80.188.435.943,00	5.862.328.151,91	7,31	17.373.493.411,47

Penjelasan:

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Pendapatan Bunga tercapai senilai Rp2.030.526.510,73 melebihi target senilai 112,61% hal ini disebabkan oleh pemanfaatan penempatan *deposito on call* atas uang kas yang belum digunakan pada periode tertentu;
2. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah tidak mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh belum selesainya penyelesaian kerugian daerah terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan temuan Inspektorat.
3. Pendapatan dari Pengembalian melebihi target senilai Rp287.029.413,00 merupakan nilai pengembalian atas belanja tahun sebelumnya.
4. Anggaran Penerimaan komisi potongan atau bentuk lain meningkat cukup signifikan yang bersumber dari penerimaan atas Piutang atas Bagi Hasil IUPK dan bagi hasil IUPK 2024 dari PT. AMNT senilai Rp74.289.602.461,00 yang direklasifikasi ke Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan.



5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	705.926.520.600,00	698.388.310.312,00	98,93	654.147.760.859,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	62.187.062.663,00	59.365.617.238,00	95,46	58.005.903.138,00
Jumlah	768.113.583.263,00	757.753.927.550,00	98,65	712.153.663.997,00

5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Dana Perimbangan	700.338.662.600,00	695.594.381.312,00	99,32	632.975.550.859,00
Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	21.172.210.000,00
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
Insentif Fiskal	5.587.858.000,00	2.793.929.000,00	50	0,00
Jumlah	705.926.520.600,00	698.388.310.312,00	98,93	654.147.760.859,00

Penjelasan:

1. Rincian Saldo Dana Perimbangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Dana Bagi Hasil	65.274.778.000,00	67.023.039.000,00	102,68	55.895.742.054,00
Dana Alokasi Umum	488.281.634.000,00	488.281.634.000,00	100,00	453.939.356.950,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	56.209.507.000,00	51.257.106.179,00	91,19	42.423.553.167,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	90.572.743.600,00	89.032.602.133,00	98,30	80.716.898.688,00
Jumlah	700.338.662.600,00	695.594.381.312,00	99,32	632.975.550.859,00



Penjelasan:

- a. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Dana Perimbangan di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 - 1) Meningkatkan Realisasi Dana Bagi hasil Pajak Tahun Anggaran 2024 meningkat dibandingkan Tahun Anggaran 2023 disebabkan Penerimaan Dana Bagi Hasil sebesar Rp29.342.498.00,00 yang ditambahkan sebagai *Treasury Deposit Facility* (TDF) sesuai surat Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor S.84/KPN.2302/2024 dan penambahan alokasi kurang bayar Dana bagi hasil bagian Kota Bima sesuai PMK/89/PMK.07/2024.
 - 2) Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik mengalami peningkatan dibandingkan Tahun Anggaran 2023 disebabkan antara lain karena adanya peningkatan Alokasi Realisasi berdasarkan Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian APBN TA 2024.
- b. Realisasi Dana Alokasi Umum mengalami Peningkatan dibandingkan Tahun Anggaran 2023 disebabkan antara lain karena adanya peningkatan Alokasi Dana Alokasi Umum berdasarkan kebijakan Fiskal Tahun 2024.
- c. Rincian Saldo Dana Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	451.216.000,00	838.443.000,00	185,82	2.506.766.425,00
DBH PPh Pasal 21	0,00	6.915.127.000,00	0,00	6.828.466.968,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	5.918.720.000,00	178.769.000,00	3,02	415.565.539,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	18.287.900.000,00	18.757.032.000,00	102,57	17.992.909.872,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara – <i>Royalty</i>	39.490.392.000,00	39.207.118.000,00	99,28	26.628.033.453,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan - Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	27.533.000,00	27.533.000,00	100,00	50.097.586,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.099.017.000,00	1.099.017.000,00	100,00	1.473.902.211,00
Jumlah	65.274.778.000,00	67.023.039.000,00	102,68	55.895.742.054,00

Dana Bagi Hasil yang diterima pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp67.023.039.000,00 tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 dan PMK 89 Tahun 2024 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil, karena dana tersebut belum ditransfer ke Kas Daerah Kota Bima.

- d. Rincian Saldo Dana Alokasi Umum yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 5.1

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAU	419.790.761.000,00	419.790.761.000,00	100	430.904.056.950,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	8.200.000.000,00	8.200.000.000,00	100	8.200.000.000,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	20.831.859.000,00	20.831.859.000,00	100	14.835.300.000,00
DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan	19.710.880.000,00	19.710.880.000,00	100	0,00
DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan	17.519.713.000,00	17.519.713.000,00	100	0,00
DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	2.228.421.000,00	2.228.421.000,00	100	0,00
Jumlah	488.281.634.000,00	488.281.634.000,00	100	453.939.356.950,00

Dana Alokasi Umum yang diterima pada TA 2024 sebesar Rp488.281.634.000,00, telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian APBN TA 2024.

- e. Rincian Saldo Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - PAUD	860.857.000,00	821.378.100,00	95,41	1.186.700.960,00
DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD	9.437.615.000,00	8.375.897.700,00	88,75	3.655.596.744,00
DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP	9.763.671.000,00	8.539.808.650,00	87,47	1.238.372.495,00
DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SKB	0,00	0,00	0,00	606.855.775,00
DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler -Perpustakaan Daerah	500.000.000,00	493.473.000,00	98,69	0,00
DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Penugasan - Penguatan Intervensi Stunting	11.376.116.000,00	10.725.156.174,00	94,28	0,00
DAK Fisik - Bidang Jalan - Reguler - Jalan	0,00	0,00	0,00	14.039.613.511,00
DAK Fisik - Bidang Air Minum - Reguler	7.625.496.000,00	6.191.487.155,00	81,19	5.891.507.700,00
DAK Fisik - Bidang Sanitasi - Reguler	6.504.542.000,00	6.496.760.000,00	99,88	7.260.280.000,00
DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Penugasan - Keluarga Berencana	1.904.952.000,00	1.860.997.000,00	97,69	2.053.758.280,00
DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Reguler - Penguatan Percepatan Penurunan Stunting	0,00	0,00	0,00	878.800.000,00
DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Reguler - Pengendalian Penyakit	0,00	0,00	0,00	85.994.300,00
DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Reguler - Penguatan Sistem Kesehatan	8.236.258.000,00	7.752.148.400,00	94,12	5.526.073.402,00
Jumlah	56.209.507.000,00	51.257.106.179,00	91,19	42.423.553.167,00



Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang diterima pada TA 2024 sebesar Rp51.257.106.179,00, tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian APBN TA 2024 pada Lampiran Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2024 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota disebabkan Transfer DAK Fisik ke RKUD berdasarkan Realisasi Penyerapan DAK Fisik oleh Pemerintah Daerah melalui Aplikasi OM-SPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara). Pada Pemerintah Kota Bima Penyerapan DAK Fisik TA 2024 sebesar Rp50.387.470.438,00.

- f. Rincian Saldo Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAK Non Fisik - BOS Reguler	21.964.800.000,00	21.964.980.000,00	100,00	19.630.299.800,00
DAK Non Fisik - BOS Kinerja	900.000.000,00	900.000.000,00	100,00	1.042.500.000,00
DAK Non Fisik - TPG PNSD	46.909.888.600,00	46.470.507.000,00	99,06	39.325.406.520,00
DAK Non Fisik - Tamsil Guru PNSD	1.134.251.000,00	1.308.001.000,00	115,32	1.009.999.950,00
DAK Non Fisik - BOP PAUD	4.594.670.000,00	4.549.675.000,00	99,02	4.365.496.000,00
DAK Non Fisik - BOP Pendidikan Kesetaraan	1.761.050.000,00	1.651.550.000,00	93,78	1.633.700.000,00
DAK Non Fisik - BOKKB – BOK	3.720.628.000,00	3.500.158.822,00	94,07	8.609.476.668,00
DAK Non Fisik - BOKKB - Pengawasan Obat dan Makanan	427.331.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik - BOKKB - Akreditasi Puskesmas	4.885.869.000,00	4.885.869.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik - BOKKB – BOKB	2.705.932.000,00	2.354.790.835,00	87,02	3.555.064.242,00
DAK Non Fisik - PK2UKM	642.324.000,00	636.965.450,00	99,17	434.261.629,00
DAK Non Fisik - Fasilitas Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	432.394.800,00
DAK Non Fisik - Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406.000.000,00	306.948.100,00	75,60	481.725.079,00
DAK Non Fisik - Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	520.000.000,00	503.156.926,00	96,76	196.574.000,00
Jumlah	90.572.743.600,00	89.032.602.133,00	98,30	80.716.898.688,00

Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang diterima pada TA 2024 sebesar Rp89.032.597.133,00, tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian APBN TA 2024 pada Lampiran Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2024 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota disebabkan Transfer DAK Non Fisik ke RKUD berdasarkan Realisasi Penyerapan DAK Non Fisik oleh Pemerintah Daerah melalui Aplikasi ALADIN (Aplikasi Pelaporan DAK Non fisik). Pada Pemerintah Kota Bima Penyerapan DAK Non Fisik Rp88.274.734.151,00.

2. Dana Insentif Daerah (DID) yang diterima pada TA 2024 sebesar Rp0,00, telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian APBN TA 2024.



3. Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur yang diterima pada TA 2024 sebesar Rp0,00, telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian APBN TA 2024.
4. Dana Keistimewaan yang diterima pada TA 2024 sebesar Rp0,00, telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian APBN TA 2024.
5. Dana Desa yang diterima pada TA 2024 sebesar Rp0,00, telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian APBN TA 2024.
6. Insentif Fiskal yang diterima pada TA 2024 sebesar Rp2.793.929.000,00, telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian APBN TA 2024.

5.1.1.2.2 Transfer Antar Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA TA 2024 dan 2023 yaitu rincian saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Bagi Hasil	62.187.062.663,00	59.365.617.238,00	95,46	54.382.999.938,00
Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	3.622.903.200,00
Jumlah	62.187.062.663,00	59.365.617.238,00	95,46	58.005.903.138,00

Penjelasan:

1. Rincian Pendapatan Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	10.635.913.598,00	8.469.439.308,00	79,63	7.875.547.294,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8.155.931.867,00	8.655.253.560,00	106,12	7.152.234.289,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	21.382.493.124,00	22.681.549.478,00	106,08	20.631.215.848,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	41.921.250,00	38.815.791,00	92,59	40.784.440,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	21.970.802.824,00	19.520.559.101,00	88,85	18.683.218.067,00
Jumlah	62.187.062.663,00	59.365.617.238,00	95,46	54.382.999.938,00

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Bagi Hasil di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

- a. Peningkatan realisasi Pendapatan Bagi hasil pajak kendaraan bermotor sesuai Alokasi SK Gubernur NTB Nomor 100.3.3.1-143 Tahun 2025, alokasi DBH Kendaraan bermotor bagian Kota Bima meningkat disebabkan meningkatnya penerimaan Propinsi atas Pajak Kendaraan Bermotor dan Paak Rokok.



- b. Tidak tercapainya Pendapatan Dana Bagi Hasil dari Target Pendampatan Bagi Hasil Propinsi disebabkan pendapatan untuk bulan Desember 2024 ditransfer Tahun 2025 dan diakui sebagai Piutang Tranfer Propinsi NTB sebesar Rp3.448.116.876,00.
2. Rincian Pendapatan Bantuan Keuangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	3.622.903.200,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	3.622.903.200,00

Tahun Anggaran 2024 Kota Bima tidak mendapatkan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi NTB maupun Pemerintah Daerah Lainnya.

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-Lain Pendapatan yang Sah TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Lain-lain Pendapatan	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	11.254.833.974,00	10.472.591.213,00	93,05	9.461.776.963,00
Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	0,00	74.289.602.461,00	0,00	0,00
Jumlah	11.254.833.974,00	84.762.193.674,00	753,12	9.521.776.963,00

Penjelasan:

1. Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara yang berasal dari keuntungan bersih pemegang izin usaha pertambangan khusus PT. AMMAN MINERAL NUSA TENGGARA sesuai Berita Acara Rekonsiliasi Nomor BA.914/059.A/BAPPENDA/2024.
2. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP TA 2024 atas klaim JKN atas pelayanan kesehatan pada FKTP.
3. Rincian Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Dana Kapitas JKN pada FKTP Tahun 2024 dan 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

Puskesmas	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023
PKM Mpunda	2.486.586.916,00	2.294.524.403,00
PKM Rasanae Timur	922.889.577,00	831.943.062,00
PKM Paruga	2.127.129.891,00	1.884.855.292,00

Puskesmas	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023
PKM Penanae	2.150.030.613,00	1.957.307.633,00
PKM Kolo	428.433.661,00	411.862.204,00
PKM Kumbe	503.434.010,00	457.552.311,00
PKM Jatibaru	1.854.086.545,00	1.623.732.058,00
Jumlah	10.472.591.213,00	9.461.776.963,00

5.1.2 Belanja Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Daerah TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

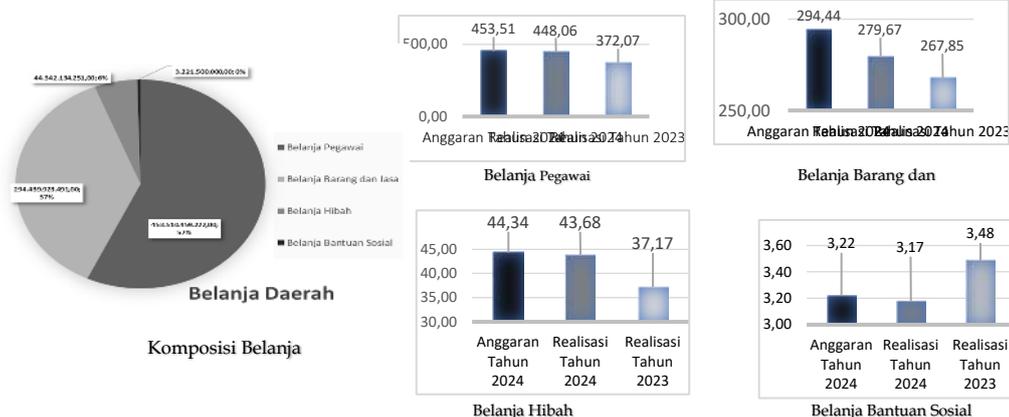
Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Operasi	795.514.016.964,00	774.585.834.029,00	97,37	680.574.756.827,25
Belanja Modal	129.620.124.937,00	117.434.068.509,00	90,60	147.479.520.226,00
Belanja Tak Terduga	3.088.350.377,00	1.305.034.700,00	42,26	1.862.720.872,00
Jumlah	928.222.492.278,00	893.324.937.238,00	96,24	829.916.997.925,25

5.1.2.1 Belanja Operasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Operasi TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Operasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pegawai	453.510.459.222,00	448.064.545.062,00	98,80	372.071.721.926,00
Belanja Barang dan Jasa	294.439.923.491,00	279.668.139.717,00	94,98	267.851.512.668,25
Belanja Hibah	44.342.134.251,00	43.680.149.250,00	98,51	37.168.222.233,00
Belanja Bantuan Sosial	3.221.500.000,00	3.173.000.000,00	98,49	3.483.300.000,00
Jumlah	795.514.016.964,00	774.585.834.029,00	97,37	680.574.756.827,25

Komposisi realisasi Belanja Operasi TA 2024 digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.





Rincian saldo Belanja Operasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 di masing-masing SKPD dapat dilihat pada *lampiran 5.1.1*.

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan	294.425.610.796,00	292.061.775.652,00	99,20	244.216.882.843,00
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	73.521.033.451,00	71.927.898.271,00	97,83	62.332.814.300,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	70.123.168.627,00	69.020.702.605,00	98,43	52.335.251.611,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	10.167.414.761,00	10.099.123.342,00	99,33	9.913.395.633,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	335.938.362,00	51.450.000,00	15,32	228.909.962,00
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	345.999.600,00	312.399.600,00	90,29	455.799.600,00
Belanja Pegawai BLUD	4.591.293.625,00	4.591.195.592,00	100,00	2.588.667.977,00
Jumlah	453.510.459.222,00	448.064.545.062,00	98.80	372.071.721.926,00

Penjelasan:

- Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Pegawai di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 - Penambahan Penggajian PNS;
 - Penambahan penggajian PPPK;
 - Pembayaran Tambahan Penghasilan Guru 50% untuk THR;
 - Penambahan Tambahan Penghasilan Pegawai PNS dan PPPK.
- Rincian saldo Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 di masing-masing SKPD dapat dilihat pada *lampiran 5.1.2*.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Barang	83.067.282.797,00	79.126.969.743,00	95,23	81.346.245.862,96
Belanja Jasa	106.145.526.215,00	99.293.316.888,00	93,55	94.683.151.800,00
Belanja Pemeliharaan	14.921.453.325,00	13.687.909.304,00	91,73	11.938.036.803,00
Belana Perjalanan Dinas	56.785.313.487,00	54.608.491.215,00	96,17	51.486.586.152,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 5.1

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.410.605.000,00	2.852.150.000,00	83,63	2.917.431.258,78
Belanja Barang dan Jasa BOS	21.204.400.800,00	21.195.052.000,00	99,96	16.085.406.650,51
Belanja Barang dan Jasa BLUD	8.905.341.867,00	8.904.250.567,00	99,99	9.394.654.141,00
Jumlah	294.439.923.491,00	279.668.139.717,00	94,98	267.851.512.668,25

Penjelasan:

- Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Barang dan Jasa di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 - Penurunan Belanja Barang Pakai Habis dibanding TA 2023 akibat adanya penghematan belanja barang sebesar Rp2.328.079.119,96;
 - Penurunan Belanja Alat Tulis Kantor dibanding TA 2023 akibat adanya penghematan belanja barang sebesar Rp1.502.098.488,00;
 - Penurunan Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat dibanding TA 2023 akibat adanya penghematan belanja barang sebesar Rp9.942.532.774,00;
 - Peningkatan Belanja Barang Jasa Dana BOS sebesar Rp 5.109.645.349,49 dikarenakan penggabungan belanja barang jasa Dana BOSP yaitu atas belanja barang jasa dana BOS negeri dan dana BOP PAUD negeri sesuai PMK Nomor 102 Tahun 2024 tentang penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan kegiatan yang didanai dari dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya dalam anggaran pendapatan belanja daerah; dan
 - Peningkatan Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.121.905.063,00 disebabkan penyesuaian Penetapan biaya perjalanan dinas sesuai Keputusan Walikota Bima Nomor 188.45/10/019/I/2024 tentang Penetapan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bima.
- Rincian saldo Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 di masing-masing SKPD dapat dilihat pada *lampiran 5.1.3*.

5.1.2.1.5 Belanja Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Hibah TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 5.1

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	140.729.233,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	35.454.520.251,00	34.934.520.250,00	98,53	33.479.537.000,00
▪ Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	23.439.381.000,00	23.439.381.000,00	100,00	2.693.941.000,00
▪ Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	845.000.000,00	820.000.000,00	97,04	7.810.000.000,00
▪ Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	11.170.139.251,00	10.675.139.250,00	95,57	22.975.596.000,00
▪ Belanja Hibah kepada Koperasi	0,00	0,00	0,00	0,00
▪ Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	0,00	0,00	0,00	0,00
▪ Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah Dana BOS	2.767.560.000,00	2.767.560.000,00	100,00	2.570.100.000,00
▪ Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
▪ Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	2.767.560.000,00	2.767.560.000,00	100	2.570.100.000,00
▪ Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	0,00	0,00	0,00	0,00
▪ Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	997.254.000,00	997.254.000,00	100,00	977.856.000,00
▪ Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	997.254.000,00	997.254.000,00	100	977.856.000,00
Belanja Hibah Dana BOSP	5.122.800.000,00	4.980.815.000,00	97,23	0,00
▪ Belanja Hibah Dana BOSP – BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
▪ Belanja Hibah Dana BOSP - BOP PAUD	3.514.370.000,00	3.471.385.000,00	98,78	0,00
▪ Belanja Hibah Dana BOSP - BOP Kesetaraan	1.608.430.000,00	1.509.430.000,00	93,84	0,00
Jumlah	44.342.134.251,00	43.680.149.250,00	98,51	37.168.222.233,00



Penjelasan:

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Hibah di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Belanja Hibah untuk penanganan PEMILU dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Hibah kepada KPU sebesar Rp13.000.000.000,00;
 - b. Belanja Hibah kepada Bawaslu sebesar Rp5.700.000.000,00;
 - c. Belanja Hibah kepada POLRES sebesar Rp2.481.881.000,00;
 - d. Belanja Hibah kepada TNI /KODIM sebesar Rp1.250.000.000,00;
 - e. Belanja Hibah kepada Detasemen Polisi Militer IX/2-2 sebesar Rp50.000.000,00;
 - f. Belanja Hibah kepada Pangkalan TNI AL sebesar Rp20.000.000,00; dan
 - g. Belanja Hibah kepada Pangkalan TNI AU sebesar Rp20.000.000,00.
2. Pemberian Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia merupakan pemberian hibah kepada:
 - a. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Bima berupa uang yang didasarkan pada Keputusan Wali Kota Bima Nomor 100.3.3.3/830/XII/2024 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Hibah kepada Lembaga/Organisasi masyarakat Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp45.000.000,00.;
 - b. PGRI, KONI, Dewan Pendidikan, *Foreign language Institute* ,KORMI, LPPM dan Kelompok Masyarakat lainnya berupa uang yang di dasarkan pada Keputusan Walikota Bima nomor 100.3.3.3/776/XI/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Bima Nomor: 188.45/158/420/II/2024 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Masyarakat Tahun Anggaran 2024 dengan rincina Hibah ke KONI sebesar Rp1.500.000.000,00, PGRI sebesar Rp150.000.000,00;
 - c. DEKRANASDA Kota Bima berupa uang yang didasarkan pada Keputusan Wali Kota Bima Nomor 188.3.3.3/343/510/IV/2024 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Hibah kepada Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) Kota Bima Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp500.000.000,00; dan
 - d. Masjid dan Mushala se Kota Bima, berupa uang yang didasarkan pada Keputusan Wali Kota Bima Nomor 188.45/199/400/II/2024 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Hibah kepada Masjid dan Mushala se Kota Bima Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.045.000.000,00.
3. Pemberian Hibah Dana BOS merupakan pemberian hibah kepada satuan pendidikan dasar, dan/atau menengah dan/atau khusus negeri (bila dari provinsi) dan swasta (bila dari provinsi dan kabupaten/kota) selama TA 2024 yang didasarkan pada pada keputusan Wali Kota Bima Nomor 100.3.3.3/538/VII/2024, tentang Penetapan besaran Alokasi Anggaran Hibah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang diterima Oleh Satuan Pendidikan Swasta Kota Bima TA. 2024.
4. Pemberian Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik merupakan pemberian hibah kepada Partai Politik yang didasarkan pada Keputusan Wali Kota Bima Nomor 188.45/140/300/II/2024 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Hibah kepada Partai Politik yang mendapatkan Kursi di DPRD Kota Tahun Anggaran 2024 dengan nilai bantuan keuangan kepada masing-masing partai politik diuraikan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 5.1

Partai Politik	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Partai Amanat Nasional	155.832.000,00	155.832.000,00	100	146.448.000,00
Partai Bulan Bintang	81.504.000,00	81.504.000,00	100	96.528.000,00
Partai Demokrat	114.567.000,00	114.567.000,00	100	95.424.000,00
Partai Gerakan Indonesia Raya	93.420.000,00	93.420.000,00	100	89.436.000,00
Partai Golongan Karya	165.195.000,00	165.195.000,00	100	164.160.000,00
Partai Hati Nurani Rakyat	60.168.000,00	60.168.000,00	100	64.104.000,00
Partai Keadilan Sejahtera	84.378.000,00	84.378.000,00	100	67.812.000,00
Partai Kebangkitan Bangsa	44.298.000,00	44.298.000,00	100	59.064.000,00
Partai NasDem	92.310.000,00	92.310.000,00	100	69.312.000,00
Partai PERINDO	36.918.000,00	36.918.000,00	100	49.224.000,00
Partai Persatuan Pembangunan	57.258.000,00	57.258.000,00	100	76.344.000,00
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	11.406.000,00	11.406.000,00	100	0,00
Jumlah	997.254.000,00	997.254.000,00	100	977.856.000,00

- Pemberian Hibah Dana BOSP merupakan pemberian hibah kepada Satuan pendidikan PAUD selama TA 2024 yang didasarkan pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 211/P/2024, tentang penerima dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Komerja, Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kinerja Tahun Anggaran 2024.
- Rincian belanja hibah pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada *lampiran 5.1.4*.

5.1.2.1.6 Belanja Bantuan Sosial

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Bantuan Sosial yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	133.000.000,00	114.500.000,00	86,09	1.583.250.000,00
▪ Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	133.000.000,00	114.500.000,00	86,09	1.583.250.000,00
▪ Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	1.888.500.000,00	1.858.500.000,00	98,41	1.900.050.000,00
▪ Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	1.888.500.000,00	1.858.500.000,00	98,41	1.900.050.000,00
▪ Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	100,00	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 5.1

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
▪ Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	100,00	0,00
▪ Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	0,00	0,00	0,00
▪ Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	0,00	0,00	0,00
▪ Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	3.221.500.000,00	3.173.000.000,00	98,49	3.483.300.000,00

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Bantuan Sosial di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 - a. Penurunan Realisasi belanja Bantuan Sosial disebabkan karena berkurangnya alokasi bantuan sosial ke masyarakat yang sudah terpenuhi kebutuhannya pada tahun-tahun sebelumnya;
2. Pemberian Bantuan Sosial berdasarkan :
 - a. Sesuai dengan SK Walikota Bima Nomor 188.45/293/400/III/2024 tentang Penetapan dan besaran bantuan sosial kepada individu (Pelajar/mahasiswa) Kota Bima TA 2024. Pada SKPD Sekretariat Daerah sebesar Rp113.000.000,00;
 - b. SK Walikota Bima Nomor 100.3.3.3/657/IX/2024 tentang Penetapan Penerima Bantuan Rumah Swadaya Kota Bima TA 2024 pada SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar R325.000.000,00p;
 - c. SK Walikota Bima Nomor 100.3.3.3/756/XI/2024 tentang Penetapan Penerima Bantuan Rumah Swadaya Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana Kota Bima TA 2024 pada SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp875.000.000,00; dan
 - d. SK Walikota Bima Nomor 100.3.3.3/608/VIII/2024 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Tunai Beresiko Stunting Kota Bima TA 2024 pada SKPD Dina Sosial sebesar Rp1.858.500.000,00.

5.1.2.2 Belanja Modal

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 5.1

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal - Tanah	3.945.555.000,00	2.282.760.420,00	57,86	1.094.391.000,00
Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	24.959.796.733,00	23.323.712.118,00	93,45	35.594.628.839,00
Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	46.622.375.275,00	42.504.291.643,00	91,17	49.102.960.640,00
Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan	51.877.747.829,00	47.137.157.328,00	90,86	59.909.921.028,00
Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya	149.200.100,00	148.641.000,00	99,63	1.757.618.719,00
Belanja Modal - Aset Lainnya	2.065.450.000,00	2.037.506.000,00	98,65	20.000.000,00
Jumlah	129.620.124.937,00	117.434.068.509,00	90,60	147.479.520.226,00

Penjelasan:

Rincian saldo Belanja Modal yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat pada *lampiran 5.1.5*.

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Tanah TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Tanah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Tanah Persil	3.834.661.400,00	2.276.906.460,00	59,38	894.391.000,00
Belanja Modal Tanah Non Persil	110.893.600,00	5.853.960,00	5,28	200.000.000,00
Belanja Modal Lapangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Tanah BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	3.945.555.000,00	2.282.760.420,00	57,86	1.094.391.000,00

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal - Tanah di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 - a. Karena adanya dukungan penanganan Masyarakat yang terdampak penataan Sungai;
 - Sungai Lanco Kelurahan Jatibaru Timur Sesuai Keputusan Walikota Bima Nomor:100 tentang Penetapan Lokasi Lahan Dukungan Kegiatan National Urban Flood Resilience Project Kelurahan Jatibaru Timur Kecamatan Asakota Kota Bima Tahun 2024.
 - Sungai Ntobo di Kelurahan Ntobo Sesuai Keputusan Walikota Bima Nomor: 100.3.3.3/755/XI/2024 tentang Penetapan Lokasi Lahan Dukungan Kegiatan *National Urban Flood Resilience Project* Kelurahan Ntobo Kecamatan Raba Kota Bima Tahun 2024.
 - b. Perluasan Lahan Pabrik Es di Kelurahan Kolo Sesuai Keputusan Walikota Bima Nomor: 100.3.3.3/549/VI/2024 tentang Penetapan Lokasi Lahan Pabrik Es Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima Tahun 2024.
 - c. Serta Pengembangan Depot Arsip Kelurahan Sadia Sesuai Keputusan Walikota Bima Nomor: 100.3.3.3/807/XII/2024 tentang Penetapan Lokasi Lahan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 5.1

Pengembangan Depot Arsip Kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima Tahun 2024.

- Rincian saldo Belanja Modal - Tanah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat pada lampiran 5.1.6.

5.1.2.2.2 Belanja Modal - Peralatan dan Mesin

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Peralatan dan Mesin TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Besar	605.000.000,00	590.000.000,00	97,52	881.604.400,00
Belanja Modal Alat Angkutan	5.595.297.250,00	5.483.534.900,00	98,00	12.408.593.312,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	114.950.000,00	114.950.000,00	100,00	2.870.000,00
Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.639.373.570,00	3.309.862.510,00	90,95	3.706.249.100,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	471.099.940,00	449.413.650,00	95,40	709.732.025,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	8.305.058.500,00	7.557.595.823,00	91,00	11.066.971.110,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	295.792.390,00	280.550.000,00	94,85	2.168.946.800,00
Belanja Modal Komputer	5.319.088.475,00	4.975.893.975,00	93,55	4.500.522.092,00
Belanja Modal Alat Eksplorasi	16.255.000,00	16.255.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00	64.740.000,00
Belanja Modal Alat Peraga	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00	84.400.000,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	33.300.000,00	33.200.000,00	99,70	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	73.299.100,00	72.143.000,00	98,42	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	441.282.508,00	440.313.260,00	99,78	0,00
Jumlah	24.959.796.733,00	23.323.712.118,00	93,45	35.594.628.839,00

Penjelasan:

- Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal - Peralatan dan Mesin di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya antaranlain disebabkan sudah terpenuhinya kebutuhan alat angkutan diuraikan diantaranya sebagai berikut:



- a. Penurunan Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp6.925.058.412,00;
 - b. Penurunan Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp 3.509.375.287,00; dan
 - c. Penurunan Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp1.888.396.800,00.
2. Rincian saldo Belanja Modal - Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat pada *lampiran 5.1.7*.

5.1.2.2.3 Belanja Modal - Gedung dan Bangunan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Gedung dan Bangunan TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bangunan Gedung	44.061.965.049,00	39.948.213.549,00	90,66	45.850.114.214,00
Belanja Modal Monumen	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Bangunan Menara	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	902.590.000,00	898.829.766,00	99,58	3.252.846.426,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.657.820.226,00	1.657.248.328,00	99,97	0,00
Jumlah	46.622.375.275,00	42.504.291.643,00	91,17	49.102.960.640,00

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal - Gedung dan Bangunan di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya Penurunan Belanja Modal Bangunan dan Gedung karena adanya Penurunan Target Anggaran dibanding pada tahun sebelumnya, pada tahun 2024 Pemerintah Kota Bima memprioritaskan pada Pembangunan gedung pada Sekolah dan Taman Kota dan Taman untuk rumah dinas Kejaksaan.
2. Rincian saldo Belanja Modal - Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat pada *lampiran 5.1.8*.

5.1.2.2.4 Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	26.720.978.940,00	24.164.394.998,00	90,43	40.043.999.117,00
Belanja Modal Bangunan Air	20.546.768.889,00	18.471.260.330,00	89,90	19.865.921.911,00
Belanja Modal Instalasi	1.730.000.000,00	1.726.502.000,00	99,80	0,00
Belanja Modal Jaringan	2.880.000.000,00	2.775.000.000,00	96,35	0,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	51.877.747.829,00	47.137.157.328,00	90,86	59.909.921.028,00



Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya karena adanya penurunan alokasi DAK Fisik bidang Jalan dan jembatan, bidang Air minum dan bidang Irigasi dan jaringan.
2. Rincian saldo Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat pada *lampiran 5.1.9*.

5.1.2.2.5 Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	98.750.000,00	98.191.000,00	99,43	1.640.198.419,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Hewan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Biota Perairan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud* (Salah dr BAS 1317)	0,00	0,00	0,00	117.420.300,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	50.450.100,00	50.450.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	149.200.100,00	148.641.000,00	99,63	1.757.618.719,00

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya berupa buku-buku perpustakaan pada Tahun Anggaran 2024, serta dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, disebabkan oleh telah terpenuhinya kebutuhan buku bahan perpustakaan. Salah satu diantaranya adalah penurunan Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebesar Rp1.542.007.419,00.
2. Rincian saldo Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat pada *lampiran 5.1.10*.

5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Aset Lainnya TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Aset Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 5.1

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud				
• Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - <i>Goodwill</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
• Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Lisensi dan <i>Franchise</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
• Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Hak Cipta	0,00	0,00	0,00	0,00
• Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Hak Paten	0,00	0,00	0,00	0,00
• Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - <i>Software</i>	2.065.450.000,00	2.037.506.000,00	98,65	20.000.000,00
• Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Kajian	0,00	0,00	0,00	0,00
• Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Aset Tidak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya	0,00	0,00	0,00	0,00
• Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
• Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Aset Tidak Berwujud Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya BLUD				
• Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	2.065.450.000,00	2.037.506.000,00	98,65	20.000.000,00

Penjelasan

- Sebab-sebab meningkatnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal Aset Lainnya di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya disebabkan adanya pengadaan aset berwujud berupa *software* diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp10.000.000,00;
 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp77.506.000,00; dan
 - Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp1.950.000.000,00.
- Rincian saldo Belanja Modal - Aset Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat pada *lampiran 5.1.11*.

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Tak Terduga TA 2024 dan 2023 yang hanya terdiri dari rincian atas saldo Belanja Tak Terduga yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Tak Terduga	3.088.350.377,00	1.305.034.700,00	42,26	1.862.720.872,00



Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Tak Terduga di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang digunakan diantaranya sebagai berikut:
 - a. Penanganan Bencana Banjir di Kota Bima Tahun 2024 pada BPBD Kota Bima sebesar Rp383.760.750,00;
 - b. Pengembalian Kelebihan Penerimaan Daerah atas Uang yang telah disetor Ke Kas Umum Daerah Kota Bima An. Alwi Yasin pada BPKAD Kota Bima sebesar Rp175.623.950,00; dan
 - c. Pemberian santunan kematian untuk masyarakat miskin Kota Bima pada BPKAD Kota Bima sebesar Rp745.650.000,00.

5.1.3 Pembiayaan Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pembiayaan Daerah TA 2024 dan 2023 yang dihitung dari:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penerimaan Pembiayaan	17.799.857.574,00	17.799.857.573,12	100,00	76.592.231.592,67
Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
Jumlah	16.799.857.574,00	17.799.857.573,12	105,95	74.592.231.592,67

5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Penerimaan Pembiayaan TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Penerimaan Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	17.799.857.574,00	17.799.857.573,12	100,00	76.583.026.629,67
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	9.204.963,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	17.799.857.574,00	17.799.857.573,12	100,00	76.592.231.592,67

Penjelasan:

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Penerimaan Pembiayaan di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diantaranya Penurunan Penerimaan Pembiayaan terjadi karena penyesuaian atas nilai SiLPA Tahun yang berakhir Anggaran 2023.



5.1.3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya TA 2024 dan 2023 yaitu rincian saldo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pelampauan Penerimaan PAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer				
Pelampauan Penerimaan Lain - Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Daerah yang Sah				
Pelampauan Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan				
Penghematan Belanja	17.799.857.574,00	17.799.857.573,12	100,00	76.583.026.629,67
Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisa Belanja Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	17.799.857.574,00	17.799.857.573,12	100,00	76.583.026.629,67

5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pengeluaran Pembiayaan TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pengeluaran Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.000.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00

Penjelasan:

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pengeluaran Pembiayaan di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diantaranya Pengeluaran Pembiayaan di TA 2024 terealisasi Rp0,00 disebabkan kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kota Bima TA 2024 tidak memungkinkan untuk melakukan pengeluaran pembiayaan pada penyertaan modal.



5.1.3.2.2 Penyertaan Modal Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Penyertaan Modal Daerah TA 2024 dan 2023 yang merupakan saldo Penyertaan Modal Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 dan persentase capaian realisasinya serta yang direalisasikan pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD):				
• Bank NTB Syariah	1.000.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
Jumlah	1.000.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00

Penjelasan:

Pemerintah Kota Bima pada TA 2024 tidak melakukan penyertaan modal

5.1.4 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran - SiLPA/(SiKPA)

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran - SiLPA/(SiKPA) TA 2024 dan 2023 yang dihitung dari:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
➤ Pendapatan Daerah	911.422.634.704,00	899.569.714.005,82	98,70	773.124.623.905,70
✓ Pendapatan Asli Daerah	132.054.217.467,00	57.053.592.781,82	43,20	51.449.182.945,70
✓ Pendapatan Transfer	768.113.583.263,00	757.753.927.550,00	98,65	712.153.663.997,00
✓ Lain-Lain Pendapatan yang Sah	11.254.833.974,00	84.762.193.674,00	753,12	9.521.776.963,00
➤ Belanja Daerah	928.222.492.278,00	893.324.937.238,00	96,24	829.916.997.925,25
✓ Belanja Operasi	795.514.016.964,00	774.585.834.029,00	97,37	680.574.756.827,25
✓ Belanja Modal	129.620.124.937,00	117.434.068.509,00	90,60	147.479.520.226,00
✓ Belanja Tak Terduga	3.088.350.377,00	1.305.034.700,00	42,26	1.862.720.872,00
➤ Pembiayaan Daerah	16.799.857.574,00	17.799.857.573,12	105,95	74.592.231.592,67
✓ Penerimaan Pembiayaan	17.799.857.574,00	17.799.857.573,12	100,00	76.592.231.592,67
✓ Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
Jumlah	0,00	24.044.634.340,94	0,00	17.799.857.573,12

Penjelasan:

Berdasarkan perhitungan di atas, Pemerintah Kota Bima pada TA 2024 memiliki SiLPA sebesar Rp24.044.634.340,94 dari nilai SiLPA tersebut terdapat SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat yang diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
➤ Dana SiLPA Terikat	
✓ Dana pada Kas di BLUD	4.650.490.635,28
✓ Dana pada Kas Dana BOS	0,00
✓ Dana pada Kas Dana Kapitasi pada FKTP	471.974,00
✓ Dana pada Kas Dana BOSP	180.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 5.1

Uraian	Nilai
✓ Dana pada Kas Dana BOK Puskesmas	198.264.561,00
✓ Dana pada Kas di Kas Daerah, Setara Kas dan Investasi Jangka Pendek yang didalamnya memuat dana:	□
• Sisa Dana Transfer Pusat – DAK Fisik yang terdiri dari:	
» DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan	2.098.850,00
» DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB	318.441.788,00
» DAK Fisik Bidang air minum	409.193.303,00
» DAK Fisik Bidang Sanitasi	5.788.000,00
• Sisa Dana Transfer Pusat – DAK Non-Fisik yang terdiri dari:	
» Dana Non Fisik Perlindungan Anak	17.491.200,00
» Dana Non Fisik Ketahanan pangan	3.045.400,00
» Dana Non Fisik BOK (Dinas kesehatan)	70.794.255,00
» » Dana Non Fisik BOKB (Dinas PP&KB)	728.483.484,00
» Dana Non Fisik PK2UMK (Dinas Koperindag)	59.229.000,00
» TPG(Dinas Dikpora)	867.013.510,00
» Dana Non Fisik Tamsil (Dinas Dikpora)	244.500.950,00
➤ Dana SiLPA Non-Terikat	
✓ Dana pada Kas di Bendahara Penerimaan	2.575.000,00
✓ Dana pada Kas di Kas Daerah, Setara Kas dan Investasi Jangka Pendek yang didalamnya memuat dana:	
• Sisa Dana Transfer Pusat – DBH SDA Mineral dan Batubara – <i>Royalty</i>	16.466.572.430,66

1. Rincian keberadaan SiLPA tersebut sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Kas di Kas Daerah	19.182.340.176,66
Kas di Kas Daerah diluar Bank	10.311.994,00
Kas di Bendahara Penerimaan	2.575.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00
Kas di BLUD	4.650.490.635,28
Kas Dana BOS	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	471.974,00
Setara Kas	0,00
Kas Dana BOSP	180.000,00
Kas Dana BOK Puskesmas	198.264.561,00
Jumlah	24.044.634.340,94

Kas di Kasda yang belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Bima per 31 Desember 2024 atas kelebihan pemotongan pajak sebesar Rp10.311.994,00 yang telah disetorkan kembali ke Rekening Kas Umum Daerah per tanggal 14 Mei 2025.



5.2 Penjelasan atas Pos-Pos LP SAL

LP SAL merupakan laporan yang menyajikan gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. LP SAL Pemerintah Kota Bima (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Kas di Kas Daerah	19.182.340.176,66	14.428.033.676,32
Kas di Kas Daerah diluar Bank	10.311.994,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	2.575.000,00	88.063.700,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	4.650.490.635,28	3.144.094.746,80
Kas Dana BOS	0,00	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	471.974,00	139.665.450,00
Setara Kas	0,00	0,00
Kas Dana BOSP	180.000,00	0,00
Kas Dana BOK Puskesmas	198.264.561,00	0,00
Jumlah	24.044.634.340,94	17.799.857.573,12

Saldo di atas merupakan Saldo Akhir Anggaran Lebih Akhir di Tahun 2024 dan 2023 pada Pemerintah Kota Bima Nilai Saldo Anggaran Lebih Awal ini juga merupakan saldo SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing - masing LRA.

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun 2024 dan 2023 yang hanya terdiri dari:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	17.799.857.573,12	76.583.026.629,67

Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Kota Bima pada TA 2023 dan 2022 yang dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2024 dan 2023 dan digunakan seluruhnya dalam kegiatan operasional serta pembiayaan Pemerintah Kota Bima selama TA 2024 dan 2023.

5.2.3 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun 2024 dan 2023 yang hanya terdiri dari:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	24.044.634.340,94	17.799.857.573,12



Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Kota Bima pada TA 2024 dan 2023 yang akan dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2023 dan 2024. Saldo tersebut sama dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing - masing LRA pada tahun berkenaan sebagaimana juga telah diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LRA pada *point 6.3.5*. Saldo tersebut juga sama dengan jumlah saldo dalam Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagaimana telah dijelaskan pada *point 6.6.5* di bawah.

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Tahun 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Koreksi SILPA	0,00	0,00

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

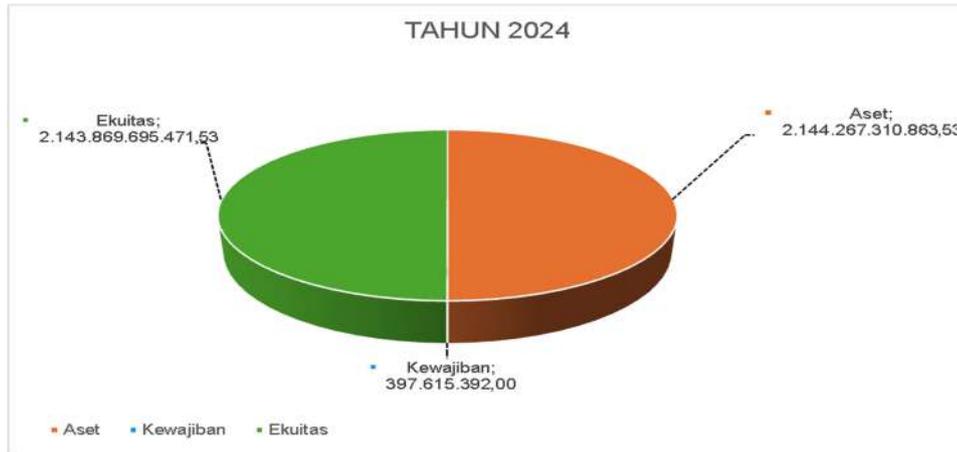
Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Anggaran Lebih Akhir milik Kota Bima per 31 Desember 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Kas di Kas Daerah	19.182.340.176,66	14.428.033.676,32
Kas di Kas Daerah diluar Bank	10.311.994,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	2.575.000,00	88.063.700,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	4.650.490.635,28	3.144.094.746,80
Kas Dana BOS	0,00	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	471.974,00	139.665.450,00
Setara Kas	0,00	0,00
Kas Dana BOSP	180.000,00	0,00
Kas Dana BOK Puskesmas	198.264.561,00	0,00
Jumlah	24.044.634.340,94	17.799.857.573,12

Saldo Anggaran Lebih Akhir yang tersaji dalam LP SAL ini sama besarnya dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing - masing LRA pada tahun berkenaan sebagaimana juga telah diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LRA pada *point 6.3.5*. Saldo tersebut juga sama dengan jumlah saldo dalam Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) sebagaimana telah dijelaskan pada *point 6.6.3* di atas.

5.3 PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Neraca Pemerintah Kota Bima terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca menunjukkan aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas. Neraca Pemerintah Kota Bima untuk per tanggal 31 Desember 2024 secara umum digambarkan sebagai berikut.



Secara lebih rinci, Neraca Pemerintah Kota Bima per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut.

5.3.1. ASET

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset sebagai berikut:

Saldo Aset pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2024 senilai Rp2.144.267.310.863,53 mengalami penurunan senilai Rp83.180.204.962,19 atau 3,73% dibandingkan dengan per 31 Desember 2023 senilai Rp2.227.447.515.825,72.

Perbandingan saldo aset Pemerintah Kota Bima periode tahun 2024 dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/Penurunan	%
1	Aset Lancar	79.873.740.021,91	121.892.245.057,06	(42.018.505.035,15)	(34,47)
2	Investasi Jangka Panjang	18.137.504.969,22	18.137.504.969,22	0,00	0,00
3	Aset Tetap	2.007.750.412.531,64	2.023.919.402.348,75	(16.168.989.817,11)	(0,80)
4	Properti Investasi	10.475.888.150,45	10.483.729.499,55	(7.841.349,10)	(0,07)
5	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Aset Lainnya	28.029.765.190,31	53.014.633.951,14	(24.984.868.760,83)	(47,13)
	Jumlah	2.144.267.310.863,53	2.227.447.515.825,72	(83.180.204.962,19)	(3,73)

5.3.1.1. Aset Lancar

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Lancar per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan



dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Lancar sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan	%
1	Kas dan Setara Kas	24.034.322.346,94	17.811.367.573,12	6.222.954.773,82	34,94
2	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Piutang Pajak Daerah	12.916.022.520,45	10.352.833.424,96	2.563.189.095,49	24,76
4	Piutang Retribusi Daerah	6.617.875.947,00	5.241.427.815,00	1.376.448.132,00	26,26
5	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	2.569.480.270,00	(2.569.480.270,00)	(100,00)
6	Piutang Lain - Lain PAD yang Sah	12.324.774.233,81	13.557.402.496,83	(1.232.628.263,02)	(9,09)
7	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	12.276.356.000,00	1.268.829.245,00	11.007.526.755,00	867,53
8	Piutang Transfer Antar Daerah	3.448.116.876,00	4.528.880.817,00	(1.080.763.941,00)	(23,86)
9	Piutang Lainnya	2.778.761.737,25	56.904.527.841,25	(54.125.766.104,00)	(95,12)
10	Penyisihan Piutang	(10.850.192.023,41)	(8.686.677.242,40)	(2.163.514.781,01)	24,91
11	Beban Dibayar Dimuka	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	0,00
12	Persediaan	16.313.952.383,87	18.330.422.816,30	(2.016.470.432,43)	(11,00)
	Jumlah	79.873.740.021,91	121.892.245.057,06	(42.018.505.035,15)	(34,47)

5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kas dan Setara Kas per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kas dan Setara Kas serta penjelasannya sebagai berikut

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan	%
1	Kas di Kas Daerah	19.182.340.176,66	14.428.033.676,32	4.754.306.500,34	32,95
2	Kas di Bendahara Penerimaan	2.575.000,00	88.063.700,00	(85.488.700,00)	(97,08)
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kas di BLUD	4.650.490.635,28	3.144.094.746,80	1.506.395.888,48	47,91
5	Kas Dana BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	471.974,00	139.665.450,00	(139.193.476,00)	(99,66)
7	Kas Lainnya	0,00	11.510.000,00	(11.510.000,00)	(100)
8	Setara Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Kas Dana Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Kas Dana BOSP	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
11	Kas Dana BOK Puskesmas	198.264.561,00	0,00	198.264.561,00	0,00
	Jumlah	24.034.322.346,94	17.811.367.573,12	6.222.954.773,82	34,94



Penjelasan :

1. Kas di Kas Daerah:

Pemerintah Kota Bima memiliki saldo Kas di Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2024 yang merupakan saldo di RKUD yang ditempatkan pada PT Bank NTB Syariah Cabang Bima dengan nomor rekening yaitu 005.21.00102.02-5 sebesar Rp19.182.340.176,66. Saldo yang disajikan tersebut telah merupakan hasil rekonsiliasi dengan pihak Bank NTB Syariah Cabang Bima yang didokumentasikan dalam berita acara rekonsiliasi. Pada akhir tahun terdapat selisih dalam rekonsiliasi bank dengan BKU. Pada laporan keuangan *unaudited*, tercantum nilai sebesar Rp10.311.994,00, yang seharusnya uang tersebut di luar RKUD. Namun, nilai tersebut telah dikeluarkan karena per 31 Desember 2024 uang diluar penguasaan BUD. Pada tahun 2025, dana sebesar Rp10.311.994,00 tersebut telah disetorkan kembali ke RKUD. Dalam saldo Kas di Kas Daerah tersebut, terdapat sisa dana (SiLPA) yang sifatnya mengikat dan tidak mengikat, sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos -Pos LRA pada Poin 5.3.5 di atas.

2. Kas di Bendahara Penerimaan :

Pemerintah Kota Bima memiliki saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp2.575.000,00. Saldo kas tersebut merupakan pendapatan yang diterima pada akhir Tahun 2024. Rincian saldo Kas di Bendahara Penerimaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Uraian	31 Desember 2024
1	Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Pertahanan pada Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.350.000,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pada Retribusi Pemanfaatan dan Aset Daerah	1.225.000,00
	Jumlah	2.575.000,00

Saldo kas di Bendahara Penerimaan tersebut telah disetorkan di awal Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Sisa Kas Belum Disetor 2024
1	Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Pertahanan pada Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (tanggal setor 18 Februari 2025)	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pada Retribusi Pemanfaatan dan aset Daerah (tanggal setor 17 Maret 2025)	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00
	Jumlah	1.225.000,00	1.350.000,00	2.575.000,00

3. Kas di Bendahara Pengeluaran :

Pemerintah Kota Bima menyajikan saldo Kas di Kas Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.



4. Kas di BLUD :

Pemerintah Kota Bima menyajikan saldo Kas di BLUD per tanggal 31 Desember 2024, yang dijelaskan sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2024
1	Saldo pada rekening nomor 005 01.00.005260- di Bank NTB Syariah Cabang Bima	4.599.573.297,95
2	Saldo pada rekening nomor 7194542784 di Bank BSI Cabang Bima	50.917.337,33
	Jumlah	4.650.490.635,28

5. Kas Dana BOS :

Pemerintah Kota Bima tidak memiliki saldo Kas Dana BOS per tanggal 31 Desember 2024 atau bernilai Rp0,00.

6. Kas Dana Kapitasi pada FKTP:

Pemerintah Kota Bima memiliki saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2024 sebesar Rp471.974,00 Rincian saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP dapat dilihat pada *lampiran 5.3.1*

7. Kas Lainnya :

Pemerintah Kota Bima tidak memiliki Kas Lainnya per tanggal 31 Desember 2024 atau bernilai Rp0,00.

8. Setara Kas:

Pemerintah Kota Bima tidak memiliki saldo Kas Setara Kas per tanggal 31 Desember 2024 atau bernilai Rp0,00.

9. Kas Dana Desa :

Pemerintah Kota Bima tidak memiliki saldo Kas Dana Desa per tanggal 31 Desember 2024 atau bernilai Rp0,00.

10. Kas Dana BOSP:

Pemerintah Kota Bima memiliki saldo Kas Dana BOSP per 31 Desember 2024 sebesar Rp180.000,00 yang tersebar pada 106 (seratus enam) Sekolah Negeri dan Swasta yang terdiri dari 82 (delapan puluh dua) Sekolah Dasar, 24 (Dua puluh empat) Sekolah Menengah Pertama dan 183 (Seratus delapan puluh tiga) pada TKN, TK Swasta, SKB, dan PKBM di seluruh Kota Bima. Rincian saldo Kas Dana BOS dapat dilihat pada *lampiran 5.3.2*.

11. Kas Dana BOK Puskesmas :

Pemerintah Kota Bima memiliki saldo Kas Dana BOK Puskesmas per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp198.264.561,00. Rincian saldo Kas Dana BOK Puskesmas dapat dilihat pada *lampiran 5.3.3*.

5.3.1.1.2 Investasi Jangka Pendek

Pemerintah Kota Bima memiliki Investasi Jangka Pendek per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

5.3.1.1.3 Piutang Pajak Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang Pajak Daerah per tanggal Neraca yaitu:

No	Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pajak Hotel	0,00	7.419.605,51	(7.419.605,51)	(100,00)
2	Pajak Restoran	0,00	110.092.863,10	(110.092.863,10)	(100,00)
3	Pajak Hiburan	0,00	1.700.000,00	(1.700.000,00)	(100,00)
4	Pajak Reklame	75.033.863,75	95.406.066,75	(20.372.203,00)	(21,35)
5	Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pajak Parkir	0,00	25.314.750,00	(25.314.750,00)	(100,00)
7	Pajak Air Tanah	2.945.373,80	1.599.824,60	1.345.549,20	84,11
8	Pajak Sarang Burung Walet	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	271.803.190,00	0,00	271.803.190,00	0,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan	11.878.628.843,00	9.558.957.265,00	2.319.671.578,00	24,27
11	Pajak Pajak BPHTB (Bea Perolehan Tanah dan Bangunan)	457.039.300,00	552.343.050,00	(95.303.750,00)	(17,25)
12	Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan dan/atau Minuman	198.382.250,70	0,00	198.382.250,70	0,00
13	Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tenaga Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan	7.802.849,20	0,00	7.802.849,20	0,00
15	Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Parkir	14.516.850,00	0,00	14.516.850,00	0,00
16	Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan	2.870.000,00	0,00	2.870.000,00	0,00
Jumlah		12.916.022.520,45	10.352.833.424,96	2.563.189.095,49	24,76

- Penjelasan sebab-sebab utama kenaikan/penurunan pada Piutang Pajak Daerah sebagai berikut:
 1. Adanya Perubahan Pencatatan dari tahun 2023 ke tahun 2024 atas piutang Piutang Pajak Hotel menjadi PBJT Jasa Perhotelan sesuai dengan nomenklatur baru di Undang-Undang No 1 tahun 2022 telah mengalami kenaikan yang disebabkan oleh penambahan piutang pada tahun 2024, berdasarkan penetapan yang telah diterbitkan melalui Surat Tagihan Pajak tahun 2024 sebesar Rp2.583.428,00. Selain itu, pembayaran atas Piutang PBJT Jasa Perhotelan tahun 2023 yang dilakukan pada tahun 2024 hanya senilai Rp2.200.184,31, sehingga terdapat selisih sebesar Rp383.243,69.
 2. Adanya Perubahan Pencatatan dari tahun 2023 ke tahun 2024 atas piutang Piutang Pajak Restoran menjadi PBJT Makanan dan/atau minuman sesuai dengan nomenklatur baru di Undang-Undang No 1 tahun 2022 telah mengalami kenaikan yang disebabkan oleh penambahan piutang pada tahun 2024 berdasarkan penetapan yang telah diterbitkan melalui Surat Tagihan Pajak tahun 2024 sebesar



Rp153.123.562,00 dan adanya penambahan Wajib Pajak baru atas Pajak Restoran. Selain itu, kenaikan terjadi akibat adanya pembayaran atas Piutang Pajak tahun 2023 yang dilakukan pada tahun 2024 hanya senilai Rp64.834.174,40, sehingga terdapat selisih sebesar Rp88.289.387,60.

3. Adanya Perubahan Pencatatan dari tahun 2023 ke tahun 2024 atas Piutang Pajak Hiburan menjadi PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan sesuai dengan nomenklatur baru di Undang-Undang No 1 tahun 2022 telah mengalami kenaikan dikarenakan belum adanya pembayaran atas piutang di tahun 2023 serta adanya penambahan atas piutang pada tahun 2024 berdasarkan penetapan yang sudah diterbitkan melalui Surat Tagihan Pajak tahun 2024 senilai Rp1.170.000,00. Meskipun demikian, penetapan Pajak Hiburan secara keseluruhan mengalami penurunan karena beberapa tempat usaha telah berhenti beroperasi, seperti Ideal Karaoke (Gunung Dua), Biliar Raba, dan ABM Zone.
4. Piutang Pajak Reklame mengalami penurunan yang disebabkan oleh pembayaran piutang tahun 2023 pada tahun 2024 sebesar Rp36.590.625,00, sedangkan penambahan piutang pada tahun 2024 berdasarkan penetapan yang telah diterbitkan melalui Surat Tagihan Pajak tahun 2024 hanya sebesar Rp16.218.422,00. Oleh karena itu, terdapat selisih penurunan piutang sebesar Rp20.372.203,00.
5. Adanya Perubahan Pencatatan dari tahun 2023 ke tahun 2024 atas Piutang Pajak Parkir menjadi PBJT Jasa Parkir sesuai dengan nomenklatur baru di Undang-Undang No 1 tahun 2022 telah mengalami penurunan yang disebabkan oleh pembayaran piutang tahun 2023 pada tahun 2024 sebesar Rp23.502.500,00, sementara penambahan piutang pada tahun 2024 berdasarkan penetapan yang telah diterbitkan melalui Surat Tagihan Pajak tahun 2024 hanya sebesar Rp13.320.600,00. Dengan demikian, terdapat selisih penurunan piutang sebesar Rp10.797.900,00.
6. Piutang Pajak Air Tanah mengalami kenaikan yang disebabkan oleh penambahan piutang pada tahun 2024 berdasarkan penetapan yang telah diterbitkan melalui Surat Tagihan Pajak tahun 2024 sebesar Rp2.650.578,00. Sementara itu, pembayaran piutang tahun 2023 yang dilakukan pada tahun 2024 hanya sebesar Rp1.305.028,80, sehingga terdapat selisih kenaikan piutang sebesar Rp1.345.549,20.
7. Piutang Pajak Sarang Burung Walet Mengalami kenaikan diakibatkan karna adanya penambahan piutang di tahun 2024 atas penetapanyang sudah diterbitkan surat tagihan pajak tahun 2024 senilai Rp7.000.000,00.
8. Piutang Pajak Mineral Logam dan Batuan Mengalami kenaikan diakibatkan karna adanya penambahan piutang di tahun 2024 atas penetapanyang sudah diterbitkan surat tagihan pajak tahun 2024 senilai Rp271.803.190,00.
9. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan mengalami kenaikan yang disebabkan oleh penambahan piutang pada tahun 2024 berdasarkan penetapan yang telah diterbitkan melalui Surat Tagihan Pajak tahun 2024 sebesar Rp3.066.058.767,00. Sementara itu, pembayaran piutang tahun 2023 yang dilakukan pada tahun 2024 hanya sebesar Rp743.175.371,00, sehingga terdapat selisih kenaikan piutang sebesar Rp2.322.883.396,00.

10. Piutang Pajak Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Mengalami Penurunan diakibatkan karena adanya pembayaran Piutang atas tahun 2023 di tahun 2024 senilai Rp95.303.750,00

▪ Penjelasan hal-hal penting lainnya:

1. Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Pajak Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2024 dan 2023 yang sudah diterbitkan surat tagihan pajak dan disampaikan kepada Wajib Pajak namun belum terbayar.
2. Terdapat saldo Piutang PBB-P2 pelimpahan dari KPP Pratama Raba Bima pada Tahun 2014 sebesar Rp1.690.174.713,00 dengan nomor berita acara pengalihan piutang Nomor : BA-17/WPJ.31/KP.02/2014 tanggal 07 Oktober 2014 (Berita Acara Serah Terima Terlampir).

Nilai piutang tersebut merupakan akumulasi dari tiga tahun PBB-P2 yaitu dari tahun 2011 s.d tahun 2013. Dengan rincian dan penjelasan sebagai berikut :

- a) Nilai Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang diserahkan pada tahun 2011 sebesar Rp499.987.066,00, tahun 2012 sebesar Rp575.191.240,00, dan tahun 2013 sebesar Rp614.996.407,00, sehingga total nilai piutang yang diserahkan mencapai Rp1.690.174.713,00. Pada saat penyerahan saldo piutang dari KPP Pratama kepada Pemerintah Kota Bima, telah dilakukan verifikasi bersama oleh kedua instansi dan dituangkan dalam berita acara kesepakatan.
 - b) Berdasarkan Berita Acara Penyerahan, dapat diketahui bahwa data yang disampaikan untuk Kota Bima mencakup periode tahun 1994 hingga tahun 2013. Namun, untuk tahun 2010 ke bawah (hingga tahun 1994), dinyatakan tidak terdapat piutang atau bernilai nihil. Dengan demikian, nilai piutang yang diakui hanya mencakup tiga tahun pajak, yaitu tahun 2011, 2012, dan 2013.
 - c) Sejak tahun 2014, pengelolaan Pajak PBB-P2 dilakukan oleh Pemerintah Kota Bima. Pengakuan piutang tetap memperhitungkan nilai piutang hasil pengalihan dari KPP Pratama Raba Bima, dan perhitungannya berlanjut hingga saat ini.
3. Rincian mutasi Piutang Pajak Daerah dapat dilihat pada *lampiran 5.3.4*.
 4. Rincian klasifikasi umur atas Piutang Pajak Daerah dapat dilihat pada *lampiran 5.3.5*.

5.3.1.1.4 Piutang Retribusi Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang Retribusi Daerah per tanggal Neraca yaitu:

- Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Piutang Retribusi Daerah sebagai berikut:

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ Penurunan	%
□ Piutang Retribusi Jasa Umum	700.751.082,00	517.371.640,00	183.379.442,00	35,44
□ Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	648.519.242,00	465.139.800,00	183.379.442,00	39,42



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 5.3

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ Penurunan	%
□ Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Telekomunikasi Menara	52.231.840,00	52.231.840,00	0,00	0,00
□ Piutang Retribusi Jasa Usaha	5.917.124.865,00	4.724.056.175,00	1.193.068.690,00	25,25
□ Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	595.800.000,00	411.765.000,00	184.035.000,00	44,69
□ Piutang Retribusi pasar Grosir dan/atau Pertokoan	5.321.324.865,00	4.312.291.175,00	1.009.033.690,00	23,40
Jumlah	6.617.875.947,00	5.241.427.815,00	1.376.448.132,00	26,26

- Penjelasan sebab-sebab utama kenaikan/penurunan* pada Piutang Retribusi Daerah sebagai berikut:

- Piutang Retribusi Jasa Umum sebesar Rp700.751.082,00 merupakan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang berasal dari Klaim BPJS di Tujuh Puskesmas dan RSUD.

- Piutang retribusi pelayanan kesehatan yang berasal dari Tujuh Puskesmas terdiri dari :

No	Puskesmas	Uraian	Bulan	Rincian	Keterangan
1	Penanae	Dana Klaim BPJS Puskesmas Bulan November dan Desember 2024 (Retribusi Pelayanan Kesehatan)	November	27.987.100,00	Dibayarkan Di Tahun 2025
			Desember	32.107.100,00	Dibayarkan Di Tahun 2025
			Saldo 31 Desember 2024		60.094.200,00
2	Rasanae Timur	Dana Klaim BPJS Puskesmas Bulan Oktober, November, dan Desember 2024 (Retribusi Pelayanan Kesehatan)	Oktober	11.848.100,00	Dibayarkan Di Tahun 2025
			November	19.866.200,00	
			Desember	13.835.100,00	Dibayarkan Di Tahun 2025
			Saldo 31 Desember 2024		45.549.400,00
3	Jatibaru	Dana Klaim BPJS Puskesmas Bulan November dan Desember 2024 (Retribusi Pelayanan Kesehatan)	November	33.312.100,00	Dibayarkan Di Tahun 2025
			Desember	29.206.300,00	Dibayarkan Di Tahun 2025
			Saldo 31 Desember 2024		62.518.400,00
4	Mpunda	Dana Klaim BPJS Puskesmas Bulan Oktober, November dan Desember 2024 (Retribusi Pelayanan Kesehatan)	Oktober	2.860.000,00	Dibayarkan Di Tahun 2025
			November	30.990.000,00	Dibayarkan Di Tahun 2025
			Desember	25.277.100,00	Dibayarkan Di Tahun 2025
			Saldo 31 Desember 2024		59.127.100,00
5	Kumbe	Dana Klaim BPJS Puskesmas Bulan Oktober, November 2024 (Retribusi Pelayanan Kesehatan)	Oktober	6.214.200,00	Dibayarkan Di Tahun 2025
			November	8.272.200,00	
			Desember	7.402.100,00	Dibayarkan Di Tahun 2025
			Saldo 31 Desember 2024		21.888.500,00
6	Paruga	Dana Klaim BPJS Puskesmas Bulan Oktober,	Oktober	2.857.100,00	Dibayarkan Di Tahun 2025



No	Puskesmas	Uraian	Bulan	Rincian	Keterangan
		November, Desember 2024 (Retribusi Pelayanan Kesehatan)	November	60.307.100,00	Dibayarkan Di Tahun 2025
			Desember	87.024.200,00	Dibayarkan Di Tahun 2025
Saldo 31 Desember 2024				150.188.400,00	
	Kolo	Dana Klaim BPJS Puskesmas Bulan November, Desember 2024 (Retribusi Pelayanan Kesehatan)	November	6.017.100,00	Dibayarkan Di Tahun 2025
			Desember	4.719.200,00	Dibayarkan Di Tahun 2025
Saldo 31 Desember 2024				10.736.300,00	
Jumlah				410.102.300,00	

- Piutang retribusi pelayanan kesehatan yang berasal dari RSUD senilai Rp238.416.942,00

No	UNIT	Uraian	Tahun	Rincian	Keterangan
1	RSUD	Klaim Obat bulan Agustus dan September	2024	32.111.942,00	Dibayarkan Di Tahun 2025
		Klaim Pending Bulan Agustus 2024	2024	54.025.000,00	Dibayarkan Di Tahun 2025
		Klaim Pending juli terakhir dan Klaim Susulan Bulan Juni	2024	152.280.000,00	Dibayarkan Di Tahun 2025
		Saldo 31 Desember 2024			238.416.942,00

- Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi yang berasal dari Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik tidak lagi menjadi penerimaan daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) serta Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 36 Tahun 2024.
- Piutang Retribusi Jasa Usaha merupakan piutang yang berasal dari Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah. Sesuai dengan nomenklatur baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis Retribusi Jasa Usaha untuk Pemakaian Kekayaan Daerah diubah menjadi Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah, dengan nilai sebesar Rp595.800.000,00. Terdapat peningkatan piutang retribusi jasa usaha dikarenakan wajib retribusi tidak melakukan kewajiban membayar tepat waktu sesuai penetapan yang telah diterbitkan.

Piutang pemanfaatan aset daerah terdapat pada

- Dinas Perumahan dan Pemukiman mengalami kenaikan piutang karena terdapat beberapa penetapan yang telah diterbitkan tetapi wajib retribusi ada yang telah membatalkan sewa sehingga menimbulkan piutang, Selain itu, terdapat piutang.
- Dinas kelautan mengalami kenaikan piutang akibat para penyewa mengalami rendahnya hasil tangkapan tidak sesuai harapan, beberapa nelayan memiliki modal terbatas dan memiliki kapal yang sudah tua.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengalami kenaikan piutang karena terdapat beberapa yang telah melakukan tanda tangan surat perjanjian di pertengahan tahun seperti di bulan juli sehingga wajib retribusi melakukan pembayaran di tahun berikutnya.

4. Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebesar Rp5.321.289.765,00 mengalami peningkatan. Masih terdapat penyewa yang belum memahami kewajiban membayar retribusi serta konsekuensi atas kelalaian dalam pembayarannya. Selain itu, banyak wajib retribusi yang tidak melakukan pembayaran karena menurunnya hasil penjualan akibat meningkatnya persaingan dengan *platform marketplace*.
5. Secara lebih rinci Piutang Retribusi Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 5.3.6** Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2024.

5.3.1.1.5 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per tanggal Neraca yaitu:

- Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD				
□ Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bank NTB)	0,00	2.461.315.900,00	(2.461.315.900,00)	(100,00)
□ Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (BPR NTB)	0,00	108.164.370,00	(108.164.370,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	2.569.480.270,00	(2.569.480.270,00)	(100,00)

- Penjelasan mengenai sebab utama terjadinya penurunan pada Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan menunjukkan bahwa pada tahun 2024, piutang tersebut mengalami penurunan akibat belum terdapat hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menjadi dasar pencatatan hak atas pendapatan daerah.

5.3.1.1.6 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang Lain - Lain PAD yang Sah per tanggal Neraca yaitu:

- Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Piutang Lain - Lain PAD yang Sah sebagai berikut:

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ Penurunan	%
Piutang Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	12.269.798.239,81	13.060.313.970,09	(790.515.730,28)	(6,05)



Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ Penurunan	%
Piutang Pendapatan Bunga	0,00	1.239.295,74	(1.239.295,74)	(100,00)
Piutang Pendapatan BLUD	0,00	495.849.231,00	(495.849.231,00)	(100,00)
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	54.975.994,00	0,00	54.975.994,00	0,00
Jumlah	12.324.774.233,81	13.557.402.496,83	(1.232.628.263,02)	(9,09)

- Penjelasan sebab-sebab utama kenaikan/penurunan pada Piutang Lain - Lain PAD yang Sah sebagai berikut:
 1. Piutang Lain - Lain PAD yang Sah berasal Piutang Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya yang merupakan hasil jual beli rumah dinas atas penyerahan piutang dari Kabupaten Bima di tahun 2023 mengalami penurunan karena adanya pembayaran di tahun 2024 atas piutang yang telah diterbitkan surat perjanjian jual beli di tahun 2023 senilai Rp789.988.593,53 dan adanya pembayaran di tahun 2023 yang telah di koreksi akibat tidak dilakukan pengurangan nilai piutang senilai Rp527.136,75.
 2. Terdapat Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atas Koreksi kurang volume atas temuan pemeriksaan Aset Tetap Jalan, Irgasi dan Jaringan yang sudah ada SKTJM-nya senilai Rp44.664.000,00 dengan rincian:
 - Peningkatan Jalan Kelurahan Kendo senilai Rp40.478.000,00;
 - Pembangunan Jembatan Nggarolo senilai Rp4.186.000,00.
 3. Terdapat Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atas Koreksi Kas di Kasda atas kelebihan potongan pajak yang dikarenakan double cair SP2D. Atas kelebihan pajak s.d. 31 Desember 2024 belum disetor Kasda. Namun nilai Kas di Kasda dalam LKPD tetap dicantumkan nilai sesuai kekurangan pajak tersebut yaitu Rp10.311.994,00.
 4. Adanya Reklasifikasi tahun 2024 karena perubahan kodifikasi piutang pendapatan pelayanan kesehatan BLUD pada RSUD menjadi retribusi pelayanan kesehatan RSUD.
 5. Secara lebih rinci Piutang Lain-Lain PAD yang Sah dapat dilihat pada **Lampiran 5.3.7. Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2024.**

5.3.1.1.7 Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang Transfer Pemerintah Pusat per tanggal Neraca yaitu:

- Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Piutang Dana Perimbangan	12.276.356.000,00	1.268.829.245,00	11.007.526.755,00	867,53
Jumlah	12.276.356.000,00	1.268.829.245,00	11.007.526.755,00	867,53

- Penjelasan sebab-sebab utama kenaikan/penurunan pada Piutang Transfer Pemerintah Pusat sebagai berikut:

1. Meningkatnya Piutang Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024 dibandingkan Tahun Anggaran 2023 disebabkan adanya Tambahan pengakuan Piutang Transfer yang ditambahkan sebagai *Treasury Deposit Facility* (TDF) sesuai surat Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor S.84/KPN.2302/2024 dan penambahan alokasi kurang bayar Dana Bagi Hasil bagian Kota Bima sesuai PMK/89/PMK.07/2024;
2. Secara lebih rinci Piutang Transfer Pemerintah Pusat dapat dilihat pada **Lampiran 5.3.8**. Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2024.

5.3.1.1.8 Piutang Transfer Antar Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang Transfer Antar Daerah per tanggal Neraca yaitu:

- Rincian nilai penurunan dan persentase penurunan pada masing-masing rincian Piutang Transfer Antar Daerah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Piutang Bagi Hasil	3.448.116.876,00	4.528.880.817,00	(1.080.763.941,00)	(23,86)
Piutang Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	3.448.116.876,00	4.528.880.817,00	(1.080.763.941,00)	(23,86)

- Penjelasan sebab-sebab utama kenaikan/penurunan pada Piutang Transfer Antar Daerah sebagai berikut:

1. Pengakuan Piutang berdasarkan surat dari Alokasi SK Gubernur NTB Nomor 100.3.3.1-143 Tahun 2025;
2. Rincian selengkapnya untuk Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2023 untuk masing-masing jenis piutang dapat dilihat pada **Lampiran 5.3.9**. Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024.

Penjelasan hal-hal Penting Lainnya :

- Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Piutang Transfer Antar Daerah serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan	%
DBH Pajak Kendaraan Bermotor	769.104.223,00	1.248.403.219,00	(479.298.996,00)	(38,39)
DBH Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	775.735.338,00	1.399.273.018,00	(623.537.680,00)	(44,56)
DBH Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.899.613.533,00	1.877.718.394,00	21.895.139,00	1,17
DBH Pajak Air Permukaan	3.663.782,00	3.486.186,00	177.596,00	5,09
DBH Pajak Rokok	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	3.448.116.876,00	4.528.880.817,00	(1.080.763.941,00)	(23,86)

5.3.1.1.9 Piutang Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang Lainnya per tanggal Neraca yaitu:

- Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase penurunan pada masing-masing rincian Piutang Lainnya sebagai berikut:



Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2.778.761.737,25	56.904.527.841,25	(54.125.766.104,00)	(95,12)
Jumlah	2.778.761.737,25	56.904.527.841,25	(54.125.766.104,00)	(95,12)

- Penjelasan sebab-sebab utama penurunan pada Piutang Lainnya sebagai berikut:
 1. Terdapat Piutang atas Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi senilai Rp2.778.761.737,25. Untuk lampiran Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana pada **Lampiran 5.3.10**.
 2. Penyebab piutang lainnya terjadi karena di tahun 2023 adanya:
 - Terdapat uang muka atas pekerjaan fisik yang belum dikembalikan ke Kas Daerah Kota Bima pada Tahun 2023 sebesar Rp49.879.500,00 oleh Dinas PUPR. Pengembalian uang muka tersebut disebabkan oleh penolakan masyarakat setempat terhadap pekerjaan rabat gang di RW 03 Kelurahan Pane, yang dilaksanakan oleh CV. Virin berdasarkan SP2D Nomor 5693/LS/Kobi/2023.
 - Terdapat Bagi Hasil IUPK PT AMNT dengan rincian berikut:
 - a) 2020: USD 282.738
 - b) 2021: USD 749.480
 - c) 2022: USD 2.470.333
 Dikalikan JISDOR per 31 Desember 2023 senilai Rp15.439,00, sehingga nilai Bagi Hasil IUPK PT AMNT dalam mata uang rupiah adalah sebagai berikut.
 - a) 2020: Rp4.365.188.551,00
 - b) 2021: Rp11.571.221.720,00
 - c) 2022: Rp38.139.476.333,00
 Total Piutang Lainnya senilai Rp54.075.886.604,00

5.3.1.1.10 Penyisihan Piutang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Penyisihan Piutang per tanggal Neraca yaitu:

- Rincian nilai kenaikan dan persentase kenaikan pada masing-masing rincian Penyisihan Piutang sebagai berikut:

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ Penurunan	%
Ø Penyisihan Piutang Pendapatan				
ü Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(5.663.591.374,36)	(4.532.292.409,40)	(1.131.298.964,96)	24,96
ü Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(5.186.600.649,05)	(4.154.384.833,00)	(1.032.215.816,05)	24,85
Jumlah	(10.850.192.023,41)	(8.686.677.242,40)	(2.163.514.781,01)	24,91

Rincian perhitungan penyisihan piutang dapat dilihat pada **Lampiran 5.3.11**.

5.3.1.1.11 Beban Dibayar Dimuka

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Beban Dibayar Dimuka per tanggal Neraca yaitu:

- Rincian nilai dan persentase pada masing-masing rincian Beban Dibayar Dimuka serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Dibayar Dimuka – Sewa	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	0,00
Jumlah	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	0,00

- Penjelasan pada Beban Dibayar Dimuka sebagai berikut:
 - Beban di bayar dimuka merupakan Sewa Rumah Aspirasi di Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima Tahun 2021 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak. Perjanjian masih berlaku pada tahun berikutnya dengan jangka waktu dari 1 (satu) tahun melewati TA 2024. Berdasarkan surat perjanjian di mulai tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan 1 Desember 2025.
 - Perhitungan masa akrual menggunakan satuan “bulan”. Jika transaksi perjanjian terjadi antara tanggal 1 s.d. 15, maka dihitung 1 bulan penuh pada bulan transaksi, sedangkan jika terjadi pada tanggal 16 s.d. 31, maka dihitung 1 bulan pada bulan berikutnya.
 - Rincian Beban Dibayar Dimuka yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bima dapat dilihat pada *Lampiran 5.3.12*.

5.3.1.1.12 Persediaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Persediaan per tanggal Neraca yaitu:

- Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Persediaan sebagai berikut:

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/(Penurunan)	%
Persediaan Barang Pakai Habis				
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.660.532,00	965.000,00	3.695.532,00	382,96
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	263.783.663,70	266.905.821,93	(3.122.158,23)	(1,17)
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	7.141.700,00	6.486.000,00	655.700,00	10,11
Bahan/bibit ternak/ bibit ikan	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00
Obat-obatan	6.539.704.068,17	9.134.723.190,37	(2.595.019.122,20)	(28,41)
Obat-obatan Lainnya	303.953.720,00	372.553.847,00	(68.600.127,00)	(18,41)
Bahan-Bahan Lainnya	255.437.500,00	449.241.825,00	(193.804.325,00)	(43,14)
Barang yang diserahkan ke masyarakat	8.938.391.200,00	8.098.667.132,00	839.724.068,00	10,37
Jumlah	16.313.952.383,87	18.330.422.816,30	(2.016.470.432,43)	(11,00)

- Penjelasan sebab-sebab utama kenaikan/penurunan pada Persediaan sebagai berikut:
 1. Terjadinya penurunan Persediaan tahun 2024 yang sangat signifikan pada jenis persediaan Obat-obatan senilai Rp2.644.363.765,06 dan pada bahan-bahan lainnya senilai Rp193.804.325,00;
 2. Nilai persediaan masih terdapat persediaan obat kedaluwarsa yang belum di musnahkan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana senilai Rp2.348.760,00.
 3. Terjadinya kenaikan Persediaan tahun 2024 yang sangat signifikan pada jenis persediaan Barang yang diserahkan ke masyarakat senilai Rp839.724.068,00.
 4. Berdasarkan Laporan Keuangan RSUD yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), disajikan persediaan senilai Rp2.441.250.642,85. Namun, nilai persediaan tersebut tidak seluruhnya dicantumkan dalam Persediaan Pemerintah Kota Bima karena belum didukung dengan dokumen sumber yang sah dan valid, seperti kertas kerja serta *stock opname* kas.
 5. Rincian Persediaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bima dapat dilihat pada **Lampiran 5.3.13**.
- Penjelasan hal-hal penting lainnya:
 1. Metode Pencatatan:

Metode pencatatan untuk jenis persediaan yang sifatnya *continuous* dan membutuhkan kontrol yang besar seperti obat-obatan menggunakan metode perpetual. Untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti ATK menggunakan metode periodik.
 2. Penerimaan/Pemberian Hibah Persediaan:

Penerimaan Hibah dari Provinsi atas Obat-Obatan terdapat pada Dinas kesehatan sebesar Rp4.836.516.222,91 dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp101.073.311,00.

5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Investasi Jangka Panjang per tanggal Neraca yaitu rincian nilai dan persentase pada masing-masing rincian Investasi Jangka Panjang sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
1	Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Investasi Permanen	18.137.504.969,22	18.137.504.969,22	0,00	0,00
Jumlah		18.137.504.969,22	18.137.504.969,22	0,00	0,00

5.3.1.2.1. Investasi Non Permanen

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Investasi Non-Permanen per tanggal Neraca yaitu rincian nilai dan persentase pada masing-masing rincian Investasi Non-Permanen serta penjelasannya sebagai berikut:



No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
1	Dana Bergulir	3.516.637.731,00	3.516.637.731,00	0,00	0,00
2	Penyisihan Dana Bergulir	(3.516.637.731,00)	(3.516.637.731,00)	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	0,00

- Penjelasan pada Investasi Non-Permanen sebagai berikut:

- Saldo Dana Bergulir pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2024 senilai Rp3.516.637.731,00 tidak mengalami perubahan senilai Rp0,00 atau 0,00%;
- Mutasi Dana Bergulir tahun 2024 adalah sebagai berikut.

No	OPD Pengelola	31/12/2023	Penambahan	Pengurangan	31/12/2024	Keterangan
1	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	1.042.052.342,00	0,00	0,00	1.042.052.342,00	Lampiran 5.3.14a
2	Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah	2.413.610.389,00	0,00	0,00	2.413.610.389,00	Lampiran 5.3.14b
3	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (ex. BPMPK)	60.975.000,00	0,00	0,00	60.975.000,00	Lampiran 5.3.14c
Jumlah		3.516.637.731,00	0,00	0,00	3.516.637.731,00	

- Rincian dana bergulir beserta perhitungan penyisihannya masing-masing SKPD adalah sebagai berikut.

No	OPD Pengelola	31/12/2024	Penyisihan Tidak Tertagih	NRV 31 Desember 2024
1	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	1.042.052.342,00	1.042.052.342,00	0,00
2	Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah	2.413.610.389,00	2.413.610.389,00	0,00
3	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (ex. BPMPK)	60.975.000,00	60.975.000,00	0,00
Jumlah		3.516.637.731,00	3.516.637.731,00	0,00

Pemerintah Kota Bima melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) melakukan penagihan piutang secara administrasi.

5.3.1.2.2. Investasi Permanen

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Investasi Permanen per tanggal Neraca yaitu rincian nilai dan persentase pada Investasi Permanen yang merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD serta penjelasannya yang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
<input type="checkbox"/> Penyertaan Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	18.137.504.969,22	18.137.504.969,22	0,00	0,00



Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
Jumlah	18.137.504.969,22	18.137.504.969,22	0,00	0,00

- Penjelasan pada Investasi Permanen sebagai berikut:

- Peraturan Walikota Bima Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bima sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bima nomor 69 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Walikota Bima Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bima bahwa Investasi pada PERUMDA Bima Aneka menggunakan metode ekuitas karena kepemilikan sahamnya 100% milik Pemerintah Kota Bima sedangkan PT. Bank NTB, PT. Jamkrida NTB Bersaing, PD. BPR NTB dan KPN Sabua Ade menggunakan metode biaya karena kepemilikan saham kurang dari 20%. Sesuai PSAP 6 paragraf 40 menyatakan *bahwa hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa deviden tunai dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham tidak akan menambah nilai investasi pemerintah.*
- Rincian Penyertaan modal dengan menggunakan Metode Ekuitas

No	BUMD	Prosesntasi Kepemilikan Saham	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023	Naik/ (turun)
1	PERUMDA Bima Aneka	100,00%	725.134.575,22	725.134.575,22	0,00
J u m l a h			725.134.575,22	725.134.575,22	0,00

Pemerintah Kota Bima membekukan aktivitas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bima Aneka pada tahun 2023 berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pembekuan Perusahaan Umum Daerah Bima Aneka.

- Rincian Penyertaan modal dengan menggunakan Metode Biaya

No	BUMD	Prosesntasi Kepemilikan Saham	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023	Naik/ (turun)
1	PT. Bank NTB Syariah	1,48%	15.067.621.350,00	15.067.621.350,00	0,00
2	PT. Jamkrida NTB BERSAING	3,05%	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
3	PD. BPR NTB	0,58%	1.044.749.044,00	1.044.749.044,00	0,00
4	KPN Sabua Ade	2,14%	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
J u m l a h			17.412.370.394,00	17.412.370.394,00	0,00

Pemerintah Kota Bima tidak melakukan penyertaan modal di tahun 2024 sebab kemampuan keuangan daerah Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2024 tidak memungkinkan untuk melakukan pengeluaran pembiayaan pada penyertaan modal.

5.3.1.3. Aset Tetap

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan



dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Tetap serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Aset Tetap Tanah	615.761.651.695,00	605.155.129.175,00	10.606.522.520,00	1,75
Aset Tetap Peralatan dan Mesin	382.394.450.345,10	358.928.790.783,25	23.465.659.561,85	6,54
Aset Tetap Gedung dan Bangunan	830.284.861.344,00	794.793.378.334,16	35.491.483.009,84	4,47
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.334.437.691.827,09	1.301.044.811.594,24	33.392.880.232,85	2,57
Aset Tetap Lainnya	88.411.731.818,60	87.161.832.504,71	1.249.899.313,89	1,43
Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	11.409.227.623,50	1.778.987.297,00	9.630.240.326,50	541,33
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.254.949.202.121,65)	(1.124.943.527.339,61)	(130.005.674.782,04)	11,56
Jumlah	2.007.750.412.531,64	2.023.919.402.348,75	(16.168.989.817,11)	(0,80)

5.3.1.3.1. Aset Tetap Tanah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Tanah per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan dan persentase kenaikan pada Aset Tetap Tanah serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Aset Tetap Tanah	615.761.651.695,00	605.155.129.175,00	10.606.522.520,00	1,75

Penjelasan:

- Rincian mutasi Aset Tetap Tanah selama TA 2024 dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Saldo Awal	605.155.129.175,00
<i>Mutasi Tambah:</i>	
- Belanja Modal	2.282.760.420,00
- Kapitalisasi atas Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa:	11.130.000,00
- Hibah tambah PSU	8.354.632.100,00
-	
-	
Jumlah Mutasi Tambah	10.648.522.520,00
<i>Mutasi Kurang:</i>	
- Penghapusan atas pemindahtanganan melalui penjualan	(42.000.000,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(42.000.000,00)
Saldo Akhir	615.761.651.695,00

Penjelasan:

Saldo Aset Tetap Tanah pada Tahun 2024 sebesar Rp615.761.695,00 belum mencakup nilai tanah di bawah jalan, karena belum diterbitkannya Surat Keputusan Wali Kota Bima tentang Penetapan Penghitungan Nilai Wajar Tanah di Bawah Jalan. Pemerintah Kota Bima berencana menerbitkan Surat Keputusan tersebut pada Tahun Anggaran 2025, sehingga pencatatan tanah di bawah jalan dapat dilakukan sebagai Aset Tetap Tanah milik Pemerintah Kota Bima.

Rincian mutasi Aset Tetap Tanah pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada *Lampiran 5.3.15*.

5.3.1.3.2. Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Peralatan dan Mesin per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan dan persentase kenaikan pada masing-masing rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Alat Besar	14.546.069.524,83	13.927.860.044,83	618.209.480,00	4,44
Alat Angkutan	85.108.931.037,35	80.810.200.103,51	4.298.730.933,84	5,32
Alat Bengkel dan Alat Ukur	3.992.947.085,94	3.705.500.513,10	287.446.572,84	7,76
Alat Pertanian	5.400.192.415,57	5.394.192.415,57	6.000.000,00	0,11
Alat Kantor dan Rumah Tangga	67.754.256.194,45	63.130.113.762,82	4.624.142.431,63	7,32
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	16.127.925.575,75	15.767.461.207,52	360.464.368,23	2,29
Alat Kedokteran dan Kesehatan	88.994.641.745,41	82.530.924.344,19	6.463.717.401,22	7,83
Alat Laboratorium	32.388.899.713,15	31.172.040.273,15	1.216.859.440,00	3,90
Alat Persenjaan	391.500.950,00	391.500.950,00	0,00	0,00
Komputer	63.327.476.038,65	57.828.227.104,56	5.499.248.934,09	9,51
Alat Eksplorasi	16.255.000,00	0,00	16.255.000,00	0,00
Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Keselamatan Kerja	496.774.700,00	485.299.700,00	11.475.000,00	2,36
Alat Peraga	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00	0,00	0,00
Rambu – rambu	3.238.637.100,00	3.238.637.100,00	0,00	0,00
Peralatan Olahraga	609.943.264,00	546.833.264,00	63.110.000,00	11,54
Jumlah	382.394.450.345,10	358.928.790.783,25	23.465.659.561,85	6,54

Penjelasan:

1. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama TA 2024 dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Saldo Awal	358.928.790.783,25
Mutasi Tambah:	
- Belanja Modal	23.323.712.118,00
- Kapitalisasi Non-Belanja Modal	1.919.155.050,00
- Penerimaan Hibah Tahun Berjalan	0,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	515.193.438,00
- Koreksi Pencatatan:	
✓ Reklasifikasi Kode Rekening Aset atas LRA	4.189.895.445,00
-	
- Mutasi antar SKPD	1.923.376.750,00
Jumlah Mutasi Tambah	31.871.332.801,00



Uraian	Nilai
Mutasi Kurang:	
- Salah Pos Belanja Modal	(82.271.000,00)
- Pengakuan Ekstrakompabel	(0,00)
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	(21.500.000,00)
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	(2.185.630.044,15)
- Koreksi Pencatatan:	
Penyesuaian Kode Rekening atas LRA	(4.189.895.445,00)
Koreksi (-) atas Kurang Volume Pekerjaan	(3.000.000,00)
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:	
✓ Reklasifikasi ke Aset Lainnya	(0,00)
✓ Lebih Catat	(0,00)
- Mutasi antar SKPD	(1.923.376.750,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(8.405.673.239,15)
Saldo Akhir	382.394.450.345,10

Penjelasan:

1. Reklasifikasi Kode Rekening atas LRA disebabkan oleh adanya perbedaan kode rekening belanja pada Laporan Realisasi Anggaran dengan fisik barang yang dibelanjakan senilai Rp4.189.895.445,00 pada mutasi tambah dan mutasi kurang sehingga diperlukan penyesuaian Kode Belanja di LRA dengan SIMDA BMD. Seperti belanja modal Pagar tetapi fisiknya belanja Taman, belanja komputer unit lainnya fisiknya belanja scanner, belanja kursi kerja pejabat lainnya fisiknya kursi besi/metal, belanja alat studio fisiknya printer, sehingga di reklas ke akun yang sesuai kodefikasi aset.
2. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin terjadi akibat kesalahan pengklasifikasian belanja, yaitu realisasi Belanja Modal yang tidak memenuhi kriteria sebagai aset tetap, seperti belanja peralatan listrik (kabel, lampu, stop kontak, dan sejenisnya), namun dicatat sebagai Belanja Modal. Oleh karena itu, dilakukan reklasifikasi ke akun Barang Habis Pakai.
3. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada *Lampiran 5.3.16*.

5.3.1.3.3. Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Gedung dan Bangunan per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan dan persentase kenaikan pada masing-masing rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan)	%
Bangunan Gedung	761.496.792.376,68	728.090.327.632,84	33.406.464.743,84	4,59
Monumen	5.101.363.078,25	5.101.363.078,25	0,00	0,00
Bangunan Menara	604.570.000,00	604.570.000,00	0,00	0,00
Tugu Titik Kontrol/Pasti	63.082.135.889,07	60.997.117.623,07	2.085.018.266,00	3,42
Jumlah	830.284.861.344,00	794.793.378.334,16	35.491.483.009,84	4,47

Penjelasan:

Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan selama TA 2024 dijelaskan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 5.3

Uraian	Nilai
Saldo Awal	794.793.378.334,16
Mutasi Tambah:	
- Belanja Modal	42.504.291.643,00
- Kapitalisasi Non-Belanja Modal	2.360.709.638,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	174.570.250,00
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	0,00
- Hibah (+) PSU 2024	260.984.000,00
- Koreksi Pencatatan:	
Koreksi tambah nilai Aset	80.000.000,00
Penyesuaian Kode Rekening Aset atas LRA	2.945.915.016,00
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:	
✓ Kurang Catat	0,00
✓ Penerimaan Hibah Sebelum Tahun Berjalan	0,00
- Mutasi antar SKPD	3.276.494.400,00
Jumlah Mutasi Tambah	51.602.964.947,00
Mutasi Kurang:	
- Salah Pos Belanja Modal	(916.565.531,23)
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	(4.924.757.699,50)
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	(384.060.160,00)
- Penghapusan Aset	(477.201.441,67)
- Hibah Keluar	(2.270.737.000,00)
- Koreksi Penyesuaian Kode Rekening Aset atas LRA	(2.945.915.016,00)
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:	
✓ Reklasifikasi ke Aset Lainnya	(0,00)
✓ Lebih Cacat	(915.750.688,76)
- Mutasi antar SKPD	(3.276.494.400,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(16.111.481.937,16)
Saldo Akhir	830.284.861.344,00

Penjelasan:

1. Pada Tahun 2024, realisasi Belanja Modal untuk Gedung dan Bangunan sebesar Rp42.504.291.643,00 mengalami kekurangan volume pekerjaan senilai Rp38.362.000,00 berdasarkan hasil pemeriksaan BPK. Nilai kekurangan tersebut telah dilakukan reklasifikasi ke akun Aset Lain-lain.
2. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan yang belum tercatat sepenuhnya merupakan penyesuaian nilai aset berdasarkan realisasi fisik yang telah mencapai 100% sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO), namun masih terdapat piutang yang belum dibayarkan pada tahun 2024.

Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada *Lampiran 5.3.17*.

5.3.1.3.4. Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Tanah per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan dan persentase kenaikan pada masing-masing rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan serta penjelasannya sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 5.3

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/(Penurunan)	%
Jalan dan Jembatan	916.150.536.978,94	902.050.836.590,88	14.099.700.388,06	1,55
Bangunan Air	296.438.169.049,32	288.007.035.604,53	8.431.133.444,79	2,93
Instalasi	52.175.198.500,34	50.453.694.500,34	1.721.504.000,00	3,41
Jaringan	69.673.787.298,49	60.533.244.898,49	9.140.542.400,00	15,10
Jumlah	1.334.437.691.827,09	1.301.044.811.594,24	33.392.880.232,85	2,57

Penjelasan:

- Rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan selama TA 2024 dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Saldo Awal	1.301.044.811.594,24
Mutasi Tambah:	
- Belanja Modal	47.137.157.328,00
- Kapitalisasi Non-Belanja Modal	5.423.363.400,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	1.604.417.047,00
- Hibah (+)	1.147.397.208,20
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	0,00
- Koreksi Penyesuaian Kode Rekening Aset atas LRA	3.301.653.553,00
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:	
✓ Penerimaan Hibah Sebelum Tahun Berjalan	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	58.613.988.536,20
Mutasi Kurang:	
- Salah Pos Belanja Modal	(0,00)
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	(6.993.685.862,00)
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	(0,00)
- Hibah Kurang	(12.642.191.115,31)
- Koreksi Pencatatan :	
✓ Koreksi penyesuaian kode rekening Asetatas LRA	(3.301.653.553,00)
✓ Koreksi (-) atas realisasi Belanja Modal yang merupakan pembayaran sisa retensi Tahun 2023	(2.238.905.773,00)
✓ Koreksi salah catat	(8.000,04)
✓ Koreksi (-) atas kekurangan volume pekerjaan	(44.664.000,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(25.221.108.303,35)
Saldo Akhir	1.334.437.691.827,09

Rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.3.18**.

5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Lainnya per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan dan persentase kenaikan pada Aset Tetap Lainnya serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ Penurunan)	%
Bahan Perpustakaan	86.445.895.818,60	85.227.082.504,71	1.218.813.313,89	1,43
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	1.223.322.000,00	1.192.236.000,00	31.086.000,00	2,61



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 5.3

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ Penurunan)	%
Hewan	0,00	0,00	0,00	0,00
Biota Perairan	0,00	0,00	0,00	0,00
Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00
Barang Koleksi Non Budaya	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap Dalam Renovasi	742.514.000,00	742.514.000,00	0,00	0,00
Jumlah	88.411.731.818,60	87.161.832.504,71	1.249.899.313,89	1,43

Penjelasan:

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya selama TA 2024 dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Saldo Awal	87.161.832.504,71
<i>Mutasi Tambah:</i>	
- Belanja Modal	148.641.000,00
- Kapitalisasi Non-Belanja Modal	1.205.189.025,00
- Penerimaan Hibah Tahun Berjalan	0,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	29.972.500,00
- Koreksi Penyesuaian Kode Rekening atas LRA	2.880.000,00
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:	
✓ Kurang Catat	0,00
- Mutasi antar SKPD	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	1.386.682.525,00
<i>Mutasi Kurang:</i>	
- Salah Pos Belanja Modal	(4.150.000,00)
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	(14.450.000,00)
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	(115.303.211,11)
- Koreksi Penyesuaian Kode Rekening atas LRA	(2.880.000,00)
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:	
✓ Lebih Catat	(0,00)
- Mutasi antar SKPD	(0,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(136.783.211,11)
Saldo Akhir	88.411.731.818,60

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada *Lampiran 5.3.19*.

5.3.1.3.6. Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan dan persentase kenaikan pada Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan)	%
Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	4.448.012.261,50	174.570.250,00	4.273.442.011,50	2.447,98



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 5.3

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan)	%
Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.961.215.362,00	1.604.417.047,00	5.356.798.315,00	333,88
Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	11.409.227.623,50	1.778.987.297,00	9.630.240.326,50	541,33

Penjelasan:

Rincian mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan selama TA 2024 dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Saldo Awal	1.778.987.297,00
<i>Mutasi Tambah:</i>	
- Kapitalisasi Belanja Non Modal	0,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	11.409.227.623,50
Jumlah Mutasi Tambah	11.409.227.623,50
<i>Mutasi Kurang:</i>	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	(1.778.987.297,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(1.778.987.297,00)
Saldo Akhir	11.409.227.623,50

Rincian mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.3.20**.

5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per tanggal Neraca yaitu rincian nilai penurunan dan persentase penurunan pada masing-masing rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	(Kenaikan) /Penurunan	%
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	287.690.779.136,88	254.269.148.413,81	(33.421.630.723,00)	(13,14)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	180.742.629.898,18	160.257.124.768,00	(20.485.505.130,18)	(12,78)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	786.515.793.086,59	710.417.254.157,80	(76.098.538.928,79)	(10,71)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Jasa Konsesi	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.254.949.202.121,65	1.124.943.527.339,61	(130.005.674.782,04)	(11,56)

Penjelasan:

Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan selama TA 2024 dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Saldo Awal	(1.124.943.527.339,61)
<i>Mutasi Tambah:</i>	
- Beban Penyusutan	(137.360.919.088,73)
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:	
Kurang Catat	(0,00)
Akm. atas Penerimaan Hibah Sebelum Tahun Berjalan	(0,00)
- Mutasi antar SKPD	(1.792.566.419,00)
Jumlah Mutasi Tambah	(139.153.485.507,73)
<i>Mutasi Kurang:</i>	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	2.260.104.825,15
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:	
Lebih Catat	67,50
Hibah Keluar	4.981.276.269,00
Penghapusan asset	194.842.053,00
- Mutasi antar SKPD	1.695.843.748,00
- Reklas Antar KIB	3.983.743
- Koreksi Pencatatan	
Koreksi atas Kurang Volume Pekerjaan	599.789,00
Koreksi susut atas penggabungan Aset	11.160.231,02
Jumlah Mutasi Kurang	9.147.810.725,67
Saldo Akhir	(1.254.949.202.121,65)

Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada *Lampiran 5.3.21*.

5.3.1.4. Properti Investasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Properti Investasi per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Properti Investasi serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/Penurunan	%
Properti Investasi Tanah	6.786.335.071,50	6.786.335.071,50	0,00	0,00
Properti Investasi Gedung dan Bangunan	4.584.569.266,05	4.584.569.266,05	0,00	0,00
Jumlah Aset Non Lancar	11.370.904.337,55	11.370.904.337,55	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(895.016.187,10)	(887.174.838,00)	(7.841.349,10)	0,88
Jumlah	10.475.888.150,45	10.483.729.499,55	(7.841.349,10)	(0,07)

Rincian Properti Investasi ada masing-masing SKPD dapat dilihat pada *Lampiran 5.3.22*.

5.3.1.5. Dana Cadangan

Pemerintah Kota Bima tidak memiliki Dana Cadangan per tanggal 31 Desember 2024 atau bernilai Rp0,00.

5.3.1.6. Aset Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Lainnya per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan

dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Lainnya sebagai berikut:

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ Penurunan	%
Tagihan Jangka Panjang	2.600.535.720,67	34.766.666,67	2.565.769.054,00	7.379,97
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tak Berwujud	4.803.392.035,00	2.764.386.035,00	2.039.006.000,00	73,76
Aset Lain-lain (Barang Rusak Berat)	43.179.236.618,15	48.370.250.387,82	(5.191.013.769,67)	(10,73)
Aset Lain-Lain Lainnya	0,00	2.805.664.560,00	(2.805.664.560,00)	(100,00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(977.594.568,88)	(829.668.867,45)	(147.925.701,43)	17,83
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(24.865.487.614,63)	(29.473.262.830,90)	4.607.775.216,27	(15,63)
<i>Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)</i>	3.289.683.000,00	29.342.498.000,00	(26.052.815.000,00)	(88,79)
Jumlah Aset Lainnya	28.029.765.190,31	53.014.633.951,14	(24.984.868.760,83)	(47,13)

5.3.1.6.1. Tagihan Jangka Panjang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kemitraan dengan Pihak Ketiga per tanggal Neraca yaitu rincian nilai dan persentase pada Kemitraan dengan Pihak Ketiga serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara	2.600.535.720,67	34.766.666,67	2.565.769.054,00	7.379,97
tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendaharan atau pejabat lain.	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	2.600.535.720,67	34.766.666,67	2.565.769.054,00	7.379,97

5.3.1.6.2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Pemerintah Kota Bima tidak memiliki Kemitraan dengan Pihak Ketiga per tanggal 31 Desember 2024 atau bernilai Rp0,00.

5.3.1.6.3. Aset Tak Berwujud

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tidak Berwujud per tanggal Neraca yaitu:

- Rincian nilai kenaikan dan persentase kenaikan pada masing-masing rincian Aset Tidak Berwujud sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
<input type="checkbox"/> Aset Tidak Berwujud	4.803.392.035,00	2.764.386.035,00	2.039.006.000,00	73,76
<input type="checkbox"/> <i>Software</i>	4.803.392.035,00	2.764.386.035,00	2.039.006.000,00	73,76
<input type="checkbox"/> Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(977.594.568,88)	(829.668.867,45)	147.925.701,43	17,83
<input type="checkbox"/> Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud - Software	(977.594.568,88)	(829.668.867,45)	147.925.701,43	17,83
Jumlah	3.825.797.466,12	1.934.717.167,55	1.891.080.298,57	97,74

Penjelasan:

Rincian SKPD yang memiliki Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

SKPD	Nilai Perolehan	Akumulasi Amortisasi	Nilai Buku
Dinas Kesehatan	190.480.000,00	94.649.500,00	95.830.500,00
BPKAD	521.156.000,00	233.950.983,00	287.205.017,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	14.850.000,00	10.395.000,00	4.455.000,00
Sekretariat Daerah	54.100.000,00	18.550.000,00	35.550.000,00
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	437.596.000,00	195.884.838,00	241.711.162,00
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	1.376.888.125,00	377.132.089,46	999.756.035,54
Dinas Sosial	10.000.000,00	3.500.000,00	6.500.000,00
BPBD	31.960.260,00	9.588.078,00	22.372.182,00
Dinas Tenaga Kerja	46.410.000,00	9.282.000,00	37.128.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	54.961.650,00	5.996.913,75	48.964.736,25
Inspektorat	9.990.000,00	1.498.500,00	8.491.500,00
RSUD Kota Bima	1.955.000.000,00	9.625.000,00	1.945.375.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	40.000.000,00	3.041.666,67	36.958.333,33
Dinas Ketahanan Pangan	60.000.000,00	4.500.000,00	55.500.000,00
Jumlah	4.803.392.035,00	977.594.568,88	3.825.797.466,12

5.3.1.6.4. Aset Lain-Lain

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Lain-Lain per tanggal Neraca yaitu:

- Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Lain-Lain sebagai berikut:

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Barang Rusak Berat	43.179.236.618,15	48.370.250.387,82	(5.191.013.769,67)	(10,73)
Aset Lain-lain lainnya (Kurang Volume)	0,00	402.049.000,00	(402.049.000,00)	(100,00)
Aset Lain-Lain lainnya (Hibah Lembaga)	0,00	2.403.615.560,00	(2.403.615.560,00)	(100,00)
Total Aset Lain-lain	43.179.236.618,15	51.175.914.947,82	(7.996.678.329,67)	(15,63)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain - Lain - Aset Rusak Berat/Usang	(24.865.487.614,63)	(29.473.262.830,90)	4.607.775.216,27	(15,63)
Dana <i>Transfer Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	3.289.683.000,00	29.342.498.000,00	(26.052.815.000,00)	(88,79)
Total	21.603.432.003,52	51.045.150.116,92	(29.441.718.113,40)	(57,68)

5.3.2. Kewajiban

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kewajiban per tanggal Neraca yaitu rincian nilai penurunan dan persentase penurunan pada masing-masing rincian Kewajiban sebagai berikut:

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/Penurunan	%
Kewajiban Jangka Pendek	397.615.392,00	8.895.417.511,87	(8.497.802.119,87)	(95,53)



Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/Penurunan	%
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	397.615.392,00	8.895.417.511,87	(8.497.802.119,87)	(95,53)

5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kewajiban Jangka Pendek per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kewajiban Jangka Pendek sebagai berikut:

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ Penurunan	%
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	11.510.000,00	(11.510.000,00)	(100,00)
Pendapatan Diterima Dimuka	64.732.400,00	35.126.301,07	29.606.098,93	84,28
Utang Belanja	332.882.992,00	8.848.781.210,80	(8.515.898.218,80)	(96,24)
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	397.615.392,00	8.895.417.511,87	(8.497.802.119,87)	(95,53)

5.3.2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Perhitungan Pihak Ketiga per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Utang Perhitungan Pihak Ketiga yang merupakan Utang Perhitungan Pihak Ketiga di Bendahara (Selain BUD) serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Utang Pihak Ketiga Lainnya	0,00	11.510.000,00	(11.510.000,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	11.510.000,00	(11.510.000,00)	(100,00)

- Penjelasan sebab-sebab utama penurunan pada Utang Pihak Ketiga di Tahun 2024 senilai Rp0,00 dibandingkan tahun 2023 senilai Rp11.510.000,00 nilai tersebut berasal dari Pengembalian BOP PAUD yang telah disetorkan di RKUN.

5.3.2.1.2. Utang Bunga

Pemerintah Kota Bima tidak memiliki saldo Utang Belanja per tanggal 31 Desember 2024 atau bernilai Rp0,00.

5.3.2.1.3. Utang Pinjaman Jangka Pendek

Pemerintah Kota Bima tidak memiliki saldo Utang Pinjaman Jangka per tanggal 31 Desember 2024 atau bernilai Rp0,00.

5.3.2.1.4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Pemerintah Kota Bima tidak memiliki saldo Utang Bagian Lancar Utang jangka panjang per tanggal 31 Desember 2024 atau bernilai Rp0,00.

5.3.2.1.5. Pendapatan Diterima Dimuka

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Pendapatan Diterima Dimuka per tanggal Neraca yaitu rincian nilai



kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Pendapatan Diterima Dimuka serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	0,00	0,00	0,00	0,00
□ Pendapatan Diterima Dimuka - Sewa	64.375.000,00	9.375.000,00	55.000.000,00	586,67
□ Pendapatan Diterima Dimuka - Sewa Tanah	64.375.000,00	9.375.000,00	55.000.000,00	586,67
□ Pendapatan Diterima Dimuka - Pajak Daerah	357.400,00	0,00	357.400,00	0,00
□ Pendapatan Diterima Dimuka - Pajak Restoran	357.400,00	0,00	357.400,00	0,00
□ Pendapatan Diterima Dimuka - Lain-Lain PAD yang Sah	0,00	25.751.301,07	(25.751.301,07)	(100,00)
□ Pendapatan Diterima Dimuka - Lain-Lain PAD yang Sah	0,00	25.751.301,07	(25.751.301,07)	(100,00)
Jumlah	64.732.400,00	35.126.301,07	29.606.098,93	84,28

Penjelasan:

Atas saldo Pendapatan diterima dimuka diperoleh dari pendapatan daerah atas perjanjian yang masih berlaku pada tahun berikutnya. Perhitungan masa akrual menggunakan satuan “bulan”. Jika transaksi perjanjian terjadi antara tanggal 1 s.d. 15, maka dihitung 1 bulan penuh pada bulan transaksi, sedangkan jika terjadi pada tanggal 16 s.d. 31, maka dihitung 1 bulan pada bulan berikutnya.

Rincian Pendapatan diterima dimuka tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 5.3.25**.

5.3.2.1.6. Utang Belanja

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Belanja dan Transfer per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Utang Belanja dan Transfer sebagai berikut:

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/Penurunan	%
Utang Belanja Pegawai	244.087.292,00	5.668.105.232,00	(5.424.017.940,00)	(95,69)
Utang Belanja Barang dan Jasa	88.795.700,00	26.011.517,00	62.784.183,00	241,37
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	915.750.688,76	(915.750.688,76)	(100,00)
Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	2.238.913.773,04	(2.238.913.773,04)	(100,00)
Jumlah	332.882.992,00	8.848.781.210,80	(8.515.898.218,80)	(96,24)

▪ Penjelasan sebab-sebab utama kenaikan/penurunan* pada Utang Belanja dan Transfer sebagai berikut:

- 1) Penurunan signifikan pada utang belanja pegawai disebabkan oleh pengakuan utang Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan kekurangan penyetaraan jabatan fungsional pada tahun 2023, yang telah diselesaikan pembayarannya pada tahun 2024.

- 2) Penurunan utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan terjadi karena termin terakhir yang belum terealisasi pada tahun 2023 telah direalisasikan pada tahun 2024.
- 3) Rincian Utang Belanja dan Transfer pada masing-masing SKPD serta rincian Utang Belanja dan Transfer Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 5.3.24**.
- 4) Berdasarkan Laporan Keuangan RSUD yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), disajikan utang belanja sebesar Rp1.230.123.403,45 Namun, nilai utang tersebut tidak dicantumkan dalam Utang Belanja Pemerintah Kota Bima karena belum terdapat dasar yang memadai untuk pengakuannya. Sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah, pengakuan utang belanja hanya dapat dilakukan apabila telah didukung dengan dokumen sumber yang sah dan valid, seperti kontrak/perjanjian, berita acara *stock opname*.

5.3.2.1.7. Utang Jangka Pendek Lainnya

Pemerintah Kota Bima tidak memiliki saldo Utang Jangka Panjang Lainnya jangka panjang per tanggal 31 Desember 2024 atau bernilai Rp0,00.

5.3.2.2. Kewajiban Jangka Panjang

Pemerintah Kota Bima tidak memiliki saldo Kewajiban Jangka Panjang per tanggal 31 Desember 2024 atau bernilai Rp0,00.

5.3.2.2.1. Utang Kepada Pemerintah Pusat

Pemerintah Kota Bima tidak memiliki saldo Utang Kepada Pemerintah Pusat panjang per tanggal 31 Desember 2024 atau bernilai Rp0,00.

5.3.2.2.2. Utang Kepada Lembaga Keuangan Bank

Pemerintah Kota Bima tidak memiliki saldo Utang kepada Lembaga Keuangan Bank per tanggal 31 Desember 2024 atau bernilai Rp0,00.

5.3.2.2.3. Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Pemerintah Kota Bima tidak memiliki saldo Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) per tanggal 31 Desember 2024 atau bernilai Rp0,00.

5.3.2.2.4. Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)

Pemerintah Kota Bima tidak memiliki saldo Utang kepada Masyarakat (Obligasi) per tanggal 31 Desember 2024 atau bernilai Rp0,00.

5.3.3. Ekuitas

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Ekuitas per tanggal Neraca yaitu nilai penurunan dan persentase penurunan pada Ekuitas serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Ekuitas	2.143.869.695.471,53	2.218.552.098.313,85	(74.682.402.842,32)	(3,37)



Penjelasan:

1. Saldo Ekuitas tersebut merupakan kekayaan bersih (selisih antara aset dengan kewajiban) yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bima, dan;
2. Saldo Ekuitas yang disajikan di Neraca telah sama dengan saldo Ekuitas Akhir sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LPE pada Poin 5.2.4.



5.4 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan Laporan Operasional Pemerintah Kota Bima Tahun 2024 dan 2023 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1 Pendapatan Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kota Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan Asli Daerah – LO	77.320.782.377,11	68.243.091.445,64
Pendapatan Transfer – LO	740.855.718.609,00	737.822.298.009,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	22.199.949.972,96	107.446.190.220,49
Jumlah	840.376.450.959,07	913.511.579.675,13

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kota Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan Pajak Daerah – LO	25.749.883.866,00	25.213.151.060,08
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	26.203.964.389,40	9.690.522.636,00
Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	53.154.883,00	4.710.270.723,00
Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO	25.313.779.238,71	28.629.147.026,56
Jumlah	77.320.782.377,11	68.243.091.445,64

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Pajak Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kota Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Pajak Hotel – LO	0,00	1.283.727.287,59
Pajak Restoran – LO	0,00	2.169.467.450,00
Pajak Hiburan – LO	0,00	55.767.950,00
Pajak Reklame – LO	460.077.284,00	648.556.603,44
Pajak Penerangan Jalan – LO	0,00	10.233.873.243,00
Pajak Parkir – LO	0,00	185.048.000,00
Pajak Air Tanah – LO	112.806.576,00	53.909.204,30



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 5.4

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Pajak Sarang Burung Walet – LO	7.000.000,00	21.000.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	470.327.687,00	235.761.383,75
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	5.309.942.393,00	5.289.309.797,00
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	4.666.636.691,00	5.036.730.141,00
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) – LO	14.723.093.235,00	0,00
Jumlah	25.749.883.866,00	25.213.151.060,08

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Pajak Daerah – LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan adanya perubahan pencatatan dari tahun 2023 ke tahun 2024 atas akun pajak hotel, restoran, hiburan, penerangan jalan, dan parkir menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah dalam LO Tahun 2024 ini lebih besar dari saldo Pendapatan Pajak Daerah dalam LRA TA 2024 sebesar Rp2.559.619.877,49 (Rp25.749.883.866,00- Rp23.190.263.988,51). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Pajak Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	Rp2.559.619.877,49
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Penambahan Piutang Pajak Reklame	16.218.422,00
✓ Penambahan Piutang Pajak Air Tanah	2.650.578,00
✓ Penambahan Piutang Pajak Sarang Burung Walet-LO	7.000.000,00
✓ Penambahan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	271.803.190,00
✓ Penambahan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	3.062.846.949,00
✓ Penambahan Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO	170.197.590,00
Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengurangan Piutang Pajak Reklame	36.590.625,00
✓ Pengurangan Piutang Pajak Air Tanah	1.305.028,80
✓ Pengurangan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	746.387.189,00
✓ Pengurangan Piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	95.303.750,00
✓ Pengurangan Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO	91.152.858,71
✓ Pengurangan karena pendapatan diterima di muka	357.400,00
Jumlah Penjelasan Selisih	2.559.619.877,49

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Retribusi Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kota Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 5.4

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Retribusi Jasa Umum – LO	21.036.176.647,40	4.908.996.250,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	19.628.317.647,40	2.841.868.750,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	0,00	501.768.000,00
✓ Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat – LO	0,00	0,00
✓ Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	393.264.000,00	407.854.000,00
✓ Retribusi Pelayanan Pasar – LO	452.890.000,00	464.957.500,00
✓ Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO	0,00	434.910.000,00
✓ Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran – LO	0,00	0,00
✓ Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta – LO	0,00	0,00
✓ Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus – LO	0,00	69.900.000,00
✓ Retribusi Pengolahan Limbah Cair – LO	0,00	0,00
✓ Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang – LO	0,00	0,00
✓ Retribusi Pelayanan Pendidikan – LO	0,00	0,00
✓ Retribusi Pelayanan Kebersihan-LO	561.705.000,00	0,00
✓ Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	0,00	187.738.000,00
➤ Retribusi Jasa Usaha	4.530.924.890,00	3.841.219.135,00
✓ Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	0,00	1.833.103.700,00
✓ Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan-LO	35.100,00	0,00
✓ Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan – LO	0,00	1.215.332.040,00
✓ Retribusi Tempat Pelelangan – LO	0,00	0,00
✓ Retribusi Terminal – LO	0,00	5.626.000,00
✓ Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO	0,00	211.343.000,00
✓ Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila – LO	151.000.000,00	0,00
✓ Retribusi Rumah Potong Hewan – LO	0,00	14.700.000,00
✓ Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	0,00	0,00
✓ Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga – LO	0,00	561.114.395,00
✓ Retribusi Penyeberangan di Air – LO	0,00	0,00
✓ Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LO	284.171.750,00	0,00
✓ Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya - LO	1.278.091.340,00	0,00
✓ Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan - LO	189.871.000,00	0,00
✓ Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak - LO	13.710.000,00	0,00
✓ Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga - LO	478.502.000,00	0,00
✓ Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah - LO	2.135.543.700,00	0,00
➤ Retribusi Perizinan Tertentu	636.862.852,00	940.307.251,00
✓ Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO	0,00	0,00
✓ Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol – LO	0,00	0,00
✓ Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum – LO	0,00	22.550.000,00
✓ Retribusi Izin Usaha Perikanan – LO	0,00	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 5.4

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
✓ Retribusi Pengendalian Lalu Lintas – LO	0,00	0,00
✓ Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO	0,00	0,00
✓ Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung – LO	636.862.852,00	917.757.251,00
✓ Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) – LO	0,00	0,00
✓ Retribusi Pertambangan Rakyat – LO	0,00	0,00
Jumlah	26.203.964.389,40	9.690.522.636,00

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Retribusi Daerah – LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan adanya perubahan pencatatan di RSUD Kota Bima dari rekening Pendapatan BLUD yang merupakan Lain-lain PAD yang sah di Tahun 2023 ke rekening retribusi pelayanan kesehatan pada tahun 2024.
2. Pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO Tahun 2024 ini lebih besar dari saldo Pendapatan Retribusi Daerah dalam LRA TA 2024 sebesar Rp825.598.901,00 (Rp26.203.964.389,40 - Rp25.378.365.488,40). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	825.598.901,00
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Penambahan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	410.102.300,00
✓ Penambahan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	238.416.942,00
✓ Penambahan Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir, Berbagai jenis barang yang dikontrakkan	35.100,00
✓ Penambahan Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	1.008.998.590,00
✓ Penambahan Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	190.515.000,00
✓ Penambahan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah atas pendapatan diterima di muka tahun lalu	9.375.000,00
➤ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pembayaran Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	465.139.800,00
✓ Pembayaran Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	495.849.231,00
✓ Pembayaran Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	6.480.000,00
✓ Pengurangan karena adanya pendapatan diterima di muka	64.375.000,00
Jumlah Penjelasan Selisih	825.598.901,00

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kota Bima selama melakukan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 5.4

kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) – LO	53.154.883,00	4.710.270.723,00
Jumlah	53.154.883,00	4.710.270.723,00

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Daerah - LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan belum adanya hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari BUMD di Tahun 2024 untuk mencatat piutang dividen.
2. Pengakuan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LO Tahun 2024 ini lebih kecil dari saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LRA TA 2024 sebesar Rp2.569.480.270,00 (Rp53.154.883,00 - Rp2.622.635.153,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	(2.569.480.270,00)
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
➤ Penambahan Piutang Dividen PT. Bank NTB	0,00
✓ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pembayaran Piutang Dividen dari PT Bank NTB dan PD. BPR NTB	2.569.480.270,00
Jumlah Penjelasan Selisih	(2.569.480.270,00)

5.4.1.1.4 Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kota Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	814.189.265,00	1.117.736.923,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	0,00	13.139.049.426,76
Jasa Giro – LO	578.475.168,25	479.369.095,52
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir – LO	0,00	501.300,00
Pendapatan Bunga – LO	2.029.287.214,99	3.247.190.524,39
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah – LO	0,00	1.185.757.924,39
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain – LO	20.349.818.894,71	35.676.961,50
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO	62.213.360,80	133.093.093,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah – LO	73.335.568,96	123.934,00
Pendapatan dari Pengembalian – LO	1.406.459.766,00	49.065.850,00
Pendapatan BLUD – LO	0,00	9.241.581.994,00
Jumlah	25.313.779.238,71	28.629.147.026,56



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 5.4

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan terdapat penurunan nilai Pendapatan BLUD RSUD di tahun 2024. Hal ini terjadi karena, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, mulai Tahun 2024 pendapatan BLUD dicatat pada rekening Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2. Pengakuan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO Tahun 2024 ini lebih besar dari saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LRA TA 2024 sebesar Rp19.451.451.086,80 (Rp25.313.779.238,71 – Rp5.862.328.151,91). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	19.451.451.086,80
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
Penambahan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain karena pengakuan Pendapatan atas Pendapatan diterima di muka tahun lalu	25.751.301,07
Reklasifikasi Penerimaan dari PT AMNT dari Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain ke IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya dalam Provinsi	74.289.602.461,00
Reklasifikasi dari Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain ke Reklasifikasi Penerimaan Pembayaran PBB BNI Cabang Bima tgl 5 sept 2024	2.718.515,00
Reklasifikasi dari Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain ke Reklasifikasi Penerimaan Pembayaran PBB Adnan Maisaroh (SPPT dari juru pungut merupakan pembayaran PBB yang sebelumnya masuk RC Kasda belum diketahui jenis penerimaannya sehingga dimasukkan dalam Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain)	493.303,00
Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
Pembayaran Piutang Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	789.988.593,53
Pembayaran Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.239.295,74
Pembayaran Piutang atas Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain dari PTN Amman Mineral Nusa Tenggara	54.075.886.604,00
Jumlah Penjelasan Selisih	19.451.451.086,80

5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer - LO yang diakui oleh Pemerintah Kota Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	682.570.865.312,00	679.649.231.050,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO	58.284.853.297,00	58.173.066.959,00
Jumlah	740.855.718.609,00	737.822.298.009,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 5.4

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO yang diakui oleh Pemerintah Kota Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Dana Perimbangan – LO	679.776.936.312,00	658.477.021.050,00
✓ Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) – LO	51.205.594.000,00	81.397.212.245,00
✓ Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	488.281.634.000,00	453.939.356.950,00
✓ Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LO	51.257.106.179,00	42.423.553.167,00
✓ Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LO	89.032.602.133,00	80.716.898.688,00
Dana Insentif Daerah – LO	0,00	21.172.210.000,00
✓ Dana Insentif Daerah – LO	0,00	21.172.210.000,00
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur – LO	0,00	0,00
✓ Dana Otonomi Khusus - Provinsi Papua – LO	0,00	0,00
✓ Dana Otonomi Khusus - Provinsi Papua Barat – LO	0,00	0,00
✓ Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh – LO	0,00	0,00
✓ Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua - LO	0,00	0,00
✓ Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat – LO	0,00	0,00
Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta – LO	0,00	0,00
✓ Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta – LO	0,00	0,00
Dana Desa – LO	0,00	0,00
✓ Dana Desa – LO	0,00	0,00
Insentif Fiskal – LO	2.793.929.000,00	0,00
✓ Insentif Fiskal – LO	2.793.929.000,00	0,00
Jumlah	682.570.865.312,00	679.649.231.050,00

Penjelasan:

- Perubahan nilai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
 - Kenaikan pada dana DAU dan DAK namun penurunan pada DBH;
 - Tidak adanya DID di tahun 2024; dan
 - Adanya Insentif Fiskal di Tahun 2024.
- Pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam LO Tahun 2024 ini lebih kecil dari saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam LRA TA 2024 sebesar Rp15.817.445.000,00 (Rp682.570.865.312,00 - Rp698.388.310.312,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Pendapatan transfer pemerintah pusat dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	15.817.445.000,00
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 5.4

Uraian	Nilai
✓ Pengakuan Piutang DBH PBB-LO	3.832.574.000,00
✓ Pengakuan Piutang DBH PPh Pasal 21-LO	1.006.912.000,00
✓ Pengakuan Piutang DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty -LO	9.148.853.000,00
✓ Pengakuan Piutang DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	16.145.000,00
✓ Pengakuan Piutang DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.000,00
➤ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pembayaran Piutang DBH PBB-LO	387.227.000,00
✓ Pembayaran Piutang DBH PPh Pasal 21-LO	1.164.840.000,00
✓ Pembayaran Piutang DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	10.336.000,00
✓ Pembayaran Piutang DBH CHT-LO	479.432.000,00
✓ Pembayaran Piutang DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty -LO	27.780.095.000,00
Jumlah Penjelasan Selisih	15.817.445.000,00

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kota Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan Bagi Hasil – LO	58.284.853.297,00	54.550.163.759,00
✓ Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor – LO	7.990.140.312,00	7.691.974.654,00
✓ Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor – LO	8.031.715.880,00	7.286.028.813,00
✓ Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	22.703.444.617,00	20.848.887.577,00
✓ Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan – LO	38.993.387,00	40.054.648,00
✓ Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok – LO	19.520.559.101,00	18.683.218.067,00
Bantuan Keuangan – LO	0,00	3.622.903.200,00
✓ Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	0,00	0,00
✓ Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0,00	3.622.903.200,00
✓ Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	0,00
✓ Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	0,00
Jumlah	58.284.853.297,00	58.173.066.959,00

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan adanya kenaikan pada DBH pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar bermotor dan pajak rokok
2. Pengakuan Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LO Tahun 2024 ini lebih kecil dari saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LRA TA 2024 sebesar Rp1.080.763.941,00 (Rp58.284.853.297,00 - Rp59.365.617.238,00). Hal tersebut



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 5.4

disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	(1.080.763.941,00)
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengakuan Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	769.104.223,00,00
✓ Pengakuan Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	775.735.338,00,00
✓ Pengakuan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.899.613.533,00
✓ Pengakuan Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	3.663.782,00
➤ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pembayaran Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	1.248.403.219,00
✓ Pembayaran Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.399.273.018,00
✓ Pembayaran Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.877.718.394,00
✓ Pembayaran Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	3.486.186,00
Jumlah Penjelasan Selisih	(1.080.763.941,00)

5.4.1.3 Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kota Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan Hibah – LO	11.727.358.759,96	43.848.526.653,49
Dana Darurat – LO	0,00	0,00
Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan – LO	10.472.591.213,00	63.597.663.567,00
Jumlah	22.199.949.972,96	107.446.190.220,49

5.4.1.2.3 Pendapatan Hibah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Hibah - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Hibah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kota Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	1.120.150.000,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	1.964.345.451,76	42.728.376.653,49
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	0,00	0,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	9.763.013.308,20	0,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	0,00
Jumlah	11.727.358.759,96	43.848.526.653,49



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 5.4

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Pendapatan Hibah – LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Tidak ada hibah dari pemerintah pusat; dan
 - b. Terjadinya penurunan yang signifikan atas hibah yang diperoleh dari pemerintah daerah lainnya.
2. Pengakuan Pendapatan Hibah dalam LO Tahun 2024 ini lebih besar dari saldo Pendapatan Hibah dalam LRA TA 2024 sebesar Rp11.727.358.759,96 (Rp11.727.358.759,96– Rp0,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan Pendapatan Hibah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	11.727.358.759,96
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Penambahan Hibah Aset dari Pemerintah Daerah Lainnya berupa obat-obatan	1.964.345.451,76
✓ Penambahan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	364.258.000,00
✓ Penambahan Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	9.398.755.308,20
➤ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
Jumlah Penjelasan Selisih	11.727.358.759,96

5.4.1.2.4 Dana Darurat – LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Dana Darurat - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu saldo rincian Dana Darurat - LO yang diakui oleh Pemerintah Kota Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Dana Darurat pada Tahap Pasca Bencana - LO	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

5.4.1.2.5 Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu saldo rincian Pendapatan Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan - LO yang diakui oleh Pemerintah Kota Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Lain-Lain Pendapatan	0,00	54.135.886.604,00
✓ Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00
✓ Pendapatan atas Pengembalian Hibah	0,00	60.000.000,00
✓ Pendapatan atas Dana <i>Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment</i>	0,00	54.075.886.604,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	10.472.591.213,00	9.461.776.963,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 5.4

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
✓ Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	10.472.591.213,00	9.461.776.963,00
Jumlah	10.472.591.213,00	63.597.663.567,00

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan - LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan adanya penurunan yang signifikan atas piutang pada PT AMNT tahun 2024.
2. Pengakuan Pendapatan Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan dalam LO Tahun 2024 ini sama dengan saldo Pendapatan Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan dalam LRA TA 2024.

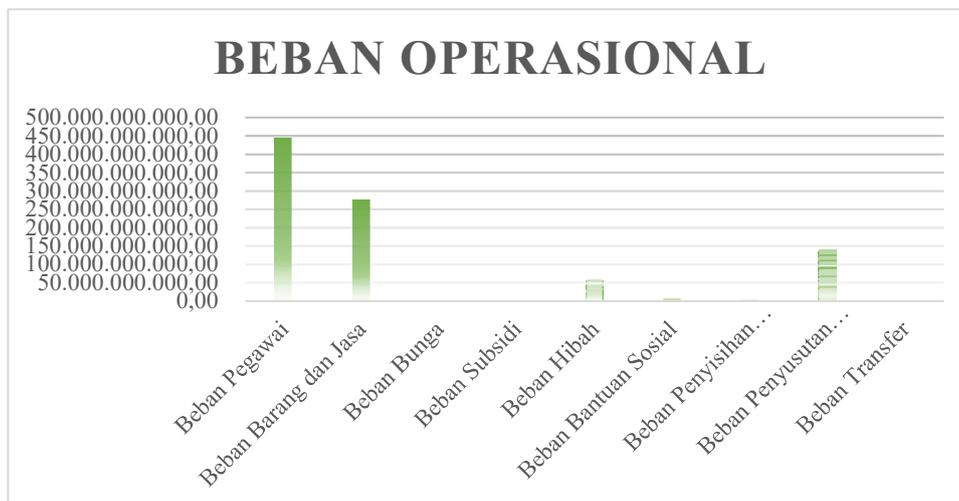
5.4.2 Beban Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Operasional Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian saldo Beban Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kota Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Pegawai	442.476.196.511,00	376.246.208.272,00
Beban Barang dan Jasa	271.768.076.398,42	263.016.599.843,92
Beban Bunga	0,00	0,00
Beban Subsidi	0,00	0,00
Beban Hibah	56.015.416.656,31	39.613.509.262,52
Beban Bantuan Sosial	3.918.650.000,00	4.270.609.000,00
Beban Penyisihan Piutang	2.353.313.737,04	2.239.240.662,94
Beban Penyusutan dan Amortisasi	138.425.713.199,22	135.648.728.946,63
Beban Transfer	0,00	0,00
Jumlah	914.957.366.501,99	821.034.895.988,01

Penjelasan:

Komposisi realisasi Beban Operasional Tahun 2024 pada Pemerintah Kota Bima digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 5.4

5.4.2.1 Beban Pegawai

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Pegawai yang diakui oleh Pemerintah Kota Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	290.154.037.101,00	245.132.939.189,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	71.927.898.271,00	62.332.814.300,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	65.340.092.605,00	55.593.681.611,00
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	10.099.123.342,00	9.913.395.633,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	51.450.000,00	228.909.962,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	312.399.600,00	455.799.600,00
Belanja Gaji dan Tunjangan MRP	0,00	0,00
Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe	0,00	0,00
Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00
Belanja Pegawai BOSP	0,00	0,00
Belanja Pegawai BLUD	4.591.195.592,00	2.588.667.977,00
Jumlah	442.476.196.511,00	376.246.208.272,00

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Pegawai Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan adanya peningkatan Beban Gaji dan Tunjangan ASN karena Penambahan ASN Baru.
2. Pengakuan Beban Pegawai dalam LO Tahun 2024 ini lebih kecil dari saldo Belanja Pegawai dalam LRA TA 2024 sebesar Rp5.588.348.551 (Rp442.476.196.511,00 - Rp448.064.545.062,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Pegawai dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	(5.588.348.551,00)
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Penambahan Utang Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2024	112.788.280,00
✓ Penambahan akibat reklas dari Beban Tak Terduga	175.623.950,00
✓ Koreksi Penambahan Pengakuan piutang gaji	34.468.951,00
➤ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pembayaran Utang Gaji dan Tunjangan Tahun sebelumnya	5.668.105.232,00
✓ Kapitalisasi Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	208.820.000,00
✓ Pengurangan Beban Gaji dan Tunjangan pegawai yang telah pensiun	34.304.500,00
Jumlah Penjelasan Selisih	(5.588.348.551,00)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 5.4

5.4.2.2 Beban Barang dan Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Barang dan Jasa yang diakui oleh Pemerintah Kota Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Barang	87.853.766.255,42	86.789.638.945,63
Beban Jasa	111.512.379.872,00	107.035.301.877,51
Beban Pemeliharaan	12.978.383.030,00	13.086.660.328,00
Beban Perjalanan Dinas	56.438.303.241,00	53.065.337.434,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat	2.985.244.000,00	3.039.661.258,78
Belanja Penunjang Otonomi Khusus*)	0,00	0,00
Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa BOSP	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	0,00	0,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00
Jumlah	271.768.076.398,42	263.016.599.843,92

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan adanya peningkatan pada beban barang, jasa dan perjalanan dinas.
2. Pengakuan Beban Barang dan Jasa dalam LO Tahun 2024 ini lebih kecil dari saldo Belanja Barang dan Jasa dalam LRA TA 2024 sebesar Rp7.900.063.318,58 (Rp271.768.076.398,42 - Rp279.668.139.717,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Barang dan Jasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	(7.900.063.318,58)
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Penambahan Beban Barang karena persediaan tahun lalu	18.330.422.816,30
✓ Penambahan Beban Barang karena reklas dari beban barang jasa BOS	9.007.257.945,00
✓ Penambahan Beban Barang yang direklas dari Beban barang dan Jasa BOSP	727.368.350,00
✓ Penambahan Beban Barang Karena Pendapatan Hibah	1.964.345.451,76
✓ Penambahan Beban karena Reklas Ke Barang Habis Pakai	907.406.531,23
✓ Penambahan Beban barang reklas dari beban tak terduga	268.710.750,00
✓ Penambahan Beban Barang yang direklas dari Beban barang dan Jasa RSUD	3.579.839.929,00
✓ Penambahan Beban Jasa karena reklas dari beban barang jasa	13.488.948.881,00
✓ Penambahan Beban karena utang listrik tahun berjalan	8.795.700,00
✓ Reklas dari Beban Tidak Terduga	115.050.000,00
✓ Penambahan Beban Pemeliharaan Tanah karena Reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa BOSP	82.020.000,00
✓ Penambahan Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa BOSP dan RSUD	164.473.938,00
✓ Penambahan Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa BOSP	1.027.244.996,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 5.4

Uraian	Nilai
✓ Penambahan Beban Aset Tetap Lainnya karena Reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa BOSP	140.710.200,00
✓ Penambahan Beban Perjalanan Dinas Biasa karena Reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa BOS dan BLUD	1.344.878.128,00
✓ Penambahan Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota karena Reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa BOS	337.320.000,00
✓ Penambahan Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota karena Reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa BOS	199.240.200,00
➤ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengurangan Beban Barang karena Persediaan Tahun ini	16.313.952.383,87
✓ Pengurangan Beban Barang karena Kapitalisasi Beban Barang ke Aset Tetap	8.294.015.075,00
✓ Penambahan Beban karena Reklas dari Barang Habis Pakai	19.980.000,00
✓ Pengurangan Beban Jasa karena Kapitalisasi Beban Jasa ke Aset Tetap	275.506.630,00
✓ Pengurangan Beban Barang karena Pembayaran Utang Listrik tahun lalu	26.011.517,00
✓ Pengurangan Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan karena Kapitalisasi Beban Pemeliharaan ke Aset Tetap	2.122.725.408,00
✓ Reklas dari Belanja Barang dan Jasa BOS ke Beban barang dan Jasa BOS	21.195.052.000,00
✓ Reklas dari Belanja Barang dan Jasa BLUD ke Beban barang dan Jasa BLUD	8.904.250.567,00
✓ Koreksi beban atas temuan pemeriksaan Belanja Reklas Beban Barang ke TGR Aset lainnya	1.435.403.002,00
✓ Koreksi beban atas temuan pemeriksaan Belanja Reklas Beban Jasa ke TGR Aset lainnya	954.324.250,00
✓ Koreksi beban atas temuan pemeriksaan Belanja Reklas Beban Pemeliharaan ke TGR Aset lainnya	1.250.000,00
✓ Koreksi beban atas temuan pemeriksaan Belanja Reklas Beban Perjalanan Daerah ke TGR Aset lainnya	51.626.302,00
Jumlah Penjelasan Selisih	(7.900.063.318,58)

5.4.2.3 Beban Bunga

Pemerintah Kota Bima tidak memiliki beban bunga atau per 31 Desember senilai Rp0,00.

5.4.2.4 Beban Subsidi

Pemerintah Kota Bima tidak memiliki beban Subsidi atau per 31 Desember senilai Rp0,00.

5.4.2.5 Beban Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Hibah Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Hibah yang diakui oleh Pemerintah Kota Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	9.931.651.846,31	2.154.765.722,83
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	431.250.539,69
Beban Hibah kepada BUMN	0,00	0,00
Beban Hibah kepada BUMD	0,00	0,00
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	37.338.135.810,00	33.479.537.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 5.4

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Hibah Dana BOS	2.767.560.000,00	2.570.100.000,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	997.254.000,00	977.856.000,00
Beban Hibah Dana BOSP	4.980.815.000,00	0,00
Jumlah	56.015.416.656,31	39.613.509.262,52

Penjelasan:

- Perubahan nilai Beban Hibah Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan adanya kenaikan Beban Hibah pada pemerintah pusat, Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, dan Beban Hibah Dana BOSP.
- Pengakuan Beban Hibah dalam LO Tahun 2024 ini lebih besar dari saldo Belanja Hibah dalam LRA TA 2024 sebesar Rp12.335.267.406,31 (Rp56.015.416.656,31 - Rp43.680.149.250,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Hibah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	12.335.267.406,31
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
➤ Penambahan Beban Hibah berupa Hibah Aset Tetap Kepada Pemerintah Pusat	9.931.651.846,31
➤ Penambahan Beban Hibah berupa Hibah Aset Tetap Ke Sekolah	2.403.615.560,00
➤ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
Jumlah Penjelasan Selisih	12.335.267.406,31

5.4.2.6 Beban Bantuan Sosial

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Bantuan Sosial yang diakui oleh Pemerintah Kota Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Bantuan Sosial kepada Individu	860.150.000,00	2.370.559.000,00
Beban Bantuan Sosial kepada Keluarga	1.858.500.000,00	1.900.050.000,00
Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	1.200.000.000,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	0,00
Jumlah	3.918.650.000,00	4.270.609.000,00

Penjelasan:

- Perubahan nilai Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan akibatnya adanya penurunan nilai yang cukup signifikan Bantuan sosial kepada individu.
- Pengakuan Beban Bantuan Sosial dalam LO Tahun 2024 ini lebih besar dari saldo Belanja Bantuan Sosial dalam LRA TA 2024 Rp745.650.000,00 (Rp3.918.650.000,00 - Rp3.173.000.000,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 5.4

peristiwa yang mempengaruhi penambahan Beban Bantuan Sosial dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	745.650.000,00
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
➤ Penambahan Beban Bantuan Sosial karena reklas dari Beban Tak Terduga	745.650.000,00
➤ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
Jumlah Penjelasan Selisih	745.650.000,00

5.4.2.7 Beban Penyisihan Piutang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Penyisihan Piutang yang diakui oleh Pemerintah Kota Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	1.320.747.587,66	1.343.520.309,78
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	1.032.566.149,38	895.720.353,16
Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Lain - Lain PAD yang Sah	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	2.353.313.737,04	2.239.240.662,94

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan adanya kenaikan pada beban penyisihan piutang retribusi daerah.
2. Pengakuan Beban Penyisihan Piutang dalam LO Tahun 2024 ini lebih besar dari selisih/perubahan saldo Penyisihan Piutang dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 dalam Neraca per 31 Desember 2024 sebesar Rp189.798.956,03 [Rp2.353.313.737,04 - (Rp8.686.677.242,40 - Rp10.850.192.023,41)]. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Kenaikan Penyisihan Piutang dalam Neraca, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – Perubahan Saldo dalam Neraca	189.798.956,03
Penjelasan Selisih:	
➤ Pengurangan Penyisihan Piutang:	
✓ Pembayaran atas piutang pajak yang telah disisihkan	189.448.622,70
✓ Pembayaran atas piutang retribusi sewa yang telah disisihkan	350.333,33
Jumlah Penjelasan Selisih	189.798.956,03



5.4.2.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi yang diakui oleh Pemerintah Kota Bima selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	36.388.210.125,22	36.838.391.673,38
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	21.702.578.001,18	18.712.342.676,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	80.179.158.022,29	79.959.634.726,80
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya - Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud	147.925.701,43	137.068.203,45
Beban Penyusutan Aset Lainnya - Aset Lain - Lain	0,00	0,00
Beban Penyusutan Properti Investasi	7.841.349,10	1.291.667,00
Jumlah	138.425.713.199,22	135.648.728.946,63

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dari Tahun 2024 disebabkan adanya kenaikan Beban penyusutan bangunan gedung karena adanya penambahan aset berupa bangunan gedung.
2. Perbedaan pengakuan Beban Penyusutan dan Amortisasi dalam LO Tahun 2024 dengan selisih/perubahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya serta perubahan saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 dalam Neraca per 31 Desember 2024 diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan atas Pos-Pos Neraca pada *Poin Poin 5.3.1.3.7 dan 5.3.1.6.3*; dan
3. Rincian nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi pada masing-masing SKPD telah diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Penjelasan atas Pos-Pos Neraca pada *Poin Poin 5.3.1.3.7 dan 5.3.1.6.3*, dan juga dapat dilihat pada *Lampiran 14*.

5.4.2.9 Beban Transfer

Pemerintah Kota Bima tidak memiliki beban transfer atau per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00.

5.4.2.9.1 Beban Transfer Bagi Hasil

Pemerintah Kota Bima tidak memiliki beban transfer Bagi Hasil atau per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00.

5.4.2.9.2 Beban Transfer Bantuan Keuangan

Pemerintah Kota Bima tidak memiliki beban transfer Bantuan Keuangan atau per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00.

5.4.3 Surplus Non-Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus Non-Operasional Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Surplus Non-Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kota Bima selama melakukan kegiatan nonoperasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 5.4

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	0,00	9.204.963,00
✓ Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	0,00	0,00
✓ Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	0,00	0,00
✓ Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang – LO	0,00	9.204.963,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO	0,00	0,00
✓ Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat - LO	0,00	0,00
✓ Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) - LO	0,00	0,00
✓ Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) - LO	0,00	0,00
✓ Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi - LO	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	189.798.956,03	110.752.586,44
✓ Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	0,00	0,00
✓ Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek – LO	189.798.956,03	110.752.586,44
Jumlah	189.798.956,03	119.957.549,44

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Surplus Non-Operasional Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Adanya kenaikan pada jumlah pembayaran atas piutang yang telah disisihkan.
2. Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek-LO Pemerintah Kota Bima Tahun 2024 merupakan surplus atas Pembayaran Piutang yang telah disisihkan.

5.4.4 Defisit Non-Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Defisit Non-Operasional Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Defisit Non-Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kota Bima selama melakukan kegiatan non operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	1.204.625.532,18	1.042.787.355,35
✓ Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	0,00	0,00
✓ Defisit Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan - LO	0,00	0,00
✓ Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang – LO	0,00	0,00
✓ Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO	1.204.625.532,18	1.042.787.355,35
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO	0,00	0,00
✓ Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat - LO	0,00	0,00
✓ Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) - LO	0,00	0,00
✓ Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) - LO	0,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	0,00	132.368,57
✓ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	0,00	132.368,57
✓ Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek – LO	0,00	0,00
Jumlah	1.204.625.532,18	1.042.919.723,92



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 5.4

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Defisit Non-Operasional Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan bertambahnya jumlah penghapusan aset tetap.
2. Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO Pemerintah Kota Bima sebesar Rp1.204.625.532,18 merupakan defisit atas Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO berupa Gedung dan Bangunan masih terdapat nilai buku (Aset Tetap) di Sekretariat Daerah sebesar Rp36.845.625,00, Dinas Pertanian Rp139.022.188,00, Dinas Kesehatan Rp52.150.000,00, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Rp54.341.575,67 dan Aset Rusak Berat (Aset Lainnya) di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebesar Rp 379.262,00, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rp39.734.066,40, Sekretariat DPRD Rp7.883.158,00, Sekretariat Daerah Rp312.785.053,00, Dinas Kesehatan Rp421.375.000,00, dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Rp140.109.604,11.

5.4.5 Pos Luar Biasa

Pemerintah Kota Bima tidak memiliki Pos Luar Biasa atau per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00.

5.4.6 Surplus/(Defisit) - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2024 dan 2023 yang dihitung dari:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Kegiatan Operasional	(74.580.915.542,92)	92.476.683.687,12
➤ Pendapatan Daerah – LO	840.376.450.959,07	913.511.579.675,13
✓ Pendapatan Asli Daerah – LO	77.320.782.377,11	68.243.091.445,64
✓ Pendapatan Transfer – LO	740.855.718.609,00	737.822.298.009,00
✓ Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO	22.199.949.972,96	107.446.190.220,49
➤ Beban Operasional	914.957.366.501,99	821.034.895.988,01
✓ Beban Operasional	914.957.366.501,99	821.034.895.988,01
Kegiatan Non-Operasional	(1.014.826.576,15)	(922.962.174,48)
➤ Surplus Non-Operasional	189.798.956,03	119.957.549,44
✓ Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	0,00	9.204.963,00
✓ Surplus dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya - LO	189.798.956,03	110.752.586,44
➤ Defisit Non-Operasional	1.204.625.532,18	1.042.919.723,92
✓ Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	1.204.625.532,18	1.042.787.355,35
✓ Defisit dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya - LO	0,00	132.368,57
Pos Luar Biasa	0,00	0,00
✓ Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
✓ Beban Luar Biasa	0,00	0,00
Jumlah	(75.595.742.119,07)	91.553.721.512,64

Jumlah saldo Surplus/(Defisit) - LO di atas juga sama dengan saldo Surplus/(Defisit) - LO yang diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan atas Pos-Pos LPE pada **Poin 5.6.2**.



5.5 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi, dan saldo Kas dan Setara Kas pada tanggal pelaporan. Terdapat empat aktivitas yang mempengaruhi perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi yaitu: aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

Penjelasan atas Pos-Pos LAK Pemerintah Kota Bima untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan disajikan sebagai berikut:

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasi Pemerintah. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas, yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu tahun anggaran. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kota Bima selama Tahun 2024 dan 2023, yaitu sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	897.965.536.147,29	772.006.886.982,70
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	(775.890.868.729,00)	(682.437.477.699,25)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	122.074.667.418,29	89.569.409.283,45

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

5.5.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
➤ Penerimaan Pajak Daerah		
✓ Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0,00	0,00
✓ Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	0,00	0,00
✓ Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	0,00	0,00
✓ Pajak Air Permukaan	0,00	0,00
✓ Pajak Rokok	0,00	0,00
✓ Pajak Hotel	0,00	1.281.743.103,28
✓ Pajak Restoran	0,00	2.132.758.354,00
✓ Pajak Hiburan	0,00	56.267.950,00
✓ Pajak Reklame	480.449.487,00	448.264.791,50
✓ Pajak Penerangan Jalan	0,00	10.233.873.243,00
✓ Pajak Parkir	0,00	164.195.500,00
✓ Pajak Air Tanah	111.461.026,80	52.914.467,70



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 5.5

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
✓ Pajak Sarang Burung Walet	0,00	21.000.000,00
✓ Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	198.524.497,00	235.761.383,75
✓ Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.993.482.633,00	3.456.288.051,00
✓ Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4.761.940.441,00	5.128.733.641,00
✓ Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	14.644.405.903,71	0,00
➤ Penerimaan Retribusi Daerah		
✓ Retribusi Jasa Umum		
• Retribusi Pelayanan Kesehatan	19.940.787.436,40	2.736.071.950,00
• Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0,00	501.768.000,00
• Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	0,00	0,00
• Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	393.264.000,00	407.854.000,00
• Retribusi Pelayanan Pasar	452.890.000,00	464.957.500,00
• Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	434.860.000,00
• Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00
• Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kaku	0,00	69.900.000,00
• Retribusi Pengolahan Limbah Cair	0,00	0,00
• Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00
• Retribusi Pelayanan Pendidikan	0,00	0,00
• Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	187.738.000,00
• Retribusi Pelayanan Kebersihan	561.705.000,00	0,00
✓ Retribusi Jasa Usaha		
• Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	1.763.033.700,00
• Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,00	423.824.800,00
• Retribusi Tempat Pelelangan	0,00	0,00
• Retribusi Terminal	0,00	5.626.000,00
• Retribusi Tempat Khusus Parkir	0,00	211.343.000,00
• Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	151.000.000,00	0,00
• Retribusi Rumah Potong Hewan	0,00	14.700.000,00
• Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	0,00	0,00
• Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	0,00	561.114.395,00
• Retribusi Penyeberangan di Air	0,00	0,00
• Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,00	0,00
• Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	269.092.750,00	0,00
• Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	189.871.000,00	0,00
• Retribusi Pelayanan Rumah Pematangan Hewan Ternak	13.710.000,00	0,00
• Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	478.502.000,00	0,00
• Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	284.171.750,00	0,00
• Retribusi Penjualan Pemanfaatan Aset Daerah	2.006.508.700,00	0,00
✓ Retribusi Perizinan Tertentu		



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 5.5

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
• Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	917.757.251,00
• Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	0,00	0,00
• Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	22.550.000,00
• Retribusi Izin Usaha Perikanan	0,00	0,00
• Retribusi Pengendalian Lalu Lintas	0,00	0,00
• Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	636.862.852,00	0,00
• Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	0,00	0,00
• Retribusi Pertambangan Rakyat	0,00	0,00
➤ Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
✓ Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	0,00	0,00
✓ Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.622.635.153,00	2.140.790.453,00
✓ Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	0,00	0,00
✓ Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	0,00	0,00
✓ Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Limbah)	0,00	0,00
✓ Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Sanitasi)	0,00	0,00
✓ Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	0,00	0,00
➤ Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah		
✓ Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	78.735.456,67
✓ Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	0,00
✓ Jasa Giro	578.475.168,25	479.369.095,52
✓ Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00
✓ Pendapatan Bunga	2.030.526.510,73	3.247.190.524,39
✓ Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	1.185.757.924,39
✓ Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	107.139.918,64	35.676.961,50
✓ Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	0,00	0,00
✓ Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	62.213.360,80	133.093.093,00
✓ Pendapatan Denda Pajak Daerah	73.335.568,96	123.934,00
✓ Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	0,00
✓ Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	0,00
✓ Pendapatan dari Pengembalian	1.406.459.766,00	49.065.850,00
✓ Pendapatan BLUD	0,00	11.046.242.349,00
✓ Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	0,00	0,00
✓ Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00
✓ Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	501.300,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 5.5

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
✓ Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (<i>Inkracht</i>)	0,00	0,00
✓ Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	0,00
✓ Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	0,00	0,00
✓ Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak	0,00	0,00
➤ Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat		
✓ Dana Perimbangan	695.594.381.312,00	632.975.550.859,00
✓ Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	21.172.210.000,00
✓ Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	0,00	0,00
✓ Dana Keistimewaan	0,00	0,00
✓ Dana Desa	0,00	0,00
✓ Insentif Fiskal	2.793.929.000,00	0,00
➤ Penerimaan Transfer Antar Pemerintah Daerah		
✓ Pendapatan Bagi Hasil		
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	8.469.439.308,00	7.875.547.294,00
• Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8.655.253.560,00	7.152.234.289,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	22.681.549.478,00	20.631.215.848,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	38.815.791,00	40.784.440,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	19.520.559.101,00	18.683.218.067,00
✓ Bantuan Keuangan		
• Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	0,00	0,00
• Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0,00	3.622.903.200,00
• Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	0,00
• Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	0,00
➤ Penerimaan Hibah		
✓ Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00
✓ Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
✓ Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Neri	0,00	0,00
✓ Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	0,00	0,00
✓ Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	0,00
➤ Penerimaan Dana Darurat		
✓ Dana Darurat pada Tahap Pasca Bencana	0,00	0,00
➤ Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		
✓ Lain-Lain Pendapatan		
• Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00
• Pendapatan atas Pengembalian Hibah	0,00	60.000.000,00
• Pendapatan atas Dana <i>Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+)</i> Results Based Payment	0,00	0,00
✓ Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		
• Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	10.472.591.213,00	9.461.776.963,00
✓ Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara		



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 5.5

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
• Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya dalam Provinsi	74.289.602.461,00	0,00
Jumlah	897.965.536.147,29	772.006.886.982,70

5.5.1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
➤ Pembayaran Belanja Pegawai		
✓ Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	292.061.775.652,00	244.216.882.843,00
✓ Belanja Tambahan Penghasilan ASN	71.927.898.271,00	62.332.814.300,00
✓ Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	69.020.702.605,00	52.335.251.611,00
✓ Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	10.099.123.342,00	9.913.395.633,00
✓ Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	51.450.000,00	228.909.962,00
✓ Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	312.399.600,00	455.799.600,00
✓ Belanja Gaji dan Tunjangan MRP	0,00	0,00
✓ Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe	0,00	0,00
✓ Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00
✓ Belanja Pegawai BOSP	0,00	0,00
✓ Belanja Pegawai BLUD	4.591.195.592,00	2.588.667.977,00
➤ Pembayaran Belanja Barang dan Jasa		
✓ Belanja Barang	79.126.969.743,00	81.346.245.862,96
✓ Belanja Jasa	99.293.316.888,00	94.683.151.800,00
✓ Belanja Pemeliharaan	13.687.909.304,00	11.938.036.803,00
✓ Belanja Perjalanan Dinas	54.608.491.215,00	51.486.586.152,00
✓ Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.852.150.000,00	2.917.431.258,78
✓ Belanja Penunjang Otonomi Khusus*)	0,00	0,00
✓ Belanja Barang dan Jasa BOS	21.195.052.000,00	16.085.406.650,51
✓ Belanja Barang dan Jasa BOSP	0,00	0,00
✓ Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	0,00	0,00
✓ Belanja Barang dan Jasa BLUD	8.904.250.567,00	9.394.654.141,00
➤ Pembayaran Belanja Bunga		
✓ Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
✓ Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00
✓ Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
✓ Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0,00	0,00
✓ Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)	0,00	0,00
✓ Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD	0,00	0,00
➤ Pembayaran Belanja Subsidi		
✓ Belanja Subsidi kepada BUMN	0,00	0,00
✓ Belanja Subsidi kepada BUMD	0,00	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 5.5

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
✓ Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	0,00	0,00
✓ Belanja Subsidi kepada Koperasi	0,00	0,00
➤ Pembayaran Belanja Hibah		
✓ Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	140.729.233,00
✓ Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
✓ Belanja Hibah kepada BUMN	0,00	0,00
✓ Belanja Hibah kepada BUMD	0,00	0,00
✓ Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	34.934.520.250,00	33.479.537.000,00
✓ Belanja Hibah Dana BOS	2.767.560.000,00	2.570.100.000,00
✓ Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	997.254.000,00	977.856.000,00
✓ Belanja Hibah Dana BOSP	4.980.815.000,00	0,00
➤ Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		
✓ Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	114.500.000,00	1.583.250.000,00
✓ Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	1.858.500.000,00	1.900.050.000,00
✓ Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	1.200.000.000,00	0,00
✓ Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	0,00
➤ Pembayaran Belanja Tak Terduga		
✓ Belanja Tak Terduga	1.305.034.700,00	1.862.720.872,00
➤ Pembayaran Belanja Transfer Bagi Hasil		
✓ Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	0,00	0,00
✓ Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	0,00	0,00
✓ Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	0,00	0,00
✓ Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	0,00	0,00
➤ Pembayaran Belanja Transfer Bantuan Keuangan		
✓ Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	0,00	0,00
✓ Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00
✓ Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0,00	0,00
✓ Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	0,00	0,00
✓ Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00
✓ Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota	0,00	0,00
Jumlah	775.890.868.729,00	682.437.477.699,25

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Realisasi Kas Bersih dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya yang bertujuan untuk meningkatkan operasi Pemerintah dan menghasilkan pendapatan dimasa yang akan datang. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kota Bima selama tahun 2024 dan 2023, yaitu sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 5.5

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	1.604.177.858,53	1.117.736.923,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	117.434.068.509,00	149.479.520.226,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(115.829.890.650,47)	(148.361.783.303,00)

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

5.5.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
➤ Pencairan Dana Cadangan		
✓ Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
➤ Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan		
✓ Hasil Penjualan Tanah	0,00	0,00
✓ Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	632.723.000,00	1.098.505.923,00
✓ Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	945.164.593,53	15.231.000,00
✓ Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00
✓ Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	26.290.265,00	4.000.000,00
✓ Hasil Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
✓ Hasil Penjualan Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
✓ Hasil Penjualan Aset Lain – Lain	0,00	0,00
➤ Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
✓ Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	0,00	0,00
✓ Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0,00	0,00
➤ Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan		
✓ Divestasi Jangka Pendek BLUD	0,00	0,00
Jumlah	1.604.177.858,53	1.117.736.923,00

5.5.2.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
➤ Pembentukan Dana Cadangan		
✓ Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
➤ Perolehan Tanah		
✓ Belanja Modal Tanah Persil	2.276.906.460,00	894.391.000,00
✓ Belanja Modal Tanah Non Persil	5.853.960,00	200.000.000,00
✓ Belanja Modal Lapangan	0,00	0,00
✓ Belanja Modal Tanah BLUD	0,00	0,00
➤ Perolehan Peralatan dan Mesin		
✓ Belanja Modal Alat Besar	590.000.000,00	881.604.400,00
✓ Belanja Modal Alat Angkutan	5.483.534.900,00	12.408.593.312,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 5.5

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
✓ Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	114.950.000,00	2.870.000,00
✓ Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00
✓ Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.309.862.510,00	3.706.249.100,00
✓ Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	449.413.650,00	709.732.025,00
✓ Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	7.557.595.823,00	11.066.971.110,00
✓ Belanja Modal Alat Laboratorium	280.550.000,00	2.168.946.800,00
✓ Belanja Modal Komputer	4.975.893.975,00	4.500.522.092,00
✓ Belanja Modal Alat Eksplorasi	16.255.000,00	0,00
✓ Belanja Modal Alat Pengeboran	0,00	0,00
✓ Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	0,00
✓ Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00
✓ Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	64.740.000,00
✓ Belanja Modal Alat Peraga	0,00	0,00
✓ Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00
✓ Belanja Modal Rambu-Rambu	0,00	84.400.000,00
✓ Belanja Modal Peralatan Olahraga	33.200.000,00	0,00
✓ Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00
✓ Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	72.143.000,00	0,00
✓ Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	440.313.260,00	0,00
➤ Perolehan Gedung dan Bangunan		
✓ Belanja Modal Bangunan Gedung	39.948.213.549,00	45.850.114.214,00
✓ Belanja Modal Monumen	0,00	0,00
✓ Belanja Modal Bangunan Menara	0,00	0,00
✓ Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	898.829.766,00	3.252.846.426,00
✓ Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.657.248.328,00	0,00
➤ Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		
✓ Belanja Modal Jalan dan Jembatan	24.164.394.998,00	40.043.999.117,00
✓ Belanja Modal Bangunan Air	18.471.260.330,00	19.865.921.911,00
✓ Belanja Modal Instalasi	1.726.502.000,00	0,00
✓ Belanja Modal Jaringan	2.775.000.000,00	0,00
✓ Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	0,00	0,00
➤ Perolehan Aset Tetap Lainnya		
✓ Belanja Modal Bahan Perpustakaan	98.191.000,00	1.640.198.419,00
✓ Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0,00	0,00
✓ Belanja Modal Hewan	0,00	0,00
✓ Belanja Modal Biota Perairan	0,00	0,00
✓ Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00
✓ Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya	0,00	0,00
✓ Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00
✓ Belanja Modal Aset Tidak Berwujud* (Salah dr BAS 1317)	0,00	117.420.300,00
✓ Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00
✓ Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	50.450.000,00	0,00
✓ Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	0,00	0,00
➤ Perolehan Aset Lainnya		
✓ Belanja Modal Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud		
• Belanja Modal Aset Tidak Berwujud – Goodwill	0,00	0,00
• Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Lisensi dan Franchise	0,00	0,00
• Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Hak Cipta	0,00	0,00
• Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Hak Paten	0,00	0,00
• Belanja Modal Aset Tidak Berwujud – Software	2.037.506.000,00	20.000.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 5.5

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
• Belanja Modal Aset Tidak Berwujud – Kajian	0,00	0,00
• Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Aset Tidak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya	0,00	0,00
• Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan	0,00	0,00
• Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Aset Tidak Berwujud Lainnya	0,00	0,00
✓ Belanja Modal Aset Lainnya BLUD		
• Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	0,00	0,00
➤ Penyertaan Modal Daerah		
✓ Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	0,00	0,00
✓ Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0,00	2.000.000.000,00
➤ Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		
✓ Investasi BLUD	0,00	0,00
Jumlah	117.434.068.509,00	149.479.520.226,00

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Pemerintah Kota Bima selama tahun 2024 dan 2023, yaitu sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	9.204.963,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	9.204.963,00

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut:

5.5.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
➤ Penerimaan Pinjaman Daerah		
✓ Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00
✓ Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00
✓ Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
✓ Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0,00	0,00
✓ Pinjaman Daerah dari Masyarakat	0,00	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 5.5

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
➤ Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		
✓ Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
✓ Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
✓ Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD	0,00	0,00
✓ Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN	0,00	0,00
✓ Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	0,00	0,00
✓ Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	0,00	9.204.963,00
✓ Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD	0,00	0,00
➤ Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan		
✓ Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD	0,00	0,00
Jumlah	0,00	9.204.963,00

5.5.3.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
➤ Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		
✓ Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00
✓ Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00
✓ Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
✓ Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0,00	0,00
✓ Pembayaran Pinjaman Daerah dari Masyarakat	0,00	0,00
➤ Pemberian Pinjaman Daerah		
✓ Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
✓ Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
✓ Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD	0,00	0,00
✓ Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN	0,00	0,00
✓ Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi	0,00	0,00
✓ Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	0,00	0,00
✓ Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir melalui BLUD	0,00	0,00
➤ Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan		
✓ Pinjaman melalui BLUD	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan Pemerintah Kota Bima untuk TA 2024. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Kota Bima selama tahun 2024 dan 2023, yaitu sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	174.188.568.743,77	172.660.545.465,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	174.103.080.043,77	172.748.609.165,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	85.488.700,00	(88.063.700,00)



Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

5.5.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
➤ Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
✓ Iuran Wajib Pegawai	29.990.681.711,00	27.278.353.055,00
✓ Pajak Penghasilan	18.675.869.429,36	14.880.377.879,00
✓ Pajak Pertambahan Nilai	17.135.050.373,46	18.055.514.294,00
✓ Tabungan Perumahan Umum (Taperum)	0,00	0,00
✓ Tabungan Asuransi Pensiunan (Tapen)	951.688.387,00	0,00
✓ Asuransi Kesehatan	2.535.824,00	2.358.470,00
✓ PFK Lainnya	37.760.602,95	7.910.000,00
➤ Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bend. Pengeluaran		
✓ Total SPJ GU	78.867.561.981,00	78.931.033.546,00
✓ Total SPJ Nihil	27.932.073.403,00	32.401.334.332,00
✓ Penerimaan Sisa UP TA 2024	282.263.147,00	395.200.895,00
✓ Penerimaan Sisa TU TA 2023 dan TA 2024	225.020.185,00	708.462.994,00
✓ Kiriman Uang Masuk	88.063.700,00	0,00
Jumlah	174.188.568.743,77	172.660.545.465,00

Untuk Tahun 2024, Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga yang disajikan oleh Pemerintah Kota Bima telah termasuk dengan Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga yang dilakukan oleh BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dan sekolah-sekolah pengelola dana BOSP. Rincian Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga pada masing-masing unit kerja dapat dilihat pada *lampiran 5.5.1*.

5.5.4.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
☐ Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
☐ Iuran Wajib Pegawai	29.990.681.711,00	27.278.353.055,00
☐ Pajak Penghasilan	18.675.869.429,36	14.880.377.879,00
☐ Pajak Pertambahan Nilai	17.135.050.373,46	18.055.514.294,00
☐ Tabungan Perumahan Umum (Taperum)	0,00	0,00
☐ Tabungan Asuransi Pensiunan (Tapen)	951.688.387,00	0,00
☐ Asuransi Kesehatan	2.535.824,00	2.358.470,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 5.5

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
□ PFK Lainnya	37.760.602,95	7.910.000,00
□ Pemberian Kembali Uang Persediaan dari Bend. Pengeluaran		
□ Total SP2D UP	7.543.500.000,00	7.734.000.000,00
□ Total SP2D GU	78.867.561.981,00	78.931.033.546,00
□ Total SP2D TU	20.895.856.735,00	25.770.998.221,00
□ Pengeluaran Sisa UP	0,00	0,00
□ Pengeluaran Sisa TU	0,00	0,00
□ Kiriman Uang Keluar	2.575.000,00	88.063.700,00
Jumlah	174.103.080.043,77	172.748.609.165,00

Nilai Kiriman Uang Keluar pada Arus Kas Keluar Aktivitas Transitoris merupakan kas yang masih terdapat pada bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah. Untuk Tahun 2024, Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga yang disajikan oleh Pemerintah Kota Bima telah termasuk dengan Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga yang dilakukan oleh BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dan sekolah-sekolah pengelola dana BOSP. Rincian Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga pada masing-masing unit kerja dapat dilihat pada *lampiran 5.5.2*.

5.5.5 Kenaikan/(Penurunan) Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Kenaikan/(Penurunan) Kas yang disebabkan keempat aktivitas yang dijabarkan di atas dengan diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	122.074.667.418,29	89.569.409.283,45
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(115.829.890.650,47)	(148.361.783.303,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	9.204.963,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	85.488.700,00	(88.063.700,00)
Jumlah	6.330.265.467,82	(58.871.232.756,55)

5.5.6 Saldo Awal Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Awal Kas Tahun 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Kas di Kas Daerah	14.428.033.676,32	71.620.257.944,90
Kas di Bendahara Penerimaan	88.063.700,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	3.144.094.746,80	4.954.209.979,26
Kas Dana BOS	0,00	664.161,51
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	139.665.450,00	7.894.544,00
Kas Lainnya	11.510.000,00	30.489.379,00
Setara Kas	0,00	0,00
Kas Dana BOSP	0,00	0,00
Kas Dana BOK Puskesmas	0,00	0,00
Jumlah	17.811.367.573,12	76.613.516.008,67

Saldo Awal Kas tahun 2024 merupakan saldo akhir kas tahun 2023 senilai Rp17.811.367.573,12 dan sudah termasuk kas di bendahara penerimaan senilai Rp88.063.700,00 dan Kas Lainnya senilai Rp11.510.000,00 sehingga Saldo Awal Kas di fungsi Perbendaharaan senilai Rp17.711.793.873,12.



5.5.7 Koreksi SiLPA Tahun Lalu

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Koreksi SiLPA Tahun Lalu pada Tahun 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Uraikan peristiwa yang menyebabkan koreksi dilakukan secara ringkas	0,00	0,00
Uraikan peristiwa yang menyebabkan koreksi dilakukan secara ringkas	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Koreksi SiLPA Tahun Lalu yang disajikan di atas juga telah dijelaskan dan diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LP SAL pada *Poin 6.6.4* di bawah.

5.5.8 Saldo Akhir Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Akhir Kas Tahun 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Kas di Kas Daerah	19.192.652.170,66	14.428.033.676,32
Kas di Bendahara Penerimaan	2.575.000,00	88.063.700,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	4.650.490.635,28	3.144.094.746,80
Kas Dana BOS	0,00	0,00
Kas Dana Kapitasi di FKTP	471.974,00	139.665.450,00
Kas Lainnya	0,00	11.510.000,00
Setara Kas	0,00	0,00
Kas Dana BOSP	180.000,00	0,00
Kas Dana BOK Puskesmas	198.264.561,00	0,00
Jumlah	24.044.634.340,94	17.811.367.573,12

Pada Tahun 2023, Pemerintah Kota Bima menyajikan Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) atas utang yang disajikan sebagai utang PFK dalam saldo akhir kas. Sedangkan di Tahun 2024 Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) yang merupakan saldo utang PFK tidak disajikan sebagai utang PFK dalam saldo akhir kas namun sudah menjadi bagian dari kas di Kas daerah dan merupakan bagian dari saldo akhir kas.

Kas di Kas Daerah senilai Rp19.182.340.176,66 sudah termasuk nilai kas yang berada di Kas Negara senilai Rp10.311.994,00 yang merupakan kelebihan setor pajak oleh RKUD (Bank NTB Syariah) pada tanggal 29 Desember 2024. Pada tanggal 14 Mei 2025 Kas tersebut telah disetor kembali ke RKUD.

Dalam Dana Saldo Akhir Kas tersebut di atas terdapat Dana SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kota Bima untuk pelaksanaan aktivitas-aktivitas arus kas di tahun mendatang. Rincian Dana SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LRA pada *Poin 6.3.5* di atas.



5.6 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (dalam satuan mata uang Rupiah) dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1 Ekuitas Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Awal Tahun 2024 dan 2023 yang hanya terdiri dari:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Ekuitas Awal	2.218.552.098.313,85	2.100.460.506.926,58

Pemerintah Kota Bima menyajikan saldo Ekuitas Awal Tahun 2024 dan 2023 yang merupakan Saldo Ekuitas Akhir tahun 2023 dan 2022 pada Pemerintah Kota Bima yang disajikan dalam LPE pada masing-masing tahun berkenaan.

5.6.2 Surplus/(Defisit) - LO

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2024 dan 2023 yang hanya terdiri dari:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Surplus/(Defisit) – LO	(75.595.742.119,07)	91.553.721.512,64

Pada Tahun 2024 dan 2023, Pemerintah Kota Bima masing-masing memiliki surplus dan defisit atas kegiatan operasional dan nonoperasional serta atas kejadian luar biasa yang berpengaruh terhadap kas maupun tanpa mempengaruhi posisi kas atau merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kota Bima Tahun 2024. Saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan di atas sama dengan nilai saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan dalam LO sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LO pada *point 5.4.5*.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang terdiri dari:

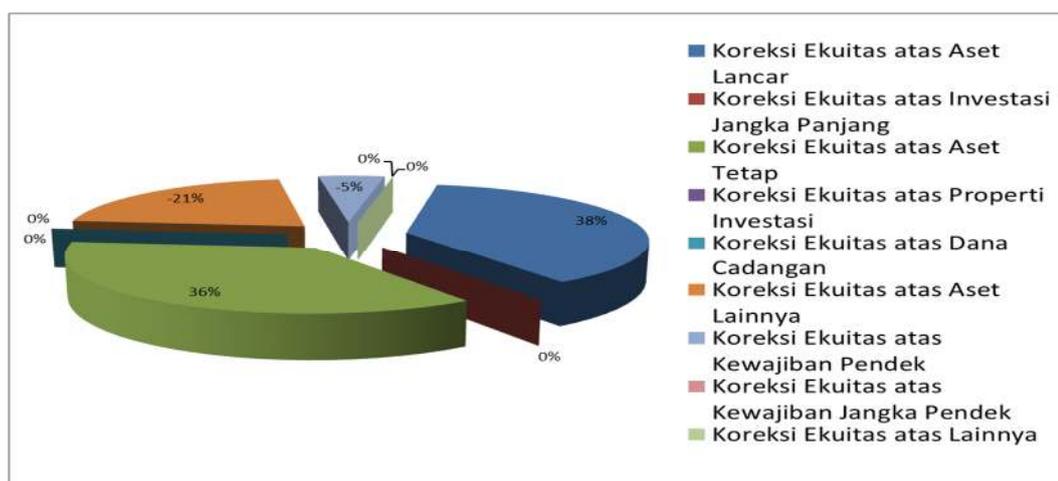
Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Koreksi Ekuitas atas Aset Lancar	721.750.118,25	0,00
Koreksi Ekuitas atas Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas atas Aset Tetap	690.468.219,50	2.099.407.000,00
Koreksi Ekuitas atas Properti Investasi	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas atas Dana Cadangan	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas atas Aset Lainnya	(402.049.000,00)	0,00
Koreksi Ekuitas atas Kewajiban Pendek	(96.830.061,00)	0,00
Koreksi Ekuitas atas Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas atas Lainnya	0,00	24.438.462.874,63
Jumlah Dampak Kumulatif	913.339.276,75	26.537.869.874,63

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang merupakan transaksi penyesuaian aset dan kewajiban yang disebabkan oleh adanya koreksi baik lebih catat maupun kurang catat dari tahun-tahun sebelumnya sehingga pada Tahun 2024

Pemerintah Kota Bima melakukan penyesuaian. Berikut kejadian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang **signifikan** mempengaruhi nilai koreksi penyajian Aset dan Kewajiban diantaranya yaitu:

1. Koreksi Ekuitas atas Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang disebabkan adanya;
2. Koreksi Ekuitas atas Aset Lancar
Koreksi Ekuitas atas Aset lancar terdiri dari Koreksi Ekuitas atas Piutang Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp721.750.118,25 dan Koreksi Ekuitas atas Piutang Lainnya sebesar (Rp49.879.745,00), koreksi atas kurangnya pencatatan terhadap piutang lain-lain PAD yg sah sebesar(Rp527.136,75);
3. Koreksi Ekuitas atas Aset Tetap
Koreksi Ekuitas atas Aset Tetap terdiri dari Koreksi Ekuitas atas Tanah sebesar (Rp42.000.000,00), Koreksi Ekuitas atas Peralatan dan Mesin sebesar Rp523.540.000,00, Koreksi Ekuitas atas Gedung dan Bangunan sebesar (Rp95.580.000,00), Koreksi Ekuitas atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp304.508.219,50;
4. Koreksi Ekuitas atas Aset Lainnya
Koreksi Ekuitas atas Aset Lainnya terdiri dari Koreksi Ekuitas atas Aset Lain - lain sebesar (Rp523.049.000,00) dan Koreksi Ekuitas atas Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp121.000.000,00;
5. Koreksi Ekuitas atas Kewajiban
Koreksi Ekuitas atas Kewajiban merupakan Koreksi Ekuitas atas Utang Belanja sebesar (Rp96.830.061,00).

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Terhadap Kelompok Akun dalam Laporan Neraca Per 31 Desember 2024 digambarkan dalam diagram di bawah ini.





5.6.4 Saldo Ekuitas Akhir

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Akhir milik Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2024 dan 2023.

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Saldo Ekuitas Akhir	2.143.869.695.471,53	2.218.552.098.313,85

Saldo ekuitas akhir yang tersaji dalam Laporan Ekuitas ini sama besarnya dengan nilai Ekuitas yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Neraca pada *point 5.3.3*.



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Kota Bima secara astronomis terletak di ujung timur Pulau Sumbawa di antara 8°20'-8°30' Lintang Selatan dan 118°41'-118°48' Bujur Timur, dengan sebagian besar batas wilayah Kota Bima di kelilingi oleh wilayah Kabupaten Bima yaitu: di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Ambalawi, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Palibelo, di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Wawo, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Bima.

Luas wilayah Kota Bima meliputi wilayah daratan seluas 222,25 km², dengan jumlah kecamatan sebanyak lima kecamatan yang dihuni oleh penduduk asli suku Mbojo (Bima) dan suku pendatang lainnya. Adapun lima kecamatan yang terdapat di wilayah Kota Bima adalah: Rasanae Barat, Mpunda, Rasanae Timur, Raba, dan Asakota.

Asakota merupakan kecamatan yang memiliki luas area terbesar, yaitu 69,03 km² sedangkan Kecamatan Rasanae Barat merupakan kecamatan tersempit dengan luas wilayah hanya 10,14 km². Artinya, hampir sepertiga atau 31,06% wilayah Kota Bima merupakan bagian wilayah Kecamatan Asakota, kemudian 28,83% dan 28,67% merupakan wilayah kecamatan Rasanae Timur dan Kecamatan Raba. Sisanya 10% adalah wilayah Kecamatan Rasanae Barat dan Mpunda, sebagaimana yang dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 6.1
Luas Wilayah Kota Bima Berdasarkan Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rasanae Barat	10,14	4,56
2	Mpunda	15,28	6,88
3	Rasanae Timur	64,07	28,83
4	Raba	63,73	28,67
5	Asakota	69,03	31,06
Total		222,25	100,00

Sumber : Kota Bima Dalam Angka, 2024

Lebih rinci, kelima kecamatan tersebut terdiri dari total 41 kelurahan, yang dapat dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 6.2
Ibu Kota Kecamatan dan Jumlah Kelurahan per Kecamatan

Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Jumlah Kelurahan
(1)	(2)	(3)
1. Rasanae Barat	Paruga	6
2. Mpunda	Sadia	10
3. Rasanae Timur	Kumbe	8
4. Raba	Penaraga	11
5. Asakota	Melayu	6
Jumlah		41

Sumber : Kota Bima Dalam Angka, 2024

Jumlah PNSD di Kota Bima adalah 3.243 orang, yang terdiri dari Eselon dan Non Eselon. Tidak ada Eselon I sebanyak 0 Orang, Eselon II sebanyak 33 orang, Eselon III



sebanyak 125 orang, Eselon IV sebanyak 351 orang, dan Eselon V sebanyak 0 orang. Sedangkan untuk Non Eselon terdiri dari Tenaga Fungsional sebanyak 1881 orang dan Jabatan Pelaksana 853 orang. Jumlah PNS per golongan dan per jabatan Pemerintah Kota Bima sebagaimana yang tertuang dalam daftar berikut :

Tabel 6.3

Daftar Jumlah PNS Pergolongan Pemerintah Kota Bima Per 31 Desember 2024

Golongan/Ruang	Eselon					Non Eselon		Jumlah
	I	II	III	IV	V	Jabatan Fungsional Tertentu	Jabatan Pelaksana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Golongan IV/e	0	0	0	0	0	0	0	0
Golongan IV/d	0	1	0	0	0	0	0	1
Golongan IV/c	0	16	0	0	0	107	0	123
Golongan IV/b	0	15	28	1	0	185	1	230
Golongan IV/a	0	1	75	14	0	244	15	349
Jumlah Golongan IV	0	33	103	15	0	536	16	703
Golongan III/d	0	0	21	202	0	534	138	895
Golongan III/c	0	0	1	111	0	271	203	586
Golongan III/b	0	0	0	20	0	339	142	501
Golongan III/a	0	0	0	3	0	145	194	342
Jumlah Golongan III	0	0	22	336	0	1289	677	2324
Golongan II/d	0	0	0	0	0	32	58	90
Golongan II/c	0	0	0	0	0	14	51	65
Golongan II/b	0	0	0	0	0	7	22	29
Golongan II/a	0	0	0	0	0	3	22	25
Jumlah Golongan II	0	0	0	0	0	56	153	209
Golongan I/d	0	0	0	0	0	0	3	3
Golongan I/c	0	0	0	0	0	0	4	4
Golongan I/b	0	0	0	0	0	0	0	0
Golongan I/a	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Golongan I	0	0	0	0	0	0	7	7
Total	0	33	125	351	0	1881	853	3243



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 6

Untuk lebih rinci, berikut dilampirkan daftar jumlah PNS per golongan per jabatan Lingkungan Pemerintah Kota Bima :

Tabel 6.4
Rincian PNS Pergolongan Perjabatan Pemerintah Kota Bima Per 31 Desember 2024

NO	INSTANSI / UNIT KERJA	II/a	II/b	III/a	III/b	IV/a	IV/b	JML	Jabatan Fungsional Tertentu	Jabatan Pelaksana	Jml	Total
1	Sekretariat Daerah	1	5	0	0	0	0	6	0	0	0	6
2	Bagian Administrasi Pembangunan	0	0	1	0	0	0	1	3	8	11	12
3	Bagian Kesejahteraan Rakyat	0	0	1	0	0	0	1	3	9	12	13
4	Bagian Organisasi	0	0	1	0	0	0	1	5	5	10	11
5	Bagian Pemerintahan	0	0	1	0	0	0	1	2	9	11	12
6	Bagian Hukum	0	0	0	0	0	0	0	2	9	11	11
7	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	1	0	0	0	1	14	3	17	18
8	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	0	0	1	0	0	0	1	2	8	10	11
9	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	0	0	1	0	1	0	2	2	6	8	10
10	Bagian Umum	0	0	1	0	1	0	2	0	15	15	17
11	Sekretariat DPRD	0	1	3	0	1	0	5	3	20	23	28
12	Inspektorat	0	1	3	0	1	0	5	45	7	52	57
13	Satuan Polisi Pamong Praja	0	1	1	2	8	0	12	2	26	28	40
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	0	1	1	3	1	0	6	8	10	18	24
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	1	1	3	2	0	7	7	15	22	29
16	Dinas Kesehatan	0	1	1	3	2	0	7	51	13	64	71
17	Dinas Ketahanan Pangan	0	1	1	3	1	0	6	8	10	18	24
18	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0	1	0	4	1	0	6	11	15	26	32
19	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	0	0	1	2	4	2	9	10	19	29	38
20	Dinas Lingkungan Hidup	0	1	1	4	4	1	11	10	87	97	108
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0	1	1	4	1	0	7	15	11	26	33
22	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	1	1	4	5	2	13	18	36	54	67
23	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0	1	1	2	6	0	10	2	18	20	30
24	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	1	0	3	2	1	7	5	10	15	22
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	1	1	0	1	0	3	6	14	20	23
26	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	1	2	1	6	0	10	33	32	65	75



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 6

NO	INSTANSI / UNIT KERJA	II/a	II/b	III/a	III/b	IV/a	IV/b	JML	Jabatan Fungsional Tertentu	Jabatan Pelaksana	Jml	Total
27	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0	1	1	2	2	0	6	7	11	18	24
28	Dinas Perhubungan	0	1	1	1	7	1	11	2	17	19	30
29	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	0	1	1	3	1	0	6	17	8	25	31
30	Dinas Pertanian	0	0	1	5	7	6	19	55	23	78	97
31	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0	1	1	3	2	0	7	5	12	17	24
32	Dinas Sosial	0	1	1	3	1	0	6	13	14	27	33
33	Dinas Tenaga Kerja	0	1	1	2	3	1	8	3	9	12	20
34	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	1	1	2	2	0	6	15	10	25	31
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	1	1	4	1	0	7	7	12	19	26
36	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	1	0	4	1	0	6	9	7	16	22
37	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0	1	1	6	13	0	21	5	52	57	78
38	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	1	0	2	1	0	4	16	13	29	33
39	Badan Riset dan Inovasi Daerah	0	1	1	2	1	0	5	3	11	14	19
40	Kecamatan Asakota	0	0	1	1	5	2	9	7	4	11	20
41	Kelurahan Jatibaru	0	0	0	0	1	4	5	0	3	3	8
42	Kelurahan Jatibaru Timur	0	0	0	0	0	4	4	0	1	1	5
43	Kelurahan Jatiwangi	0	0	0	0	1	4	5	0	2	2	7
44	Kelurahan Kolo	0	0	0	0	1	4	5	0	2	2	7
45	Kelurahan Melayu	0	0	0	0	1	4	5	0	4	4	9
46	Kelurahan Ule	0	0	0	0	1	4	5	0	2	2	7
47	Kecamatan Mpunda	0	0	1	1	5	2	9	7	5	12	21
48	Kelurahan Lewirato	0	0	0	0	1	4	5	0	3	3	8
49	Kelurahan Mande	0	0	0	0	1	4	5	0	2	2	7
50	Kelurahan Manggemaci	0	0	0	0	1	4	5	0	5	5	10
51	Kelurahan Matakando	0	0	0	0	1	4	5	0	1	1	6
52	Kelurahan Monggonao	0	0	0	0	1	4	5	0	3	3	8
53	Kelurahan Panggi	0	0	0	0	1	4	5	0	5	5	10
54	Kelurahan Penatoi	0	0	0	0	1	3	4	0	2	2	6
55	Kelurahan Sadia	0	0	0	0	1	4	5	0	1	1	6
56	Kelurahan SambinaE	0	0	0	0	1	4	5	0	1	1	6
57	Kelurahan Santi	0	0	0	0	1	4	5	0	5	5	10
58	Kecamatan Raba	0	0	1	1	5	2	9	7	5	12	21
59	Kelurahan Kendo	0	0	0	0	1	4	5	0	5	5	10
60	Kelurahan Nitu	0	0	0	0	1	4	5	0	1	1	6
61	Kelurahan Ntobo	0	0	0	0	1	3	4	0	4	4	8



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 6

NO	INSTANSI / UNIT KERJA	II/a	II/b	III/a	III/b	IV/a	IV/b	JML	Jabatan Fungsional Tertentu	Jabatan Pelaksana	Jml	Total
62	Kelurahan PenanaE	0	0	0	0	1	4	5	0	0	0	5
63	Kelurahan Penaraga	0	0	0	0	1	4	5	0	2	2	7
64	Kelurahan Rabadompu Barat	0	0	0	0	1	4	5	0	4	4	9
65	Kelurahan Rabadompu Timur	0	0	0	0	1	4	5	0	5	5	10
66	Kelurahan Rabangodu Selatan	0	0	0	0	1	4	5	0	7	7	12
67	Kelurahan Rabangodu Utara	0	0	0	0	1	4	5	0	5	5	10
68	Kelurahan Rite	0	0	0	0	1	4	5	0	2	2	7
69	Kelurahan Rontu	0	0	0	0	1	4	5	0	6	6	11
70	Kecamatan RasanaE Barat	0	0	0	1	5	2	8	8	4	12	20
71	Kelurahan Dara	0	0	0	0	1	4	5	0	1	1	6
72	Kelurahan NaE	0	0	0	0	1	4	5	0	2	2	7
73	Kelurahan Pane	0	0	0	0	1	2	3	0	2	2	5
74	Kelurahan Paruga	0	0	0	0	1	4	5	0	1	1	6
75	Kelurahan SaraE	0	0	0	0	1	4	5	0	3	3	8
76	Kelurahan Tanjung	0	0	0	0	1	4	5	0	2	2	7
77	Kecamatan RasanaE Timur	0	0	1	1	5	2	9	5	2	7	16
78	Kelurahan Dodu	0	0	0	0	1	3	4	0	1	1	5
79	Kelurahan Kodo	0	0	0	0	1	4	5	0	4	4	9
80	Kelurahan Kumbe	0	0	0	0	1	4	5	0	5	5	10
81	Kelurahan Lampe	0	0	0	0	1	4	5	0	2	2	7
82	Kelurahan Lelamase	0	0	0	0	1	4	5	0	1	1	6
83	Kelurahan Nungga	0	0	0	0	1	4	5	0	1	1	6
84	Kelurahan Oi Fo'o	0	0	0	0	1	4	5	0	2	2	7
85	Kelurahan Oimbo	0	0	0	0	1	4	5	0	1	1	6
86	UPT. Sanggar Kegiatan Belajar	0	0	0	0	0	1	1	11	1	12	13
87	Puskesmas Jatibaru	0	0	0	0	0	1	1	54	2	56	57
88	Puskesmas Kolo	0	0	0	0	0	1	1	16	0	16	17
89	Puskesmas Kumbe	0	0	0	0	0	1	1	26	1	27	28
90	Puskesmas Mpunda	0	0	0	0	0	1	1	81	6	87	88
91	Puskesmas Paruga	0	0	0	0	0	1	1	70	3	73	74
92	Puskesmas Penanae	0	0	0	0	0	1	1	66	4	70	71
93	Puskesmas Rasanae Timur	0	0	0	0	0	1	1	32	6	38	39
94	Rumah Sakit Umum Daerah	0	0	0	1	3	0	4	90	10	100	104
95	UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah dan Pemeliharaan Alat Kesehatan	0	0	0	0	1	1	2	12	2	14	16
96	SDN 1 Melayu Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9
97	SDN 10 Penatoi Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14
98	SDN 11 Manggemaci Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	13	1	14	14
99	SDN 12 Sarae Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 6

NO	INSTANSI / UNIT KERJA	II/a	II/b	III/a	III/b	IV/a	IV/b	JML	Jabatan Fungsional Tertentu	Jabatan Pelaksana	Jml	Total
100	SDN 13 Kolo Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	6	1	7	7
101	SDN 14 Sadia Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11
102	SDN 15 Ntobo Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6
103	SDN 16 Salama Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5
104	SDN 17 Pane Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7
105	SDN 18 Dodu Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7
106	SDN 19 Rabangodu Utara Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	16	2	18	18
107	SDN 2 Suntu Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18
108	SDN 20 Rabadompu Timur Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9
109	SDN 21 Tolomundu Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	14	1	15	15
110	SDN 22 Jatibaru Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7
111	SDN 24 Rabangodu Utara Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	6	1	7	7
112	SDN 25 Santi Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6
113	SDN 26 Rabadompu Barat Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6
114	SDN 27 Rabadompu Timur Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10
115	SDN 28 Melayu Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14
116	SDN 29 Tanjung Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	18	2	20	20
117	SDN 3 Jatiwangi Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2
118	SDN 30 Nitu Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7
119	SDN 31 Lelamase Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	6	1	7	7
120	SDN 32 Panggi Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7
121	SDN 33 Lampe Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	7	1	8	8
122	SDN 34 Bonto Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6
123	SDN 35 Nungga Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	3
124	SDN 36 Nggarolo Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	5	3	8	8
125	SDN 37 Kendo Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5
126	SDN 39 Rabadompu Barat Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	8	1	9	9
127	SDN 40 Lewirato Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11
128	SDN 42 Manggemaci Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	10	1	11	11
129	SDN 44 Mande Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6
130	SDN 45 Pane Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8
131	SDN 46 Lela Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5
132	SDN 47 Kodo Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6
133	SDN 48 Kumbe Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7
134	SDN 49 Rabangodu Selatan Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	16	1	17	17
135	SDN 5 Rabangodu Utara Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	17	1	18	18
136	SDN 50 Pendaraga Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 6

NO	INSTANSI / UNIT KERJA	II/a	II/b	III/a	III/b	IV/a	IV/b	JML	Jabatan Fungsional Tertentu	Jabatan Pelaksana	Jml	Total
137	SDN 51 Rite Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6
138	SDN 52 Busu Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9
139	SDN 53 Oi Fo'o Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	7	1	8	8
140	SDN 55 Dara Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	12	1	13	13
141	SDN 56 Tolobali Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7
142	SDN 57 Wadumbolo Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	8	1	9	9
143	SDN 58 Tambana Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3
144	SDN 59 Rasalewi Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	8	3	11	11
145	SDN 6 Kodo Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6
146	SDN 60 Sambinae Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	6	2	8	8
147	SDN 61 Karara Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9
148	SDN 62 Rontu Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	10	1	11	11
149	SDN 63 Dodu Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5
150	SDN 64 Sori Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2
151	SDN 65 Jatibaru Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12
152	SDN 66 Kuta Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4
153	SDN 67 Rabantala Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8
154	SDN 68 Kolo Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9
155	SDN 69 Kabanta Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	5	1	6	6
156	SDN 7 Kumbe Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	8	1	9	9
157	SDN 70 Tolotonga Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	9	1	10	10
158	SDN 71 Wenggo Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4
159	SDN 72 Ntobo Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5
160	SDN 73 Sabali Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6
161	SDN 74 Songgela Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5
162	SDN 76 Toloweri Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5
163	SDN 77 Ni'u Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6
164	SDN 8 Penanae Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7
165	SMP Negeri 1 Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	50	3	53	53
166	SMP Negeri 10 Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	13	2	15	15
167	SMP Negeri 11 Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	23	2	25	25
168	SMP Negeri 12 Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9
169	SMP Negeri 13 Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	21	2	23	23
170	SMP Negeri 14 Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	9	4	13	13
171	SMP Negeri 15 Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	10	1	11	11
172	SMP Negeri 2 Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	41	6	47	47
173	SMP Negeri 3 Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	20	3	23	23
174	SMP Negeri 4 Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	26	3	29	29
175	SMP Negeri 5 Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	25	2	27	27



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 6

NO	INSTANSI / UNIT KERJA	II/a	II/b	III/a	III/b	IV/a	IV/b	JML	Jabatan Fungsional Tertentu	Jabatan Pelaksana	Jml	Total
176	SMP Negeri 6 Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	28	2	30	30
177	SMP Negeri 7 Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	21	3	24	24
178	SMP Negeri 8 Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	27	5	32	32
179	SMP Negeri 9 Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	21	1	22	22
180	TK Negeri 04 Tanjung Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3
181	TK Negeri 05 Rabadompu Timur Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2
182	TK Negeri 06 Penaraga Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2
183	TK Negeri 07 Pane Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4
184	TK Negeri 08 Penatoi Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3
185	TK Negeri 09 Rabadompu Barat Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3
186	TK Negeri 10 Rabangodu Utara Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
187	TK Negeri 11 Jatibaru Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2
188	TK Negeri 12 Penanae Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3
189	TK Negeri 13 Monggonao Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3
190	TK Negeri 14 Rite Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3
191	TK Negeri 15 Kodo Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2
192	TK Negeri 16 Jatiwangi Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2
193	TK Negeri 17 Nae Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
194	TK Negeri 18 Manggemaci Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2
195	TK Negeri 19 Santi Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4
196	TK Negeri 20 Lampe Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
197	TK Negeri 21 Kumbe Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	3
198	TK Negeri 22 Rontu Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3
199	TK Negeri 23 Dodu Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2
200	TK Negeri 25 Rabangodu Utara Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3
201	TK Negeri 26 Lelamase Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
202	TK Negeri 28 Kodo Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
203	TK Negeri 29 Kumbe Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2
204	TK Negeri 30 Rabadompu Timur Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3
205	TK Negeri 31 Bonto Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
206	TK Negeri 33 Ni'u Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2
207	TK Negeri Pembina 01 Raba Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	4
208	TK Negeri Pembina 02 Kolo Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 6

NO	INSTANSI / UNIT KERJA	II/a	II/b	III/a	III/b	IV/a	IV/b	JML	Jabatan Fungsional Tertentu	Jabatan Pelaksana	Jml	Total
209	TK Negeri Pembina 03 Paruga Kota Bima	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6
J U M L A H		1	32	42	83	159	192	509	1881	853	2734	3243

Pada tahun 2024 Daftar Satuan Kerja Perangkat Daerah telah berubah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima. Berikut Daftar Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.

Tabel 6.5
Daftar Nama Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024

No	Nama Perangkat Daerah
DINAS DAERAH	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Dinas Kesehatan
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Dinas Sosial
6	Satuan Polisi Pamong Praja
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10	Dinas Tenaga Kerja
11	Dinas Ketahanan Pangan
12	Dinas Lingkungan Hidup
13	Dinas Perhubungan
14	Dinas Komunikasi dan Informatika
15	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
16	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
19	Dinas Kelautan dan Perikanan
20	Dinas Pariwisata
21	Dinas Pertanian
BADAN DAERAH	
22	Inspektorat
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 6

No	Nama Perangkat Daerah
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
28	Badan Riset dan Inovasi Daerah
SEKRETARIAT	
29	Sekretariat DPRD
30	Sekretariat Daerah
31	Bagian Organisasi
32	Bagian Umum
33	Bagian Humas
34	Bagian Perekonomian
35	Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan
36	Bagian Kesra
37	Bagian LPBJ
38	Bagian Administrasi Pemerintahan
39	Bagian Hukum
KECAMATAN	
40	Kecamatan Asakota
41	Kecamatan Rasanae Barat
42	Kecamatan Rasanae Timur
43	Kecamatan Mpunda
44	Kecamatan Raba

BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima Tahun 2024 telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan prinsip penyajian paripurna (*full disclosure*), laporan keuangan ini telah disajikan secara penuh atas semua keuangan saat ini ataupun nanti.

Sebagaimana diuraikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima Tahun 2024 ini, dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran-sasaran strategik yang ditetapkan telah dapat dipenuhi dengan segala kekurangannya.

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima Tahun 2024 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kota Bima dalam penyampaian laporan keuangan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan kami antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam periode penyusunan laporan keuangan tahun-tahun mendatang.

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima Tahun 2024 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kota Bima dalam penyampaian Laporan Keuangan.

Pemerintah Kota Bima telah mencoba memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kota Bima di masa yang akan datang serta sejalan dengan percepatan perubahan lingkungan strategis yang luar biasa.

Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan akan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya.

Besar harapan kami, pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima Tahun 2024 ini dapat berguna bagi *stakeholder* dan seluruh pihak yang berkepentingan. Untuk perbaikan penyajian, masukan dan saran selalu kami harapkan khususnya demi peningkatan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas Pemerintah Kota Bima di masa yang akan datang.

Kota Bima, Mei 2025
WALIKOTA BIMA,

H. A. RAHMAN, SE.